Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman (Audited)

2024

Mei 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, kegiatan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pariaman, Mei 2025
WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD, S.STP, M.Si

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2024. LKPD Kota Pariaman Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan pendekatan kinerja.

LKPD merupakan hasil penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) sampai ayat (3) menyatakan:

- ayat 1: "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir";
- ayat 2: "Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  a. Laporan Realisasi Anggaran;
  b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  c. Neraca;
  d. Laporan Operasional;
  e. Laporan Arus Kas;
  f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD."
- ayat 3: "Penyajian Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan".

Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di atas, LKPD Kota Pariaman Tahun 2024 telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2024.

Pariaman, Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD, S.STP, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iv**
DAFTAR GAMBAR		**ix**
DAFTAR LAMPIRAN		**x**
LAPORAN KEUANGAN		
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II	**INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**	7
2.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas	7
2.2.	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Landasan Kegiatan Operasional	7
BAB III	**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**	9
3.1.	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	9
3.2.	Kebijakan Keuangan	11
3.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	14
BAB IV	**KEBIJAKAN AKUNTANSI**	24
4.1.	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	24
4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
BAB V	**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**	119
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	119
5.2	Laporan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL)	155
5.3	Laporan Neraca	156
5.4	Laporan Operasional (LO)	205
5.5	Laporan Arus Kas	225
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	232

BAB VI	**PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA**	234
6.1	Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan	234
6.2	Komitmen dan Kontijensi	234
6.3	Pengungkapan Lainnya	235
6.4	Struktur Organisasi	235
6.5	Kepemimpinan Daerah	237
BAB VII	**PENUTUP**	238

DAFTAR TABEL

		Hal
3.1	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman Tahun 2019 – 2024 (%)	10
3.2	Pengangguran dan TPT Tahun 2023	10
3.3	Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2023	11
3.4	Ringkasan APBD Pergeseran TA 2024	14
3.5	Ringkasan APBD Perubahan TA 2024	14
3.6	Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2024	15
3.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2024	16
3.8	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan per TA 2024 dan 2023	19
3.9	Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi per TA 2024 dan 2023	21
3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD TA 2024	22
5.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023	120
5.2	Rincian PBJT Tahun 2024	121
5.3	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	121
5.4	Kenaikan dan/atau Penurunan Realisasi Retribusi 2024	122
5.5	Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023	124
5.6	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023	124
5.7	Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024	125
5.8	Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak	126
5.9	Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023	127
5.10	Dana Alokasi Khusus	128
5.11	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun 2024 dan 2023	129
5.12	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2024 dan 2023	130
5.13	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya Tahun 2024 dan 2023	130
5.14	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	131
5.15	Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023	132
5.16	Rencana dan Realisasi Belanja Operasi 2024 dan 2023	132
5.17	Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	133
5.18	Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan 2023	134
5.19	Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	135
5.20	Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2024 dan 2023	136
5.21	Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023	138
5.22	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Tahun 2024	138
5.23	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024	139

5.24	Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024	140
5.25	Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2024 dan 2023	141
5.26	Belanja Modal Peralatan Mesin per SKPD Tahun 2024 dan 2023	142
5.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023	144
5.28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024 dan 2023	144
5.29	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023	145
5.30	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2024 dan 2023	145
5.31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023	146
5.32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024 dan 2023	146
5.33	Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023	148
5.34	Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Tahun 2024	149
5.35	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	150
5.36	Rincian SiLPA Tahun 2024	151
5.37	Sisa DAU- Yang Ditentukan Penggunaannya sampai TA 2024	152
5.38	Sisa DAK – Fisik sampai TA 2024	153
5.39	Sisa DAK – Non Fisik sampai TA 2024	154
5.40	Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023	156
5.41	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dan Tahun 2023	157
5.42	Rincian Kas BLUD	157
5.43	Rincian Kas Dana BOS	158
5.44	Rincian Kas pada FKTP	159
5.45	Daftar Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024	159
5.46	Daftar Piutang Pajak	160
5.47	Daftar Rincian Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d 2024	160
5.48	Daftar Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023	161
5.49	Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman	162
5.50	Rincian Piutang Denda air Bersih	162
5.51	Daftar Rincian Piutang Transfer antar Daerah Tahun 2024	163
5.52	Daftar Piutang Lain-Lain	164
5.53	Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*	164
5.54	Daftar Penyisihan Piutang Pajak	166
5.55	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi	166
5.56	Daftar Penyisihan Piutang Lain-Lain	167
5.57	Daftar Persediaan	168
5.58	Daftar Persediaan Kadaluarsa dan/atau Sudah Dimusnahkan	168
5.59	Rincian Dana Bergulir bagi UMKM	170

5.60	Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari	171
5.61	Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Tahun 2024	173
5.62	Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman	174
5.63	Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	175
5.64	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	176
5.65	Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga	177
5.66	Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening	177
5.67	Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	178
5.68	Data Mutasi (+) Antar SKPD	178
5.69	Data Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi	179
5.70	Mutasi (-) Ke Aset Lain-lain	185
5.71	Rincian Belanja Modal Pembayaran Utang 2023 UPTD Dinas Pendidikan	186
5.72	Data Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas dan Gedung Bangunan yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman	187
5.73	Rincian Saldo Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024	188
5.74	Mutasi (+) Antar SKPD	189
5.75	Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	191
5.76	Mutasi (+) Antar SKPD	192
5.77	Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi JIJ	192
5.78	Mutasi (-) Terutang	193
5.79	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	194
5.80	Mutasi (+) Mutasi antar SKPD	194
5.81	Mutasi (-) tidak Dikapitalisasi ATL	195
5.82	Mutasi (-) ke Aset lain-lain	195
5.83	Mutasi (-) ke Aset lain-lain	196
5.84	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024	196
5.85	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	197
5.86	Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024	198
5.87	Daftar Aset Tidak Berwujud	199
5.88	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024	199
5.89	Rincian Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2024	200
5.90	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	201
5.91	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024	202
5.92	Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023	202
5.93	Pendapatan Diterima Dimuka	203

5.94	Rincian Utang PBPU dan BP Tahap II Tahun 2024	203
5.95	Ekuitas	204
5.96	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	205
5.97	Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023	206
5.98	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)	208
5.99	Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA	208
5.100	Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka	209
5.101	Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD Yang SAH	210
5.102	Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023	211
5.103	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer	212
5.104	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 2024 dan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024	212
5.105	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	213
5.106	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024	213
5.107	Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	214
5.108	Selisih Pendapatan Hibah	214
5.109	Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023	215
5.110	Beban Pegawai –LO Tahun 2024 dan 2023	215
5.111	Pengujian LO-LRA Pegawai Tahun 2024	216
5.112	Beban Persediaan –LO Tahun 2024 dan 2023	216
5.113	Perbandingan LO-LRA Persediaan Tahun 2024	217
5.114	Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023	217
5.115	Pengujian LO-LRA Barang dan Jasa Tahun 2024	218
5.116	Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023	219
5.117	Pengujian LO-LRA Pemeliharaan Tahun 2024	219
5.118	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023	220
5.119	Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas Tahun 2024	220
5.120	Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023	220
5.121	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023	221
5.122	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023	222
5.123	Beban Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023	223
5.124	Pengujian LO-LRA Beban Transfer	223
5.125	Defisit Non Operasional-LO Tahun 2024 dan 2023	224

5.126	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	225
5.127	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	225
5.128	Rincian Arus Masuk Kas - Pendapatan Asli Daerah	226
5.129	Rincian Arus Masuk Kas - Transfer dari Pemerintah Pusat	226
5.130	Rincian Arus Masuk Kas - Transfer dari Pemerintah Provinsi	226
5.131	Rincian Arus Masuk Kas - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	227
5.132	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	227
5.133	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	228
5.134	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	228
5.135	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	228
5.136	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	229
5.137	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	229
5.138	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	230
5.139	Penerimaan Fihak Ketiga Tahun 2024	230
5.140	Rincian Saldo Akhir Kas	231
5.141	Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas pada Neraca	231
5.142	Ekuitas Tahun 2024 dan 2023	232
5.143	Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024	233
6.1	Pergantian Manajemen dan Pegawai	234
6.2	Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023	237
6.3	Daftar Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023	237

DAFTAR GAMBAR

5.1	Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023 per Komponen Pendapatan	17
5.2	Diagram Pendapatan Transfer Tahun 2024	18
5.3	Grafik Porsi Belanja Tahun 2024 dan 2023	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Belanja Pegawai
1.a. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1.b. Daftar Belanja Tambahan Penghasilan ASN
1.c. Daftar Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1.d. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
1.e. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
1.f. Daftar Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH , Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD
2. Daftar Belanja Barang dan Jasa
2.a. Daftar Belanja Persediaan
2.b. Daftar Belanja Barang dan Jasa
2.c. Daftar Belanja Pemeliharaan
2.d. Daftar Belanja Perjalanan Dinas
2.e. Daftar Belanja Hibah
3. Ikhtisar Dana Desa
4. Rekapitulasi Dana BLUD Tahun 2024
5. Rekapitulasi Dana BOS Tahun 2024
5.a. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT SMP Se Kota Pariaman
5.b. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Utara
5.c. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Tengah
5.d. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Selatan
5.e. Rekapitulasi Sisa Dana BOS UPT Pendidikan Pariaman Timur
5.f. Rincian BOS Swasta
6. Rekapitulasi Dana BOK Puskesmas Tahun 2024
7. Daftar Piutang Kota Pariaman
7.a. Daftar Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer Kota Pariaman
7.b. Daftar Piutang Retribusi Kota Pariaman
7.c. Daftar Piutang Lain-Lain Kota Pariaman
8. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Kota Pariaman
8.a. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer Kota Pariaman
8.b. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Kota Pariaman
8.c. Daftar Umur Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain Kota Pariaman
9. Daftar Persediaan

10.a Rekapitulasi perkembangan bantuan dana bergulir ukm dan *Revolving Fund*

10.a Rekapitulasi Perkembangan Bantuan Dana Bergulir KSP/USP

10.b Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

11. Penyertaan Modal

12. Daftar Aset Tetap Tanah

13. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

14. Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan

15. Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

16. Daftar Aset Tetap Lainnya

17. Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

18. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

18.a. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Mesin

18.b. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Bangunan

18.c. Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jaringan

18.d Data Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

19.a Properti Investasi

19.b Data Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

20.a. Aset Lain- Lain TGR

20.b. Rincian Aset Lain-Lain (TGR)

21. Aset Lain- Lain (Aset Tak Berwujud)

22. Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud

23. Aset Lain- Lain

24. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

25. Daftar Pendapatan diterima dimuka

26. Rekap Data Sisa Kewajiban Pemko Pariaman (Utang Belanja)

26a. Rincian Sisa Kewajiban Pemko Pariaman (Utang Belanja)

27. Daftar Beban Pegawai

27.a. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan ASN

27.b. Daftar Beban Tambahan Penghasilan ASN

27.c. Daftar Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

27.d. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

27.e. Daftar Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

27.f. Daftar Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KWDH dan Beban Pegawai BOS

28. Daftar Beban Barang dan jasa

28.a. Daftar Beban Persediaan

28.b. Daftar Beban Jasa
28.c. Daftar Beban Pemeliharaan
28.d. Daftar Beban Perjalanan Dinas-LO
28.e. Daftar Beban Hibah-LO
28.f. Daftar Beban Lain-lain
29.a. Daftar Selisih Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai-LRA
29.b Daftar Selisih Beban Barang-LO dan Beban Barang-LRA
29.c Daftar Selisih Beban Barang dan Jasa -LO dan Belanja Barang dan Jasa -LRA
29.d Daftar Selisih Beban Pemeliharaan -LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA
29.e Daftar Selisih Beban Perjalanan Dinas -LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
29.f Daftar Selisih Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan-LO
30. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**PENDAPATAN**					
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	14.135.000.000,00	14.396.111.950,00	101,85	14.323.956.113,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	12.636.235.000,00	9.375.406.310,00	74,19	3.115.174.963,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	10.042.663.440,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4)	15.686.236.504,00	10.808.347.629,36	68,90	11.379.806.186,04
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		**53.788.984.257,00**	**45.911.378.642,36**	**85,35**	**38.861.600.702,04**
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**					
1.2.1.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a	4.780.810.000,00	6.320.110.669,00	132,20	6.516.066.396,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).b	5.977.692.000,00	5.977.692.000,00	100,00	7.422.153.000,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).c	412.646.363.000,00	417.506.738.000,00	101,18	400.085.686.160,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).d	103.976.103.000,00	93.837.724.329,00	90,25	91.764.620.936,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		**527.380.968.000,00**	**523.642.264.998,00**	**99,29**	**505.788.526.492,00**
1.2.2.	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
1.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.b.2)	0,00	0,00	0,00	6.012.923.000,00
1.2.2.2.	Dana Desa	5.1.1.b.3)	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	41.372.835.000,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		**41.844.428.000,00**	**41.844.428.000,00**	**100,00**	**47.385.758.000,00**
1.2.3.	**TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.b.4)	46.459.281.700,00	32.963.958.033,00	70,95	26.989.474.036,00
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINYA		**46.459.281.700,00**	**32.963.958.033,00**	**70,95**	**26.989.474.036,00**
1.2.4.	**BANTUAN KEUANGAN**					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.b.5)	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00
	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**615.684.677.700,00**	**598.450.651.031,00**	**97,20**	**580.803.758.528,00**
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.1.1.c	0,00	0,00	0,00	1.272.000.000,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	4.891.724.240,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		**0,00**	0,00	**0,00**	**6.163.724.240,00**
	TOTAL PENDAPATAN		**669.473.661.957,00**	**644.362.029.673,36**	**96,25**	**625.829.083.470,04**
2	**BELANJA**					
2.1.	**BELANJA OPERASI**					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.2.2.a.1)	320.340.036.391,38	314.988.384.111,00	98,33	276.716.366.014,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.a.2)	178.170.146.627,50	164.059.422.975,00	92,08	174.333.143.316,00
2.1.3.	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	5.2.2.a.3)	20.784.042.703,00	21.650.244.697,33	104,17	15.822.266.936,00

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
2.1.6.	Bantuan Sosial	5.2.2.a.4)	724.320.000,00	610.542.000,00	84,29	396.360.000,00
2.1.7.	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		**520.018.545.721,88**	**501.308.593.783,33**	**96,40**	**467.268.136.286,00**
2.2.	**BELANJA MODAL**					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.2.2.b.1)	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.b.2)	12.313.469.448,00	10.229.912.049,00	83,08	12.532.002.906,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.b.3)	30.744.561.723,00	27.172.296.811,00	88,38	23.033.557.412,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.2.2.b.4)	20.251.301.659,00	19.973.012.799,00	98,63	27.638.458.867,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.b.5)	1.427.906.100,00	1.305.248.900,00	91,41	480.440.400,00
2.2.5.	Belanja Aset Lainnya	5.2.2.b.6)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		**64.737.258.930,00**	**58.680.468.559,00**	**90,64**	**63.803.160.485,00**
2.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.2.2.c	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		**500.000.000,00**	**120.495.000,00**	**24,10**	**0,00**
2.4.	**BELANJA TRANSFER**					
2.4.1.	**BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**					
2.4.1.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	5.2.2.d.1)	1.794.702.879,31	546.560.321,00	30,45	1.271.990.662,00
2.4.1.3.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.2.2.d.2)	1.786.735.009,81	424.969.883,00	23,78	260.492.865,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		**3.581.437.889,12**	**971.520.204,00**	**27,13**	**1.532.483.527,00**
2.4.2.	**BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
2.4.2.1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	5.2.2.d.3)	3.235.680.000,00	3.235.680.000,00	100,00	4.646.400.000,00
2.4.2.2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.2.2.d.4)	83.784.226.995,00	83.784.226.995,00	100,00	81.913.834.013,00
	JUMLAH BELANJATRANSFER BANTUAN KEUANGAN		**87.019.906.995,00**	**87.019.906.995,00**	**100,00**	**86.560.234.013,00**
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		**90.601.344.884,12**	**87.991.427.199,00**	**97,12**	**88.092.717.540,00**
	TOTAL BELANJA		**675.857.149.536,00**	**648.109.984.541,33**	**95,89**	**619.164.014.291,00**
	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)		**(6.383.487.579,00)**	**(3.738.954.867,97)**	**58,57**	**6.665.069.179,04**
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
3.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	5.2.3.a	7.383.487.579,00	7.383.487.579,51	100,00	718.418.400,47
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	5.2.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**7.383.487.579,00**	**7.383.487.579,51**	**100,00**	**718.418.400,47**
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.3.c	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEGELUARAN PEMBIAYAAN		**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	0,00
3.3.	**PEMBIAYAAN BERSIH**		**6.383.487.579,00**	**6.383.487.579,51**	**100,00**	**718.418.400,47**
4	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**5.2.4**	**0,00**	**2.644.532.711,54**	**0,00**	**7.383.487.579,51**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALADI, S.STP, M.SI

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	7.383.487.579,51	718.418.400,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		7.383.487.579,51	718.418.400,47
3	**Subtotal (1 - 2)**		**(0,00)**	**(0,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		2.644.532.711,54	7.383.487.579,51
5	**Subtotal (3 + 4)**		**2.644.532.711,54**	**7.383.487.579,51**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**		**2.644.532.711,54**	**7.383.487.579,51**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALADI, S.STP, M.SI

C. NERACA

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**ASET**			
1.1	**ASET LANCAR**			
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a	1.571.594.340,16	5.184.423.125,13
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.b	86.760.250,00	0,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
1.1.1.4	Kas di BLUD	5.3.1.c	507.674.452,38	1.163.925.554,00
1.1.1.5	Kas Dana BOS	5.3.1.d	10.126.000,00	122.385,00
1.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.e	0,00	42.669.245,38
1.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.f	468.377.669,00	992.347.270,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.g	4.855.374.375,00	4.138.591.351,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.h	2.411.280.523,00	1.914.263.040,00
1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.i	243.823.161,85	123.000.000,00
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.j	1.758.923.689,00	0,00
1.1.8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.k	11.888.547.076,00	8.704.184.792,00
1.1.9	Piutang Lainnya	5.3.1.l	608.409.748,66	703.738.804,33
1.1.10	Penyisihan Piutang			
1.1.10.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.m.a	(2.703.917.540,75)	(2.217.995.481,93)
1.1.10.2	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.m.b	(601.864.086,66)	(677.087.688,50)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	5.3.1.n	5.022.938.757,10	13.101.240.458,23
	JUMLAH ASET LANCAR		**26.128.048.414,74**	**33.173.422.854,64**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
1.2.1	Investasi Non Permanen			
1.2.1.1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
1.2.1.2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
1.2.1.3	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
1.2.1.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
1.2.1.5	Dana Bergulir	5.3.2.a	775.474.500,00	769.806.500,00
1.2.1.6	Penyisihan Dana Bergulir		0,00	0,00
1.2.1.7	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
1.2.1.8	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
1.2.1.9	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen			
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.b	60.172.899.000,00	59.172.899.000,00
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**60.948.373.500,00**	**59.942.705.500,00**
1.3	**ASET TETAP**			
1.3.1	Tanah	5.3.3.a	103.598.821.439,25	103.617.451.439,25
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	256.586.551.868,93	250.494.507.245,37
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	553.208.953.941,84	526.863.585.915,84
1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.3.3.d	926.566.640.376,04	908.791.373.236,04
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	81.522.445.476,56	80.874.583.281,56
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.3.f	46.359.805.963,00	46.370.697.963,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(1.369.522.652.054,92)	(1.292.080.067.060,06)
	JUMLAH ASET TETAP		**598.320.567.010,70**	**624.932.132.021,00**
1.4	**DANA CADANGAN**			
1.4.1	Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**			
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.4.a	4.640.412.060,96	2.197.997.925,19

No.	Uraian	Catatan	2024	2023
1	2	3	4	5
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.b	687.162.000,00	687.162.000,00
1.5.5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.c	(687.162.000,00)	(687.162.000,00)
1.5.7	Aset Lain-lain	5.3.4.d	32.260.937.983,10	26.401.914.056,66
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.4.e	(27.155.293.594,97)	(23.030.211.620,09)
	JUMLAH ASET LAINNYA		**9.746.056.449,09**	**5.569.700.363,76**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**			
1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.5.a	137.605.343.958,88	137.605.343.956,56
1.6.4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.5.b	(32.340.945.875,00)	(25.750.381.549,00)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**105.264.398.083,88**	**111.854.962.409,88**
	JUMLAH ASET		**800.407.443.458,41**	**836.472.923.149,28**
2	**KEWAJIBAN**			
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2.1.2	Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		0,00	0,00
2.1.3	Utang Bunga		0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.a	82.225.825,28	122.836.615,78
2.1.6	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.b	5.192.971.396,01	12.432.262.179,31
2.1.7	Utang Transfer Out		0,00	0,00
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**5.275.197.221,29**	**12.555.097.795,09**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
2.2.1	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		**5.275.197.221,29**	**12.555.097.795,09**
3	**EKUITAS**			
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**			
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0,00	0,00
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan		0,00	0,00
3.1.3	Cadangan Piutang		0,00	0,00
3.1.4	Cadangan Persediaan		0,00	0,00
3.1.5	Cadangan Belanja yang Ditangguhkan		0,00	0,00
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		0,00	0,00
3.1.7	Utang Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR			
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**			
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0,00	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0,00	0,00
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		0,00	0,00
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		**0,00**	**0,00**
3.3	**EKUITAS DANA CADANGAN**			
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
3.4	**EKUITAS**		795.132.246.237,12	822.917.825.354,19
	JUMLAH EKUITAS	**6.3.7**	**795.132.246.237,12**	**822.917.825.354,19**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**800.407.443.458,41**	**835.472.923.149,28**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALADI, S.STP, M.SI

D. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4-5/5*100
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN					
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.a.				
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah		15.099.752.161,17	15.039.730.059,17	60.022.122,00	0,40
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		9.799.612.224,33	3.133.987.642,00	6.665.624.582,33	212,69
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.331.512.753,00	10.042.663.440,00	1.288.849.313,00	12,83
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		10.961.152.554,21	11.684.671.198,30	(723.518.644,09)	(6,19)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		47.192.029.712,71	39.901.052.339,47	7.290.977.373,24	18,27
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.b.				
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		8.079.034.358,00	5.703.778.396,00	2.375.255.962,00	41,64
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.977.692.000,00	7.422.153.000,00	(1.444.461.000,00)	(19,46)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		417.506.738.000,00	400.085.686.160,00	17.421.051.840,00	4,35
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		93.837.724.329,00	91.764.620.936,00	2.073.103.393,00	2,26
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		525.401.188.687,00	504.976.238.492,00	20.424.950.195,00	4,04
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.1	Dana Penyesuaian		0,00	6.012.923.000,00	(6.012.923.000,00)	(100,00)
1.2.2.2	Dana Desa		41.844.428.000,00	41.372.835.000,00	471.593.000,00	1,14
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		41.844.428.000,00	47.385.758.000,00	(5.541.330.000,00)	(11,69)
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		36.148.320.317,00	32.413.600.773,00	3.734.719.544,00	11,52
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH		36.148.320.317,00	32.413.600.773,00	3.734.719.544,00	11,52
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN					
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		0,00	640.000.000,00	(640.000.000,00)	0,00
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pemerintah Pusat/Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN		0,00	640.000.000,00	(640.000.000,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		603.393.937.004,00	585.415.597.265,00	17.978.339.739,00	3,07
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.c.				
1.3.1.	Pendapatan Hibah		174.500.000,00	106.415.394.499,00	(106.240.894.499,00)	(99,84)
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	4.891.724.240,00	(4.891.724.240,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		174.500.000,00	111.307.118.739,00	(111.132.618.739,00)	(99,84)
	JUMLAH PENDAPATAN		650.760.466.716,71	736.623.768.343,47	(85.863.301.626,76)	(11,66)
2	BEBAN					
2.1	BEBAN OPERASI					
2.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.a.1)	312.696.234.820,00	279.349.746.942,00	33.346.487.878,00	11,94
2.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.a.2)	37.356.733.694,13	39.104.473.974,57	(1.747.740.080,44)	(4,47)
2.1.3	Beban Jasa	5.4.2.a.3)	102.440.686.282,00	96.373.536.036,40	6.067.150.245,60	6,30

No.	Uraian	Catatan	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4-5/5*100
2.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.2.a.4)	8.291.680.563,00	11.107.758.625,00	(2.816.078.062,00)	(25,35)
2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.a.5)	18.634.452.689,00	24.583.064.412,00	(5.948.611.723,00)	(24,20)
2.1.6	Beban Barang BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Beban Hibah	5.4.2.a.6)	21.850.244.697,33	16.013.566.936,00	5.836.677.761,33	36,20
2.1.11	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.a.7)	545.742.000,00	461.160.000,00	84.582.000,00	18,34
2.1.12	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.a.8)	410.696.456,98	707.947.328,90	(297.248.871,92)	(41,99)
2.1.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.a.9)	88.821.620.731,02	98.298.656.790,75	(9.477.036.059,73)	(9,64)
2.1.14	Beban Lain-lain	5.4.2.a.10)	633.887.617,00	2.974.181.506,00	(2.340.293.889,00)	(78,69)
	JUMLAH BEBAN OPERASI		**591.481.981.750,46**	**568.974.092.551,62**	**22.507.889.198,84**	**3,96**
2.2	**BEBAN BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**	**5.4.2.b.**				
2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.600.016.144,21	1.271.990.692,00	328.025.452,21	25,79
2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		3.235.680.000,00	4.646.400.000,00	(1.410.720.000,00)	(30,36)
2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		83.784.226.995,00	81.913.834.013,00	1.870.392.982,00	2,28
2.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		988.696.139,10	260.492.865,00	728.203.274,10	279,55
	JUMLAH BEBAN TRANSFER		**89.608.619.278,31**	**88.092.717.540,00**	**1.515.901.738,31**	**1,72**
5	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**5.4.2.c.**				
5.2.1	Beban Tidak Terduga		120.495.000,00	0,00	120.495.000,00	0,00
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA		**120.495.000,00**	**0,00**	**120.495.000,00**	0,00
	JUMLAH BEBAN		**681.211.096.028,77**	**657.066.810.091,62**	**24.144.285.937,15**	**3,67**
3	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**(30.450.629.312,06)**	**79.556.958.251,85**	**(110.007.587.563,91)**	**0,00**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
4	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
4.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		186.678.517,00	26.159.101,00	160.519.416,00	613,63
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(186.678.517,00)**	**(26.159.101,00)**	**(160.519.416,00)**	**613,63**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(30.637.307.829,06)**	**79.530.799.150,85**	**(110.168.106.979,91)**	**(138,52)**
6	**POS LUAR BIASA**	**5.4.2.d.**				
5.1.1	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.4.3	**(30.637.307.829,06)**	**79.530.799.150,85**	**(110.168.106.979,91)**	**(138,52)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAO, S.STP, M.SI

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
1	*2*	*3*	*4*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		14.396.111.950,00	14.323.956.113,00
Penerimaan Retribusi Daerah		9.375.406.310,00	3.115.174.963,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.331.512.753,00	10.042.663.440,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		10.652.465.229,36	11.374.069.686,04
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		6.320.110.669,00	6.516.066.396,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.977.692.000,00	7.422.153.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		417.506.738.000,00	400.085.686.160,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		93.837.724.329,00	91.764.620.936,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	6.012.923.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		32.963.958.033,00	26.989.474.036,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		0,00	640.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		41.844.428.000,00	41.372.835.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	1.272.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	4.891.724.240,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**644.206.147.273,36**	**625.823.346.970,04**
Arus Keluar Kas	5.5.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		314.988.384.111,00	276.716.366.014,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		164.059.422.975,00	174.333.143.316,00
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		21.650.244.697,33	15.822.266.936,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		610.542.000,00	396.360.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		120.495.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		546.550.321,00	1.271.990.662,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		424.969.883,00	260.492.865,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		3.235.680.000,00	4.646.400.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		83.784.226.995,00	81.913.834.013,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**589.420.515.982,33**	**555.360.853.806,00**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		**54.785.631.291,03**	**70.462.493.164,04**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.a**		
Pencarian Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		0,00	1.300.000,00
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		155.882.400,00	4.436.500,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**155.882.400,00**	**5.736.500,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.b.**		

Uraian	Catatan	2024	2023
1	2	3	4
Perolehan Tanah		0,00	117.700.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		10.229.912.049,00	12.532.002.806,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		27.172.296.811,00	23.033.557.412,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		19.973.012.799,00	27.638.459.887,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.305.246.900,00	480.440.400,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	1.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**59.680.468.559,00**	**63.803.160.485,00**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		**(59.524.586.159,00)**	**(63.797.423.985,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.5.4.**		
Arus Masuk Kas	**5.5.4.a.**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.932.044.859,68	38.774.112.887,00
Dana BOS/FKTP/BLUD Tahun 2023		2.199.064.454,38	25.875.039,00
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**45.131.109.314,06**	**38.799.987.926,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.4.b.**		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.932.044.859,68	38.774.112.887,00
Dana BOS Tahun 2023		0,00	122.385,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya		986.178.121,38	2.198.942.069,38
Koreksi SiLPA Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**43.918.222.981,06**	**40.973.177.341,38**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		**1.212.886.333,00**	**(2.173.189.415,38)**
Kenaikan/Penurunan Kas	**5.5.5.**	**(3.526.068.534,97)**	**4.491.879.763,66**
Saldo Awal Kas di BUD		**5.184.423.125,13**	**692.543.361,47**
Saldo Akhir Kas di BUD		**1.658.354.590,16**	**5.184.423.125,13**
- Saldo Akhir Kas di Kasda		1.571.594.340,16	5.184.423.125,13
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		86.760.250,00	0,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BLUD		**507.674.452,38**	**1.163.925.554,00**
Saldo Akhir Kas Dana BOS		**10.126.000,00**	**122.385,00**
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	**42.669.245,38**
Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas		**468.377.669,00**	**992.347.270,00**
Saldo Akhir Kas	**5.5.6.**	**2.644.532.711,54**	**7.383.487.579,61**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD, S.STP, M.SI

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024	2023
1	2	3	4	5
1	EKUITAS AWAL	5.6	822.917.825.354,19	753.884.427.111,33
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		(30.637.307.829,06)	79.530.799.150,85
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		0,00	0,00
3.1	Koreksi Nilai Piutang		0,00	0,00
3.2	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		0,00	0,00
3.3	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
3.4	Koreksi Nilai Beban dibayar Dimuka		0,00	0,00
3.5	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen- Dana Bergulir		0,00	0,00
3.6	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
3.7	Koreksi Nilai Utang Belanja		0,00	0,00
3.8	Koreksi Nilai Utang Transfer Out		0,00	0,00
3.9	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
3.10	Koreksi Nilai Aset Tetap		0,00	0,00
3.11	Koreksi Nilai Penyisihan Aset Tetap		0,00	0,00
3.12	Koreksi Nilai Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
3.13	Koreksi Nilai Aset Lainnya		0,00	0,00
3.14	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
4	KOREKSI EKUITAS LAINNYA		2.851.728.711,99	(10.497.400.907,99)
5	EKUITAS AKHIR		795.132.246.237,12	822.917.825.354,19

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

WALI KOTA PARIAMAN

YOTA BALADI, S.STP, M.SI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan tersebut antara lain:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1752);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 173);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

bb. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255);

cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

dd. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

ee. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019, Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

ff. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30);

gg. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

hh. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77);

ii. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 16).

jj. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 3).

kk. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6).

ll. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 9).

mm. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 10)

nn. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

2.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

3.2. Kebijakan Keuangan

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

5.2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3. Neraca

5.3.1. Aset Lancar

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

5.3.3. Aset Tetap

5.3.4. Aset Lainnya

5.3.5. Properti Investasi

5.3.6. Kewajiban Jangka Pendek

5.3.7. Ekuitas

5.4. Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan – LO

5.4.2. Beban – LO

5.4.3. Surplus/Defisit – LO

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

5.6.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

6.2. Komitmen dan Kontijensi

6.3. Pengungkapan Lainnya

6.4. Struktur Organisasi

6.5. Kepemimpinan Daerah

BAB VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Otonom Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, 55 desa, dan 16 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur. Namun demikian, jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 6 desa dan 16 kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, dan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa.

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.373 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman jika dirinci menurut jenis pendidikan yang ditamatkan, yaitu sebanyak 229 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 1.571 orang berpendidikan Sarjana (S1), 441 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan Sarjana Muda / Diploma, 125 orang dengan pendidikan SMU, 3 orang berpendidikan SMP, 2 orang berpendidikan Sekolah Dasar (Badan Pusat Statistik, 2025).

Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal yang bekerja di Kota Pariaman terdapat sebanyak 568 orang dengan rincian 277 orang pada Kementerian Agama, 22 orang pegawai Badan Pusat Statistik, 19 orang pada Badan Pertanahan Nasional, 32 orang pada Pengadilan Negeri, 84 orang pada Lembaga Pemasyarakatan, 71 orang pada Kejaksaan Negeri, dan 28 orang pada Pengadilan Agama, 7 orang pada Samsat, 4 orang pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 18 orang pada KPU Pariaman dan 8 orang pada Bawaslu. Juga terdapat 286 orang personel Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman dan 362 orang Personel Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Pariaman (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255);

d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);

e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

f. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 10);

g. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30);

h. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);

i. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77);

j. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 16).

k. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 3).

l. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6).

m. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 9).

n. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 10)

o. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17).

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2024 dilakukan dengan menganalisa pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, dan proyeksi ketersediaan dana pembangunan, serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu data yang sangat penting, yang mana di dalamnya dapat diperoleh informasi jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Data PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita. Indikator tersebut merupakan indikator pembangunan yang sangat penting, karena dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2024 tercatat sebesar 4,51% Angka tersebut diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp4.018,87 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi Rp4.200,08 miliar rupiah pada tahun 2024. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp6.801,89 miliar rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp6.435,12 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2025).

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur Perekonomian Kota Pariaman tahun 2024 masih didominasi empat kategori utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman yang kontribusinya di atas 10% yaitu:

a. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,38%;

b. Kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,62%;

c. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,18%; dan

d. Sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,20%.

Terkait dengan perkembangan harga bahwa perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan, dan rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir, diperkirakan laju pertumbuhan Indeks

Harga Implisit PDRB Kota Pariaman menurut lapangan usaha sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman Tahun 2020 – 2024 (%)

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertanian	-0,27	1,55	5,93	4,57	1,77
2	Pertambangan dan Penggalian	0,78	1,27	4,07	6,28	-0,86
3	Industri Pengolahan	2,55	5,29	7,63	4,72	3,05
4	Pengadaan Listrik. & Gas	0,96	0,82	1,47	2,26	0,25
5	Pengadaan Air	0,17	0,56	4,95	4,00	3,15
6	Konstruksi	2,52	2,26	7,46	4,25	1,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-0,94	-0,75	10,57	4,97	2,16
8	Transportasi dan Pergudangan	2,7	1,71	8,22	6,48	-1,37
9	Akomodasi dan Makan Minum	1,65	1,96	3,35	3,14	1,48
10	Informasi dan Komunikasi	-0,48	1,41	5,82	2,33	0,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	2,89	6,32	1,91	0,68
12	*Real Estate*	1,06	0,91	5,03	5,33	1,04
13	Jasa Perusahaan	0,56	0,28	3,12	5,87	0,05
14	Adm Pemerintah	8,20	5,37	5,71	4,22	0,11
15	Jasa Pendidikan	0,56	1,21	5,41	4,28	1,13
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	2,51	1,91	4,50	4,90	2,20
17	Jasa Lain-lain	2,36	1,44	6,41	4,77	1,45
PDRB/GDRP		**1,11**	**1,73**	**7,00**	**4,41**	**1,14**

3.1.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Pengangguran dan TPT Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Sekolah Dasar	159	3,14	0,00	0,00	159	1,84
SMP/Tsanawiyah	80	1,83	47	1,89	127	1,85
SMA/Aliyah	904	6,40	411	5,41	1.315	6,05
SMTA Kejuruan/ SMK	642	11,16	170	11,59	812	11,25
Diploma I/II/III	65	7,34	0,00	0,00	65	2,76
Universitas/ D.IV/S1/S2/S3	429	8,42	984	10,39	1.215	7.59
Jumlah	**1.288**	**4,31**	**1.458**	**6,71**	**2.746**	**5,32**

(sumber : https://pariamankota.bps.go.id/publication /2025)

3.1.4. Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio*

Data indikator kemiskinan dan gini *ratio* Kota Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini *Ratio*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2019	4.200	5,03	0,49	0,07	446.514	0,300
2020	3.658	4,76	0,49	0,10	480.028	0,310
2021	3.987	4,38	0,36	0,08	495.386	0,301
2022	3.796	4,13	0,46	0,09	522.932	0,272
2023	3.910	4,20	0,48	0,09	576.455	0,289
2024	4.010	4,26	0,50	0,08	609.286	0,281

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024, yaitu: Tahun 2020 (78,55), Tahun 2021 (78,72), Tahun 2022 sebesar (79,31), pada Tahun 2023 sebesar (79,76) dan mengalami peningkatan di Tahun 2024 sebesar (80,49) dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pariaman TA 2024, terutama dari sisi pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pariaman diarahkan sebagai berikut.

a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan Semester I Tahun 2024;

b. Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;

c. Menyesuaikan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Pariaman;

d. Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan

e. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman antara lain dengan:

1. Meningkatkan target PAD Kota Pariaman. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah secara proporsional akan terus ditingkatkan;
2. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang mana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan angka Prediksi Belanja di Kota Pariaman selama kurun waktu 2024 adalah sebagai berikut.

a. Untuk prediksi belanja tahun 2024 sudah memprediksi Belanja untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi;
b. Pergeseran anggaran antar SKPD antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Perundangan yaitu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau lahan;
c. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial dan bersumber dari APBD;
d. Program kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD transisi Kota Pariaman Tahun 2023-2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk TA 2024;
e. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat;
f. Belanja

   Anggaran Belanja pada perubahan APBD Tahun 2024 berkurang sebesar (Rp9.507.316.565,00) sehingga total anggaran Belanja menjadi sebesar Rp675.857.149.536,00. Kebijakan perubahan Anggaran Belanja pada perubahan APBD TA 2024 adalah sebagai berikut.

   1. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp4.703.927.349,12), sehingga total Belanja Operasi menjadi Rp520.018.545.721,88. Setelah dilakukan penghitungan kembali terjadi penurunan pada Belanja Pegawai sebesar (Rp5.634.832.581,62) dengan memperhitungkan sisa kebutuhan gaji dan tunjagan yang sebenarnya. Penurunan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp51.026.205,50) dengan memperhitungkan kebutuhan operasional di unit kerja

serta terjadi peningkatan pada Belanja Hibah sebesar Rp950.251.438,00 merupakan penyesuaian terhadap realisasi hibah bantuan operasional sekolah untuk satuan pendidikan swasta;

2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp6.668.867.309,00) atau menjadi Rp64.737.258.930,00. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik kontruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaiaan pekerjaan diakhir tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000.000,00) yang semula Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00. Belanja ini nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan OPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman serta mendukung program penyelenggaran pemilu dan pilkada tahun anggaran 2024;
6. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. Optimalisasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
8. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

3.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Tahun 2024 telah ditetapkan sesuai perubahan anggaran dengan perkiraan defisit sebesar (Rp6.383.487.579,00). Kebijakan pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit TA 2024 tersebut sebesar Rp6.383.487.579,00 adalah penggunaan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000,00.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2024 sesuai Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang dapat dijelaskan dalam **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Ringkasan APBD Pergeseran TA 2024

Uraian	Anggaran Sebelum Pergeseran	Anggaran Setelah Pergeseran	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pendapatan	**656.864.466.101,00**	**656.864.466.101,00**	**-**
Pendapatan Asli Daerah	50.514.504.873,00	50.514.504.873,00	-
Pendapatan Transfer	603.925.961.228,00	603.925.961.228,00	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.424.000.000,00	2.424.000.000,00	-
Belanja Daerah	**685.364.466.101,00**	**685.364.466.101,00**	**-**
Belanja Operasi	524.722.473.071,00	532.152.795.724,00	7.430.322.653,00
Belanja Modal	71.406.126.239,00	65.975.803.586,00	(5.430.322.653,00)
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
Belanja Transfer	87.735.866.791,00	85.735.866.791,00	(2.000.000.000,00)
Surplus / (Defisit)	**(28.500.000.000,00)**	**(28.500.000.000,00)**	**-**
Penerimaan Pembiayaan	28.500.000.000,00	28.500.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	**28.500.000.000,00**	**28.500.000.000,00**	**-**

Perbandingan Anggaran Persegeran TA 2024 dengan Anggaran Perubahan APBD TA 2024 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, dapat dilihat pada **tabel 3.5** berikut:

Tabel 3.5 Ringkasan APBD Perubahan TA 2024

Uraian	Anggaran Pergeseran	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pendapatan	**656.864.466.101,00**	**669.473.661.957,00**	**12.609.195.856,00**
Pendapatan Asli Daerah	50.514.504.873,00	53.788.984.257,00	3.274.479.384,00
Pendapatan Transfer	603.925.961.228,00	615.684.677.700,00	11.758.716.472,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.424.000.000,00	0,00	(2.424.000.000,00)
Belanja Daerah	**685.364.466.101,00**	**675.857.149.536,00**	**(9.507.316.565,00)**
Belanja Operasi	532.152.795.724,00	520.018.545.721,88	(12.134.250.002,12)
Belanja Modal	65.975.803.586,00	64.737.258.930,00	(1.238.544.656,00)
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Belanja Transfer	85.735.866.791,00	90.601.344.884,12	4.865.478.093,12
Surplus / (Defisit)	**(28.500.000.000,00)**	**(6.383.487.579,00)**	**22.116.512.421,00**
Penerimaan Pembiayaan	28.500.000.000,00	7.383.487.579,00	(21.116.512.421,00)
Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	**28.500.000.000,00**	**6.383.487.579,00**	**(22.116.512.421,00)**

Pada pos Belanja terjadi pengurangan dari target awal sebesar Rp685.364.466.101,00 pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp675.857.149.536,00 menurun sebesar (Rp9.507.316.565,00) atau 1,39% dari APBD Awal TA 2024.

3.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah perubahan, yaitu: (1) pendapatan direncanakan sebesar Rp669.473.661.957,00; (2) belanja direncanakan sebesar Rp675.857.149.536,00; dan (3) defisit direncanakan sebesar (Rp6.383.487.579,00).

Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2024 dilakukan sehubungan:

a. Penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan;

b. Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp656.864.466.101,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp669.473.661.957,00 terjadi kenaikan sebesar Rp12.609.195.856,00 atau bertambah sebesar 6,48% sebagaimana tertera dalam **Tabel 3.6**

Tabel 3.6 Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2024

Pendapatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ (Turun) (%)
Pendapatan Asli Daerah	50.514.504.873,00	53.788.984.257,00	6,48
Dana Perimbangan	603.925.961.228,00	615.684.677.700,00	1,95
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.424.000.000,00	0,00	(100,00)
Total Pendapatan	**656.864.466.101,00**	**669.473.661.957,00**	**1,92**

Realisasi APBD Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

A. Realisasi Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2024 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp644.362.029.673,36 atau 96,25% dari anggaran sebesar Rp669.473.661.957,00.

   SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 11 SKPD dari 28 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi pendapatan yang dicapai oleh 11 SKPD tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2024

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga	15.000.000,00	3.846.000,00	(11.154.000,00)	25,64	2.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	13.974.250.504,00	12.192.101.021,00	(1.782.149.483,00)	87,25	11.426.875.403,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	525.000.000,00	299.125.820,00	(225.874.180,00)	56,98	283.668.463,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	2.877.486.000,00	2.032.127.753,00	(845.358.247,00)	70,62	1.774.592.805,00
5	Dinas Perhubungan	615.000.000,00	206.808.000,00	(408.192.000,00)	33,63	470.641.400,00
6	Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	900.000.000,00	257.827.763,00	(642.172.237,00)	28,65	345.637.350,00
7	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.200.000.000,00	807.710.000,00	(392.290.000,00)	67,31	850.582.250,00
8	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	250.075.000,00	172.320.000,00	(77.755.000,00)	68,91	274.490.000,00
9	Bagian Umum	70.000.000,00	74.750.000,00	4.750.000,00	106,79	30.500.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	649.046.850.453,00	628.315.413.316,36	(20.731.437.136,64)	96,81	610.236.895.799,04
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	132.800.000,00
TOTAL		**669.473.661.957,00**	**644.362.029.673,36**	**(25.111.632.283,64)**	**96,25**	**625.829.083.470,04**

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan tertinggi jika dibandingkan dengan anggaran yaitu pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman sebesar Rp74.750.000,00 atau 106,79%, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp628.315.413.316,36 atau 96,81%. Dinas Kesehatan sebesar Rp12.192.101.021,00 atau 87.25%. Adapun realisasi yang terendah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp3.846.000,00 atau 25,64%.

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2024 dan 2023 per Komponen Pendapatan

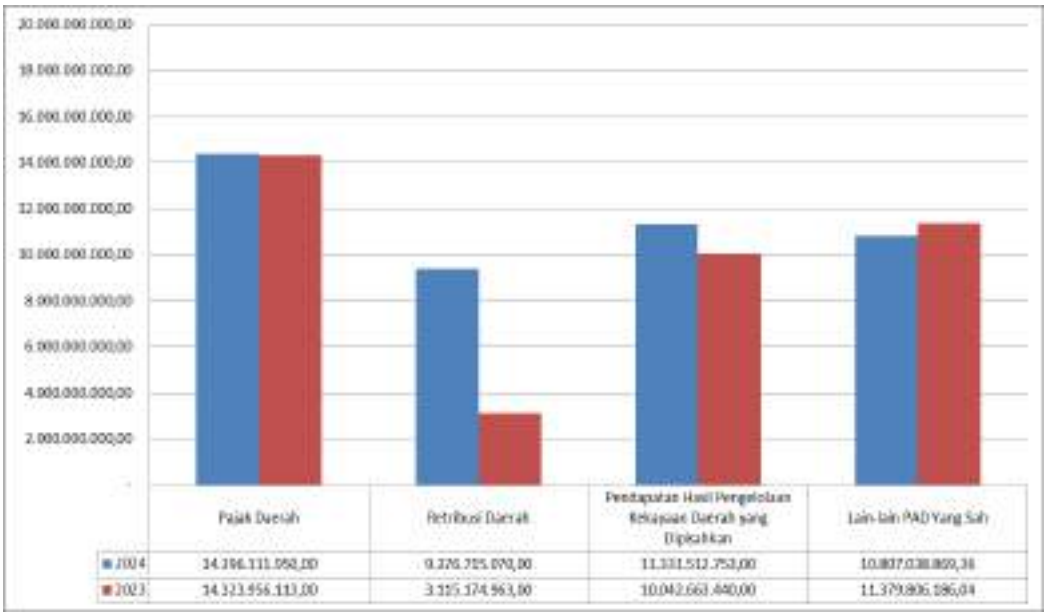

Berdasarkan gambar diatas intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pendapatan retribusi daerah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah sehingga berdampak untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Beberapa hal yang perlu untuk segera dilakukan antara lain:

a. mengidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan sulitnya dalam mencapai target penerimaan retribusi.
b. melakukan pengkajian ulang terhadap potensi sebenarnya dari objek retribusi yang telah terdata sehingga target penerimaan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
c. melakukan pendataan terhadap objek-objek yang berpotensi dijadikan sebagai objek retribusi baru.
d. meningkatkan pengawasan pengelolaan retribusi daerah secara berkala melalui pembentukan tim pengawas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
e. meningkatkan SDM pemungutan retribusi daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
f. meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terutama dalam pengelolaan retribusi daerah sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kebocoran retribusi serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan retribusi daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp598.450.651.031,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 5.2 Diagram Pendapatan Transfer Tahun 2024

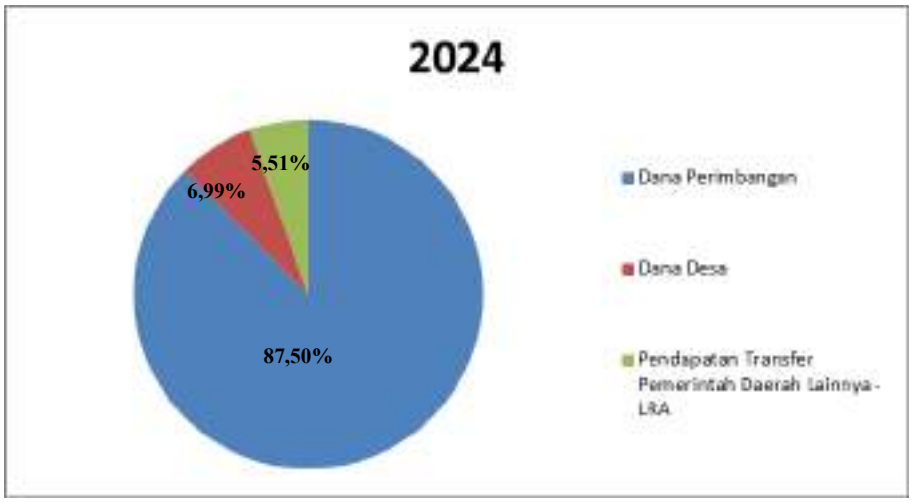

Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa pendapatan transfer Tahun 2024, komponen terbesar diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 87,50%, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar 6,99%, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 5,51%. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan keuangan Kota Pariaman terhadap Pemerintah Pusat.

B. Realisasi Belanja- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2024 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 diperoleh realisasi belanja urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh dua puluh delapan SKPD, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Terdapat dua puluh delapan entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp675.857.149.536,00 dan terealisasi sebesar Rp648.100.984.541,33 atau 95,89%.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Gambar 5.3 Grafik Porsi Belanja Tahun 2024 dan 2023

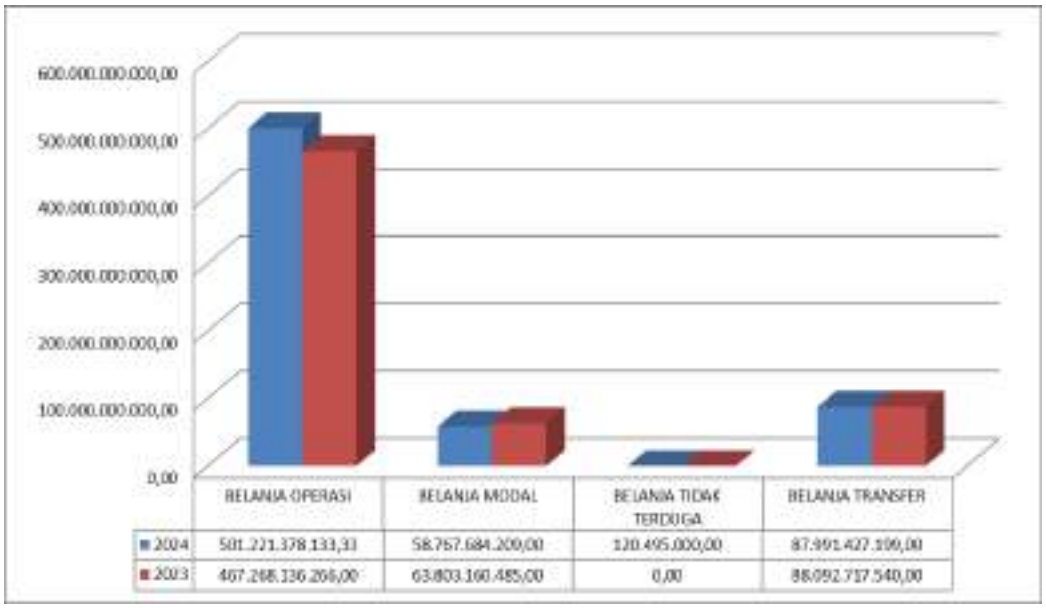

Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 berdasarkan Organisasi adalah:

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		**367.572.616.757,00**	**354.615.268.684,00**	**96,47**	**309.270.047.827,00**
		Pendidikan	152.291.856.452,34	150.870.465.391,00	99,07	136.487.114.121,00
		Kesehatan	137.847.308.627,28	130.503.276.786,00	94,67	97.189.844.576,00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.987.810.021,30	34.800.356.384,00	94,09	44.953.584.912,00
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.704.490.079,54	17.527.731.050,00	93,71	10.641.689.234,00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.854.481.351,42	17.152.334.258,00	96,07	16.101.688.524,00
		Sosial	3.886.670.225,12	3.761.104.815,00	96,77	3.896.126.460,00
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		**63.189.111.010,00**	**60.732.391.856,00**	**96,11**	**74.981.811.609,00**
		Tenaga Kerja	165.562.500,04	163.429.740,00	98,71	429.243.164,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.645.304.255,00	4.311.090.110,00	92,81	4.409.678.732,00
		Pangan	333.565.131,00	299.497.149,00	89,79	126.649.000,00
		Pertanahan	144.252.500,12	76.438.260,00	52,99	332.787.976,00
		Lingkungan Hidup	10.550.472.779,00	10.081.888.650,00	95,56	8.112.940.443,00
		Administrasi Kependudukan dan Capil	3.737.051.776,62	3.647.190.577,00	97,60	3.990.893.447,00

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.666.886.240,00	5.511.990.166,00	97,27	5.973.206.269,00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.077.114.000,00	3.977.163.750,00	97,55	3.027.076.100,00
		Perhubungan	9.488.091.959,40	9.260.740.493,00	97,60	10.653.327.847,00
		Komunikasi dan Informatika	6.795.767.689,00	6.524.918.748,00	96,01	7.252.473.065,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.051.370.907,00	5.705.334.051,00	94,28	5.079.940.955,00
		Penanaman Modal	4.873.630.602,00	4.708.524.934,00	96,61	4.352.162.422,00
		Kepemudaan dan Olah Raga	2.025.742.200,00	1.968.348.500,00	97,17	4.275.681.032,00
		Statistik	31.665.946,00	29.310.946,00	92,56	9.850.000,00
		Persandian	15.338.250,00	14.132.082,00	92,14	1.320.000,00
		Kebudayaan	1.132.016.819,56	1.107.828.331,00	97,86	4.349.463.916,00
		Perpustakaan	3.153.579.005,26	3.055.815.695,00	96,90	12.475.948.756,00
		Kearsipan	301.698.450,00	288.749.674,00	95,71	129.168.485,00
3	**Urusan Pilihan**		**26.266.014.184,00**	**25.223.041.350,00**	**96,03**	**24.541.764.792,00**
		Kelautan dan Perikanan	1.040.735.550,04	874.903.463,00	84,07	1.054.281.350,00
		Pariwisata	6.485.611.385,00	6.136.122.542,00	94,61	3.811.515.747,00
		Pertanian	15.331.839.873,66	14.845.668.763,00	96,83	15.790.242.785,00
		Perdagangan	3.377.668.375,30	3.336.968.924,00	98,80	3.368.053.407,00
		Perindustrian	30.159.000,00	29.377.658,00	97,41	517.671.503,00
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**		**218.829.407.585,00**	**207.530.282.651,33**	**94,84**	**210.370.390.063,00**
		Administrasi Pemerintahan	23.456.786.943,34	21.238.904.700,00	90,54	25.891.687.287,00
		Pengawasan	7.592.612.225,08	7.175.799.825,00	94,51	8.147.335.780,00
		Perencanaan	6.417.745.757,56	5.749.317.109,00	89,58	6.175.425.202,00
		Keuangan	107.029.295.515,88	103.483.759.237,00	96,69	107.947.183.308,00
		Kepegawaian	4.979.994.402,74	4.728.226.461,00	94,94	5.734.600.821,00
		Penelitian dan Pengembangan	227.346.200,00	48.391.950,00	21,29	273.230.912,00
		Sekretariat DPRD	28.173.879.396,00	25.784.572.335,00	91,52	24.310.945.313,00
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.941.825.877,40	21.424.478.512,00	93,39	20.722.875.318,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	18.009.921.267,00	17.896.832.522,33	99,37	11.167.106.122,00
JUMLAH			**675.857.149.536,00**	**648.100.984.541,33**	**95,89**	**619.164.014.291,00**

Rincian belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 berdasarkan Fungsi adalah:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi TA 2024 dan 2023

No.	JENIS	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PELAYANAN UMUM**	**208.297.521.784,00**	**196.790.058.728,00**	**94,48**	**206.722.744.491,00**
	Pangan	333.565.131,00	299.497.149,00	89,79	126.649.000,00
	Komunikasi dan Informatika	6.795.767.689,00	6.524.918.748,00	96,01	7.252.473.065,00
	Statistik	31.665.946,00	29.310.946,00	92,56	9.850.000,00
	Persandian	15.338.250,00	14.132.082,00	92,14	1.320.000,00
	Kearsipan	301.698.450,00	288.749.674,00	95,71	129.168.485,00
	Administrasi Pemerintahan	23.456.786.943,34	21.238.904.700,00	90,54	25.891.687.287,00
	Pengawasan	7.592.612.225,08	7.175.799.825,00	94,51	8.147.335.780,00
	Perencanaan	6.417.745.757,56	5.749.317.109,00	89,58	6.175.425.202,00
	Keuangan	107.029.295.515,88	103.483.759.237,00	96,69	107.947.183.308,00
	Kepegawaian	4.979.994.402,74	4.728.226.461,00	94,94	5.734.600.821,00
	Penelitian dan Pengembangan	227.346.200,00	48.391.950,00	21,29	273.230.912,00
	Sekretariat DPRD	28.173.879.396,00	25.784.572.335,00	91,52	24.310.945.313,00
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	22.941.825.877,40	21.424.478.512,00	93,39	20.722.875.318,00
2	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**35.864.402.618,42**	**35.049.166.780,33**	**97,73**	**27.268.794.646,00**
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.854.481.351,42	17.152.334.258,00	96,07	16.101.688.524,00
	Kesatuan Bangsa dan Politik	18.009.921.267,00	17.896.832.522,33	99,37	11.167.106.122,00
3	**EKONOMI**	**46.025.945.007,44**	**44.436.938.192,00**	96,55	**47.218.129.702,00**
	Tenaga Kerja	165.562.500,04	163.429.740,00	98,71	429.243.164,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.666.886.240,00	5.511.990.166,00	97,27	5.973.206.269,00
	Perhubungan	9.488.091.959,40	9.260.740.493,00	97,60	10.653.327.847,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.051.370.907,00	5.705.334.051,00	94,28	5.079.940.955,00
	Penanaman Modal	4.873.630.602,00	4.708.524.934,00	96,61	4.352.162.422,00
	Kelautan dan Perikanan	1.040.735.550,04	874.903.463,00	84,07	1.054.281.350,00
	Pertanian	15.331.839.873,66	14.845.668.763,00	96,83	15.790.242.785,00
	Perdagangan	3.377.668.375,30	3.336.968.924,00	98,80	3.368.053.407,00
	Perindustrian	30.159.000,00	29.377.658,00	97,41	517.671.503,00
4	**LINGKUNGAN HIDUP**	**10.694.725.279,12**	**10.158.326.910,00**	94,98	**8.445.728.419,00**
	Pertanahan	144.252.500,12	76.438.260,00	52,99	332.787.976,00
	Lingkungan Hidup	10.550.472.779,00	10.081.888.650,00	95,56	8.112.940.443,00
5	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**55.692.300.100,84**	**52.328.087.434,00**	93,96	**55.595.274.146,00**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.987.810.021,30	34.800.356.384,00	94,09	44.953.584.912,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	18.704.490.079,54	17.527.731.050,00	93,71	10.641.689.234,00
6	**KESEHATAN**	**141.924.422.627,28**	**134.480.440.536,00**	94,75	**100.216.920.676,00**
	Kesehatan	137.847.308.627,28	130.503.276.786,00	94,67	97.189.844.576,00
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.077.114.000,00	3.977.163.750,00	97,55	3.027.076.100,00
7	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**7.617.628.204,56**	**7.243.950.873,00**	95,09	**8.160.979.663,00**
	Kebudayaan	1.132.016.819,56	1.107.828.331,00	97,86	4.349.463.916,00

No.	JENIS	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Pariwisata	6.485.611.385,00	6.136.122.542,00	94,61	3.811.515.747,00
8	**PENDIDIKAN**	**157.471.177.657,60**	**155.894.629.586,00**	**99,00**	**153.238.743.909,00**
	Pendidikan	152.291.856.452,34	150.870.465.391,00	99,07	136.487.114.121,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	2.025.742.200,00	1.968.348.500,00	97,17	4.275.681.032,00
	Perpustakaan	3.153.579.005,26	3.055.815.695,00	96,90	12.475.948.756,00
9	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**12.269.026.256,74**	**11.719.385.502,00**	95,52	**12.296.698.639,00**
	Sosial	3.886.670.225,12	3.761.104.815,00	96,77	3.896.126.460,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.645.304.255,00	4.311.090.110,00	92,81	4.409.678.732,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.737.051.776,62	3.647.190.577,00	97,60	3.990.893.447,00
JUMLAH		**675.857.149.536,00**	**648.100.984.541,33**	**95,89**	**619.164.014.291,00**

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD TA 2024

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	154.317.598.652,34	152.838.813.891,00	(1.478.784.761,34)	99,04	140.762.795.153,00
2	Dinas Kesehatan	137.847.308.627,28	130.503.276.786,00	(7.344.031.841,28)	94,67	97.189.844.576,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	38.887.950.691,10	36.643.210.757,00	(2.244.739.934,10)	94,23	42.868.945.673,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	29.319.519.008,54	27.649.175.700,00	(1.670.343.308,54)	94,30	22.740.725.921,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	12.765.829.157,00	12.319.877.726,00	(445.951.431,00)	96,51	10.871.381.820,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.088.652.194,42	4.832.456.532,00	(256.195.662,42)	94,97	5.230.306.704,00
7	Dinas Sosial	3.886.670.225,12	3.761.104.815,00	(125.565.410,12)	96,77	3.896.126.460,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8.722.418.255,00	8.288.253.860,00	(434.164.395,00)	95,02	7.436.754.832,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.737.051.776,62	3.647.190.577,00	(89.861.199,62)	97,60	3.990.893.447,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.666.886.240,00	5.511.990.166,00	(154.896.074,00)	97,27	5.973.206.269,00
11	Dinas Perhubungan	7.667.647.639,80	7.454.768.380,00	(212.879.259,80)	97,22	9.084.658.818,00

NO	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.842.771.885,60	6.568.361.776,00	(274.410.109,60)	95,99	7.263.643.065,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	9.459.198.282,30	9.071.680.633,00	(387.517.649,30)	95,90	8.965.665.865,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	5.039.193.102,04	4.871.954.674,00	(167.238.428,04)	96,68	4.781.405.586,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.617.628.204,56	7.243.950.873,00	(373.677.331,56)	95,09	8.160.979.663,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.455.277.455,26	3.344.565.369,00	(110.712.086,26)	96,80	12.605.117.241,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	16.706.140.554,66	16.020.069.375,00	(686.071.179,66)	95,89	16.971.173.135,00
18	Sekretariat Daerah	23.456.786.942,32	21.238.904.700,00	(2.217.882.242,32)	90,54	25.862.834.787,00
19	Sekretariat DPRD	28.173.879.396,94	25.784.572.335,00	(2.389.307.061,94)	91,52	24.310.945.313,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.500.207.309,94	2.424.336.831,00	(75.870.478,94)	96,97	2.302.841.923,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	15.869.431.692,08	14.592.729.304,00	(1.276.702.388,08)	91,95	13.925.241.146,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.679.921.976,44	2.600.602.857,00	(79.319.119,44)	97,04	2.479.439.390,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.931.576.318,32	1.843.416.068,00	(88.160.250,32)	95,44	2.044.205.359,00
24	Inspektorat	7.553.300.805,08	7.139.193.277,00	(414.107.528,08)	94,52	8.147.335.780,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	6.645.091.957,56	5.797.709.059,00	(847.382.898,56)	87,25	6.448.656.114,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	107.029.295.515,88	103.483.759.237,00	(3.545.536.278,88)	96,69	107.947.183.308,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	4.979.994.402,74	4.728.226.461,00	(251.767.941,74)	94,94	5.734.600.821,00
28	Kantor Kesbangpol	18.009.921.267,06	17.896.832.522,33	(113.088.744,73)	99,37	11.167.106.122,00
JUMLAH		**675.857.149.536,00**	**648.100.984.541,33**	**(27.756.164.994,67)**	**95,89**	**619.164.014.291,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja paling tinggi pada Kantor Kesbangpol sebesar Rp17.896.832.522,33 dari anggaran sebesar Rp18.009.921.267,06 atau sebesar 99.37%; Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp152.838.813.891,00 dari anggaran sebesar Rp154.317.598.652,34 atau sebesar 99,04% Adapun realisasi belanja paling rendah pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp5.797.709.059,00 dari target anggaran sebesar Rp6.645.091.957,56 atau sebesar 87,25%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah SKPD sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam Tahun 2024 entitas pengelola anggaran Pemerintah Kota Pariaman terdiri dua puluh delapan unit organisasi, yaitu:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
5) Kantor Kesbangpol;
6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8) Dinas Sosial;
9) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12) Dinas Perhubungan;
13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
14) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
15) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
17) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
18) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan;
19) Sekretariat Daerah;
20) Sekretariat DPRD;
21) Kecamatan Pariaman Utara;
22) Kecamatan Pariaman Tengah;

23) Kecamatan Pariaman Selatan;
24) Kecamatan Pariaman Timur;
25) Inspektorat;
26) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
27) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
28) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo akun-akun Tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan kebijakan akuntansi melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Akun Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek Pemerintah Kota pariaman yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah dibagi menjadi dua berdasarkan unit pengelolaan kas, antara lain yaitu:

1) Kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD);
2) Kas dan setara kas yang dikelola Pemerintah Kota Pariaman (SKPD) dan BLUD; dan
3) Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD.

Kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri atas:

4) Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan sub Rekening Kas Umum Daerah (sub RKUD) di Bank Umum;
5) Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Kota Pariaman Lainnya di Bank Umum;
6) Kas pada Rekening Bank Persepsi PBB dan BPHTB dan Bank Operasional Gaji yang dikelola Kuasa BUD; dan
7) Rekening khusus (special account) Pemerintah Kota Pariaman yaitu rekening yang dibuka oleh Pemerintah Kota Pariaman selaku BUD pada Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dalam/luar negeri.

Kas dan setara kas yang dikelola Pemerintah Kota Pariaman (SKPD) dan BLUD terdiri dari:

8) Kas di Bendahara Penerimaan;
9) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
10) Kas pada BLUD.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas ada SKPD selain dari Kas di Bendahara Pegeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLUD, terdiri dari:

11) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
12) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan; dan
13) Kas Lainnya dari Hibah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo uang daerah. Penerimaan kas melalui BUD dipengaruhi oleh:

1) Penerimaan Pendapatan;
2) Penerimaan Pembiayaan; dan
3) Penerimaan Kas Lainnya.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi kas daerah. Pengeluaran kas melalui BUD dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/ transitoris.

a. Pengakuan

Pengakuan Kas dan Setara Kas, diakui pada saat:

1) Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
2) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Pemerintah Kota Pariaman.

Pengakuan Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui BUD, diakui pada saat:

1) Penerimaan Kas melalui BUD diakui pada saat diterima di rekening milik BUD. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUD diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUD;
2) Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui rekening Pemerintah Kota Pariaman/(SKPD dan/atau BLUD);
3) Penerimaan kas melalui rekening SKPD dan/atau BLUD terkait diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas SKPD dan/atau BLUD; dan
4) Pengeluaran kas melalui rekening SKPD dan/atau BLUD diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas SKPD dan/atau BLUD

b. Pengukuran

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.
2) Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

c. Pengungkapan

Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah mengungkapkan:

1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
3) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
4) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
5) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
6) Selisih kas, bila ada; dan
7) Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka.

d. Penyajian

1) Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
2) Transaksi kas dan setara kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi oleh KPPN dan Satuan Kerja SKPD dan/atau BLUD. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman (LKPD) sesuai dengan aktivitasnya, Laporan Arus Kas (LAK) disajikan secara khusus pada Kebijakan Pelaporan Keuangan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/ dicairkan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
3) Berisiko rendah

Jenis investasi jangka pendek antara lain:

1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
2) Surat Utang Daerah (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
4) Reksa dana.

a. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila dalam pelepasan/ penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

b. Pengukuran

1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

c. Pengungkapan

1) Investasi jangka pendek diungkapkan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan/atau BLUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
2) Pada LAK, investasi jangka pendek diungkapkan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.
6) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek.

d. **Penyajian**

7) Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar pada dokumen di neraca.

1) Hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
2) Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan/atau BLUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA.
3) Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
4) Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam Laporan Arus Kas (LAK).
5) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Piutang

Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) komponen akun, yaitu

1) Piutang Jangka Pendek; dan

2) Piutang Jangka Panjang.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Pariaman dan/atau hak Pemerintah Kota Pariaman yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis-jenis piutang antara lain:

1) Piutang Pajak Daerah;
2) Piutang Restribusi Daerah;
3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah;
5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
6) Piutang Transfer Antar Daerah;
7) Piutang Lainnya; dan
8) Penyisihan Piutang

Yang termasuk dalam aktivitas piutang adalah:

1) Piutang Pajak
2) Piutang Bukan Pajak
    a) Piutang Retribusi daerah
    b) Piutang dari Pendapatan Laba BUMD
    c) Piutang dari Pendapatan PDBP Lainnya
3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
4) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)
5) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
6) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja
7) Piutang BLUD
8) Piutang Transfer ke Daerah

a. Pengakuan

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar

pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

1) Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria:
   a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
   b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan Piutang Pajak ditetapkan dan diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBBP2);
   f) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STP PBBP2);
   g) Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SKP PBBP2).
2) Piutang pajak diakui pada diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan. Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan.
3) Klaim/hak tersebut timbul saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan atau terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
4) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b) jumlah piutang dapat diukur.
5) Untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun.
6) Untuk Piutang transfer antar daerah, piutang dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
7) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
8) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.

2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
3) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan kualitas
   a) Piutang Lancar;
   b) Piutang Kurang Lancar;
   c) Piutang Diragukan;
   d) Piutang Macet.
7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
   a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
   b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
   c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun.
   d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun dan/atau usaha wajib pajak sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.
8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:
   a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 bulan.
   b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.
   c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun dan/atau usaha wajib retribusi sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.

9) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.

10) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
   a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 tahun.
   b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d. 3 tahun.
   c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d. 5 tahun.
   d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun dan/atau usaha wajib bayar sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.

11) Dalam kondisi kekeliruan dalam pencatatan piutang, nilai piutang tersebut disisihkan 100% dari nilai piutang, dengan pertimbangan meskipun belum dilakukan koreksi penghapusan namun secara substansi piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi.

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	(%) Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
1	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
3	Diragukan	50 %	50 %		50 %
4	Macet	100 %	100 %		100 %

2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
   a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
   b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
   a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);

b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
   a) 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
   b) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
6) Perhitungan penyisihan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan.
7) Apabila masih terdapat saldo piutang pada akhir tahun, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
8) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Penyajian

1) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis- jenis piutang.
2) Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat se bagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.
3) Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.
4)

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Pengakuan

1) Persediaan diakui pada saat:
   a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
   b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
2) Pengakuan persediaan setelah dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).
   a) Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
   b) Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
   c) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
   d) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi:
   a) harga pembelian;
   b) biaya pengangkutan;
   c) biaya penanganan;
   d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

   Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
   a) potongan harga,

b) rabat, dan lainnya yang serupa.

2) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
3) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
4) Dalam pengukuran rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang Persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual /diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda.
5) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

c. Pengungkapan

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu

1) Investasi Permanen

   Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus- menerus/ berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

   Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa:

   a) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan badan lainnya dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal berupa aset/barang yang dinilai dengan uang.

b) Pemberian pinjaman daerah merupakan Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/ berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

a) Investasi kepada BUMN, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk tidak dimiliki Pemerintah Kota Pariaman secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian nasional.
b) Investasi kepada BUMD, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk tidak dimiliki Pemerintah Kota Pariaman secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian daerah.
c) Investasi dalam obligasi, merupakan atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo.
d) Investasi dalam proyek pembangunan, merupakan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
e) Dana bergulir, dana yang disisihkan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

a. Pengakuan

1) Pengeluaran Kas, Aset dan penerimaan Hibah

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/ penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2) Pelepasan/ Penjualan Investasi

a) Pada saat pelepasan/ penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi.
b) Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.
c) Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.
d) Hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend) tidak diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun LO, tetapi diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Pengukuran

Pengukuran dan penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan mempergunakan 3 (tiga) metode, sebagai berikut:

1) Metode Biaya
   Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
   Metode biaya diterapkan untuk:
   a) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.
      1. Pendapatan/penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
      2. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kota Pariaman dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
   b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
   c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR).
   d) Biaya perolehan yang sebagaimana dimaksud pada angka c) adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Metode Ekuitas
   a) Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
   b) Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
   c) Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Kota Pariaman
   d) Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Operasional (LO) dan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Kota Pariaman
   e) Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.
   f) Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
   g) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul

akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dan terapkan untuk:

a) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan BUMD.
b) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

c. Penyajian

1) Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.

2) Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.
3) Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Kota Pariaman atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut ini Jenis Akun Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Uraian Akun
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung dan Bangunan
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	Aset Tetap Lainnya
6	Konstruksi dalam Pengerjaan
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

a. Pengakuan

1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Pengukuran Aset Tetap diklasifikasikan denga tahapan sebagai berikut:

1) Penilaian Awal Aset Tetap
   a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
   b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
   c) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pariaman oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pariaman melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
   d) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian

kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

e) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2) Komponen Biaya

a) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1. biaya persiapan tempat;
   2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
   3. biaya pemasangan (installation cost);
   4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
   5. biaya konstruksi.

b) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

c) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

d) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

e) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

f) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

h) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

b) Dalam PSAP Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

4) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5) Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

6) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
c) Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

7) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dlluar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan Nilai Satuan Minimun Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization Threashold).

Nilai Satuan Minimun Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threashold*) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimun Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

a. peralatan dan mesin sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) keatas;
b. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,00 keatas; dan
c. Perolehan aset tetap kontruksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) keatas.

8) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

9) Penyusutan

a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
d) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
e) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
   a. Metode garis lurus (straight line method);
   b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
   c. Metode unit produksi (unit of production method).
f) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

10) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

11) Akuntansi Tanah
a) Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.
b) Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan ini.

12) Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)
Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset

infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

c. Penghentian dan Pelepasan (Retirement Disposal)

1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengungkapan

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a) Penambahan;
   b) Pelepasan;
   c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d) Mutasi aset tetap lainnya.
3) Informasi penyusutan, meliputi:
   a) Nilai penyusutan;
   b) Metode penyusutan yang digunakan;
   c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
   a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
   b) Tanggal efektif penilaian kembali;
   c) Jika ada, nama penilai independen;
   d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
   e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode

waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

a. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

c. Biaya Konstruksi

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1) Asuransi;
2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap

pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf diatas. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. -

d. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.

3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4) Uang muka kerja yang diberikan;
5) Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pariaman selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya berdasarkan jenis dan objek, antara lain:

1) Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari :
   a) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA); dan
   b) Tagihan Ganti Rugi (TGR).
2) Kemitraan dengan Fihak Ketiga,
3) Aset Tak Burwujud (ATB),
4) Aset Lain-Lain.

Tagihan jangka panjang adalah merupakan aset lainnya untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Pariaman secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Kemitraan dengan Fihak Ketiga, yaitu:

1) Aset Lainnya kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah Kota Pariaman dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
2) Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
3) Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

5) Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
   a) disediakan oleh mitra yang:
      (1) dibangun, dikembangkan, atau peroleh dari pihak lain; atau
      (2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
   b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
      (1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
      (2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

   Aset Konsesi Jasa dalam hal ini timbul dari perjanjian konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
   a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;
   b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

   Lebih lanjut, perjanjian konsesi jasa dimaksud mempunyai karakteristik umum sebagai berikut:

   a) Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
   b) Mitra bertanggungjawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;
   c) Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siap jasa harus diberikan, dan berapa harga/ tarifnya;
   d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikir atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayai, dan
   e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanismea penyesuaian tarif dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

   Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :

   a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
   b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset diakhir masa konsesi.

   Pemberi konsesi dalam hal ini adalah entitas akuntansi/ pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra dalam hal ini adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

6) Masa kerjasama, kemitraan, atau konsesi adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) masih terikat dengan perjanjian kemitraan.

Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Dapat diidentifikasi;
2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh pemerintah;
3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh pemerintah;
4) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-lain adalah aset rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dan merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, tagihan jangka panjang dan kemitraan dengan pihak ketiga.

a. Pengakuan

1) Pengakuan Tagihan Jangka Panjang

Secara umum aset lainnya sebagai tagihan jangka panjang dapat diakui pada saat:

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Pariaman dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
c) Diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
d) Berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Setelah adanya aktivitas dan transaksi kerjasama sewa kedua belah pihak yang mempunyai kekutan hukum yang sah.
b) Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS:
   (1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
   (2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
   (3) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
   (4) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.
c) Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG:

(1) BMD lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

d) Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa:
(1) Aset kemitraan diakui dan timbul dari pola perjanjian konsesi jasa pada saat diserahkan sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dimana komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya hanya yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi.
(2) Untuk komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra, belum dilakukan pengakuan asetnya di Neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pengakuan Aset Tak Berwujud

ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
a) Dapat diidentifikasi;
b) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
c) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
d) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

a) Tahap penelitian/ riset; dan
b) Tahap pengembangan.

Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

a) Kegiatan/ aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; dan/ atau
d) Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
d) Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut; dan
f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

4) Pengakuan Aset Lain-lain
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pariaman dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b. Pengukuran

1) Pengukuran Tagihan Jangka Panjang

a) TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
c) TGKD dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah (KUD).

2) Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS
   1. Barang Milik Daerah (BMD) lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji/guna.
   2. Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai CaLK.
b) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG
   1. BMD lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji/guna.
   2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya atau

penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang dipartisipasikan sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.

c) Pengukuran aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa Komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi, diukur sebesar nilai awal perolehan atau tercatat perolehan asetnya di BMD lain.

3) Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

a) Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran ATB yang diperoleh pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar- benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.

4) Pengukuran Aset Lain-Lain

a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
b) Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
c) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

c. Pengungkapan

1) Pengungkapan Tagihan Jangka Panjang

Pengungkapan aset lainnya (Tagihan Jangka Panjang) dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Rincian aset lainnya (TPA dan TKPD);
b) Pengungkapan TPA pada kontrak/berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai/pejabat lain disetor ke KUD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
c) Surat Tuntutan Perbendaharaan dengan penetapan nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke KUD;
d) Pengungkapan dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai/pejabat lain yang bersangkutan ke KUD; dan
e) Informasi dan dokumen penting lainnya.

2) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos aset lainnya, termasuk dalam hal ini aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa yang komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi.
b) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan aset kemitraan, antara lain:
   (1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan.
   (2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang)

(3) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS sehubungan:
   (a) Pengungkapan BMD lain yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS;
   (b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BGS;
   (c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar / disetor oleh mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah;
   (d) Pengungkapan hak untuk menenma aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra di akhir masa kerjasama;
   (e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BGS;
   (f) Apabila ada, pengungkapan yang mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama.

(4) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG sehubungan:
   (a) Pengungkapan BMD yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG;
   (b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BSG;
   (c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/ disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Umum Daerah
   (d) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BSG.

(5) Hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan:
   (a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
   (b) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
      1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
      2. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
      3. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
      4. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
      5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
      6. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
      7. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

(c) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

3) Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Penyajian ATB dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

a) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
c) Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
f) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
g) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
h) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan
i) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

4) Pengungkapan Aset Lain-Lain

a) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
b) Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

d. Penghentian, Pelepasan dan Akumulasi Amortisasi ATB

1) Penghentian dan Pelepasan ATB

Aset Tak Berwujud (ATB) diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Jika ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Jika ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah- tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

Penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional (LO).

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas (LAK).

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)
   a) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise.
   b) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta.
   c) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten.
   d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- software.

   Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian.

   Umur ekonomis untuk ATB-Kajian dengan umur manfaat terbatas dibagi menjadi:

Kelompok ATB	Masa Manfaat	Tarif
Soft ware	4 tahun	25,00%
License dan Franchice	8 tahun	12,50%
Hak Cipta, Paten dan hak lainnya	16 tahun	6,25%
Hasil Kajian/ Pengembangan	20 tahun	5,00%

e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

   Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.

2) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
   Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.

3) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna
   Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).

4) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -Kerjasama

Penyediaan Infrastruktur Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi properti Investasi

Properti adalah harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/ atau bangunan yang dimaksudkan. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

a. Pengakuan

Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMD properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BMD properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis oleh pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedomenan serta melakukan pengelolaan BMD.
   BMD properti yang digunakan menghasilkan pendapatan sewa dikecualikan untuk diakui sebagai properti investasi sesuai Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD atau dokumen yang dipersamakan, apabila:
   a) digunakan sendiri dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
   b) digunakan untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman;
   c) digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman;
   d) digunakan sendiri tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain;
   e) digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMD-nya tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
      (1) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau

(2) intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

b. Pengukuran

Terhadap BMD properti yang diperoleh sebelum tahun pelaporan dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMD properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/ atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Perolehan awal BMD properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di tahun berjalan dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

1) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMD properti, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.
2) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
3) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
4) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMD sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

Hasil reklasifikasi BMD properti dan/ atau perolehan awal baru BMD properti yang memenuhi karakteristik properti investasi, disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

c. Properti Investasi Setelah Perolehan Awal

BMD properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMD properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Penilaian kembali atau revaluasi BMD properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMD secara nasional. Pengeluaran biaya untuk penambahan BMD properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMD diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMD sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Perubahan intensi penggunaan BMD properti oleh Satker dari waktu ke waktu untuk ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya · jika terdapat perubahan penggunaannya yang ditujukkan dengan:

1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Satker, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi aset tetap;
2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi persediaan;
3) Berakhirnya pemakaian BMD properti oleh Satker, dialihfungsikan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau
4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Jika Satker memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Satker tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan.

Jika Satker mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sehagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sehagai properti investasi. Nilai yang digunakan pada saat peruhahan intensi penggunaan BMD properti adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersehut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pelepasan properti Investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi ohjek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksirannya.

d. Pengungkapan

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4) Jumlah tercatat hruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
    a) Penamhahan, pengungkapan terpisah untuk penamhahan yang dihasilkan dari penggahungan dan penamhahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sehagai aset;
    b) Penamhahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
    c) Pelepasan;
    d) Alih fungsi ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
    e) perubahan lain.
6) Jumlah yang diakui sehubungan:
    a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timhbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan;

c) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti invetasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.

7) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Akun Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, dimana kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena:

1) penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan
2) kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Jenis Kewajiban Jangka Pendek yaitu :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2) Utang Bunga
3) Utang Pinjaman Jangka Pendek
4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BLUJP)
5) Pendapatan Diterima Dimuka
6) Utang Belanja
7) Utang Jangka Pendek Lainnya

Jenis Kewajiban Jangka Panjang, yaitu:

1) Utang kepada Pemerintah Pusat
2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
4) Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
5) Premium (Diskonto) Obligasi

Karakteristik Umum Kewajiban, yaitu:

1) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.
3) Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
4) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang- undangan.

Klasifikasi Aktivitas Kewajiban:

1) Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
2) Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
3) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
6) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7) Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu

bagian dari pendanaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

8) Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
   a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
   b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pelaksanaan Transaksi Kewajiban

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   a) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
   b) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2) Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
   a) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
   b) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
   c) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
3) Utang Bunga (*Account Interest*)
   a) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
   b) Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang

Daerah (SUN) dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pariaman (provinsi, kota) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

4) Utang Transfer
   a) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
   b) Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   a) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
   b) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6) Utang/Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
   a) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
   b) Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
7) Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Trade Debt*)
   a) Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
   b) Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
   c) Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
   d) Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat

diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

e) Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

8) Perubahan Valuta Asing
   a) Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
   b) Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
   c) Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
   d) Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
   e) Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.
   f) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

9) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
   a) Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
   b) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
   c) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10) Tunggakan

a) Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
b) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
c) Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
d) Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

11) Restrukturisasi Utang
a) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
b) Restrukturisasi dapat berupa:
(1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
(2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
(a) Perubahan jadwal pembayaran,
(b) Penambahan masa tenggang, atau
(c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
(3) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
(4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
(5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus

mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

(6) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

(7) Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

12) Penghapusan Utang

a) Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

b) Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

c) Lainnya penghapusan piutang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

13) Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah Daerah

a) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

(1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;

(2) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;

(3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,

(4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.

(5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

b) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
c) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan di bawah.
d) Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional untuk menentukan hal tersebut.
e) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

1) Pengakuan dan Pengukuran Jenis Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua, iuran lain dan utang pajak pusat yang akan diserahkan ke lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain dan lembaga lain terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.
(1) Pengakuan Utang PFK, diakui pada saat:
(a) Dilakukan pemotongan oleh BUD atau diterima oleh BUD untuk PFK yang disetorkan oleh BUD; atau

(b) Akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada Pihak Lain dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicatat adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan kewajiban pemerintah daerah membayar kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, LKB, LKBB, masyarakat dan BLUD.

(1) Pengakuan Utang bunga, diakui pada saat:

(a) Jatuh tempo kewajiban bayar bunga pinjaman, yang disetor oleh BUD.

(b) Akhir periode laporan, utang bunga yang dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah utang bunga yang masih harus dibayar.

(2) Pengukuran

Nilai jumlah yang dicatat dan seharusnya dibayar sebesar utang bunga yang sudah dicadangkan/ dikeluarkan tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.

c) Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah membayar angsuran pokok atau pelunasan pinjaman kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, LKB, LKBB, masyarakat dan BLUD.

(1) Pengakuan

Utang Pinjaman Jangka Pendek, diakui pada saat:

(a) Jatuh tempo kewajiban bayar pokok/pelunasan pinjaman, yang disetor oleh BUD; atau

(b) Akhir periode laporan, utang pokok/ pelunasan pinjaman yang dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah utang pinjaman yang masih harus dibayar.

(2) Pengukuran

Nilai jumlah yang dicatat dan seharusnya dibayar sebesar utang pokok/ pelunasan pinjaman yang sudah dicadangkan/ dikeluarkan tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

(1) Pengakuan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat: Melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

(2) Pengukuran

(a) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(b) Bagian Lancar Surat Berharga Negara (SBN) dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi, dan disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SBN tersebut mencerminkan nilai yang masih terutang pada tanggal pelaporan dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(c) Premium/ diskon diamortisasi sepanjang masa berlakunya SBN. Apabila SBN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

(1) Pengakuan

Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat:

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

f) Utang Belanja

Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(1) Pengakuan

Utang Belanja, diakui pada saat:

Diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

g) Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan/ dibayarkan kepada yang berhak pada akhir tahun.

(1) Pengakuan

Utang jangka pendek lainnya, diakui pada saat:

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak atas kelebihan pembayaran PAD, transfer dan hibah.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

2) Pengakuan dan Pengukuran Jenis Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada pemerintah pusat merupakan penerusan pemerintah pusat bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

(1) Pengakuan Utang kepada Pemerintah Pusat, diakui pada saat:

(a) sejak ada perjanjian utang/pinjaman antara pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat.
(b) Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang/pinjaman dan/atau pelunasan utang.

(2) Pengukuran

(a) Utang dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
(b) Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pemerintah pusat dan/ atau yang berkepentingan.
(c) Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang/kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan.
(d) Melunasi utang/pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.

b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada LKB merupakan pinjaman pemerintah Kota Pariaman kepada Lembaga Keuangan Bank dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan kepada LKB.

(1) Pengakuan

Utang kepada LKB, diakui pada saat:

(a) sejak ada perjanjian utang pinjaman antara pemerintah Kota Pariaman dengan pihak LKB.
(b) Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang pinjaman dan/atau pelunasan utang.

(2) Pengukuran

(a) Utang pinjaman dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
(b) Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pihak kreditur/LKB yang berkepentingan.
(c) Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang pokok pinjaman dan disajikan dalam laporan keuangan.
(d) Melunasi utang/pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.

c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Utang kepada LKBB merupakan pinjaman pemerintah Kota Pariaman kepada LKBB baik berupa barang atau uang yang berasal pinjaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan kepada pihak LKBB.

(1) Pengakuan

Utang kepada LKBB, diakui pada saat:

(a) Sejak ada perjanjian utang pinjaman antara pemerintah Kota Paiaman dengan pihak LKBB.
(b) Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang pinjaman dan/atau pelunasan utang.

(2) Pengukuran

(a) Utang dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
(b) Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pihak kreditur LKBB atau yang berkepentingan.
(c) Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang/kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan.
(d) Melunasi utang pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.

d) Utang kepada Masyarakat – Obligasi Daerah

Utang kepada Masyarakat –Obligasi Daerah adalah jenis surat utang/ perjanjian tertulis yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (fixed rate) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate). Pengakuan dan pengukuran obligasi daerah, diakui pada saat:

(1) Pengakuan

Utang kepada Masyarakat-Obligasi Daerah, diakui pada saat:

(a) Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi awal transaksi penjualan.
(b) Entitas mengakui investasi obligasi sebagai aset keuangan.
(c) Penentuan harga investasi obligasi oleh tingkat bunga.

(d) Penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. e) Pelunasan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo.
(e) Pada saat terjadinya pertukaran obligasi dengan surat berharga lain.

(2) Pengukuran
(a) Pengukuran investasi utang obligasi secara umum yaitu : biaya yang diamortisasi dan fair value.
(b) Pengukuran Awal Utang Obligasi, diukur aset keuangan dengan nilai wajar, nilai obligasi hingga jatuh tempo, dapat diperluabelikan dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi.
(c) Pengukuran setelah pengakuan awal yaitu diukur aset keuangan dengan nilai wajar, nilai obligasi hingga jatuh tempo, dapat diperluabelikan dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi.
(d) Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan dimiliki sampai jatuh tempo, diperdagangkan dan tersedianya untuk dijual dengan bunga pada saat dihasilkan (keuntungan/ kerugian dari penjualan).

e) Premium (Diskonto) Obligasi
(1) Pengakuan Diskonto Obligasi, diakui pada saat:
(a) Terjadi awal transaksi pembelian/pembelian obligasi.
(b) Ditetapkan dengan surat utang.

(2) Pengukuran
(a) Utang obligasi harus diamortisasi selama umur obligasi.
(b) Beban bunga obligasi dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
(c) Imbalan bunga bersifat tetap (fixed rate) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate).

b. Pengungkapan

1) Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek

Utang pemerintah Kota Pariaman harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah Kota Pariaman berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
(1) Pengurangan pinjaman;
(2) Modifikasi persyaratan utang;
(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
(6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
g) Biaya pinjaman:
   (1) Perlakuan biaya pinjaman;
   (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

2) Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang
   a) Utang jangka panjang pemerintah Kota Pariaman harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang akuntabel. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:
      (1) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
      (2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
      (3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.
   b) Pengungkapan Utang Jangka Panjang dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi, dengan pengungkapan:
      (1) Nilai kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG dan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di neraca pada pos utang jangka panjang lainnya. Penyajian dan pengakuan di Neraca terhadap kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa terkait dengan komponen aset konsesi jasanya berasal atau disediakan oleh mitra, dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa.
      (2) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG
      (3) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa dan penjelasan skema kompensasi yang diberikan pemberi konsesi kepada mitra untuk masing-masing:
         (a) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan bagian dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra, baik

pembayaran untuk bagian komponen aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra maupun pembayaran untuk bagian jasa layanan publik.

(b) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra, yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan dan/ atau ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

c. Perlakuan Khusus

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang berbeda- beda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

1) Utang Transfer ke Daerah
   Utang transfer timbul akibat beban transfer ke Pemerintah Kota Pariaman yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan
   a) Pengakuan
      Utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing- masing Pemerintah Kota Pariaman penerima, yang berupa Peraturan Menteri Keuangan, pemberitahuan dari PA/KPA penyalur transfer ke Pemerintah Daerah, dan/ atau penyajian oleh PA/KPA pada laporan keuangan yang telah diaudit.
   b) Penyajian
      PA/KPA menyajikan utang transfer diestimasi dalam hal:
      (1) Nominal utang transfer secara rinci untuk masing-masing Pemda tidak dapat dipastikan; dan
      (2) Nominal utang transfer belum ditetapkan dalam PMK mengenai kurang bayar atau salur dana transfer.
2) Utang Bunga
   Utang bunga timbul akibat:
   a) Perhitungan akuntansi kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan; dan
   b) Transaksi bunga diterima di muka dari investor atas praktek penerbitan Surat Berharga Daerah (SBN).

   Utang bunga disajikan pada tanggal pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
3) Utang kepada Pihak Ketiga
   Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga

adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

a) Pengakuan

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

(1) terdapat kekurangan penenmaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau

(2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk. Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

b) Pengukuran

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

(1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau

(2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) Utang Pembelian Cicilan

Utang Pembelian Cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan membayar secara angsuran. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat- syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Transaksi pembelian secara angsuran/ cicilan memiliki dua varian utama :

a) perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu.

b) perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kesamaan pada kedua varian tersebut adalah bahwa tingkat bunga dikenakan terhadap sisa pokok utang yang belum dibayar.

Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah secara kredit yang melampaui tahun anggaran lebih rumit daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenakan bunga eksplisit atau tersamar, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada besaran harga pembelian, dengan pengakuan dan pengukuran:

a) Pengakuan
Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat para pihak secara legal, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

b) Pengukuran
Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Dalam hal transaksi dalam mata uang asing maka kewajiban dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

5) Kewajiban Kemitraan

Kewajiban kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) pada pola kerjasama pemanfaatan Bangun Serah Guna (BSG) dan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan pengakuan aset kemitraan berupa komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra.

Pada kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa belum dilakukan pengakuan kewajibannya di Neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa, dengan:

a) Pengakuan
Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

b) Pengukuran
Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG pada awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan nilainya sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra.

6) Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Dalam hal terjadi tuntutan hukum pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan oleh BPKPD Kota Pariaman. Setiap SKPD Kota Pariaman yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi dan melaporkan kepada BPKPD. Selain menyampaikan data tuntutan hukum, setiap SKPD juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah Kota Pariaman dalam LKPD dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

a) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah Kota Pariaman dan telah dianggarkan dalam DIPA SKPD terkait, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKPD;
b) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dianggarkan dalam DIPA SKPD terkait, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam CaLK pada LKPD secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
c) Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang inkracht atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah Kota Pariaman, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK LKPD.

7) Kondisi-kondisi Tertentu

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi- kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (carrying amount) harus diungkapkan pada CaLK.

b) Tunggakan Utang

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

c) Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok

utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persayaratan baru. Hal tersebut `harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

d) Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

(1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
(2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

8) Kewajiban atas Kebijakan Pemerintah

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada timbulnya potensi beban yang wajib ditunaikan maka untuk terus menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, perlu diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

9) Kewajiban Diestimasi

Jika terjadi kondisi yang diperlukan, kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

a) Pengakuan

Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan azas konservatif harus dilaporkan.

b) Pengukuran

Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal.

Contoh Utang Diestimasi misalnya Utang Transfer Diestimasi. Utang Transfer yang diestimasi berkaitan dengan bagi hasil pendapatan kepada Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi karena jenis pendapatan yang harus dibagihasilkan tersebut sudah diketahui tetapi entitas yang berhak menerima belum dapat diketahui dengan pasti hingga tanggal laporan keuangan.

10) Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu

peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

a) Pengakuan
Kewajiban kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:
(1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
(2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal.

b) Pengukuran
Kewajiban kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Maka untuk memperoleh nilai yang handal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

c) Pengungkapan
Kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah Kota Pariaman, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:
(1) Karakteristik kewajiban kontijensi;
(2) Estimasi dari dampak financial yang diukur;
(3) Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
(4) Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Akun Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas pada tanggal pelaporan.
2) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi ekuitas lainnya.
3) Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar SKPD.

b. Penilaian

1) Pemerintah Kota Pariaman mencatat ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Pariaman setelah tanggal perolehan.

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
4) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran.
5) Ekuitas Dana Lancar digunakan untuk mencatat selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari:
   a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
   b) Cadangan Piutang;
   c) Cadangan Persediaan;
   d) Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
6) Ekuitas Dana Investasi digunakan untuk mencatat kekayaan Pemerintah Kota Pariaman yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, terdiri dari :
   a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
   b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
   c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan);
   d) Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.
7) Ekuitas Dana Cadangan digunakan untuk mencatat kekayaan Pemerintah Kota Pariaman yang dicadangkan untuk tujuan yang telah diperuntukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan, Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

c. Pengungkapan

1) Pengungkapan Koreksi-Koreksi atas LPE

   a) Ekuitas diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas.
   b) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
2) Transaksi Antar Entitas (TAE)
   a) Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/ entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah.
   b) Pada level konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu SKPD/BUD, antar satker lintas SKPD/BUD, antara satker SKPD dengan BUD, dan antara SKPD dengan Kuasa BUD.
   c) Contoh Transaksi Antar Entitas TAE):
      TAE muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu SKPD/ BLUD ke satu atau beberapa SKPD/ BLUD yang lain dalam lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi

dalam satu entitas pelaporan SKPD/ BLUD/BUD atau antar entitas akuntansi lintas entitas pelaporan SKPD/BLUD/BUD. Atas transfer masuk/ transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila transfer masuk/transfer keluar terjadi antar satker/ entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan SKPD/BLUD/SKPKD-BUN, maka di level LK.SKPD/BLUD/ LK.SKPKD Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

(2) Apabila transfer masuk/keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi lintas entitas pelaporan SKPD/BLUD dan SKPKD/BUD, maka di level LKPD Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

3) Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan hibah langsung adalah transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUD pengelola hibah. Berdasarkan dokumen pengesahan atas pendapatan hibah langsung, satker meng-kredit ekuitas dari pengesahan hibah langsung dan BUN pengelola hibah men-debet ekuitas dari pengesahan hibah langsung. Pada saat penyusunan LKPD ekuitas dari pengesahan hibah langsung yang disajikan oleh SKPD/BLUD dan SKPKD/BUD akan saling mengeliminasi.

4) Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
Pada saat Satker melakukan transaksi dengan Kuasa BUD, terbentuk jurnal antar entitas (DDEL/DKEL). Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi antara Satker yang mempunyai kewenangan melakukan belanja dan menatausahakan pendapatan dengan Kuasa BUD yang mempunyai kewenangan mengelola kas (membayar tagihan dan menerima setoran). Pada saat penyajian laporan keuangan, Satker maupun Kuasa BUD menyajikan akun DDEL/DKEL sebagai pos Transaksi Antar Entitas (TAE) pada LPE. Pada saat konsolidasi LKPD, TAE pada LPE SKPD/BLUD dan TAE pada Kuasa BUD akan saling mengeliminasi.

d. Perlakuan Khusus

1) Transaksi Antar Entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan Kuasa BUD atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP /TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus.

2) Penarikan dan pengembalian dana UP/TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP/TUP oleh Satker (SP2D) UP/TUP dicatat oleh Kuasa BUD sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUD juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN).

3) Sebaliknya pada saat penerimaan pengembalian dana UP/TUP, Kuasa BUD mencatat penambahan kas dan ekuitas (DKEL). Kuasa BUN juga mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas.

4) Sedangkan Satker mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN.

5) Pada saat konsolidasian, LKPD menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh SKPD/ BLUD dengan pasangan ekuitas. Kas di Bendahara

Pengeluaran yang disajikan oleh Kuasa BUD dieliminasi dengan saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan oleh SKPD/ BLUD.

e. Penyajian

Ekuitas disajikan pada:

1) Ekuitas disajikan dalam Neraca.
2) Penyajian Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.
3) Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO/LRA

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pariaman yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Kota Pariaman untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO, digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pendapatan LO dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b) Pendapatan Transfer
c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Aktivitas Transaksi Penerimaan Pendapatan-LO.

a) Berdasarkan jenis Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

No	Uraian Akun
1	Pajak Hotel- Losmen
2	Pajak Restoran-Retoran & Sejenisnya

No	Uraian Akun
3	Pajak Hiburan- Pameran
4	Pajak Reklame - Papan/Billboard/Video- tron/Megatron, Reklame kain dan berjalan
5	Pajak Penerangasn Jalan- Dihasilkan sendiri dan sumber lain.
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Sarang Burung Walet
9	Pajak Mineral Bukan Logam, Batuan dan Lainnya
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian hak baru.

b) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

No	Uraian Akun
1	Retibusi Jasa Umum
1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Retribusi Jasa Usaha
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2.3	Retribusi Terminal
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.5	Restribusi Rumah Potong Hewan
2.6	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Restribusi Perizinan Tertentu
3.1	Restribusi Izin Mendirikan Bangunan

c) Selain pendapatan pajak dan pendapatan restribusi daerah, diperoleh juga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain :
   (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD –LKB.
   (2) Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:
      (a) Hasil penjualan Aset Tetap lainnya;
      (b) Jasa giro;
      (c) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah;
      (d) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
      (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
      (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
      (g) Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
      (h) Pendapatan dari pengembalian;

(i) Pendapatan BLUD.

d) Untuk kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, selengkapnya pendapatan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Lampiran Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LO, diatur sebagai berikut:

a) Pendapatan Perpajakan-LO

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui : self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

a) Self Assesment System

Sistem Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/pajak terutang.

b) Official Assesment System

Sistem Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

c) Withholding Tax System

Withholding tax system adalah sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong/memungut, dan menyetorkan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kota Pariaman memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode Self Assessment dan Withholding tax system.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh SKPD terkait.

b) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode Official Assessment.

Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO.Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada

periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan PDBP-LO

a) Pendapatan Restribusi Daerah

Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari kewenangan Pemerintah Kota Pariaman, diakui pada saat:

(1) diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau

(2) diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

Pertimbangan pengakuan pendapatan penzman dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan tersebut dan biaya perizinan yang telah disetor pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon.

Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau matching cost againts revenue).

b) Pendapatan PDBP-LO layanan

Pendapatan PDBP-LO layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila basil dari transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

(2) Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;

(3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

(4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biayai untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipil/daerah dan lain-lain). Apabila pembayaran dilakukan untuk layanan yang meliputi beberapa periode maka pendapatannya diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan.

c) Pendapatan PDBP-LO Eksploitasi/Pemanfataan Sumber Daya Alam (SDA) Pendapatan-LO yang diperoleh dari eksploitasi/pemanfaatan Sumber Daya Alam dibedakan ke dalam empat kelompok yaitu:

(1) berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam;
(2) berdasar volume/unit pengambilan;
(3) berdasarkan harga jual; dan
(4) berdasarkan bagi hasil.

Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizinan.

d) Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah
Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

e) Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah
Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.

f) Pendapatan-LO lainnya
(1) Pendapatan PDBP-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas;
(2) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas;
(3) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas;
(4) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
(5) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkhract) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan; dan
(6) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

c) Pengakuan Pendapatan Hibah-LO
a) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat:
(1) kas diterima di RKUD,
(2) tanggal penarikan (valuta) yang tercantum dalam NoD, atau
(3) pengesahan oleh Kuasa BUD.
b) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa dan/atau surat berharga diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh Kuasa BUD.

b. Pengukuran

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

a) Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment system dan Withholding tax system.

Sementara itu untuk official assessment, pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b) Pengukuran Pendapatan PDBP-LO

Pendapatan PDBP-LO diukur melalui beberapa cara:

a) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di Kas Umum Daerah;
b) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan;
c) Tarif PDBP dengan menggunakan formula tertentu. PDBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.

c) Pengukuran Pendapatan Hibah-LO

Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

a) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar:
   (1) Nilai nominal hibah yang diterima di RKUD atau Reksus;
   (2) Nilai nominal yang tercantum dalam NoD; atau
   (3) Nilai nominal yang tercantum dalam SP2HL/SPHL yang disahkan oleh Kuasa BUD.
b) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST;
c) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut:
   (1) Menurut biayanya;
   (2) Menurut harga pasar; atau
   (3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.

   Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengungkapan

a) Entitas pemerintah daerah dapat mengungkapkan klasifikasi menurut sumber pendapatan-LO. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Kota Pariaman dikelompokkan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, disamping menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objeknya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b) Pendapatan-LO diungkapkan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

d. Perlakuan Khusus

a) Koreksi Pendapatan-LO
Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

b) Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas
Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

c) Koreksi atas Pendapatan Pajak-LO yang tidak mempengaruhi kas
Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.

d) Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

Khusus perolehan dari pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah memiliki potensi untuk peningkapatan PAD, namun harus diikuti dengan regulasi Pemerintah Kota Pariaman yang memadai secara aspek yuridisnya. Dengan adanya regulasi baru diharapkan SKPD terkait dapat mengimplementasikan dengan baik dan akuntabel.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pariaman dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b) Pendapatan Transfer; dan
c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Aktivitas Transaksi Penerimaan Pendapatan-LRA

a) Berdasarkan jenis Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

No	Uraian Akun
1	Pajak Hotel- Losmen
2	Pajak Restoran-Retoran & Sejenisnya
3	Pajak Hiburan- Pameran
4	Pajak Reklame - Papan/Billboard/Video- tron/Megatron, Reklame kain dan berjalan
5	Pajak Penerangasn Jalan- Dihasilkan sendiri dan sumber lain.
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Sarang Burung Walet
9	Pajak Mineral Bukan Logam, Batuan dan Lainnya
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian hak baru.

b) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

No	Uraian Akun
1	Retibusi Jasa Umum
1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Retribusi Jasa Usaha
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2.3	Retribusi Terminal
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.5	Restribusi Rumah Potong Hewan
2.6	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Restribusi Perizinan Tertentu
3.1	Restribusi Izin Mendirikan Bangunan

c) Selain pendapatan pajak dan pendapatan restribusi daerah, diperoleh juga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain :
   (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD –LKB.
   (2) Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:
      (a) Hasil penjualan Aset Tetap lainnya;
      (b) Jasa giro;
      (c) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah;
      (d) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
      (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
      (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(g) Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
(h) Pendapatan dari pengembalian;
(i) Pendapatan BLUD.

d) Untuk kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, selengkapnya pendapatan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Lampiran Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. Pengakuan

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh Pemerintah Kota Pariaman pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
Pengakuan Pendapatan-LRA, diakui pada saat:

a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima dan disetor pada RKUD.
b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
f) Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan RKUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta pendapatan dana BOS/PSG.

b. Pengukuran

a) Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

c) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
d) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Pengungkapan

a) Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
b) Pendapatan-LRA diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
c) Pendapatan-LRA diungkapkan dan disajikan dalam dua format laporan keuangan LRA dan LAK berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
d) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
   (1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   (2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
   (4) konversi klasifikasi pendapatan dari klasifikasi berdasarkan dokumen anggaran (DPA/Perda APBD) yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
   (5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Perlakuan Khusus

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan-LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan- LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
b) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
c) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
d) Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi

dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:

(1) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
(2) Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.
(3) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Akun Belanja LRA dan Beban-LO

A. Belanja LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi akun belanja dikelompokkan, menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1) Belanja Operasi;
2) Belanja Modal;
3) Belanja Tak Terduga; dan
4) Belanja Transfer

a. Pengakuan

1) Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

2) Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
3) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
4) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
5) Untuk BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Secara umum diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan atas belanja BLUD, dana kapitasi JKN FKTP dan Belanja BOS/PSG.

b. Pengukuran

1) Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran daerah yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
3) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

c. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:
a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
b) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas lnvestasi; dan
d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang dikonversi dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan dalam pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, agar diberikan penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah tersebut secara lengkap dalam CaLK.

d. Perlakuan Khusus

a) Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Kota Pariaman dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
b) Hibah Aset Tetap yang dimiliki pemerintah daerah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Kota Pariaman tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

B. Beban LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban Transfer adalah merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Tak Terduga adalah merupakan beban luar biasa yang terjadi karena akibat yang tidak dapat diprediksi/diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah daerah.

Berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi akun beban dikelompokkan, menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

a) Beban Operasi;
b) Beban Penyusutan dan Amortisasi;
c) Beban Transfer; dan
d) Beban Tak Terduga.

a. Pengakuan

Akun Beban diakui pada saat:

a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
   Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
b) Terjadinya konsumsi aset
   Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
   (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
   (2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
c) Timbulnya kewajiban
   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
   Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kota Pariaman.

b. Pengukuran

a) Beban Pegawai. Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
b) Beban Barang dan Jasa. Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Misalnya beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK.
c) Beban Bunga. Beban bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/ atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.
d) Beban Subsidi. Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
e) Beban Hibah.Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
f) Beban Bantuan Sosial, Beban bantuan sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
g) Beban Penyisihan Piutang. Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing- masing kualitas piutang.
h) Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing- masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
i) Beban Transfer. Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
j) Beban Tak terduka. Pengkurannya untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tak terduga.

c. Koreksi dan Pengembalian

a) Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban

bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

b) Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

c) Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

d. Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) entitas akuntansi/ pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga menghasilkan informasi yang andal, relevan dan akuntabel.

4.3.14. Kebijakan Akuntansi Akun Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali.

Jenis-jenis akun pembiayaan:

1) Penerimaan pembiayaan
2) Pengeluaran pembiayaan

a. Pengakuan

1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:

1) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asmg yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
2) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
3) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs tengah BI/Bank Umum bersangkutan;
4) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs transaksi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran pengeluaran pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:

1) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
2) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
    a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asmg lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
    b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan; dan
2) Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan

d. Perlakuan Khusus

1) Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana Penerimaan Notice of Disbursement (NoD) mendahului Penerimaan Kas.

Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD

Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kas-nya, maka Kuasa BUD mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

2) Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD).

   Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana kas diterima sebelum diterimanya NoD adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD. Namun, pengakuan penerimaan kas tersebut digunakan pasangan akun Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan.

   Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kasnya, maka Kuasa BUD mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

3) Perlakuan khusus penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD) pada akhir tahun anggaran diatur dalam peraturan tersendiri.

4) Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon.

Pada saat penerbitan obligasi, jumlah kas yang diterima dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominalnya. Dalam hal nilai kas yang diterima lebih besar dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya premium. Sedangkan apabila nilai kas yang diterima lebih kecil dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya diskon.

Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon diakui sebesar jumlah kas yang diterima. Premium atau diskon disajikan di neraca dalam kelompok pos kewajiban.

Amortisasi atas premium dan diskon dilakukan secara periodik dan menggunakan metode garis lurus terhadap pembayaran bunga atau kupon atas obligasi tersebut.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SlLPA), Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

A. SILPA/SIKPA

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

a. Penyajian

1) SiLPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
2) Pada Laporan Realisasi Anggaran, SILPA/SIKPA disajikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan; belanja; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
3) Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, SILPA/SIKPA disajikan sebagai penambah/pengurang saldo awal SAL sehingga diperoleh saldo akhir SAL.

b. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA, antara lain:

1) Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non – recurring (berulang);
2) Selisih kurs belum terealisasi atas kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas di Bendahara Pengeluaran (dalam bentuk valas); dan
3) Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

c. Penggunaan SiLPA

Berdasarkan Pasal 165 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16l ayat (21) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/ atau RKA SKPD.

Berdasarkan Pasal 155 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran;
2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6) mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
7) mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

B. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

SAL adalah kumpulan/gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

a. Penyajian

1) SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Saldo akhir SAL dipengaruhi oleh Saldo awal SAL, penggunaan SAL tahun berjalan, SiLPA/SiKPA berikut koreksi-koreksi atas SiLPA/SiKPA.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD/ BLUD, Laporan Konsolidasian BUD, dan LKPD.

b. Transaksi-transaksi yang mengkoreksi SAL, antara lain:

1) Koreksi kesalahan saldo Kas di BUD;
2) Kas di KPPN;
3) Kas di BLUD;

4) Kas di Bendahara Pengeluaran;
5) Kas Hibah Langsung yang telah tahun anggaran disahkan sebelumnya; dan
6) Penyesuaian catatan SAL

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Transitoris

A. Transaksi Transitoris

Transaksi Transitoris adalah transaksi kas non anggaran yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/beban, dan pembiayaan Pemerintah Kota Pariaman.
Transaksi kas transitoris adalah transaksi atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening Fihak Ketiga yang telah ditentukan.

Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), sebagai berikut:

1) Transaksi Transito
   Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.
2) Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat daerah, pegawai negeri sipil daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
3) Transaksi Pemindah bukuan dan Transfer
   Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA/LO
4) Transaksi Koreksi Kesalahan Pemindahbukuan
   Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.
5) Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga
   Merupakan transaksi penerimaan kas yang akan disalurkan kepada pihak ketiga selain Dana PFK dan/ atau penerimaan kas di rekening BUD yang belum dapat ditetapkan sebagai pendapatan atau pembiayaan. Misalnya: penerimaan retur dana SP2D, penerimaan di Rekening Migas (RPL), penerimaan penarikan pinjaman/hibah luar negeri di Reksus sebelum terbit NoD, dan lain-lain.

B. Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Hal--hal yang diungkapkan pada CaLK, antara lain:
1) Rincian jenis transaksi transitoris; dan
2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

C. Pengelolaan Kas Transitoris

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
Jenis-jenis Kas Transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi PemerintahKota Pariaman dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pariaman.
4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

D. Aktivitas Pengelolaan Kas Transitoris

1) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
2) Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3) Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
4) Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:
    a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Kota Pariaman dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
    b) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk

mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

c) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
d) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.
2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara
3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.
2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.
3) Jaminan

   Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

   a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.
   b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Kota Pariaman.
   c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
      (1) Perintah Pencairan Uang;
      (2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
      (3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
      (4) dilampiri oeh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

   Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

   a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
   b) Pemerintah Kota Pariaman mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

4.3.17. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/ pos yang diungkapkan pada CaLK.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos- pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Kota Pariaman untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan- laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a) Kesalahan tidak berulang;
   b) Kesalahan berulang dan sistemik.
5) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

6) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
7) Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
11) Contoh koreksi kesalahan belanja yang:
    a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
    b) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    c) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    d) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
13) Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas yang:
    a) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
    b) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

14) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
15) Contoh koreksi kesalahan beban yang:
    a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
    b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain- lain-LO dan mengurangi saldo kas.
16) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
17) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA yang:
    a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
        (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
        (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
18) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
19) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO yang:
    a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
    b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
        (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
        (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
20) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
21) Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan yang:

a) Menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Pariaman, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Pariaman dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

22) Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

23) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
24) Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban yang:
a) Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

25) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
26) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf B paragraf 9,10,12, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
27) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf B paragraf 9,14 dan 18 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
29) Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada huruf B paragraf 28 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
30) Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada huruf B paragraf 6 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas

untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

31) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
32) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1) Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7) Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :
   a) Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
   b) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

1) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO

tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang tidak Dilanjutkan

1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan –misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada– harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b) Fungsi tersebut tetap ada.
   c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

e. Peristiwa Luar Biasa

1) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Aktivitas biasa entitas pemerintah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi secara rutin atau berulang yang telah diperkirakan sebelumnya akan terjadi dan dituangkan dalam anggaran, termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi

peristiwa tersebut belum tentu tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4) Anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarannya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap anggaran yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.
5) Petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
6) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
7) Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
   d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
8) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.18. Kebijakan Akuntansi Penyusutan

1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.
2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
3) Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.
4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
5) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
   a) Peralatan dan Mesin;
   b) Gedung dan Bangunan;

c) Jalan, Irigasi dan Jaringan.

6) Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Pariaman dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
7) Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan fihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
   a) Tanah;
   b) Konstruksi dalam Pengerjaan;
   c) buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman
   d) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
   e) Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.
11) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:
   a) Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan.
   b) Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca.
   c) Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut.
12) Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
13) Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.
14) Terhadap Aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan baik itu pada awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, maka perhitungan penyusutan dibulatkan 1 (satu) tahun sejak diperoleh.
15) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
16) Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penyusutan = Nilai Perolehan / Masa Manfaat

17) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
18) Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.
19) Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya overhaul/renovasi, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun, Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
2) Nilai yang dapat disusutkan, Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.
3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap, Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda- beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

   Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial.

Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkanPada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap. Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

a) Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

b) Metode Saldo Menurun Berganda

Penyusutan per Periode = (Nilai yang dapat disusutkan - Akumulasi Penyusutan Periode Sebelumnya) x Tarif Penyusutan

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c) Metode Unit Produksi

Penyusutan per Periode = Produksi Periode Berjalan x Tarif Penyusutan

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

a. Prosedur Penyusutan

1) Identifikasi Aset Tetap yang dapat disusutkan:
   a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dala neraca;
   b) Identifikasi apakah Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan;
   c) Jika Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.
2) Pengelompokan Aset:
   a) Dapatkan seluruh daftar aset tetap;
   b) Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan mempunyai masa manfaat yang sama;
(2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
(3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
(4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

c) Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya;
d) Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Berkelompok misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset. Kemudian susun daftar aset individu dan nilai awalnya.

3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap, Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:
   a) Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas.
   b) Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang.
   c) Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah 2) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.
4) Penetapan Nilai yang dapat Disusutkan, oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

5) Penetapan Metode Penyusutan
   a) identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;
   b) Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan metode unit produksi;
   c) Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten;

d) Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda;
e) Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus;
f) Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;
g) Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin 3) atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin 4), demi alasan kepraktisan, perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat diterapkan;
h) Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi;
i) Dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
   (1) Identifikasi aset yang dapat disusutkan.
   (2) Metode penyusutan yang digunakan.
   (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan.

6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
   a) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
   b) Lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
   c) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

b. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusuan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Pengungkapan Penyusutan

Dalam Pengungkapan Penyusutan di dalam CaLK, informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

1) Nilai penyusutan.

2) Metode penyusutan yang digunakan.
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1) Kebijakan Akuntansi;
   Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada. Sebagai contoh, penetapan metode penyusutan. Pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut: Mesin fotokopi disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Jalan raya disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda. Selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
2) Daftar Aset dan Penyusutannya.
   Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya. Apabila disajikan catatan untuk masing- masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

4.3.19. Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Dana yang tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Ruang lingkup substansi yang dimuat dalam kebijakan ini meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan dan Belanja pada SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD bagi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi pengelolaan dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu:

1) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2) dana Kapitasi JKN bagi FKTP.

Dana Kapitasi merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembayaran Dana Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan melalui Rekening Bandaharan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperuntukkan bagi setiap orang, bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya diperlukan regulasi agar pengelolaan dana Kapitasi khusus oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana transfer dari Pusat yang mekanisme transfernya tidak

melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi diterima dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri melalui rekening masing-masing bendahara dan diakui sebagai pendapatan.

a. Laporan Keuangan SKPD

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan, dan belanja/ beban dan aset SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:

1) Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
2) Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
3) Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
4) Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka untuk pelaporan keuangan, Pemerintah Kota Pariaman menerapkan pengelompokan pendapatan dan belanja dalam penganggarannya yang ditetapkan melalui APBD sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri.

APBD Kota Pariaman TA 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Adapun Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan *Refocussing* Anggaran ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024. Perubahan APBD TA 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan Perubahan Penjabaran Anggaran ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 1 November 2024.

Secara ringkas APBD Kota Pariaman Tahun 2024 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp669.473.661.957,00 belanja sebesar Rp675.857.149.536,00 pembiayaan bersih sebesar Rp6.383.487.579,00 dan defisit sebesar Rp6.383.487.579,00. Defisit anggaran Tahun 2024 direncanakan ditutup dengan pembiayaan bersih.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman TA 2024 dapat digambarkan pada uraian berikut.

1. Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp644.362.029.673,36 berasal dari: a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.911.378.642,36, b) Pendapatan Transfer sebesar Rp598.450.651.031,00, c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.
2. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp648.100.984.541,33 yang terdiri dari: a) Belanja Operasi sebesar Rp501.221.378.133,33, b) Belanja Modal sebesar Rp58.767.684.209,00, c) Belanja Tak Terduga sebesar Rp120.495.000,00,00, dan d) Belanja Transfer Daerah sebesar Rp87.991.427.199,00.

   Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi defisit anggaran pada TA 2024 sebesar Rp3.738.954.867,97.

Realisasi Pembiayaan Bersih pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.383.487.579,51 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024.

	Anggaran	Realisasi
1. Pendapatan	**Rp669.473.661.957,00**	**Rp644.362.029.673,36**

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 adalah sebesar Rp669.473.661.957,00 dengan realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 atau sebesar

96,25%. Realisasi Pendapatan TA 2024 meningkat sebesar Rp18.532.946.203,32 atau 2,96% dari TA 2023 sebesar Rp625.829.083.470,04.

1.a Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp53.788.984.257,00	**Rp45.911.378.642,36**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 adalah sebesar Rp53.788.984.257,00 dengan realisasi sebesar Rp45.911.378.642,36 atau 85,35%. Realisasi PAD TA 2024 meningkat sebesar Rp7.049.777.940,32 atau 18,14% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp38.861.600.702,04.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD adalah:

1) Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp14.135.000.000,00	**Rp14.396.111.950,00**

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp14.135.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.396.111.950,00 atau 101,85%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 meningkat sebesar Rp72.155.837,00 atau 0,50% dari TA 2023 sebesar Rp14.323.956.113,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah disajikan pada tabel 5.1 berikut**.**

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	132.032.170,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.551.851.563,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	22.400.500,00
4	Pajak Reklame	135.000.000,00	136.464.108,00	101,08	127.746.417,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	5.179.248.587,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	5.908.220,00	0,00	151.162.880,00
7	Pajak Parkir	0,00	0.00	0,00	5.170.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.000.000.000,00	1.604.473.250,00	80,22	1.592.328.996,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.050.000.000,00	5.503.588.857,00	108,98	5.562.015.000,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.950.000.000,00	7.145.677.515,00	102,90	0,00
Jumlah		**14.135.000.000,00**	**14.396.111.950,00**	**101,85**	**14.323.956.113,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu selanjutnya disebut PBJT adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, terdiri dari:

Tabel 5.2 Rincian PBJT Tahun 2024

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.300.000.000,00	1.389.223.652,00	106,86
2	PBJT-Tenaga Listrik	5.500.000.000,00	5.623.488.313,00	102,25
3	PBJT-Jasa Perhotelan	100.000.000,00	114.340.550,00	114,34
4	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00	1.520.000,00	5,07
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000,00	17.105.000,00	85,53
Jumlah		**6.950.000.000,00**	**7.145.677.515,00**	**102,82**

2) Pendapatan Retribusi Daerah **Anggaran Rp12.636.235.000,00** **Realisasi Rp9.375.406.310,00**

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp12.636.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.375.406.310,00 atau 74,19%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 meningkat sebesar Rp6.260.231.347,00 atau 200,96% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp3.115.174.963,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah disajikan pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

NO	Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.072.000.000,00	6.939.650.757,00	85,97	243.541.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	163.995.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	265.000.000,00	92.768.000,00	35,01	95.740.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	300.000.000,00	257.827.763,00	85,94	123.536.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	43.210.900,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	8.186.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	132.800.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	500.000.000,00	272.487.000,00	54,50	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	612.579.750,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	198.415.350,00
11	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	207.510.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	124.180.500,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	27.320.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	755.822.000,00

NO	Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	117.170.000,00
16	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	600.000.000,00	4.250.000,00	0,71	0,00
17	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	350.000.000,00	114.040.000,00	32,58	0,00
18	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	39.075.000,00	41.910.000,00	107,26	0,00
19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.125.000.000,00	774.206.000,00	68,82	0,00
20	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	591.000.000,00	402.599.730,00	68,12	0,00
21	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	294.160.000,00	213.600.000,00	72,61	0,00
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	262.067.060,00	52,41	261.168.463,00
TOTAL		**12.636.235.000,00**	**9.375.406.310,00**	**74,19**	**3.115.174.963,00**

Tabel di atas menunjukan bahwa realisasi penerimaan retribusi Tahun 2024 mengalami kenaikan dan/atau penurunan realisasi dengan jumlah Rp6.260.231.347,00 dengan penjelasan disajikan pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Kenaikan dan/atau Penurunan Realisasi Retribusi 2024

NO	Akun	Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.696.109.757,00	Perpindahan dari target penerimaan BLUD menjadi target penerimaan retribusi pelayanan kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(163.995.000,00)	Penyesuaian akun ke retribusi pelayanan kebersihan
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(2.972.000,00)	Belum optimalnya pemungutan retribusi
4	Retribusi Pelayanan Pasar	134.291.763,00	Adanya penambahan objek retribusi
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	(43.210.900,00)	Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tidak lagi menjadi objek retribusi
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	(8.186.000,00)	Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tidak lagi menjadi objek retribusi
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	(132.800.000,00)	Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tidak lagi menjadi objek retribusi
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	272.487.000,00	Penyesuaian akun dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(612.579.750,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	(198.415.350,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
11	Retribusi Terminal	(207.510.000,00)	Retribusi terminal Tahun 2024 menjadi objek retribusi penerimaan pemerintah pusat
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	(124.180.500,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi ke retribusi tempat khusus parker diluar badan jalan

NO	Akun	Kenaikan/Penurunan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	(27.320.000,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi ke retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(755.822.000,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	(117.170.000,00)	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
16	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	4.250.000,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi terhadap sewa toko pasar (kios sala)
17	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	114.040.000,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
18	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	41.910.000,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	774.206.000,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
20	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	402.599.730,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
21	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	213.600.000,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	898.597,00	Penyesuaian akun pendapatan retribusi
TOTAL		**6.260.231.347,00**	

Adanya *perubahan terhadap penetapan alokasi target penerimaan retribusi pada Tahun 2024 menyesuaikan dengan realisasi penerimaan dari Tahun sebelumnya; dan kemampuan OPD pengelola retribusi dalam melakukan pemungutan.*

	Anggaran	Realisasi
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Rp11.331.512.753,00**	**Rp11.331.512.753,00**

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 adalah sebesar Rp11.331.512.753,00 dengan realisasi sebesar Rp11.331.512.753,00 atau 100,00%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 meningkat sebesar Rp1.288.849.313,00 atau 12,83% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp10.042.663.440,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Nagari Tahun Buku 2023 tanggal 02 April 2024, berdasarkan surat Bank Nagari nomor SR/144/TRS/CB/04-2024 tanggal 03 April 2024 tentang penyampaian bukti pemindahbukuan deviden Tahun buku 2023 sebesar Rp11.331.512.753,00 disajikan pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	100,00	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0,00	0,00	0,00	10.042.663.440,00
Jumlah		**11.331.512.753,00**	**11.331.512.753,00**	100,00	**10.042.663.440,00**

4) Lain-lain PAD yang sah

Anggaran	**Realisasi**
Rp 15.686.236.504,00	**Rp10.808.347.629,36**

Anggaran Lain-lain PAD yang sah TA 2024 adalah sebesar Rp15.686.236.504,00 dengan realisasi sebesar Rp10.808.347.629,36 atau 68,90%. Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2024 menurun sebesar Rp571.458.556,68 atau 5,02% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp11.379.806.186,04. Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2024 disajikan pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 dan 2023

NO	Akun	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	155.882.400,00	29,41	5.736.500,00
2	Jasa Giro	2.000.000.000,00	693.433.441,25	34,67	695.462.516,00
3	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	109.375.000,00	4,38	252.083.335,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.750.000.000,00	2.478.422.123,89	90,12	2.237.703.439,34
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	448.732.052,00	0,00	450.324.010,70
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	25.779.453,00	0,00	92.067.942,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	51.034.488,00	0,00	58.339.975,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.308.760,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	173.228.624,22	0,00	2.300.000,00
10	Pendapatan BLUD	7.829.736.504,00	6.669.901.287,00	85,19	7.320.337.268,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	264.951.200,00

NO	Akun	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.000.000,00	1.250.000,00	25,00	500.000,00
Jumlah		**15.686.236.504,00**	**10.808.347.629,36**	**68,90**	**11.379.806.186,04**

Tabel 5.7 Rincian Lain-lain PAD yang sah Tahun 2024

NO	Akun	Keterangan
1	*2*	*3*
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	- Penjualan Mobil Dinas Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 Sk nomor 325/900/2024
2	Jasa Giro	- Pendapatan Jasa Giro Rekening Kas Daerah - Rekening atas nama jabatan di SKPD - Rekening BOK dan dana BOS
3	Pendapatan Bunga	- Pendapatan dari Bunga Deposito Bank Nagari
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	- Setoran pengembalian temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK RI
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	- Setoran pengembalian yang diketahui peruntukkannya
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	- Pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan oleh pihak ketiga (Dinas PUPRP)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	- Pendapatan denda pajak reklame - Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan bantuan - Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	- Pendapatan denda retribusi persetujuan bangunan gedung-persetujuan bangunan gedung
9	Pendapatan dari Pengembalian	- Pendapatan denda keterlambatan atas pekerjaan
10	Pendapatan BLUD	- Pendapatan atas jasa layanan kesehatan (kapitasi JKN)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	- Pembayaran denda pelanggaran an. Putri Yahya - Biaya penegakan Perda nomor 10 th 2018

1.b Pendapatan Transfer

Anggaran	Realisasi
Rp615.684.677.700,00	**Rp598.450.651.031,00**

Anggaran Pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp615.684.677.700,00 dan terealisasi sebesar Rp598.450.651.031,00 atau 97,20%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 meningkat sebesar Rp17.646.892.503,00 atau 3,04 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp580.803.758.528,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1)	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran	Realisasi
		Rp527.380.968.000,00	Rp523.642.264.998,00

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 adalah sebesar Rp527.380.968.000,00 dengan realisasi sebesar Rp523.642.264.998,00 atau 99,29%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2024 meningkat sebesar Rp17.853.738.506,00 atau 3,53% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp505.090.779.000,00. Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.	Bagi Hasil Pajak	Anggaran	Realisasi
		Rp4.780.810.000,00	Rp6.320.110.669,00

Anggaran Bagi Hasil Pajak TA 2024 adalah sebesar Rp4.780.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.320.110.669,00 atau 132,20%. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 menurun sebesar (Rp195.955.727,00) atau 3,01% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp6.516.066.396,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

NO	Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	742.977.000,00	2.241.837.669,00	301,74	2.022.417.901,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.037.833.000,00	3.903.193.000,00	96,67	4.243.328.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	-	134.640.000,00	-	202.788.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	40.440.000,00	-	47.532.495,00
Jumlah		**4.780.810.000,00**	**6.320.110.669,00**	**132,20**	**6.516.066.396,00**

b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran	Realisasi
		Rp5.977.692.000,00	Rp5.977.692.000,00

Anggaran Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 adalah sebesar Rp5.977.692.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.977.692.000,00 atau 100,00%. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2024 menurun sebesar Rp1.444.461.000,00 atau 19,46% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp7.422.153.000,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	334.451.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	133.689.000,00	131.757.000,00	98,55	283.841.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	628.378.000,00	628.378.000,00	100,00	0,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty*	0,00	0,00	0,00	835.653.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	49.347.000,00	51.279.000,00	103,92	4.560.872.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.208.750.000,00	1.208.750.000,00	100,00	1.407.336.000,00
7	DBH Sawit	3.957.528.000,00	3.957.528.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**5.977.692.000,00**	**5.977.692.000,00**	**100,00**	**7.422.153.000,00**

Terdapat penyaluran dana Treasury Deposit Facility (TDF) dari Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan gaji ketiga belas di daerah Tahun anggaran 2024 dan berdasarkan lampiran surat Kementerian Keuangan nomor 136/ND/XV/03/2025 terdapat saldo TDF sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.758.923.689,00 yang merupakan Silpa TDF Tahun 2023 sebesar Rp1.629.474.689,00 (nilai TDF Kota Pariaman 31 Desember 2023 sebesar Rp3.111.455.689,00 - Nilai yang telah diterima dalam bentuk kas sebesar Rp1.481.981.000,00) ditambah saldo TDF Tahun Anggaran 2024 yang belum ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp129.449.000,00.

c. DAU **Anggaran** **Realisasi**

Rp412.646.363.000,00 **Rp417.506.738.000,00**

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 adalah sebesar Rp412.646.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp417.506.738.000,00 atau 101,18%. Realisasi DAU TA 2024 meningkat sebesar Rp17.421.051.840,00 atau 4,35% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp400.085.686.160,00.

Peningkatan realisasi DAU Tahun 2024 karena terdapat penyaluran DAU Peruntukan Tahun 2024 sebesar Rp38.227.032.000,00 yang terdiri dari:

1. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan total penyaluran sebesar Rp13.938.176.000,00;
2. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum total penyaluran sebesar Rp4.760.344.000,00;
3. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan total penyaluran sebesar Rp14.346.073.000,00;
4. DAU penggajian Formasi PPPK total penyaluran sebesar Rp1.982.439.000,00;
5. DAU Pendanaan Kelurahan total penyaluran sebesar Rp3.200.000.000,00.

d. DAK **Anggaran** **Realisasi**

Rp103.976.103.000,00 **Rp93.837.724.329,00**

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 adalah sebesar Rp103.976.103.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.837.724.329,00 atau 90,25%. Realisasi DAK TA 2024 meningkat sebesar Rp2.073.103.393,00 atau 2,26% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp91.764.620.936,00. Rincian DAK disajikan pada Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisai 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DAK Fisik	40.767.944.000,00	34.147.923.493,00	83,76	30.681.315.075,00
DAK Non Fisik	63.208.159.000,00	59.689.800.836,00	94,43	61.083.305.861,00
Jumlah	**103.976.103.000,00**	**93.837.724.329,00**	**90,25**	**91.764.620.936,00**

d.1) DAK – Fisik **Anggaran** **Realisasi**

Rp40.767.944.000,00 **Rp34.147.923.493,00**

Anggaran DAK – Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp40.767.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.147.923.493,00 atau 83,76%. Realisasi DAK – Fisik TA 2024 menurun sebesar Rp3.466.608.418,00 atau 11.30% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp30.681.315.075,00. Rincian DAK - Fisik disajikan pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisai 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	259.471.000,00	258.384.898,00	99,58	385.599.600,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.338.307.000,00	1.320.523.106,00	98,67	1.069.963.225,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.913.828.000,00	0,00	0,00	1.559.455.368,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	9.514.964.696,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.984.399.436,00
6	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.030.439.216,00
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	14.938.161.534,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	896.394.000,00	878.811.900,00	98,04	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	371.700.000,00	371.700.000,00	100,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	198.332.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	8.029.616.000,00	5.386.911.300,00	67,09	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	26.958.628.000,00	25.931.592.289,00	96,19	0,00
Jumlah		**40.767.944.000,00**	**34.147.923.493,00**	**83,76**	**30.681.315.075,00**

d.2) DAK – Non Fisik **Anggaran** **Realisasi**

Rp63.208.159.000,00 **Rp59.689.800.836,00**

Anggaran DAK – Non Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp63.208.159.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.689.800.836,00 atau 94,43%. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2024 menurun sebesar (Rp1.393.505.025,00) atau 2,28% dari TA 2023 sebesar Rp61.083.305.861,00 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	30.287.145.000,00	28.605.817.000,00	94,45	28.618.556.825,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	252.068.000,00	793.795.000,00	314,91	432.930.390,00
3	Bantuan Operasional PAUD	1.954.200.000,00	1.948.100.911,00	99,69	1.855.605.800,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.197.100.000,00	1.167.348.950,00	97,51	802.074.352,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan KB	13.212.935.000,00	11.098.364.064,00	84,00	13.233.692.622,00
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	612.881.000,00	599.856.250,00	97,87	400.892.400,00
7	Fasilitasi Penanaman Modal	397.530.000,00	393.682.423,00	99,03	390.120.000,00
8	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	329.712.500,00	63,41	466.945.500,00
9	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	195.992.000,00
10	Dana BOS	14.774.300.000,00	14.753.123.738,00	99,86	14.686.495.972,00
Jumlah		**63.208.159.000,00**	**59.689.800.836,00**	**94,43**	**61.083.305.861,00**

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya **Anggaran Rp41.844.428.000,00** **Realisasi Rp41.844.428.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp41.844.428.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.844.428.000,00 atau 100%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 menurun sebesar Rp5.541.330.000,00 atau 11.69% dari TA 2023 sebesar Rp47.385.758.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya disajikan pada tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No.	Akun	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	6.012.923.000,00
2	Dana Desa	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	41.372.835.000,00
Jumlah		**41.844.428.000,00**	**41.844.428.000,00**	100,00	**47.385.758.000,00**

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran	Realisasi
	Rp46.459.281.700,00	Rp32.963.958.033,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp46.459.281.700,00 dengan realisasi sebesar Rp32.963.958.033,00 atau 70,95% dengan rincian disajikan pada tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Tanggal	Nomor Keputusan	Keterangan	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	06/05/2024	Nomor 971.1/20/PPD-Bapenda/2024	DBH TW I	1.546.791.513	802.551.688	2.614.592.414	34.511.451		4.998.447.066
2	06/05/2024	Nomor 971.1/21/PPD-Bapenda/2024	DBH Pajak Rokok Desember 2023					1.656.150.041	1.656.150.041
3	06/05/2024	Nomor 971.1/22/PPD-Bapenda/2024	DBH Pajak Rokok Desember 2023					2.577.978.500	2.577.978.500
4	01/07/2024	Nomor 971.1/28/PPD-Bapenda/2024	DBH TW II	1.546.791.513	802.551.688	2.614.592.414	34.511.451		4.998.447.066
5	18/07/2024	Nomor 971.1/34/PPD-Bapenda/2024	DBH Pajak Rokok TW II					2.241.074.327	2.241.074.327
6	21/10/2024	Nomor 971.1/42/PPD-Bapenda/2024	DBH Pajak Rokok TW III					2.584.786.720	2.584.786.720
7	22/10/2024	Nomor 971.1/43/PPD-Bapenda/2024	Kurang Salur Tahun 2023	2.414.564.563	1.020.795.144	5.252.976.951	15.848.134		8.704.184.792
8	20/12/2024	Nomor 971.1/52/PPD-Bapenda/2024	DBH TW III	2.338.688.525	1.128.149.358	-	-		3.466.837.883
9	16/12/2024	Nomor 971.1/50/PPD-Bapenda/2024	DBH Pajak Rokok TW IV					1.736.051.638	1.736.051.638
JUMLAH				**7.846.836.114**	**3.754.047.878**	**10.482.161.779**	**84.871.036**	**10.796.041.226**	**32.963.958.033**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 meningkat sebesar Rp5.974.483.997,00 atau 22,14% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 sebesar Rp26.989.474.036,00.

2. Belanja	Anggaran	Realisasi
	Rp675.857.149.536,00	Rp648.100.984.541,33

Anggaran Belanja Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp675.857.149.536,00 dengan Realisasi sebesar Rp648.100.984.541,33. Realisasi Belanja TA 2024 meningkat sebesar Rp28.936.970.250,00 atau 4,67% dari TA 2023 sebesar Rp619.164.014.291,00. Rincian Belanja dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15 Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Operasi	520.018.545.721,88	501.308.593.783,33	96,40	467.268.136.266,00
2	Belanja Modal	64.737.258.930,00	58.680.468.559,00	90,64	63.803.160.485,00
3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	120.495.000,00	24,10	0,00
4	Belanja Transfer	90.601.344.884,12	87.991.427.199,00	97,12	88.092.717.540,00
Jumlah		**675.857.149.536,00**	**648.100.984.541,33**	**95,89**	**619.164.014.291,00**

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.a Belanja Operasi **Anggaran** **Realisasi**

Rp520.018.545.721,88 **Rp501.308.593.783,33**

Anggaran Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp520.018.545.721,88 dan terealisasi sebesar Rp501.308.593.783,33 atau 96,40%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp34.040.457.517,33 atau 7,28% dari TA 2023 sebesar Rp467.268.136.266,00. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi disajikan pada tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16 Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No.	Akun Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Pegawai	320.340.036.391,38	314.988.384.111,00	98,33	276.716.366.014,00
2	Belanja Barang dan Jasa	178.170.146.627,50	164.059.422.975,00	92,08	174.333.143.316,00
3	Belanja Hibah	20.784.042.703,00	21.650.244.697,33	104,17	15.822.266.936,00
4	Belanja Bantuan Sosial	724.320.000,00	610.542.000,00	84,29	396.360.000,00
Jumlah		**520.018.545.721,88**	**501.308.593.783,33**	**96,40**	**467.268.136.266,00**

1) Belanja Pegawai **Anggaran** **Realisasi**

Rp320.340.036.391,38 **Rp314.988.384.111,00**

Anggaran Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp320.340.036.391,38 dengan realiasasi sebesar Rp314.988.384.111,00 atau 98,33%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 meningkat sebesar Rp38.272.018.097,00 atau 13,83% dari TA 2023 sebesar Rp276.716.366.014,00.

Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2024 disebabkan karena adanya: a) pembayaran tambahan penghasilan pegawai THR dan TPP Ke-13 dibayarkan 100%, b) Tambahan Tunjangan Profesi Guru THR dan TPG Ke-13 c) pembayaran utang Tunjangan Fungsional ASN. d) serta penyesuaian

penganggaran akun belanja. Rincian Belanja Pegawai disajikan pada tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17 Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No.	Akun Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	185.563.431.600,58	180.172.606.765,00	97,09	167.798.109.785,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80.005.778.975,74	77.378.356.727,00	96,72	63.324.742.610,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.549.297.239,98	44.229.309.969,00	109,08	36.721.885.304,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	6.395.653.378,00	6.165.974.726,00	96,41	5.894.911.700,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	333.066.238,08	114.876.312,00	34,49	275.095.860,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	379.800.000,00	92,44	410.880.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	290.418.000,00	17.847.875,00	6,15	265.627.858,00
8	Belanja Pegawai BLUD	6.791.510.959,00	6.529.611.737,00	96,14	2.025.112.897,00
Jumlah		**320.340.036.391,38**	**314.988.384.111,00**	**98,33**	**276.716.366.014,00**

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN capaian realisasinya melebihi anggaran sebesar Rp3.680.012.729,02, dimana pada akun belanja tersebut terdapat pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) THR dan Gaji 13 manual sebesar dengan rincian:

1. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) THR 100% TK, SD, SMP dan Pengawas Tahun 2024 SP2D nomor 13.77/04.0/000003/LS_MANUAL/1.01.2.19.0.00.01.0000/PR/12/2024/DIKPORA sebesar Rp2.436.783.100,00 validasi tanggal 12 Desember 2024;
2. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Gaji 13 100% Guru SD, TK, SD, SMP dan Pengawas SP2D nomor 13.77/04.0/000002/LS_MANUAL/1.01.2.19.0.00.01.0000/PR/12/2024/DIKPORA sebesar Rp2.436.677.000,00 validasi tanggal 12 Desember 2024;
3. Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) SP2D nomor 13.77/04.0/000001/LS_MANUAL/1.01.2.19.0.00.01.0000/PR/12/2024/DIKPORA sebesar Rp444.000.000,00 validasi tanggal 30 Desember 2024.

Terhadap pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) THR dan Gaji 13 alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat setelah APBD perubahan ditetapkan.

Rendahnya realisasi Belanja Pegawai BOS Tahun 2024 dibadingkan dengan realisasi Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 pasal 40 ayat 3 " Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara, b. tercatat pada Dapodik, c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru"

Rincian Belanja Pegawai per SKPD disajikan pada tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18 Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	115.222.486.191,34	118.048.329.361,00	102,45	102.870.295.209,00
2	Dinas Kesehatan	74.558.843.274,28	72.700.731.564,00	97,51	60.213.144.272,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	6.459.804.123,60	5.617.835.360,00	86,97	4.993.049.881,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	7.557.634.601,54	7.362.710.073,00	97,42	6.676.014.300,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.680.460.248,00	5.404.353.579,00	95,14	4.977.657.200,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.921.370.490,42	2.778.521.617,00	95,11	2.537.581.044,00
7	Dinas Sosial	2.408.885.139,12	2.372.687.604,00	98,50	1.974.078.670,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.231.384.432,00	3.024.969.406,00	93,61	2.580.485.273,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.968.828.236,62	2.902.326.034,00	97,76	2.547.694.905,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.959.726.220,00	2.946.585.588,00	99,56	2.440.494.547,00
11	Dinas Perhubungan	3.742.891.833,80	3.614.032.266,00	96,56	3.064.119.673,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.097.720.349,60	2.895.131.252,00	93,46	2.505.387.568,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.678.046.532,30	4.388.877.127,00	93,82	3.694.947.522,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	3.769.299.586,04	3.645.534.094,00	96,72	2.994.821.313,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.812.651.773,56	3.575.652.866,00	93,78	3.101.690.916,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.464.647.994,26	2.402.408.495,00	97,47	2.218.155.350,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	12.853.843.288,66	12.511.787.417,00	97,34	11.162.640.973,00
18	Sekretariat Daerah	10.421.174.465,32	9.972.768.819,00	95,70	8.707.067.734,00
19	Sekretariat DPRD	9.519.699.377,94	9.181.091.996,00	96,44	8.276.376.421,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.244.446.259,94	2.183.370.990,00	97,28	1.895.337.794,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	11.034.951.934,08	10.017.712.649,00	90,78	9.509.649.569,00

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.460.955.348,44	2.395.564.233,00	97,34	2.123.919.784,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.687.191.349,32	1.610.523.755,00	95,46	1.505.446.272,00
24	Inspektorat	6.897.241.880,08	6.505.152.749,00	94,32	5.837.043.772,00
25	Badan Perencanaan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4.130.786.742,56	3.814.444.990,00	92,34	3.417.263.892,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	8.340.614.297,76	8.083.182.324,00	96,91	10.545.302.129,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.475.780.025,74	3.322.286.971,00	95,58	2.902.700.808,00
28	Kantor Kesbang Pol	1.738.670.395,06	1.709.810.932,00	98,34	1.443.999.223,00
Jumlah		**320.340.036.391,38**	**314.988.384.111,00**	**98,33**	**276.716.366.014,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

2) Belanja Barang dan Jasa **Anggaran** **Realisasi**

Rp178.170.146.627,50 **Rp164.059.422.975,00**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp178.170.146.627,50 dengan realisasi sebesar Rp164.059.422.975,00 atau 92,08%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 menurun sebesar Rp10.273.720.341,00 atau 5,89% dari TA 2023 sebesar Rp174.333.143.316,00.

Penurunan belanja barang dan jasa Tahun 2024 disebabkan karena penyesuaian penganggaran belanja di unit kerja. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan akun belanja disajikan pada tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	TA 2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Barang Pakai Habis	35.759.985.184,50	32.700.985.961,00	91,45	43.810.168.533,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	968.140.000,00	760.300.284,00	78,53	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	57.957.580.919,00	54.817.346.837,00	94,58	54.468.198.797,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.714.119.759,00	9.982.674.554,00	78,52	7.588.644.515,00
5	Belanja Sewa Tanah	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	60.800.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.217.300.000,00	1.070.227.000,00	87,92	1.422.885.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.337.464.000,00	1.917.991.676,00	82,05	3.122.932.915,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	79.000.000,00	98,75	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	357.087.740,00	223.527.740,00	62,60	370.143.460,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non	0,00	0,00	0,00	89.784.500,00

No	Akun	TA 2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Konstruksi				
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	18.900.000,00	16.900.000,00	89,42	12.450.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	118.715.000,00	99.815.000,00	84,08	1.092.296.357,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	72.316.200,00	68.496.950,00	94,72	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.359.379.597,00	5.031.421.267,00	93,88	6.288.778.027,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.057.955.765,00	3.756.589.886,00	92,57	3.755.210.081,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.444.440.000,00	1.413.331.933,00	97,85	993.021.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.930.437.361,00	18.776.632.740,00	89,71	23.774.642.347,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	666.242.014,00
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.871.009.407,00	6.415.218.776,00	93,37	1.476.281.500,00
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.097.161.290,00	5.658.682.191,00	92,81	11.966.862.149,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.118.692.020,00	10.446.477.615,00	103,24	9.633.743.929,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.748.797.340,00	4.481.320.697,00	94,37	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.908.665.045,00	6.310.481.868,00	91,34	3.740.058.192,00
Jumlah		**178.170.146.627,50**	**164.059.422.975,00**	**92,13**	**174.333.143.316,00**

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD disajikan pada tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20 Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	23.378.968.711,00	21.849.087.224,00	93,46	21.807.002.205,00
2	Dinas Kesehatan	33.940.419.261,00	29.784.019.613,00	87,75	27.565.178.202,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	14.506.921.872,50	13.766.313.874,00	94,89	10.201.140.519,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	15.928.282.657,00	14.823.490.577,00	93,06	14.277.328.379,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.072.858.577,00	6.903.097.222,00	97,60	5.769.404.620,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.152.581.704,00	2.039.282.915,00	94,74	2.647.792.860,00
7	Dinas Sosial	1.409.926.754,00	1.320.917.211,00	93,69	1.593.367.290,00

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.474.389.823,00	5.246.684.454,00	95,84	4.648.173.628,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	768.223.540,00	744.864.543,00	96,96	1.151.710.642,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.707.160.020,00	2.565.404.578,00	94,76	3.493.694.722,00
11	Dinas Perhubungan	3.765.307.806,00	3.683.638.114,00	97,83	5.389.350.145,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.745.051.536,00	3.673.230.524,00	98,08	4.566.515.497,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.781.151.750,00	4.682.803.506,00	97,94	5.269.718.343,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1.241.968.516,00	1.200.866.646,00	96,69	1.738.184.273,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.981.226.431,00	2.857.478.383,00	95,85	4.026.845.864,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	759.049.461,00	725.179.124,00	95,54	814.902.195,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	3.800.320.266,00	3.458.113.131,00	91,00	4.631.154.646,00
18	Sekretariat Daerah	12.723.217.477,00	11.068.169.381,00	86,99	16.419.480.639,00
19	Sekretariat DPRD	18.122.598.019,00	16.075.916.339,00	88,71	14.867.244.445,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	244.761.050,00	233.084.841,00	95,23	402.504.129,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	4.633.115.508,00	4.379.933.655,00	94,54	4.326.497.077,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	218.966.628,00	205.038.624,00	93,64	338.519.606,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	235.904.969,00	224.692.313,00	95,25	538.759.087,00
24	Inspektorat	656.058.925,00	634.040.528,00	96,64	2.281.593.008,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.512.074.215,00	1.981.079.069,00	78,86	2.926.815.254,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.497.938.334,00	7.203.004.714,00	96,07	9.178.748.639,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.988.377,00	1.385.739.490,00	93,38	2.691.400.013,00
28	Kantor KesbangPol	1.427.714.440,00	1.344.252.382,00	94,15	770.117.389,00
Jumlah		**178.170.146.627,50**	**164.059.422.975,00**	**92,08**	**174.333.143.316,00**

Rincian per objek dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

3) Belanja Hibah **Anggaran** **Realisasi**
Rp20.784.042.703,00 **Rp21.650.244.697,33**

Anggaran Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp20.784.042.703,00 dengan realiasasi sebesar Rp21.650.244.697,33 atau 104,17%. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 meningkat Rp5.827.977.761,33 atau 36,83% dari realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp15.822.266.936,00 dengan rincian disajikan pada tabel 5.21 berikut.

Tabel 5.21 Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	TA 2024		Rasio %	TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.961.261.265,00	13.961.261.265,00	100,00	0,00
b.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.576.300.000,00	4.540.449.861,00	99,22	13.030.043.549,00
c.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	1.950.993.387,00
d.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	875.252.334,00	875.252.333,33	100,00	841.230.000,00
e.	Belanja Hibah Dana BOSP	1.371.229.104,00	2.273.281.238,00	165,78	0,00
Jumlah		**20.784.042.703,00**	**21.650.244.697,33**	**104,17**	**15.822.266.936,00**

Peningkatan Belanja Hibah Tahun 2024 disebabkan karena terdapat pembayaran hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat merupakan Hibah Pemerintah Kota Pariaman Kepada KPU untuk Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Pariaman dengan KPU Kota Pariaman Nomor: 01/HIBAH/KKPol/XI/2023 Nomor 1/PR.07-NK/1377/3/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 sebesar Rp13.961.261.265,00.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disajikan pada tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024

NO	URAIAN	NO KEPUTUSAN	NILAI	SKPD
1	2	3	4	5
1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 49/900/20224 tentang Pemberian Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024	200.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	URAIAN	NO KEPUTUSAN	NILAI	SKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 31/900/2024 tentang Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2024	1.025.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 172/900/2024 tentang Pemberian Hibah Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024	200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler	1.167.348.950,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler	1.948.100.911,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga
TOTAL			**4.540.449.861,00**	

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disajikan pada tabel 5.23 berikut.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2024

NO	JENIS	ANGGARAN	REALISASI
1	Penyaluran bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN)	99.769.500,00	99.769.500,00
2	Penyaluran bantuan Keuangan Partai Bulan Bintang	71.415.000,00	71.415.000,00
3	Penyaluran bantuan Keuangan Partai DEMOKRAT	99.313.500,00	99.313.500,00
4	Penyaluran bantuan Keuangan Partai GERINDRA	122.687.500,00	122.687.500,00
5	Penyaluran bantuan Keuangan Partai Golongan Karya	124.974.000,00	124.974.000,00
6	Penyaluran bantuan Keuangan Partai HANURA	38.797.500,00	38.797.500,00
7	Penyaluran bantuan Keuangan Partai NASDEM	82.150.834,00	82.150.833,33
8	Penyaluran bantuan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan	106.246.500,00	106.246.500,00
9	Penyaluran bantuan Keuangan Partai keadilan Sejahtera	129.898.000,00	129.898.000,00
TOTAL		**875.252.334,00**	**875.252.333,33**

Rincian Belanja Hibah Dana BOSP dengan anggaran sebesar Rp1.371.229.104,00 realisasi sebesar Rp2.273.281.238,00 atau 165,78% terdiri dari BOS SD Swasta sebesar Rp1.837.200.365,00, BOS SMP Swasta sebesar Rp436.080.873,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP merupakan data realisasi non RKUD berdasarkan Pendapatan Transfer langsung dari Pemerintah Pusat ke sekolah penerima dana BOSP. Rincian Belanja Hibah Belanja Hibah Dana BOSP disajikan pada **Lampiran 5f.**

4) Bantuan Sosial **Anggaran** **Realisasi**
Rp724.320.000,00 **Rp610.542.000,00**

Anggaran Bantuan sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp724.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp610.542.000,00 atau 84,29%. Realisasi Bantuan sosial pada Tahun 2024 lebih besar Rp214.182.000,00 atau 54,04% dari Tahun 2023 sebesar Rp396.360.000,00.

Tabel 5.24 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

No.	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	**724.320.000,00**	**610.542.000,00**
Jumlah		**724.320.000,00**	**610.542.000,00**

Bantuan Sosial yaitu Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu digunakan untuk Bantuan Biaya Personil Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Pariaman Pintar (KPP) sebesar Rp610.542.000,00 terdiri dari:

1. Pembayaran Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2024 sebesar Rp545.262.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor PR/107.A/PKS/11-2023 Nomor 420/2927.a/Dikpora-2023 dan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 307/420/2024 tanggal 20 Desember 2024 kepada 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) orang siswa/i Satuan Pendidikan Dasar (SD) dan 158 (seratus lima puluh delapan) siswa/i Satuan Pendidikan Menengah Pertama (SMP) se-Kota Pariaman.
2. Pembayaran Utang Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2023 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp65.280.000,00 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama PKS Nomor: PR/029/PKS/11-2020 Nomor: 420/1306/Dikpora-2020.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi terhadap data keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2024 realisasi pengajuan pencairan Belanja Bantuan Sosial biaya personil pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KPP sebesar Rp632.010.000,00 dan telah disalurkan ke peserta didik sebesar Rp545.262.000 sehingga terdapat sisa kas pada rekening penampungan KPP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 0500.0101.1332-0 rekening An. Dinas Dikpora Kota Pariaman KPP sebesar Rp86.748.000,00. Sesuai dengan Berita Acara Sisa Pembayaran KPP nomor 420/667/Dikpora/2025 tanggal 24 Februari 2025 sisa kas tersebut telah disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pariaman tanggal 24 Februari Tahun 2025.

2.b Belanja Modal

Anggaran	Realisasi
Rp64.737.258.930,00	**Rp58.680.468.559,00**

Anggaran Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp64.737.258.930,00 dengan realisasi sebesar Rp58.680.468.559,00 atau 90,64%. Realisasi Belanja Belanja Modal TA 2024 menurun sebesar Rp5.122.691.926,00 atau 8,73% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp63.803.160.485,00.

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran	Realisasi
Rp0,00	**Rp0,00**

Anggaran Belanja Modal Tanah TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp117.700.000,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran	Realisasi
Rp12.313.469.448,00	**Rp10.229.912.049,00**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp12.313.469.448,00 dengan realisasi sebesar Rp10.229.912.049,00 atau 83,08%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 berkurang sebesar Rp2.302.090.757,00 atau 22,50% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp12.532.002.806,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel 5.25 berikut.

Tabel 5.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	TA 2024		Rasio %	TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	70.520.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	640.341.408,00	179.000.000,00	27,95	112.500.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.025.520.000,00	2.025.280.000,00	99,99	5.266.370,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	86.602.000,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	757.902.000,00	729.379.750,00	96,24	1.434.300.798,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	710.706.664,00	702.374.015,00	98,83	2.032.871.823,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	92.654.805,00
10	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	9.179.000,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran	212.609.999,00	145.750.502,00	68,55	2.569.325.219,00
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.000.951.101,00	2.817.317.000,00	93,88	35.000.000,00
14	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	197.520.000,00

No	Akun	TA 2024		Rasio %	TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
15	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	461.850.000,00	341.421.100,00	73,92	0,00
16	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	5.575.042,00
17	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
18	Belanja Modal Komputer Unit	788.999.250,00	753.501.009,00	95,50	1.051.443.108,00
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	427.945.000,00	318.547.677,00	74,44	772.041.134,00
20	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	49.000.000,00
21	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	70.979.400,00
22	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	39.810.000,00	34.018.610,00	85,45	513.746.000,00
23	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	139.368.750,00	129.075.000,00	92,61	558.990.000,00
24	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.810.000,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.581.604.776,00	766.620.900,00	48,47	2.412.437.482,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.515.060.500,00	1.276.826.486,00	84,28	391.240.625,00
Jumlah		**12.313.469.448,00**	**10.229.912.049,00**	**83,08**	**12.532.002.806,00**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada tabel 5.26 berikut.

Tabel 5.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2.837.209.776,00	1.877.995.915,00	66,19	3.541.887.990,00
2	Dinas Kesehatan	5.915.907.767,00	5.461.387.488,00	92,32	3.105.915.490,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	522.291.408,00	64.305.600,00	12,31	142.209.655,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.628.118.750,00	1.568.903.500,00	96,36	371.649.442,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.510.332,00	12.426.925,00	99,33	124.320.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.700.000,00	14.652.000,00	99,67	44.932.800,00
7	Dinas Sosial	67.858.332,00	67.500.000,00	99,47	328.680.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	16.644.000,00	16.600.000,00	99,74	56.950.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	291.487.900,00

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	39.017.000,00
11	Dinas Perhubungan	159.448.000,00	157.098.000,00	98,53	631.189.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	191.740.000,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	27.925.000,00	25.553.934,00	91,51	48.400.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38.750.000,00	38.750.000,00	100,00	84.431.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.430.000,00	201.848.750,00	93,26	244.800.000,00
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	51.977.000,00	50.168.827,00	96,52	870.495.200,00
18	Sekretariat Daerah	312.395.000,00	197.966.500,00	63,37	736.286.414,00
19	Sekretariat DPRD	151.582.000,00	149.300.000,00	98,49	1.167.324.447,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	11.000.000,00	7.881.000,00	71,65	0,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	201.364.250,00	195.083.000,00	96,88	89.094.500,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	8.480.000,00	8.200.000,00	96,70	-
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	28.699.000,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.231.000,00	2.185.000,00	97,94	104.576.968,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	89.398.000,00	85.650.000,00	95,81	130.415.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.226.000,00	20.200.000,00	99,87	140.500.000,00
28	Kantor KesbangPol	7.022.833,00	6.255.610,00	89,08	-
Jumlah		**12.313.469.448,00**	**10.229.912.049,00**	**83,08**	**12.532.002.806,00**

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran	**Realisasi**
Rp30.744.581.723,00	**Rp27.172.296.811,00**

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp30.744.581.723,00 dengan realisasi sebesar Rp27.172.296.811,00 atau 88,38%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 lebih besar Rp4.138.739.399,00 atau 17.96% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp23.033.557.412,00. Peningkatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya alokasi anggaran DAK-Fisik pembangunan gedung RSUD dr. Sadikin dan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel 5.27 berikut.

Tabel 5.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Akun	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.804.581.723,00	26.505.158.749,00	88,93	21.506.517.716,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	493.946.000,00	98,79	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	173.500.000,00	173.192.062,00	99,82	1.527.039.696
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	266.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**30.744.581.723,00**	**27.172.296.811,00**	**88,38**	**23.033.557.412,00**

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada tabel 5.28 berikut.

Tabel 5.28 Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

NO	SOPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	4.994.328.770,00	2.549.010.392,00	51,04	5.083.502.667,00
2	Dinas Kesehatan	22.832.138.325,00	21.958.638.121,00	96,17	5.889.635.868,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.253.114.628,00	1.220.314.674,00	97,38	1.376.192.551,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	500.000.000,00	294.000.000,00	58,80	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	151.145.931,00
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	785.000.000,00	772.069.624,00	98,35	948.011.383,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	9.327.259.696,00
8	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	257.809.316,00
9	Sekretariat DPRD	380.000.000,00	378.264.000,00	99,54	0,00
TOTAL		**30.744.581.723,00**	**27.172.296.811,00**	**88,38**	**23.033.557.412,00**

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran	Realisasi
	Rp20.251.301.659,00	Rp19.973.012.799,00

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 adalah sebesar Rp20.251.301.659,00 dengan realisasi sebesar Rp19.973.012.799,00 atau 98,63%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 berkurang sebesar Rp7.665.447.068,00 atau 0,28% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp27.638.459.867,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

NO	Akun	TA 2024		Rasio %	TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan	17.202.026.059,00	16.995.457.309,00	98,80	21.303.402.684,00
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	369.357.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.644.552.700,00	1.641.844.700,00	99,84	5.309.109.222,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	99.722.900,00	99.722.900,00	100,00	268.812.161,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	74.500.800,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	400.000.000,00	398.500.000,00	99,63	0,00
7	Belanja Modal Jaringan Air Minum	855.000.000,00	837.487.890,00	97,95	0,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	313.278.000,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**20.251.301.659,00**	**19.973.012.799,00**	**98,63**	**27.638.459.867,00**

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD, disajikan pada tabel 5.30 berikut.

Tabel 5.30 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	3	5	4
1	Dinas Kesehatan	400.000.000,00	398.500.000,00	99,63	17.300.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	16.145.818.659	15.974.441.249	98,94	26.156.353.067,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.705.483.000,00	3.600.071.550,00	97,16	1.415.733.800,00

No	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*3*	*5*	*4*
4	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	49.073.000,00
JUMLAH		**20.251.301.659,00**	**19.973.012.799,00**	**98,63**	**27.638.459.867,00**

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Anggaran** **Realisasi**

Rp1.427.906.100,00 **Rp1.305.246.900,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp1.427.906.100,00 dengan realisasi sebesar Rp1.305.246.900,00 atau 91,41%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 meningkat sebesar Rp824.806.500,00 atau 63,19% dari realisasi TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp480.440.400,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel 5.31 berikut.

Tabel 5.31 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

NO	Akun	TA 2024		Rasio %	TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	14.550.000,00	14.529.000,00	99,86	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.412.756.100,00	1.290.117.900,00	91,32	475.440.400,00
Jumlah		**1.427.906.100,00**	**1.305.246.900,00**	**91,41**	**480.440.400,00**

Rincian belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada tabel 5.32 berikut.

Tabel 5.32 Belanja Modal Aset Tetap Lainya per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.412.756.100,00	1.290.117.900,00	91,31	475.440.400,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	15.150.000,00	15.129.000,00	99,86	0,00
3	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		**1.427.906.100,00**	**1.305.246.900,00**	**91,40**	**480.440.400,00**

6) Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran	Realisasi
	Rp0,00	Rp0,00

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000,00.

2.c Belanja Tak Terduga	Anggaran	Realisasi
	Rp500.000.000,00	Rp120.495.000,00

Anggaran Belanja Tak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp120.495.000,00 atau 24,10%. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 terdiri dari:

1. Pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah (restitusi pajak BPHTB) kepada Syahdiwirman surat setoran pajak daerah (SSPD – BPHTB) Nomor 004187 tanggal 12 April 2022, berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 123/900/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengembalian atas Kesalahan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bengunan atas Nama Syahdiwirman dengan pembayaran SP2D Nomor 13.77/04.0/000100/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024 tanggal 4 April 2024; dan
2. Belanja operasional penanggulangan kejadian banjir Kota Pariaman pada tanggal 26 s.d 28 Agustus Tahun 2024 berdasarkan surat pengajuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900/99/BPBD/VIII-2024 tanggal 27 Agustus 2024.

2.d Belanja Transfer	Anggaran	Realisasi
	Rp90.601.344.884,12	Rp87.991.427.199,00

Anggaran Belanja Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp90.601.344.884,12 dengan realisasi sebesar Rp87.991.427.199,00 atau 97,12%. Realisasi Belanja Transfer TA 2023 menurun sebesar (Rp101.290.341,00) atau 0,11% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp88.092.717.540,00. Hal ini disebabkan karena penyesuaian anggaran belanja transfer bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019 tentang tata cara perhitungan, pengalokasian dan prioritas pengguna dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan keputusan Wali Kota Pariaman nomor 232/900/2024 tentang dana bagi hasil dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024. Rincian Belanja Transfer disajikan pada tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.33 Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023

No.	Akun	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.794.702.879,31	546.550.321,00	30,45	1.271.990.662,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.786.735.009,81	424.969.883,00	23,78	260.492.865,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	3.235.680.000,00	3.235.680.000,00	100,00	4.646.400.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	40.540.999.013,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	41.372.835.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	41.939.798.995,00	41.939.798.995,00	100,00	0,00
Jumlah		**90.601.344.884,12**	**87.991.427.199,00**	**97,12**	**88.092.717.540,00**

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Anggaran	Realisasi
Rp1.794.702.879,31	**Rp546.550.321,00**

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.794.702.879,31 dengan realisasi sebesar Rp546.550.321,00 atau 30,45%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 berkurang sebesar Rp725.440.341,00 atau 57,03% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.271.990.662,00. Penurunan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah disebabkan penyesuaian realisasi pendapatan pajak daerah sebagai faktor pengali bagi hasil pajak daerah perhitungan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Anggaran	Realisasi
Rp1.786.735.009,81	**Rp424.969.883,00**

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.786.735.009,81 dengan realisasi sebesar Rp424.969.883,00 atau 23,78%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 meningkat sebesar Rp164.477.018,00 atau 63,14% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp260.492.865,00. Peningkatan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah disebabkan meningkatnya realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun 2024 perhitungan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021.

3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Anggaran	Realisasi
	Rp3.235.680.000,00	Rp3.235.680.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2024 adalah sebesar Rp3.235.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.235.680.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2024 menurun sebesar Rp1.410.720.000,00 atau 30,36% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp4.646.400.000,00. Penurunan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi disebabkan karena penyesuaian jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka program wajib belajar 12 Tahun dari pemerintah Kota Pariaman untuk pelajar SMA/SMK di wilayah Kota Pariaman sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Program Sekolah Gratis SMAN, SMKN, dan SLBN Kota Pariaman Nomor 120.012/PKS/GSB-2024 dan Nomor 001/PKS-PEM/VII/2024 dengan rincian bantuan keuangan yaitu disajikan pada tabel 5.34 berikut..

Tabel 5.34 Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Tahun 2024

NO	PENERIMA BANTUAN	REALISASI		TOTAL
		TAHAP I	TAHAP II	
1	SMA N 1 PARIAMAN	268.560.000,00	268.560.000,00	537.120.000,00
2	SMA N 2 PARIAMAN	270.720.000,00	270.720.000,00	541.440.000,00
3	SMA N 3 PARIAMAN	214.560.000,00	214.560.000,00	429.120.000,00
4	SMA N 4 PARIAMAN	159.840.000,00	159.840.000,00	319.680.000,00
5	SMA N 5 PARIAMAN	121.320.000,00	121.320.000,00	242.640.000,00
6	SMA N 6 PARIAMAN	75.240.000,00	75.240.000,00	150.480.000,00
7	SMKN 1 PARIAMAN	126.000.000,00	126.000.000,00	252.000.000,00
8	SMKN 2 PARIAMAN	112.320.000,00	112.320.000,00	224.640.000,00
9	SMKN 3 PARIAMAN	194.760.000,00	194.760.000,00	389.520.000,00
10	SMKN 4 PARIAMAN	36.720.000,00	36.720.000,00	73.440.000,00
11	SLB N 1 PARIAMAN	27.720.000,00	27.720.000,00	55.440.000,00
12	SLB N 2 PARIAMAN	10.080.000,00	10.080.000,00	20.160.000,00
JUMLAH		**1.617.840.000,00**	**1.617.840.000,00**	**3.235.680.000,00**

4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	Anggaran	Realisasi
	Rp83.784.226.995,00	Rp83.784.226.995,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2024 adalah sebesar Rp83.784.226.995,00 dengan realisasi sebesar Rp83.784.226.995,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2024 meningkat Rp1.870.392.982,00 atau 2,28% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp81.913.834.013,00. Peningkatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa disebabkan penyesuaian kembali bantuan keuangan ke Pemerintah Desa sesuai dengan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Rincian ikhtisar Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa disajikan pada **Lampiran 3**.

3. Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp6.383.487.579,00	Rp6.383.487.579,51

Pembiayaan Bersih pada APBD Kota Pariaman TA 2024 adalah sebesar Rp6.383.487.579,00 dan realisasinya sebesar Rp6.383.487.579,51. Realisasi Dibandingkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pariaman Tahun 2023 sebesar Rp718.418.400,47 mengalami peningkatan sebesar Rp5.665.069.179,04 atau 788,55%.

3.a Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp7.383.487.579,00	Rp7.383.487.579,51

Penerimaan pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.383.487.579,00 dan realisasinya sebesar Rp7.383.487.579,51 sebesar 100,00%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya disajikan pada tabel 5.35 berikut..

Tabel 5.35 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Nilai (Rp)
➢ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.184.423.125,13
➢ Kas di BLUD	1.163.925.554,00
➢ Kas di Bendahara BOS	122.385,00
➢ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	42.669.245,38
➢ Kas Dana BOK Puskesmas	992.347.270,00
Jumlah	**7.383.487.579,51**

3.b Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp1.000.000.000,00	**Rp1.000.000.000,00**

Pengeluaran pembiayaan TA 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal kepada PT Bank Nagari dengan SP2D Nomor 13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 06 November 2024 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan Persetujuan Walikota Pariaman tanggal 26 Oktober 2024.

4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Anggaran	Realisasi
	Rp0,00	**Rp2.644.532.711,54**

Jumlah SiLPA akhir TA 2024 (per 31 Desember 2024) sebesar Rp2.644.532.711,54 mengalami penurunan sebesar Rp4.738.954.867,97 atau 64,18% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51. Rincian SiLPA Tahun 2024 disajikan pada tabel 5.36 berikut.

Tabel 5.36 Rincian SiLPA Tahun 2024

Keterangan	Nilai (Rp)
➢ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.571.594.340,16
➢ Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00
➢ Kas di BLUD	479.674.452,38
➢ Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	28.000.000,00
➢ Kas di Bendahara BOS	10.126.000,00
➢ Kas Dana BOK Puskesmas	468.377.669,00
JUMLAH	**2.644.532.711,54**

Sampai Tahun 2024 terdapat sisa penyaluran Dana Transfer Pusat sebesar Rp12.201.071.016,00 terdiri Dana Alokasi Umum (DAU) - yang ditentukan penggunaanya sebesar Rp5.333.952.979,00, dan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6.867.118.03,00 yang terdiri dari DAK-Fisik sebasar Rp2.277.256.891,00 DAK-Non Fisik sebesar Rp4.589.861.146,00 dengan rincian pada tabel 5.37, 5.38, 5.39.

Tabel 5.37 Sisa DAU – Yang Ditentukan Penggunaanya Sampai TA 2024

URAIAN	SiLPA	PENERIMAAN 2024	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL REALISASI	SISA DAU
1	*2*	*3*	*4=2+3*	*5*	*6=4-5*
Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	587.997.986,00	4.760.344.000,00	5.348.341.986,00	5.091.935.606,00	256.406.380,00
Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan	1.120.582.988,00	14.346.073.000,00	15.466.655.988,00	14.049.589.226,00	1.417.066.762,00
Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	4.795.199.060,00	13.938.176.000,00	18.733.375.060,00	15.135.160.893,00	3.598.214.167,00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	295.725.345,00	3.200.000.000,00	3.495.725.345,00	3.433.459.675,00	62.265.670,00
Dana Alokasi Umum penggajian Formasi PPPK	647.454.000,00	1.982.439.000,00	2.629.893.000,00	2.629.893.000,00	0,00
TOTAL	**7.446.959.379,00**	**38.227.032.000,00**	**45.673.991.379,00**	**40.340.038.400,00**	**5.333.952.979,00**

Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp5.333.952.979,00 telah di tagging pada anggaran sub kegiatan Tahun 2025 dengan rincian:

1. *Bidang Kesehatan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan UMKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp1.417.066.762,00;*
2. *Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada kegiatan administrasi keuangan dan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.598.214.167,00;*
3. *Bidang Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan Pertanahan pada kegiatan administrasi keuangan dan perangkat daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp256.406.380,00 dan pada Tahun 2025 sesuai dengan PMK Kemenkeu RI Nomor 29 Tahun 2025 terdapat pengurangan dana transfer dari pusat untuk DAU bidang pekerjaan umum dan untuk pelaporannya menunggu juknis dari Kemenkeu RI;*
4. *Bidang Pendanaan Kelurahan pada kegiatan di masing-masing Kelurahan Tahun 2025 sebesar Rp62.265.670,00.*

Tabel 5.38 Sisa DAK – Fisik Sampai TA 2024

KETERANGAN DAK	Sisa DAK- Fisik s.d Tahun 2023	Penerimaan Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Total Sisa DAK- Fisik (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Pendidikan	159.780.039,00	0,00	0,00	159.780.039,00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.105.600,00	258.384.898,00	258.384.898,00	2.105.600,00
Sekolah Dasar (SD)	0,00	1.320.523.106,00	1.319.713.106,00	810.000,00
Kesehatan dan KB	1.032.084.825,00	25.931.592.289,00	25.931.646.289,00	1.032.030.825,00
Keluarga Berencana	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Jalan	169.695.143,00	0,00	0,00	169.695.143,00
Bidang Air Minum	389.543.944,00	878.811.900,00	878.811.900,00	389.543.944,00
Bidang Perumahan dan Permukiman	10.150.000,00	5.386.911.300,00	5.340.386.150,00	56.675.150,00
Bidang Sanitasi	20.400.000,00	371.700.000,00	371.700.000,00	20.400.000,00
Bidang Irigasi	352.465.571,00	0,00	0,00	352.465.571,00
Bidang Pariwisata - Cadangan	93.696.619,00	0,00	0,00	93.696.619,00
TOTAL DAK Fisik	**2.229.975.741,00**	**34.147.923.493,00**	**34.100.642.343,00**	**2.277.256.891,00**

Sisa DAK-Fisik sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.277.256.891,00 akan dilakukan koordinasi dengan KPPN Padang terkait penyampaian laporan sisa DAK-Fisik.

Tabel 5.39 Sisa DAK Non – Fisik Sampai TA 2024

KETERANGAN DAK-NON FISIK	SiLPA Tahun 2023	PENERIMAAN 2024	TOTAL PENERIMAAN	REALISASI	SISA DAK
1	*2*	*3*	*4=2+3*	*5*	*6=4-5*
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	768.316.600,00	28.605.817.000,00	29.374.133.600,00	28.970.648.200,00	403.485.400,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	(105.319.610,00)	793.795.000,00	688.475.390,00	596.250.000,00	92.225.390,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	14.753.123.738,00	14.753.123.738,00	12.479.830.000,00	2.273.293.738,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	(31.819.848,00)	1.948.100.911,00	1.916.281.063,00	2.013.300.000,00	(97.018.937,00)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.167.348.950,00	1.167.348.950,00	1.167.348.950,00	0,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.278.581.165,00	11.098.364.064,00	13.376.945.229,00	11.788.361.415,00	1.588.583.814,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	52.131.581,00	599.856.250,00	651.987.831,00	606.647.760,00	45.340.071,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	321.342.000,00	329.712.500,00	651.054.500,00	418.002.750,00	233.051.750,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	20.627.577,00	393.682.423,00	414.310.000,00	386.242.080,00	28.067.920,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.832.000,00	0,00	22.832.000,00	0,00	22.832.000,00
TOTAL	**3.326.691.465,00**	**59.689.800.836,00**	**63.016.492.301,00**	**58.426.631.155,00**	**4.589.861.146,00**

Sisa DAK-Non Fisik sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.589.861.146,00 Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu RI melakukan pemotongan penyaluran DAK-Non Fisik Tahun 2025 dengan perhitungan berdasarkan sisa DAK-Non Fisik tahun pelaporan 2024.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

1. SAL Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp7.383.487.579,51	**Rp718.418.400,47**

SAL Awal Tahun 2024 sebesar Rp7.383.487.579,51 meningkat sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dari SAL Tahun 2023 sebesar Rp718.418.400,47.

2. Penggunaan SAL	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp7.383.487.579,51	**Rp718.418.400,47**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan. Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.383.487.579,51 yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang bersumber dari SAL Akhir per 31 Desember 2023. Penggunaan SiLPA Tahun 2024 meningkat sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dari Tahun 2023 sebesar Rp718.418.400,47.

3. SiLPA	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.644.532.711,54	**Rp7.383.487.579,51**

SiLPA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.644.532.711,54 menurun sebesar Rp4.738.954.867,97 atau 64,18% dari Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51.

4. SAL	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.644.532.711,54	**Rp7.383.487.579,51**

SAL per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.644.532.711,54 menurun sebesar Rp4.738.954.867,97 atau 64,18% dari Tahun 2023 sebesar Rp7.383.487.579,51.

5.3. Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp800.407.443.458,41 nilai Kewajiban sebesar Rp5.275.197.221,29 dan Ekuitas sebesar Rp795.132.246.237,12. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp26.128.048.414,74	**Rp33.173.422.854,64**

Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.128.048.414,74 dan Rp33.173.422.854,64, rincian disajikan pada tabel 5.40 berikut.

Tabel 5.40 Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Kas di Kas Daerah	1.571.594.340,16	5.184.423.125,13
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00	0,00
3	Kas di BLUD	507.674.452,38	1.163.925.554,00
4	Kas Dana BOS	10.126.000,00	122.385,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	42.669.245,38
6	Kas Dana BOK Puskesmas	468.377.669,00	992.347.270,00
7	Piutang Pajak Daerah	4.855.374.375,00	4.138.591.351,00
8	Piutang Retribusi Daerah	2.411.280.523,00	1.914.263.040,00
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	243.823.161,85	123.000.000,00
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.758.923.689,00	0,00
11	Piutang Transfer antar Daerah	11.888.547.076,00	8.704.184.792,00
12	Piutang Lainnya	608.409.748,66	703.738.804,33
13	Penyisihan Piutang	(3.305.781.627,41)	(2.895.083.170,43)
14	Persediaan	5.022.938.757,10	13.101.240.458,23
Jumlah		**26.128.048.414,74**	**33.173.422.854,64**

1.a. Kas di Kas Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.571.594.340,16	**Rp5.184.423.125,13**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.571.594.340,16 dan Rp5.184.423.125,13. Saldo ini merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening kas umum daerah nomor 0500.0101.0039-5.

Selama Tahun 2024 Pemerintah Kota Pariaman melakukan penempatan Kas dalam bentuk deposito berjangka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (1) “Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi

jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik". Nilai uang yang didepositokan adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 pada Bank Nagari dan sampai dengan akhir tahun anggaran Deposito dimaksud telah disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) "Deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetorkan ke Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember".

1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp86.760.250,00	**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp86.760.250,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

a) Kas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.250,00 merupakan kas tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b) Kas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp86.748.000,00 merupakan sisa kas di rekening penampungan KPP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga nomor 0500.0101.1332-0 rekening An. Dinas Dikpora Kota Pariaman KPP.

Rincian disajikan pada tabel 5.41 berikut.

Tabel 5.41 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Kesehatan	12.250,00	0,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	86.748.000,00	0,00
Jumlah		**86.760.250,00**	**0,00**

1.c. Kas di BLUD	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp507.674.452,38	**Rp1.163.925.554,00**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp507.674.452,38 dan Rp1.163.925.554,00, rincian disajikan pada tabel 5.42 berikut.

Tabel 5.42 Rincian Kas BLUD

NO	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*3*
1	RSUD Sadikin	274.743.994,00	1.101.381.172,00
2	UPTD Air Bersih	77.770.661,00	62.544.382,00
3	Puskesmas Naras	31.217.681,00	0,00
4	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	5.547.906,00	0,00
5	Puskesmas Pariaman	62.419.676,00	0,00

NO	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*3*
6	Puskesmas Kuraitaji	24.585.110,00	0,00
7	Puskesmas Air Santok	12.155.087,38	0,00
8	Puskesmas Marunggi	18.354.947,00	0,00
9	Puskesmas Sikapak	879.390,00	0,00
TOTAL		**507.674.452,38**	**1.163.925.554,00**

Rincian Kas di pada BLUD disajikan pada **Lampiran 4**.

1.d. Kas Dana BOS

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp10.126.000,00	**Rp122.385,00**

Saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.126.000,00 dan Rp122.385,00, rincian disajikan pada tabel 5.43 berikut.

Tabel 5.43 Rincian Kas Dana BOS

No.	Sekolah	Saldo per 31 Desember Tahun 2024	Saldo per 31 Desember Tahun 2023
1	2	3	4
1	SDN Negeri	10.126.000,00	122.385,00
2	SMP Negeri	0,00	0,00
Jumlah		**10.126.000,00**	**122.385,00**

Rincian Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 5**.

Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo Kas BOS pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.126.000,00 merupakan Kas pada rekening BOS terdiri dari:

a) UPT. Kecamatan Pariaman Tengah SDN 18 Karan Aur sebesar Rp4.036.000,00; dan

b) UPT. Kecamatan Pariaman Selatan SDN 07 Toboh Palabah sebesar Rp6.090.000,00.

1.e. Kas pada FKTP

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp0,00	**Rp42.669.245,38**

Kas pada FKTP merupakan saldo Kas yang berada pada pengelola Bendahara Umum Daerah pada Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP/Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp42.669.245,38, rincian disajikan pada tabel 5.44 berikut.

Tabel 5.44 Rincian Kas pada FKTP

NO	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Puskesmas Naras	0,00	176.658,00
2	Puskesmas Pariaman	0,00	14.763.631,00
3	Puskesmas KP Baru Padusunan	0,00	0,00
4	Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00
5	Puskesmas Marunggi	0,00	16.754.912,00
6	Puskesmas Air Santok	0,00	10.974.044,38
7	Puskesmas Sikapak	0,00	0,00
Total		**0,00**	**42.669.245,38**

Pada Tahun 2024 FKTP/Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Wali Kota Pariaman nomor 250/400/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

1.f. Kas Dana BOK Puskemas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp468.377.669,00	**Rp992.347.270,00**

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp468.377.669,00 dan Rp992.347.270,00 merupakan Kas pada Rekening Penerima BOK salur Tahun 2024. Rincian disajikan pada tabel 5.45 berikut.

Tabel 5.45 Daftar Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024

NO	SKPD	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Puskesmas Naras	283.798.931,00	474.651.069,00	700.706.875,00	57.743.125,00
2	Puskesmas Pariaman	190.508.671,00	1.211.141.329,00	1.307.240.897,00	94.409.103,00
3	Puskesmas KP Baru Padusunan	111.303.358,00	622.996.642,00	725.351.848,00	8.948.152,00
4	Puskesmas Kuraitaji	100.170.321,00	611.283.679,00	671.358.825,00	40.095.175,00
5	Puskesmas Marunggi	96.891.563,00	614.537.437,00	600.763.961,00	110.665.039,00
6	Puskesmas Air Santok	135.457.411,00	561.254.589,00	620.715.704,00	75.996.296,00
7	Puskesmas Sikapak	74.217.015,00	622.512.985,00	616.209.221,00	80.520.779,00
TOTAL		**992.347.270,00**	**4.718.377.730,00**	**5.242.347.331,00**	**468.377.669,00**

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada **Lampiran 6.**

1.g. Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp4.855.374.375,00	**Rp4.138.591.351,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.855.374.375,00 dan Rp4.138.591.351,00, rincian disajikan pada tabel 5.46 berikut.

Tabel 5.46 Daftar Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Restoran	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.840.177.475,00	4.123.394.451,00
3	Pajak Parkir	166.700,00	166.700,00
Jumlah		**4.855.374.375,00**	**4.138.591.351,00**

Rincian Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 7a**.

Kegiatan *updating* data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdapat piutang dari Tahun 2014 s.d. 2024 sebesar Rp4.840.177.475,00 dengan rincian disajikan pada tabel 5.47 berikut.

Tabel 5.47 Daftar Rincian Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d. 2024

No.	Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2014	225.802.984,00	4.899.331,00	220.903.653,00
2	2015	215.991.765,00	4.292.966,00	211.698.799,00
3	2016	157.293.483,00	2.278.454,00	155.015.029,00
4	2017	255.243.051,00	5.936.244,00	249.306.807,00
5	2018	183.012.023,00	3.414.400,00	179.597.623,00
6	2019	180.991.527,00	4.534.674,00	176.456.853,00
7	2020	603.290.928,00	23.986.254,00	579.304.674,00
8	2021	672.961.848,00	32.101.462,00	640.860.386,00
9	2022	692.394.489,00	37.441.169,00	654.953.320,00
10	2023	936.412.353,00	109.109.205,00	827.303.148,00
11	2024	0,00	0,00	944.777.183,00
Jumlah		**4.123.394.451,00**	**227.994.159,00**	**4.840.177.475,00**

Piutang PBB P2 untuk Tahun 2024 sebesar Rp944.777.183,00 merupakan perolehan dari backup data SISMIOP per tanggal 31 Desember 2024 dari nilai ketetapan sebesar Rp2.321.256.274,00 dan pembayaran sebesar Rp1.376.479.091,00.

1.h. Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.411.280.523,00	**Rp1.914.263.040,00**

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.411.280.523,00 dan Rp1.914.263.040,00, dengan rincian disajikan pada tabel 5.48 berikut.

Tabel 5.48 Daftar Piutang Retribusi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.650.000,00	9.650.000,00
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	88.206.943,00	88.206.943,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar (Disparbud)	112.100.000,00	27.600.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	73.954.000,00	27.125.000,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Diskoperindag)	2.175.000,00	2.175.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	1.350.214.779,00	1.115.944.895,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Disperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.983.848,00	10.983.848,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	758.095.506,00	631.531.354,00
10	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.854.447,00	0,00
Jumlah		**2.411.280.523,00**	**1.914.263.040,00**

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada **Lampiran 7b.**

1.i. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp243.823.161,85	**Rp123.000.000,00**

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp243.823.161,85 dan Rp123.000.000,00 terdiri dari:

1. Koreksi LKPD TA 2023 atas piutang dana bergulir koperasi sebesar Rp123.000.000,00; dan
2. Piutang Denda Retribusi Air Bersih UPT Pengelola Air Bersih sebesar Rp120.000.000,00.

Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 5.49 berikut.

Tabel 5.49 Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman

No.	Nama Nasabah/KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Penyaluran Awal Tahun 2006			
1	Jamaah Masjid Kampung Baru	50.000.000,00	0,00	
2	Takapalo Saiyo	50.000.000,00	35.000.000,00	10.500.000,00
3	Pengadilan Agama	50.000.000,00	0,00	
4	Bina Karya Pariaman	50.000.000,00	0,00	
5	KP-RI SMPN 3 Pariaman	50.000.000,00	0,00	
6	Jambak Sakato	50.000.000,00	27.500.000,00	8.250.000,00
7	KPN SMAN 2 Pariaman	50.000.000,00	0,00	
8	Tuah Sakato	50.000.000,00	37.500.000,00	11.250.000,00
9	KPP Laskar Cimparuh	50.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
10	KPRI Pemko Pariaman	50.000.000,00	0,00	
Jumlah		**500.000.000,00**	**110.000.000,00**	**33.000.000,00**
	Guliran I Tahun 2006			
1	PRIMKOPTAMA	50.000.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00
2	Koperasi Nelayan Pasie Nareh	10.000.000,00	5.500.000,00	1.650.000,00
3	KPP SERB USH	20.000.000,00	0,00	
	Guliran II Tahun 2009			
1	KOPPAS APPSI	50.000.000,00	0,00	
2	KSU Teratai	50.000.000,00	0,00	
3	KPP Kampung Apar Farming	50.000.000,00	0,00	
4	Koperasi Tirta Anai	50.000.000,00	0,00	
Jumlah		**280.000.000,00**	**13.000.000,00**	**3.900.000,00**
Total		**780.000.000,00**	**123.000.000,00**	**36.900.000,00**

Rincian atas piutang denda pemakaian air UPTD. Air Bersih Kota Pariaman per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 5.50 berikut.

Tabel 5.50 Rincian Piutang Denda Air Bersih

No.	Lokasi	Kategori Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar> 1 s.d 3 Bulan	Diragukan > 3 s.d 12 Bulan	Macet > 12 Bulan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pariaman Tengah	157.493,00	1.342.921,00	17.641.365,75	21.553.239,50	40.695.019,25
2	Paraman Utara	0,00	67.001,00	7.684,00	97.125,00	171.810,00
3	Pariaman Selatan	128.289,00	376.332,50	7.393.089,75	33.363.502,00	41.261.213,25
4	Pariaman Timur	108.171,00	276.848,50	6.554.017,95	31.756.081,90	38.695.119,35
Total		**393.953,00**	**2.063.103,00**	**31.596.157,45**	**86.769.948,40**	**120.823.161,85**

1.j. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.758.923.689,00	**Rp0,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.758.923.689,00 dan Rp0,00.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan piutang transfer penyaluran dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Saldo Piutang TDF sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.758.923.689,00 merupakan Silpa TDF Tahun 2023 sebesar Rp1.629.474.689,00 ditambah saldo tahun 2024 sebesar Rp129.449.000,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI Nomor 136/ND/XV/03/2025.

1.k. Piutang Transfer antar Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp11.888.547.076,00	**Rp8.704.184.792,00**

Saldo Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.888.547.076,00 dan Rp8.704.184.792,00.

Piutang Transfer antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 berdasarkan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bependa/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan rincian disajikan pada tabel 5.51 berikut.

Tabel 5.51 Rincian Piutang Transfer antar Daerah Tahun 2024

NO	Uraian	Nilai
1	*2*	*3*
1.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.421.608.824,00
2.	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	874.295.597,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.539.408.766,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	53.233.889,00
Jumlah		**11.888.547.076,00**

1.l. Piutang Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp608.409.748,66	**Rp703.738.804,33**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp608.409.748,66 dan Rp703.738.804,33, rincian disajikan pada tabel 5.52 berikut.

Tabel 5.52 Daftar Piutang Lain-Lain

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang jasa bunga dana bergulir BPR	117.367.333,33	118.564.000,00
3	Piutang Lain-lain TGR	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR	6.545.662,00	6.095.662,00
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	320.434.635,00	320.434.635,00
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	139.049.569,16	139.049.569,16
7	Piutang Denda Air Bersih	0,00	94.582.389,00
Jumlah		**608.409.748,66**	**703.738.804,33**

Uraian Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp608.409.748,66** sebagai berikut.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP sebesar **Rp24.600.000,00**

  Dana bergulir Penguatan Modal Koperasi Kota Pariaman bidang usaha simpan pinjam dikelola oleh Dinas Perindagkop UKM dan disalurkan melalui Bank Nagari Cabang Pariaman sebesar Rp500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat tunggakan pokok sebesar Rp123.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp36.900.000,00. Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman dana bergulir sesuai perjanjian yaitu 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari. Sehingga saldo piutang bunga jasa dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar 2/3x Rp36.900.000 = Rp24.600.000,00.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund* sebesar **Rp117.367.333,33**

  Pengelolaan dana bergulir *Revolving Fund* dulunya dilaksanakan oleh DPMDES dan sekarang oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disalurkan melalui PT. BPR La Mangau Sejahtera sebesar Rp2.500.000.000,00. Tunggakan Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian disajikan pada tabel 5.53 berikut.

Tabel 5.53 Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*

Sektor	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*
Pertanian & Peternakan	32.742.500,00	32.742.500,00
Kelautan & Perikanan	34.467.000,00	34.547.000,00
Industri	49.705.000,00	49.705.000,00
Perdagangan	59.136.500,00	60.851.500,00
Jumlah	**176.051.000,00**	**177.846.000.00**

Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman Dana Bergulir sesuai perjanjian yaitu: 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk

Bank Nagari, sehingga saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar 2/3 x Rp176.051.000,00 = Rp117.367.333,33.

- Piutang Lain-lain TGR sebesar **Rp412.549,17**

  Piutang Lain-lain TGR merupakan piutang TGR yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2023. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK Semester II Tahun 2023 nilai Piutang TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp412.549,17.

- Piutang Jasa *Revolving* BPR sebesar **Rp6.545.662,00**

  Merupakan Jasa Giro Tabungan *Revolving* pada Bank BPR La Mangau Sejahtera berdasarkan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman surat nomor 01/BPR-LMS/SDNM-Umum/I-2025.

- Piutang Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp320.434.635,00**

  Merupakan Piutang atas Jaminan Pelaksanaan oleh *Videi General Insurance* sebesar Rp641.083.635,00 atas pemutusan kontrak kegiatan pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja pengadaan bangunan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Puncak Timur Papua. (nilai berdasarkan progres lapangan), telah dilakukan angsuran pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan oleh PT Puncak Timur Papua sebesar Rp320.649.000,00 dengan rincian pembayaran: tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp150.649.000,00, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp60.000.000,00, dan tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 dan tanggal 06 Februari 2023 nilai pembayaran sebesar Rp15.000.000,00. Sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat penyetoran atas sisa pembayaran oleh PT. Puncak Timur Papua berdasarkan surat Perintah Pembayaran Jaminan Pelaksanaan RSUD Sadikin Nomor 005/022/RS-SDNK/2025 tanggal 02 Januari 2025.

- Piutang Kelebihan Pembayaran sebesar **Rp139.049.569,16**

  Merupakan piutang kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Tahun Anggaran 2019 pada PT Puncak Timur Papua. Sampai dengan tahun 2024 tidak terdapat penyetoran atas sisa pembayaran oleh PT. Puncak Timur Papua Berdasarkan surat RSUD dr. Sadikin Nomor 005/083-A/RS-SDNK/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal penagihan kelebihan pembayaran.

1.m. Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp3.305.781.627,41)	**(Rp2.895.083.170,43)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp3.305.781.627,41) dan (Rp2.895.083.170,43) terdiri dari:

a. Penyisihan Piutang Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp2.703.917.540,75)	(Rp2.217.995.481,93)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.703.917.540,75) dan (Rp2.217.995.481,93) dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp1.882.979.300,21)	(Rp1.585.899.128,96)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.882.979.300,21) dan (Rp1.585.899.128,96), dengan rincian disajikan pada tabel 5.54 berikut.

Tabel 5.54 Daftar Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*3*
1	Pajak Restoran	(15.030.200,00)	(15.030.200,00)
2	PBB P2	(1.867.782.400,21)	(1.570.702.228,96)
3	Pajak Parkir	(166.700,00)	(166.700,00)
Jumlah		**(1.882.979.300,21)**	**(1.585.899.128,96)**

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp297.080.171,25 dari penyisihan piutang per 31 Desember 2023 . (Rincian disajikan pada **Lampiran 8a**).

2. Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp718.161.933,36)	(Rp632.096.352,97)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp718.161.933,36) dan (Rp632.096.352,97), dengan rincian disajikan pada tabel 5.55 berikut.

Tabel 5.55 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*3*
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	(61.646.943,00)	(60.385.343,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	(1.046.000,00)	(1.046.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Disperindagkop)	(2.175.000,00)	(2.175.000,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	(24.277.500,00)	(23.617.500,00)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*3*
5	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH)	(570.214.925,12)	(499.617.661,97)
6	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH)	(38.143.445,00)	(24.621.000,00)
7	Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	(9.650.000,00)	(9.650.000,00)
8	Retribusi IMB (DPMPTSP dan Naker)	(11.008.120,24)	(10.983.848,00)
Jumlah		**(718.161.933,36)**	**(632.096.352,97)**

Rincian disajikan pada **Lampiran 8b**.

3. **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	(Rp102.776.307,19)	**(Rp0,00)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp102.776.307,19) dan (Rp0,00). Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 merupakan penyisihan terhadap piutang denda retribusi air pada UPTD. Air Bersih.

b. **Penyisihan Piutang Lainnya**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	(Rp601.864.086,66)	**(Rp677.087.688,50)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp601.864.086,66) dan (Rp677.087.688,50), dengan rincian disajikan pada tabel 5.56 berikut.

Tabel 5.56 Daftar Penyisihan Piutang Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Piutang bunga dana bergulir KSP/USP	(24.600.000,00)	(24.600.000,00)
2	Piutang bunga dana bergulir BPR	(117.367.333,33)	(118.564.000,00)
4	Piutang Lain-lain TGR	(412.549,17)	(412.549,17)
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	(320.434.635,00)	(320.434.635,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	(139.049.569,16)	(139.049.569,16)
7	Piutang Denda Air Bersih	0,00	(74.026.935,17)
Jumlah		**(601.864.086,66)**	**(677.087.688,50)**

Rincian disajikan pada **Lampiran 8c**.

1.n. Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.022.938.757,10	**Rp13.101.240.458,23**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.022.938.757,10 dan Rp13.101.240.458,23, dengan rincian disajikan pada tabel 5.57 berikut.

Tabel 5.57 Daftar Persediaan

No.	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Bahan Kimia	101.173.900,00	184.546.690,00
2	Bahan Baku	0,00	9.014.500,00
3	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	31.698.500,00	34.082.000,00
4	Bahan Lainnya	531.470.664,00	256.876.180,00
5	Alat Tulis Kantor	56.555.002,00	87.797.890,00
6	Bahan Cetak	139.008.300,00	144.984.550,00
7	Benda Pos	3.120.000,00	190.000,00
8	Alat Listrik	432.168.650,00	400.169.800,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.000,00	207.216.450,00
10	Obat	3.525.016.662,10	4.003.614.440,23
11	Obat-obatan Lainnya	174.481.479,00	230.479.958,00
12	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	7.535.833.000,00
13	Pakan	24.195.600,00	6.435.000,00
Jumlah		**5.022.938.757,10**	**13.101.240.458,23**

Rincian data persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 9**.

Per 31 Desember 2024 terdapat persediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang kadaluarsa dan/atau sudah dimusnahkan nilai persediaan sebesar Rp151.924.674,76. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor 35/00.2.4/2024 tangal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman. Daftar obat yang dihapuskan dari persediaan obat perbekalan kesehatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Pariaman sebesar Rp69.008.145,00, obat yang berasal dari program APBN/APBD sebesar Rp82.916.530,00.

Tabel 5.58 Daftar Persediaan Kedaluwarsa dan/atau Sudah Dimusnahkan

No	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	*2*	*3*
1	UPT Instalasi Farmasi	103.272.460,73
2	UPT Puskesmas Naras	10.790.512,34
3	UPT Puskesmas Kuraitaji	7.348.299,75

No	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	*2*	*3*
4	UPT Puskesmas Kampung Baru Pdsn	5.641.756,57
5	UPT Puskesmas Air Santok	11.319.271,48
6	UPT Puskesmas Sikapak	2.811.321,56
7	UPT Puskesmas Pariaman	4.050.609,91
8	UPT Puskesmas Marunggi	6.690.442,42
JUMLAH		151.924.674,76

2. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp60.948.373.500,00	**Rp59.942.705.500,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp60.948.373.500,00 dan Rp59.942.705.500,00. Terdapat pembayaran dana bergulir Tahun 2024 sebesar Rp5.668.000,00 sesuai dengan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman Tahun 2024 surat nomor 01/BPR-LMS/SDNM-Umum/I-2025.

2.a. Dana Bergulir

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp775.474.500,00	**Rp769.806.500,00**

Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp775.474.500,00 dan Rp769.806.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Non Permanen		*Rp2.500.000.000,00*
Investasi Non Permanen yang diragukan tidak tertagih terdiri dari:		
- *DPMDES*	*Rp1.601.525.500,00*	
- *Diskoperindag*	*Rp123.000.000,00*	*(Rp1.724.525.500,00)*
Investasi Non Permanen Netto		***Rp775.474.500,00***

Dana bergulir yang tidak tertagih disajikan mulai Tahun 2013 setelah Pemerintah Kota Pariaman membuat Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Investasi permanen yang diragukan tidak tertagih senilai Rp1.724.525.500,00 merupakan penyisihan atas dana bergulir berdasarkan *aging schedule*:

1. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
2. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 10%.
3. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.

4. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil *aging schedule* tersebut, maka diperoleh rincian dana bergulir yang tidak tertagih senilai Rp1.724.525.500,00 terdiri dari dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM dan untuk penguatan modal usaha koperasi, yaitu:

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM sebesar Rp1.601.525.500.
- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha koperasi sebesar Rp123.000.000,00.

Alokasi Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

1. Bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme "jasa/bunga dan biaya dana bergulir" sebesar 6% per tahun. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan BPR LPN Lurah Ampalu Kurai Taji (sekarang BPR La Mangau Sejahtera Kurai Taji). Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di BPR, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan BPR, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk BPR sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan disalurkan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Oktober 2004 melalui BPR dan pengguliran pertama yang berasal dari pokok sebesar Rp91.500.000,00. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2024 dengan rincian pada tabel 5.59 berikut.

Tabel 5.59 Rincian Dana Bergulir bagi UMKM

No.	Sektor	Jumlah Nasabah (orang)	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertanian dan Peternakan	48	351.500.000,00	279.534.500,00	32.742.500,00
2	Kelautan dan Perikanan	77	412.500.000,00	321.747.500,00	34.467.000,00
3	Industri	106	588.500.000,00	434.986.500,00	49.705.000,00
4	Perdagangan	181	739.000.000,00	565.257.000,00	59.136.500,00
Jumlah		**412**	**2.091.500.000,00**	**1.601.525.500,00**	**176.051.000,00**

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan bagi UMKM di BPR adalah sebesar Rp399.045.700,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 330.0.00419.0 bahwa rekening tersebut tidak dapat dicairkan untuk di transfer ke rekening Kas Daerah karena masalah administrasi specimen tanda tangan pemilik rekening dan saldo sebesar Rp6.545.662,00 yang bersumber dari

penerimaan jasa giro rekening pada rekening Nomor 330.0.00425.0. Kedua saldo tersebut mengendap di rekening masing-masing dan selama Tahun 2024 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

2. Bantuan penguatan modal kepada Koperasi di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme "jasa/bunga dan biaya dana bergulir" sebesar 6% per tahun. Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di Bank Nagari, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan Bank Nagari, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk Bank Nagari sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir pada Tahun 2006 adalah sebesar Rp500.000.000,00 melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM. Selanjutnya terdapat pengguliran pertama dari pengembalian pokok pada Tahun 2006 dan pengguliran kedua pada Tahun 2009 dengan total plafon Rp280.000.000,00.

   Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan Modal Koperasi di Bank Nagari adalah sebesar Rp377.000.000,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 05000101009047. Saldo tersebut masih mengendap di rekening tersebut dan selama Tahun 2024 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

Rincian perhitungan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 10a dan 10b**.

2.b. Investasi Permanen	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp60.172.899.000,00	**Rp59.172.899.000,00**

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang menggambarkan saldo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp60.172.899.000,00 dan Rp59.172.899.000,00. Penyertaan modal pemerintah Kota Pariaman kepada BUMD, yaitu:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp57.348.000.000,00 berupa saham seri A sejumlah 57.348 lembar atau merupakan 3,01% dari seluruh jumlah saham Seri A dalam perseroan, dengan rincian pada tabel 5.60 berikut.

Tabel 5.60 Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari

No.	Tahun	Nominal (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2003-2006	1.000.000,00	7.100	7.100.000.000,00
2	2007-2009	1.000.000,00	1.500	1.500.000.000,00
		1.000.000,00	2	2.000.000,00
3	2010	1.000.000,00	742	742.000.000,00

No.	Tahun	Nominal (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4	2011	1.000.000,00	1.479	1.479.000.000,00
5	2012	1.000.000,00	3.184	3.184.000.000,00
6	2013	1.000.000,00	5.582	5.582.000.000,00
7	2014	1.000.000,00	5.111	5.111.000.000,00
8	2015	1.000.000,00	7.515	7.515.000.000,00
9	2017	1.000.000,00	11.183	11.183.000.000,00
10	2018	1.000.000,00	1.800	1.800.000.000,00
11	2020	1.000.000,00	8.650	8.650.000.000,00
12	2022	1.000.000,00	2.500	2.500.000.000,00
13	2024	1.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00
Jumlah			**57.348**	**57.348.000.000,00**

Tahun 2024 terdapat penambahan investasi permanen kepada PT Bank Nagari Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan Persetujuan Wali Kota Pariaman tanggal 26 Oktober 2024.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

   Penyertaan Modal pertama kali dilakukan pada Tahun 2007 melalui Kantor Perwakilan Sumbar PT Balairung Citra Jaya Sumbar dibentuk dengan Akta Notaris Tentang Pendirian Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2009 yang berkedudukan di Jakarta. Pada Tahun 2011 PT Balairung Citra Jaya Sumbar menerbitkan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 600 lembar dengan nominal @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebanyak 400.000 lembar dengan nominal @ Rp1.000,00.

   Tambahan modal disetor pada Tahun 2012 sebesar Rp1.824.899.000,00 terdiri dari Saham Seri A sebesar Rp1.094.939.400,00 atau 1.094,94 lembar saham dengan harga perlembar @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebesar Rp729.959.600,00 atau 729.959,6 lembar saham dengan harga perlembar sebesar @ Rp1.000,00.
   Core Business dari PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah jasa pengelolaan hotel. Persentase saham Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar 1,72% dari nilai saham Rp2.824.899.000,00 dan sampai dengan tanggal pelaporan LKPD Kota Pariaman TA 2024 data bagi hasil deviden PT Balairung Citra Jaya Sumbar belum diterima oleh pemerintah daerah. (Rincian Investasi Permanen disajikan pada **Lampiran 11**).

3. Aset Tetap	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp598.320.567.010,70	**Rp624.932.132.021,00**

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp598.320.567.010,70 dan Rp624.932.132.021,00. Nilai Buku Aset Tetap

Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.611.565.010,30 atau 4,26%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

3.a. Tanah	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp103.598.821.439,25	**Rp103.617.451.439,25**

Nilai Tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.598.821.439,25 dan Rp103.617.451.439,25, dengan rincian disajikan pada tabel 5.61 berikut.

Tabel 5.61 Rincian Saldo Aset Tetap Tanah Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
1	2
Saldo Awal	**103.617.451.439,25**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	1.800.000,00
Total Mutasi Tambah	**1.800.000,00**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD (-)	(18.000.000,00)
Penghapusan (-)	(18.630.000,00)
Total Mutasi Kurang	**(20.430.000,00)**
Saldo Akhir	**103.598.821.439,25**

Penambahan dan pengurangan aset tanah diuraikan sebagai berikut.

1. Transfer masuk antar SKPD (+) Tanah sebesar Rp1.800.000,00 merupakan mutasi aset tanah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Puskesmas Kampung Baru Padusunan Rp18.000.000,00 yaitu tanah bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Koto Marapak.
2. Transfer keluar antar SKPD (-) Tanah sebesar Rp1.800.000,00 merupakan mutasi aset tanah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu sesuai rincian mutasi antar SKPD.
3. Penghapusan sebesar Rp18.630.000,00 merupakan aset tetap tanah yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset yang dihibahkan ke Kemenag dengan SK penghapusan No.187/900/2024.

Tanah senilai Rp103.598.821.439,25 merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Pariaman yang pemanfaatan atas tanah dimaksud digunakan untuk bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, pasar produksi, jalan *by pass*, irigasi, jalan, dan jembatan.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. 267 persil tanah bersertifikat dengan luas 1.084.244,50 m² senilai Rp72.357.160,49. Total fisik sertifikat adalah sebanyak 386 sertifikat;
2. 9 persil tanah masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Pariaman dengan luas 43.589,00 m² senilai Rp2.779.360.000,00 yaitu:

a) Tanah untuk Gedung Pariwisata Ampalu Pauh, hibah dari Ibu Ratna Juwita (Eks Tanah STIE-SB), luas 31.910 m^2 senilai Rp2.616.620.000,00;

b) SDN 02 Karan Aur, luas 725 m^2 senilai Rp45.000.000,00;

c) Tanah Bangunan Sekolah SDN 06 Punggung Lading (wakaf), luas 2.479 m^2 senilai Rp12.250.000,00;

d) Tanah Bangunan Sekolah SDN 04 Kajai, luas 2.015 m^2 senilai Rp42.500.000,00;

e) Tanah Bangunan SDN 10 Sungai Pasak, luas 1.515 m^2 senilai Rp14.440.000,00;

f) Tanah Bangunan SDN 02 Marunggi, luas 645 m^2 senilai Rp12.900.000,00;

g) Tanah Bangunan SDN 11 Cubadak Air Utara, luas 1.550 m^2 senilai Rp7.710.000,00;

h) Gedung Nasional (STIE-SB) Kelurahan Jawi-Jawi I Kota Pariaman, luas 2.150 m^2 senilai Rp23.650.000,00;

i) Puskesmas Pembantu Talago Sariak, luas 600 m^2 senilai Rp4.290.000,00.

3. Belum bersertifikat sebanyak 217 bidang tanah dengan luas 1.010.502.82 m^2 senilai Rp31.260.290.950,00.

Rincian Tanah masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 12**.

Selain itu, terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak tiga persil dengan nilai perolehan:

1. Tanah TPI Muaro pinjam pakai dengan Satuan Kepolisian Perairan Polres Kota Pariaman, nilai perolehan Rp18.450.000,00;
2. Tanah Departemen Agama pinjam pakai dengan nilai perolehan Rp18.630.000,00; dan
3. Tanah Pantai Gandoriah di belakang Hotel Nan Tongga yang disewakan kepada masyarakat dengan nilai perolehan Rp18.540.000,00.

Tabel 5.62 Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman

No.	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang Dipinjamkan	Tanggal Pinjam Pakai	Jangka Waktu
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah ukuran 8x10 m² untuk pos jaga kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Tanah Pemerintah Kota seluas 1.863 m² di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur	8 Maret 2021	5 thn
3	Kepala Kepolisisan Resor Pariaman	Tanah seluas 80 M^2 (8 X 10 M^2) untuk pembangunan pos penjagaan kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn

Terdapat Aset Tetap Tanah yang disewakan kepada pihak lain sebanyak satu persil, yaitu tanah ukuran 24 x 7,5 m² di kawasan wisata Gandoriah untuk Warung Gandoriah dengan Pejabat Pemakai a.n. Irwan Maryon, tanggal sewa 19 Oktober 2023 selama lima tahun.

Selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.216/PDT/2023/PT PDG memerintahkan pengurangan luas tanah dan nilai tanah karan aur sebelumnya nilainya Rp1.605.420.000,00 - Rp270.000.000,00 = Rp1.335.420.000 dan pengurangan luas sebelumnya Rp59.460,00 - Rp10.000,00 = Rp49.460,00 tapi keputusan itu belum dilakukan pengurangan pada KIBAR tanah.

3.b. Peralatan dan Mesin	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp256.586.551.868,93	**Rp250.494.507.245,37**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp256.586.551.868,93 dan Rp250.494.507.245,37, dengan rincian disajikan pada tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**250.494.507.245,37**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal(+)	186.616.500,00
Belanja modal (+)	10.229.912.049,00
Hibah Masuk (+)	174.500.000,00
Salah Rekening (+)	135.696.500,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	69.672.100,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	3.009.832.370,00
Total Mutasi Tambah	**13.806.229.519,00**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD (-)	(3.009.832.370,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(475.595.209,00)
Salah Rekening (-)	(9.933.300,00)
mutasi ke Aset lainya (-)	(3.548.341.516,44)
Terutang 2023 (-)	(158.450.000,00)
Penghapusan (-)	(512.032.500,00)
Total Mutasi Kurang	**(7.714.184.895,44)**
Saldo Akhir	**256.586.551.868,93**

Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 13.**

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.586.551.868,93 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Jenis	Nilai
1	2	3
1	Alat besar	10.056.965.479,00
2	Alat angkutan	66.932.126.218,95
3	Alat bengkel dan alat ukur	3.944.019.670,00
4	Alat pertanian	4.616.805.521,20
5	Alat kantor dan rumah tangga	59.814.458.788,80
6	Alat studio, komunikasi, dan pemancar	7.436.892.318,33
7	Alat kedokteran dan kesehatan	37.386.847.707,00
8	Alat laboratorium	27.564.079.475,33
9	Alat persenjataan	877.599.826,00
10	Komputer	32.874.526.680,32
11	Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian	16.250.000,00
12	Alat keselamatan kerja	2.475.921.970,00
13	Alat peraga	91.800.000,00
14	Peralatan proses/produksi	27.450.000,00
15	Rambu-rambu	2.187.131.264,00
16	Peralatan olah raga	283.676.950,00
Jumlah		**256.586.551.868,93**

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.229.912.049,00 berdasarkan LRA Tahun 2024;
2. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp186.616.500,00 adalah koreksi karena pencatatan kembali BMD yang belum dicatat dalam Simda BMD pada:
    a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga UPT. Kec. Pariaman Utara sebesar Rp91.116.500,00 pada SDN 10 Cubadak Air sebesar Rp76.800.000,00 dan SDN 19 Cubadak Air Utara sebesar Rp3.496.500,00;
    b. Puskesmas Air Santok sebesar Rp14.500.000,00; dan
    c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Rp.81.000.000,00 yaitu sembilan buah tablet samsung pembelian Tahun 2022.
3. Hibah Masuk (+) Bantuan dari Pihak Lain sebesar Rp174.500.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.65 Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga

No.	SKPD	Jenis Barang	Bantuan/Hibah(belum tercatat)/DANA BTT (+)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Puskesmas Naras	Mobil Ambulannce	150.000.000,00	hibah mobil ambulance merek Isuzu Tahun 2003 dari dinkes Provinsi Sumbar Rp150.000.000,.
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	container	24.500.000,00	Hibah dari PT. Kereta Api Indonesia Persero Tahun 2024
Jumlah			**174.500.000,00**	

4. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp135.696.500,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.66 Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening

SKPD		NILAI REKLAS	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*
UPT. KECAMATAN PARIAMAN UTARA					
1	SDN 02 Sikapak Barat (Eks SDN 02 Sikapak Mudik)	5.000.000,00	Tenda 2 unit	5.000.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
2	SDN 06 Birik (Eks SDN 05 Padang Birik Birik)	5.000.000,00	CCTV	5.000.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
3	SDN 14 Cubadak Air Selatan (Eks SDN 19 Olo)	900.000,00	Speaker	900.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
4	SDN 17 Tungkal Utara (Eks SDN 22 Taji Taji)	1.250.000,00	Papan Slogan Ruang Guru sebesar Rp750.000	750.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
			Papan Slogan Ruang Guru sebesar Rp500.000	500.000,00	
JUMLAH		***12.150.000,00***		***12.150.000,00***	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH					
1	SDN 08 Kampung Jawa I (Eks SDN 05 Kampung Jawa I)	16.100.000,00	Laptop	13.100.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
			Printer	3.000.000,00	
2	SDN 14 Pauh Timur (Eks SDN 23 Koto Mandakek)	7.500.000,00	Gandang Tasa	7.500.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
3	SDN 17 Kampung Baru (Eks SDN 27 Kampung Baru)	2.500.000,00	Lemari Penyimpanan	2.500.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
JUMLAH		***26.100.000,00***		***26.100.000,00***	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN SELATAN					
1	SDN 02 Marunggi (Eks 03 Marunggi)	3.000.000,00	Speaker	3.000.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
2	SDN 05 Marabau	8.700.000,00	Laptop	8.700.000,00	
3	SDN 11 Marunggi (Eks	7.000.000,00	Speaker	4.000.000,00	

SKPD		NILAI REKLAS	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1		*2*	*3*	*4*	*5*
UPT. KECAMATAN PARIAMAN UTARA					
	SDN 14 Marunggi)				
			Papan Media	3.000.000,00	
JUMLAH		***18.700.000,00***		***18.700.000,00***	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN TIMUR					
1	SDN 02 Talago Sariak (Kec. Pariaman Timur)	5.100.000,00	Alat Musik Drum Band	5.100.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
JUMLAH		***5.100.000,00***		***5.100.000,00***	
SMP					
1	SMP 1 Pariaman	22.146.500,00	Laptop	14.646.000,00	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
			Gandang Tasa	7.500.000,00	
2	SMP 3 Pariaman	10.500.000,00	Rak Buku 3 unit	10.500.000,00	
3	SMP 5 Pariaman	1.500.000,00	Toa	1.500.000,00	
JUMLAH		***34.146.500,00***		***34.146.000,00***	
DPRD					
1	***DPRD***	39.500.000,00	Meja Pimpinan DPRD	*13.300.000,00*	Reklas dari ATL Ke Peralatan Mesin Belanja Modal 2024
			Lemari sebesar Rp26.200.000	*26.200.000,00*	
Jumlah		***39.500.000,00***		***39.500.000,00***	
TOTAL				**135.696.000,00**	

5. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp69.672.100,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.67 berikut.

Tabel 5.67 Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Pendidikan	Laptop	10.000.000,00
2	SDN 05 Tungkal Utara	Laptop	13.100.000,00
3	DP3AKB	Lemari Arsip Rp8.000.000 + Meja 1/2 Biro 3x Rp4.000.000 = Rp12.000.000 + Kursi Kerja 3x Rp3.400.000 = Rp10.200.000 + Kipas Angin 3x Rp650.000 = Rp1.950.000	32.150.000,00
4	Kelurahan Taratak	Lemari Arsip	2.822.100,00
5	Kelurahan Jawi-Jawi I	3x170.000= Rp5.100.000 + Kursi Lurah Rp2.500.000 + Meja Rp4.00.000	11.600.000,00
Jumlah			**69.672.100,00**

6. Transfer masuk antar SKPD sebesar Rp3.009.832.370,00 merupakan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel 5.68 berikut.

Tabel 5.68 Data Mutasi (+) Antar SKPD

NO	SKPD	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	UPT. Kec. Pariaman utara	373.901.509,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	303.773.840,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS

NO	SKPD	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	452.994.035,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
4	UPT. Kec. Pariaman timur	78.526.235,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
5	TK Pariaman Selatan	59.410.000,00	
	UPT Sanggar Kegiatan Belajar SPNF	6.937.500,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
6	SMP 1 Pariaman	21.750.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
7	SMP 2 Pariaman	40.325.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
8	SMP 3 Pariaman	93.440.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
9	SMP 4 Pariaman	50.180.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
10	SMP 5 Pariaman	14.850.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
11	SMP 6 Pariaman	21.180.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
12	SMP 7 Pariaman	13.800.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
13	SMP 8 Pariaman	19.800.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
14	SMP 9 Pariaman	13.500.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
15	Dinas Kesehatan	149.000.000,00	Mutasi mini bus Maven BA 1900 WP dari UPT Farmasi Rp. 149.000.000
16	RSUD Dr.Sadikin Kota Pariaman	138.458.251,00	Mutasi dari Puskesmas Kuraitaji
17	UPT. Instalasi Farmasi	726.956.000,00	Mutasi BM dari Dinas Kesehatan
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	374.350.000,00	Mutasi mobil dump truck BA 8004 WP dari UPT. PJU Rp339.350.000+ mutasi becak motor dari Kelurahan Jawi-Jawi II Rp35.000.000
19	Bagian Hukum dan HAM	14.700.000,00	mutasi BM dari Bagian Umum
20	Bagian Organisasi dan Aparatur	42.000.000,00	mutasi BM dari Bagian Umum
JUMLAH		**3.009.832.370,00**	

7. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp3.009.832.370,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD.
8. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp475.595.209,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin namun tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.69 berikut.

Tabel 5.69 Data Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	16.112.200,00	Selempang guru penggerak 22 buah	3.390.000,00	Barang Habis Pakai
			Alat peraga berupa buku 364 buah diserahkan ke PAUD	12.722.200,00	Barang Diserahkan Ke PAUD
		16.112.200,00			
UPT. KEC. PARIAMAN UTARA					
1	SDN 01 Balai Nareh	820.000,00	Tiang Badminton Rp700.000,00	700.000,00	Barang Mudah Rusak
			Net Badminton Rp120.000,00	120.000,00	Barang Mudah Rusak

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	SDN 17 Tungkal Utara (Eks SDN 22 Taji Taji)	1.400.000,00	Biaya Studi Tiru Rp1.400.000,00	1.400.000,00	Biaya Studi Tiru
3	SDN 03 Naras Hilir (Eks SDN 04 Nareh Hilir)	5.800.000,00	Matras Ruang Olahraga 20 x Rp240.000,00	4.800.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00 dan Mudah Rusak
			Bola kaki 10 x Rp100.000,00	1.000.000,00	Barang Habis Pakai
4	SDN 08 Apar (Eks SDN 07 Apar)	5.022.753,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
5	SDN 09 Sikapak Barat (Eks SDN 08 Sikapak Mudik)	5.022.753,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	SDN 07 Sungai Rambai (Eks SDN 10 Sungai Rambai)	5.022.753,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
7	SDN 23 Balai Nareh (Eks SDN 11 Balai Nareh)	7.772.753,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Alat Kebersihan Rp2.750.000,00 (Harga di bawah Rp300.000,00) gayung, sapu, sabun cuci, palu, gergaji, cangkul kecil	2.750.000,00	Barang Habis Pakai
8	SDN 22 Manggung (Eks SDN 13 Manggung)	6.882.000,00	Pembuatan kanopi parkir depan ruang kantor	6.882.000,00	Melekat ke Bangunan
9	SDN 05 Tungkal Utara (Eks SDN 15 Sungai Betung)	5.022.753,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
10	SDN 12 Naras I (Eks SDN 16 Nareh)	5.582.753,00	BM Dinas Pendidikan Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Tong sampah besar Rp560.000,00	560.000,00	Barang Mudah Rusak
11	SDN 13 Tungkal Selatan (Eks SDN 17 Hulu Banda)	5.022.753,00	BM Dinas Pendidikan Kursi Siswa Rp200.910,00 x 25	5.022.753,00	Harga dibawah Rp300.000,00
12	SDN 15 Ampalu (Eks SDN 18 Ampalu)	11.090.045,00	BM Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kursi Siswa Rp200.910,00 x 44	8.840.045,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Kursi siswa 5 x Rp200.000,00	1.000.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Meja Siswa 5 x Rp200.000,00	1.250.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
		64.461.316,00			
UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH					
1	SDN 10 Jati Hilir	4.013.760,00	BM Dikpora kursi siswa 20 x Rp200.688,00	4.013.760,00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 06 Cimparuh (Eks SDN 11 Lapai)	4.263.760,00	BM Dikpora kursi siswa 20 x Rp200.688,00	4.013.760,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Speaker kecil 1 x 250.000	250.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	SDN N 01 Kp.Jawa I (Eks SDN 16 Kampung Jawa I)	13.570.000,00	Alat kebersihan kain pel 1 x Rp250.000,00 dan sapu 16 x Rp45.000,00	970.000,00	Barang Habis Pakai

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Meja Siswa Rp250.000,00 x 28	7.000.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Kursi Siswa Rp200.000,00 x 28	5.600.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
4	SDN 13 Lohong (Eks SDN 22 Lohong)	15.971.075,00	BM Dikpora kursi siswa 25 x Rp197.025,00	4.925.625,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			BM Dikpora meja siswa 25 x Rp294.150,00	7.353.750,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Converter to HDMI + VGA 2 x Rp230.800,00	461.600,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Meja baca siswa 12 x Rp269.175,00	3.230.100,00	Harga dibawah Rp300.000,00
5	SDN 14 Pauh Timur (EKS SDN 23 Koto Mandakek)	1.500.000,00	Barang habis pakai dibawah Rp300.000,00 (tong sampah plastik, bola kasti, alat kebersihan, piala)	1.500.000,00	Barang Habis Pakai harga dibawah Rp300.000,00
6	SDN 17 Kampung Baru (EKS SDN 27 Kampung Baru)	6.475.000,00	Bangku dan kursi sekolah dibawah Rp300.000,00, meja siswa 10 x Rp285.000,00 dan kursi siswa 10 x Rp200.000,00	2.850.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Umbul-umbul marawa 6 x Rp100.000,00	2.600.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Charger baterai laptop 2 x Rp175.000,00	350.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Acces Point Rp675.000,00	675.000,00	Barang Mudah Rusak
7	SDN 19 Kampung Baru (EKS SDN 29 Kampung Baru)	400.000,00	Baterai mikrofon 4 x Rp100.000,00	400.000,00	Barang Habis Pakai
8	SDN 15 Jalan Kereta Api (EKS SDN 30 Taratak)	5.017.200,00	Kursi siswa 25 x Rp200.688,00	5.017.200,00	
		51.210.795,00			
UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN					
1	SDN 01 Kurai Taji (Eks SDN 04 Pauh)	185.000,00	Dispenser	185.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 05 Marabau	12.740.975,00	BM Dikpora kursi siswa 25 x Rp197.025,00	4.925.625,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			BM Dikpora meja siswa 25 x Rp294.150,00	7.353.750,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Converter to HDMI + VGA 2 x Rp230.800,00	461.600,00	Harga dibawah Rp300.000,00
3	SDN 03 Taluak (Eks SDN 06 Taluk)	8.285.000,00	Pengadaan teralis jendela/pintu kelas lima	4.400.000,00	Melekat ke Bangunan
			Pengadaan jendela kelas satu dan ruang majelis guru	3.885.000,00	Melekat ke Bangunan
4	SDN 04 Batang Tajongkek (Eks SDN 07 Batang Tajongkek)	4.013.760,00	BM Dikpora kursi siswa 20 x Rp200.688,00	4.013.760,00	Harga dibawah Rp300.000,00

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	SDN 07 Toboh Palabah (Eks SDN 08 Toboh Palabah)	512.800,00	Pembelian charger laptop	512.800,00	Barang Beresiko Hilang/Mudah berpindah
6	SDN 08 Marunggi (Eks SDN 09 Marunggi)	940.000,00	Beli kabel infokus Rp140.000,00	140.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Biaya pemeliharaan plang sekolah (menambah tulisan baru) Rp800.000,00	800.000,00	Biaya Pemeliharaan
7	SDN 10 Palak Aneh (Eks SDN 11 Palak Aneh)	1.240.000,00	Tangkuluak tanduak 7 x Rp120.000,00	840.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Suntiang kecil Rp150.000,00	150.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Suntiang Besar Rp250.000,00	250.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
8	SDN 06 Punggung Lading (Eks SDN 12 Punggung Lading)	5.017.200,00	BM Dikpora kursi siswa 25 x Rp200.688,00	5.017.200,00	Harga dibawah Rp300.000,00
9	SDN 11 Marunggi (EKS SDN 14 Marunggi)	14.127.520,00	BM Dikpora kursi siswa 40 x Rp200.688,00	8.027.520,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Plang media ramah anak dan anti bullying Rp3.000.000,00	3.000.000,00	Barang Mudah Rusak
			Peralatan Olahraga (2 gawang, 2 tiang voly, 2 ring basket dan alat olahraga lainnya dibawah 300.000)	3.100.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
10	SDN 12 Taluk (Eks SDN 15 Taluk)	37.299.725,00	Ruang labor BM Dikpora kursi siswa 25 x Rp197.025,00	4.925.625,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Ruang labor BM Dikpora kursi siswa meja siswa 25 x Rp294.150,00	7.353.750,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Ruang pustaka BM Dikpora kursi siswa 50 x Rp197.025,00	9.851.250,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Ruang pustaka BM Dikpora meja siswa 50 x Rp294.150,00	14.707.500,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Converter to HDMI + VGA 2 x Rp230.800,00	461.600,00	Harga dibawah Rp300.000,00
11	SDN 13 Balai Kurai Taji (Eks SDN 16 Balai)	5.017.200,00	BM Dikpora Kursi siswa 25 x Rp200.688,00	5.017.200,00	Harga dibawah Rp300.000,00
		89.379.180,00			
UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR					
1	SDN 04 Kajai (Kec. Pariaman Timur)	717.000,00	Cok sambung listrik tiap kelas	717.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
2	SDN 08 Kampung Gadang (Kec. Pariaman Timur)	300.000,00	Wifi Reapeter	130.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Speaker Bluetooth	170.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	SDN 09 Bato (Kec. Pariaman Timur)	350.000,00	Kipas Angin Rp175.000,00 x 2	350.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
4	SDN 10 Sungai Pasak (Kec. Pariaman Timur)	5.017.200,00	BM Dikpora Kursi siswa 25 x Rp200.688,00	5.017.200,00	Harga dibawah Rp300.000,00
5	SDN 11 Koto Marapak (Kec. Pariaman Timur)	8.465.000,00	Meja 12 x Rp200.000,00 dan Kursi siswa 12 x Rp150.000,00	4.200.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Meja Panjang Siswa 4 x Rp200.000,00	800.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Pembelian Gorden pintu dan jendela kelas 31 pasang x Rp55.000,00	1.705.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Pembelian 25 Sampul Rapor Siswa	1.760.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
6	TK Pariaman Selatan	3.111.000,00	Alat Peraga Edukasi (APE)	3.111.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
7	SMP 1 Pariaman	123.000,00	Palu	123.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
8	SMP 4 Pariaman	17.375.000,00	Pembuatan huruf timbul nama sekolah	16.500.000,00	Nama Sekolah
			Pembelian baterai untuk pemeliharaan laptop Rp875.000,00	875.000,00	Biaya Pemeliharaan
9	SMP 6 Pariaman	5.430.000,00	Pemeliharaan CCTV Rp1.700.000,00	1.700.000,00	Biaya Pemeliharaan
			Papan informasi 10 x Rp120.000,00	1.200.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Microphone 2 x Rp275.000,00	550.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Pot bunga 132 x Rp15.000,00	1.980.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
10	SMP 7 Pariaman	13.800.000,00	Alat Pukul Bulu Tangkis 10 x Rp290.000,00	2.900.000,00	Barang Habis Pakai
			Bola Kaki 8 x Rp650.000,00	5.200.000,00	Barang Habis Pakai
			Bean Shutter Bulu Tangkis 5 x Rp100.000,00	500.000,00	Barang Habis Pakai
			Bola Volly 8 x Rp650.000,00	5.200.000,00	Barang Habis Pakai
11	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	4.925.000,00	Alat Bantu Pemeriksaan Kedokteran Harga di bawah Rp300.000,00 (Snellen Chart, Best Dentist, Instrumen Tray, Sendok Cetak Gigi, Spiton Bowl, Spatula Aduk Alginate, Lecron Dental, Okludator Dental, Loupe, Peak Flowmeter, GCU Aautocheck,manset tensi meter, penlight, tabung korentang, dll)	4.925.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00, Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
12	Puskesmas Air Santok	46.029.002,00	Backdrop ruangan pimpinan Rp29.000.000,00 dan ruang KTU Rp15.000.000,00	44.000.000,00	Melekat di Bangunan
			Alat Kesehatan Barang Habis Pakai Rp2.029.000,00	2.029.000,00	Barang Habis Pakai

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	Puskesmas Sikapak Barat	34.999.322,00	Pembuatan Handrail (alat bantu pegangan di tangga)	14.000.000,00	Melekat di Bangunan
			Alat Kesehatan Barang Habis Pakai Harga dibawah Rp300.000,00	6.999.322,00	Barang Habis Pakai
			Pembuatan Kanopi	14.000.000,00	Melekat di Bangunan
14	RSUD dr.Sadikin Kota Pariaman	1.874.994,00	Thermometer 6 x Rp275.000,00	1.650.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Thermometer bayi	224.994,00	Harga dibawah Rp300.000,00
15	Kantor Kesbangpol	192.000,00	Alat Pengukur Tinggi Badan	22.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
			Timbangan Berat Badan	170.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
16	Kantor Satpolpp & Damkar	1.163.200,00	Alat Kebersihan : Cairan Pembersih Kerak Kaca	1.163.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
17	Dinas Sosial	67.500.000,00	Alat Bantu Dengar HP1 5 x Rp2.263.652,00	11.318.260,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Alat Bantu Dengar HP3 10 x Rp3.330.000,00	33.300.000,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Kursi Roda Standar 6 x Rp1.740.480,00	10.442.880,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Walker Stick Kaki 4 x Rp222.000,00	888.000,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Walker 2 x Rp491.830,00	983.660,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Walker Stick Kaki 3 (1 x Rp222.000,00)	222.000,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Kursi Roda Manaual Wheelchair 2 x Rp2.231.100,00	4.462.200,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
			Kursi Roda Wheel Chair 2 in 1 (2 x 2.941.500)	5.883.000,00	Barang Diserahkan Ke Masyarakat
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.450.000,00	Selempang Finalis Duta Wisata 25 x Rp298.000,00	7.450.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
19	UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman	250.000,00	Sendok Makan	250.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
20	Bagian Umum & Protokoler	1.860.000,00	Engsel Pintu 20 x Rp93.000,00	1.860.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
21	Kelurahan Jawi-Jawi I	11.115.000,00	Bendera Marawa 93 buah x Rp119.516,00	11.114.988,00	Harga dibawah Rp300.000,00
22	Kelurahan Kp.Jawa I	10.000.000,00	Seng 2,5 Kodi Rp3.847.000,00, Pemeliharaan Cat Rp2.850.000,00, upah tukang Rp2.470.000,00, alat2 pengecatan Rp833.000,00	10.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Kantor
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.200.000,00	Marawa 16 x Rp75.000,00	1.200.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.185.000,00	Alat-alat kebersihan, Tong sampah, tisu kebersihan, cairan pembersih dll	2.185.000,00	Harga dibawah Rp300.000,00

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.000.000,00	Hiasan Mobil Pawai (Spanduk dan alat peraga bayar pajak)	5.000.000,00	Barang Habis Pakai
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.000.000,00	Pemeliharaan printer head printer brother MFC J3530 Rp2.500.000,00 + pemeliharaan printer brother MFC J3530 Dw Rp1.500.000,00	4.000.000,00	Biaya Pemeliharaan Printer
		254.431.718,00			
TOTAL		**475.595.209,00**		**475.595.209,00**	

9. Reklasifikasi salah rekening (-) sebesar Rp9.933.300,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Peralatan Mesin ke Aset Tetap Lainnya akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan. Reklasifikasi salah rekening ke Aset Tetap Lainnya pada UPT. Kecamatan Pariaman Selatan SDN 07 Toboh Palabah atas pembelian buku.

10. Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) sebesar Rp3.548.341.516,44 merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang kondisi rusak berat dan merupakan hasil inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.70 berikut.

Tabel 5.70 Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)
1	*2*	*3*
1	UPT. Kec. Pariaman utara	254.313.736,00
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	389.286.574,72
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	345.643.183,72
4	UPT. Kec. Pariaman timur	221.322.275,00
5	SMP 1 Pariaman	53.700.000,00
6	SMP 2 Pariaman	57.392.385,00
7	SMP 3 Pariaman	112.438.792,00
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	1.687.023.200,00
9	UPT. Laboratorium Lingkungan	286.902.600,00
10	Dinas Perindagkop	26.439.300,00
11	Pariwisata	86.865.470,00
12	UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	27.014.000,00
JUMLAH		**3.548.341.516,44**

11. Belanja pembayaran utang Tahun 2023 (-) sebesar Rp158.450.000,00 merupakan pelunasan gagal bayar Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024. Dengan rincian pada:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp103.400.000,00 terdiri dari: a) SMPN 7 sebesar Rp4.000.000 pembelian kursi tata usaha, b) SDN 10 Cubadak Air Selatan sebesar Rp19.478.180,00, c) SDN 06 Cimparuh sebesar Rp19.980.455,00, d) SDN 07 Kampug Jawa 2 sebesar Rp19.980.455,00, e) SDN 17 Kampung Baru sebesar Rp19.980.455,00, dan f) SDN 01 Koto Marapak sebesar Rp19.980.455,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp24.800.000,00 pembelian laptop;

c. Sekretariat Daerah sebesar Rp6.000.000,00 pembelian mesin finger print;

d. Sekretariat DPRD sebesar Rp24.250.000,00 pembelian laptop.

Tabel 5.71 Rincian Belanja Modal pembayaran Utang Tahun 2023
UPTD Dinas Pendidikan

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELEUR	UNIT	KET	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4*6
SDN						
1	**SDN. 10 Cubadak Air Selatan**	Kursi Siswa	24	Baik/lengkap	199.800,00	4.795.200,00
		Meja Siswa (Tunggal)	24	Baik/lengkap	302.475,00	7.259.400,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.478.180,00
2	**SDN. 06 Cimparuh**	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
3	**SDN. 07 Kampung Jawa II**	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
4	**SDN. 17 Kampung Baru**	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELEUR	UNIT	KET	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4*6
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
5	**SDN. 01 Koto Marapak**	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
Total						**99.400.000,00**
SMP						
No	**NAMA SEKOLAH**	**JENIS MEUBELEUR**	**UNIT**	**KET**	**HARGA**	**JUMLAH**
1	SMP7 PARIAMAN	Kursi tata usaha	1	Baik/lengkap	4.000.000,00	4.000.000,00
Total Pembayaran Utang						**103.400.000,00**

12. Penghapusan sebesar Rp512.032.500,00 merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapusbukukan disebabkan kondisi Aset Tetap yang rusak berat, lelang, hilang, dan telah diusulkan oleh SKPD/Unit kerja pengguna untuk dihapusbukukan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 325/900/2024.

    Dapat diinformasikan terdapat Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Pariaman, rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*9*
1	900/02/BPKPD-2020	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisisan Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Suzuki Grand Vitara 2.4 AT dengan Nopol BA 1542	2014	326.230.000,00	11-Mar-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2	030.032/03/BPKPD/VI-2023	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Kendaraan Minibus Innova dengan Nopol : BA 1059 W	2017	290.920.000,00	5-Jun-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
3	900/03/bpkpd-2019	Efrianto, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1018 W	2019	224.550.000,00	14-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*9*
4	900/04/BPKPD-2019	Andry Kurniawan, S.iK, M.Hum	Kepala Kepolisisan Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1007 WD	2010	154.165.000,00	28-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
5	900/01/DPPKA-2023	Mayor INF. Darius	A.n .Kepala KODIM 0308	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) SUZUKI JEEP Grand Vitara 24 AT 2015 dengan Nopol BA 1550 W	2015	355.660.000,00	13-Feb-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
6	900/01/BPKPD-2020	A. Bondan, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota Innova V M/T dengan plat Nomor BA 5 W	2014	289.240.000,00	27-Feb-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
7	900//BPKPD-2020	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1502 W	2011	140.950.000,00	26-Oct-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
8	03/VII/umum/2022	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Jeep Toyota Fortuner BA 1641 XX	2022	532.900.000,00	12-Jul-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
9	900/01/BPKPD/2022	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Yamaha Mio Soul BA 3186 W	2017	17.510.000,00	26-Apr-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
10	07/BAST/Umum-2023	Zainal	Polres Pariaman	Mobil Avanza Veloz BA 1038 W	2016	206.820.000,00	18-Jul-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
Jumlah						**2.538.945.000,00**		

3.c. Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp553.208.953.941,84	**Rp526.863.585.915,84**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp553.208.953.941,84 dan Rp526.863.585.915,84 (jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2024), dengan rincian disajikan pada tabel 5.73 berikut.

Tabel 5.73 Rincian Saldo Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**526.863.585.915,84**
Mutasi Tambah	

URAIAN	NILAI (Rp)
koreksi (+)	11.180.000,00
Belanja modal (+)	27.172.296.811,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	1.350.838.400,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	4.801.501.833,00
Koreksi BPK	1.086.074.606,00
Total Mutasi Tambah	**34.421.891.650,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi awal (-)	(247.567.000,00)
Transfer keluar antar SKPD (-)	(4.801.501.833,00)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(15.674.508,00)
Salah Rekening (-)	(333.500.000,00)
Mutasi ke Aset Lainnya (-)	(1.746.029.903,00)
Terutang 2023 (-)	(932.250.380,00)
Total Mutasi Kurang	**(8.076.523.624,00)**
Saldo Akhir	**553.208.953.941,84**

Rincian disajikan pada **Lampiran 14**.

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.172.296.811,00 berdasarkan LRA Tahun 2024;
2. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp11.180.000,00 adalah koreksi karena kurang catat Nilai KDP bangunan pada RSUD dr. Sadikin ke KIB Bangunan dan Gedung sebesar Rp11.180.000,00 yang harusnya nilai KDP-nya sudah tergabung dalam KIB;
3. Kapitalisasi barang dan Jasa (+) Sebesar Rp1.350.838.400,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa, namun memenuhi kriteria Aset Tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Dinas Kesehatan sebesar Rp598.000.000,00 yaitu Bangunan IPAL LABKESDNA, dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp752.838.400,00 merupakan rehap rusak berat SDN 11 Marunggi;
4. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp4.801.501.833,00 merupakan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Mutasi (+) antar SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	375.905.732,00	Mutasi BM Dikpora
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	726.101.238,00	Mutasi BM Dikpora

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
3	UPT. Kec. Pariaman Selatan	1.547.216.980,00	Mutasi BM Dikpora Rp794.378.580,00 dan mutasi Belanja Barang Dan Jasa Rp752.838.400,00
4	TK. Pariaman Selatan	173.379.148,00	Mutasi BM Dikpora
5	SMP 2 Pariaman	186.770.100,00	Mutasi BM Dikpora
6	SMP 5 Pariaman	195.363.224,00	Mutasi BM Dikpora
7	UPT Air Bersih	461.422.000,00	mutasi BM DPUPRP *paving block* UPT Air Bersih
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	450.984.773,00	Mutasi ke Dispersip bangunan arsip di pantai Gandoriah
9	Bagian Umum & Protokoler	98.954.000,00	mutasi BM DPUPRP rehap Mushola Rp98.954.000,00
10	Sekretariat DPRD	388.207.800,00	Mutasi BM DPUPRP rehab Bangunan Gedung DPRD Rp188.813.000,00 = *paving block* Rp199.394.800,00
11	Kecamatan Pariaman Timur	197.196.838,00	mutasi BM DPUPRP pemasangan *paving block* Kec. Pariaman Timur
JUMLAH		**4.801.501.833,00**	

5. Koreksi (+) BPK sebesar Rp1.086.074.606,00 merupakan koreksi belanja terhadap rehap gedung SDN pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp4.801.501.833,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Gedung Dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD;
7. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp247.567.000,00 pada UPT Penyuluh Pertanian adalah koreksi karena pencatatan Bangunan Gedung BPP Pariaman Tengah sudah dihapus sesuai dengan SK Nomor 301/900/2022 dan pada aplikasi BMD belum disesuaikan pada tahun berkenaan. Tahun 2024 dilakukan penyesuaian;
8. Mutasi (-) tidak dikapitalisasi sebesar Rp15.674.508,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun tidak memenuhi kriteria Aset Tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp15.674.508,00 yaitu interior ruangan Kepala;
9. Mutasi (-) salah rekening sebesar Rp333.500.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Aset Tetap selain gedung dan bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp294.000.000,00 reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp39.500.000,00 reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

10. Mutasi ke Aset Lainnya (-) sebesar Rp1.746.029,90300 merupakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Dinas Satpolpp dan Damkar sebesar Rp1.528.609.903,00 dan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp217.420.00,00;
11. Belanja Modal Terutang (-) sebesar Rp932.250.380,00 merupakan pelunasan utang akibat gagal bayar di Tahun 2023, dengan rincian pada: a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp92.112.370,00 yaitu pekerjaan *paving block* SDN 14 Sungai Pasak, b. Dinas Kesehatan sebesar Rp776.278.482,00 yaitu pekerjaan lanjutan pengembangan RSUD dr. Sadikin, dan c. Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp58.859.528,00 yaitu interior ruangan Kepala Dinas.

3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023	Tahun 2023
	Rp926.566.640.376,04	**Rp908.791.373.236,04**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp926.566.640.376,04 dan Rp908.791.373.236,04, dengan rincian disajikan pada tabel 5.75 berikut.

Tabel 5.75 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**908.791.373.236,04**
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (+)	19.973.012.799,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	1.519.737.890,00
Salah Rekening (+)	294.000.000,00
KDP (+)	79.664.000,00
Variabel Pendukung (+)	292.586.500,00
Total Mutasi Tambah	**22.159.001.189,00**
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(1.519.737.890,00)
Tidak Dikapitalisasi (-)	(149.571.000,00)
mutasi ke Aset LainNya (-)	(1.000.000,00)
KDP (-)	(79.952.000,00)
Terutang 2023 (-)	(2.633.473.159,00)
Total Mutasi Kurang	**(4.383.734.049,00)**
Saldo Akhir	**926.566.640.376,04**

Rincian disajikan pada **Lampiran 15**.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.973.012.799,00 sesuai LRA Tahun 2024.

2. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.519.737.890,00 merupakan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.76 berikut.

Tabel 5.76 Mutasi (+) antar SKPD

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	UPT Air Bersih	JIJ	837.487.890,00	Mutasi BM DPUPRP
2	Dinas Pertanian dan Perikanan	JIJ	682.250.000,00	Mutasi dari Dinas Pariwisata Dermaga Apung
JUMLAH			**1.519.737.890,00**	

3. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp294.000.000,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain JIJ ke Aset Tetap JIJ pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp294.000.000,00;

4. KDP (+) sebesar Rp79.664.000,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang proses pengerjaanya telah selesai sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan kegiatan perencanaan pembangunan jalan pekerjaan perencanaan jalan dua paket oleh PT. Taru Nusantara SPK Nomor 10/SPK.PRC/DPUPR.BM/DPUPR/2020 tanggal 19 November 2020;

5. Mutasi (+) Aset Variabel Pendukung sebesar Rp292.586.500,00 merupakan penambahan dari biaya perolehan Aset Tetap selain dari Belanja Modal yang belum dikapitalisasi pada aset bersangkutan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp292.586.500,00 yaitu biaya pengawasan lima ruas jalan;

6. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp5.519.737.890,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sesuai rincian mutasi antar SKPD;

7. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp149.571.000,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel 5.77 berikut.

Tabel 5.77 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi JIJ

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	*Updating* Data Jalan PKRMS 2024 Rp49.811.000,00, dan survei kondisi jalan Rp99.750.000,00	149.571.000,00
Jumlah			**149.571.000,00**

8. Mutasi ke Aset Lainnya (-) sebesar Rp1.000.000,00 merupakan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp1.000.000,00; dan
9. KDP (-) sebesar Rp79.952.000,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang proses pengerjaanya belum selesai sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Perencanaan Jalan DAK Tahun 2025 Termin 80% kontrak sebesar Rp99.850.000,00 oleh CV. D'XTRIE Consultant SPK Nomor 21/SPK.BM/JK/DPURP.PRM/2024 tanggal 11 November 2024;
10. Pembayaran utang (-) sebesar Rp2.633.473.159,00 terdiri dari utang Rp1.519.887.984,00 merupakan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terutang Tahun 2022 sebesar Rp1.148.041.600,00 yang telah dibayarkan dan fisiknya sudah tercatat.

Tabel 5.78 Mutasi (-) Terutang

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	2.633.473.159,00	Pembayaran utang Tahun 2023 Rp1.485.041.600,00 dengan rincian: - pembangunan jalan Desa Koto Marapak sebesar Rp99.367.000,00; - Peningkatan Jalan Pondok Duo sebesar Rp98.987.000,00; - Perencanaan jalan Tahun 2023 sebesar Rp15.910.80,00; - Pembangunan Jalan Bulakan Kp.Baru Padusunan olo cubadak air sebesar Rp407.540.000,00; - Pembangunan Jalan rawang Kp. Pondok Kp.sato sebesar Rp271.803.700,00; - Pemeliharaan periodik jalan lanjutan drainase apar batas kota sebesar Rp97.500.000,00; - Pembangunan Drainase Kampung Pondok Rp99.150.000,00; - Drainase Batang Air Pampan Kel Jawi-Jawi II Rp97.086.200,00; - Rehabilitasi Bantaran Sungai Bt Sungai Sunur Rp99.722.900,00; - Pembangunan Jalan Lingkar mesjid Pantai Kata Rp197.974.000,00; - Perencanaan jalan Tahun 2023 Rp15.910.800,00 dan Pembayaran Utang Tahun 2022 sebesar Rp.1.148.041.600,00 dengan rincian : - Pembayaran hutang (Pekerjaan Peningkatan Jalan Pinggir Sungai Batang Mangor Tahun 2022, Jembatan Sunur - Jembatan Kurai Taji Rp350.000.000; dan - Pembayaran hutang (Peningkatan Jalan 3 Ruas Tahun 2022) Rp798.431.559,00
Jumlah		**2.633.473.159,00**	

3.e. Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp81.522.445.476,56	**Rp80.874.583.281,56**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.522.445.476,56 dan Rp80.874.583.281,56, dengan rincian disajikan pada tabel 5.79 berikut.

Tabel 5.79 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**80.874.583.281,56**
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	1.392.462.550,00
Salah Rekening (+)	9.933.300,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	1.290.117.900,00
Total Mutasi Tambah	**2.692.513.750,00**
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD (-)	(1.290.117.900,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(94.684.650,00)
Salah Rekening (-)	(96.196.500,00)
mutasi ke Aset lainya (-)	(563.652.505,00)
Total Mutasi Kurang	**(2.044.651.555,00)**
Saldo Akhir	**81.522.445.476,56**

Rincian disajikan pada **Lampiran 16.**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.392.462.550,00 sesuai LRA Tahun 2024;
2. Salah rekening (+) sebesar Rp9.933.300,00 merupakan pindahan dari selain Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga UPT. Kecamatan Pariaman Selatan.
3. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.290.117.900,00 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Belanja Modal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berupa buku pelajaran dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Mutasi (+) mutasi antar SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*
1	UPT. Kec. Pariaman utara	201.879.100,00
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	267.119.400,00
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	180.870.300,00
4	UPT. Kec. Pariaman timur	131.584.800,00
5	SMP 1 Pariaman	125.980.200,00
6	SMP 2 Pariaman	78.542.200,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*
7	SMP 3 Pariaman	90.943.000,00
8	SMP 4 Pariaman	45.219.100,00
9	SMP 5 Pariaman	53.652.800,00
10	SMP 6 Pariaman	35.947.300,00
11	SMP 7 Pariaman	38.448.400,00
12	SMP 8 Pariaman	25.381.300,00
13	SMP 9 Pariaman	14.550.000,00
JUMLAH		**1.290.117.900,00**

4. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp1.290.117.900,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya antar SKPD ke UPT. Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana rincian pada mutasi antar SKPD;

5. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp94.684.650,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi ATL

NO	SKPD	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*4*	*5*
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	87.215.650,00	Barang habis pakai yang diserahkan ke SDN, SMP, dan TK Kota Pariaman
2	UPT. Kec. Pariaman Utara	4.609.000,00	Pada SDN 01 Naras Rp1.824.000,00 yaitu pianika 12 x Rp152.000,00, dan pada SDN 17 Tungkal Utara 1. papan DUK Sekolah 1 x Rp250.000,00
3	UPT. Kec. Pariaman Tengah	1.750.000,00	Pada SDN 14 Pauh Timur. baju gandang tasa 7 x Rp250.000,00
4	UPT. Kec. Pariaman Timur	510.000,00	Barang Habis Pakai pada SDN 09 Bato alat musik piano 3x Rp170.000,00 = Rp510.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600.000,00	Bingkai foto Presiden dan Wakil Presiden
TOTAL		**94.684.650,00**	

6. Salah rekening (-) sebesar Rp96.196.500,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82 Mutasi (-) Ke Aset lain Lain

NO	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	Peralatan Mesin	12.150.000,00
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	Peralatan Mesin	26.100.000,00

NO	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
3	UPT. Kec. Pariaman Selatan	Peralatan Mesin	18.700.000,00
4	UPT. Kec. Pariaman Timur	Peralatan Mesin	5.100.000,00
5	SMP 1 Pariaman	Peralatan Mesin	22.146.500,00
6	SMP 3 Pariaman	Rak buku	10.500.000,00
7	SMP 5 Pariaman	*Sound System TOA*	1.500.000,00
Jumlah			**96.196.500,00**

7. Mutasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp563.652.505,00 adalah mutasi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada Aset Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Mutasi (-) Ke Aset Lain-Lain

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)
1	*2*	*3*
1	UPT. Kec. Pariaman Utara	129.390.521,00
2	UPT. Kec. Pariaman Tengah	160.224.410,00
3	UPT. Kec. Pariaman Selatan	233.054.390,00
4	UPT. Kec. Pariaman Timur	6.547.037,00
5	SMP 2 Pariaman	29.809.647,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.626.500,00
JUMLAH		**563.652.505,00**

3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp46.359.805.963,00	**Rp46.370.697.963,00**

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.359.805.963,00 dan Rp46.370.697.963,00, dengan rincian disajikan pada tabel 5.84 berikut.

Tabel 5.84 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**46.370.697.963,00**
Mutasi Tambah	
KDP (+)	79.952.000,00
Total Mutasi Tambah	**79.952.00,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi (-)	(11.180.000,00)
KDP (-)	(79.664.000,00)
Total Mutasi Kurang	**(90.844.000,00)**
Saldo Akhir	**46.359.805.963,00**

Penambahan dan pengurangan aset KDP diuraikan pada **Lampiran 17**.

3.g. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp1.369.522.652.054,92)	**(Rp1.292.080.067.060,06)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.369.522.652.054,92) dan (Rp1.292.080.067.060,06), dengan rincian disajikan pada tabel 5.85 berikut.

Tabel 5.85 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**1.292.080.067.060,06**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	287.962.470,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	863.646.559,00
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	82.213.507.503,02
Koreksi BPK (+)	6.136.235,00
Total Mutasi Tambah	**83.371.252.767,02**
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	(422.814.726,00)
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(863.646.559,00)
Rusak Berat (-)	(4.316.852.504,16)
Penghapusan (-)	(325.353.983,00)
Total Mutasi Kurang	**(5.928.667.772,16)**
Saldo Akhir	1.369.522.652.054,92

1. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp287.962.470,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap Aset Peralatan Mesin senilai Rp64.315.056,00 dan Gedung dan Bangunan senilai Rp223.647.414,00;
2. Mutasi masuk antar SKPD disebabkan karena mutasi antar SKPD sebesar Rp863.646.559,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp636.652.001,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp226.994.558,00;
3. Penyusutan tahun berjalan (+) sebesar Rp82.213.507.503,02 adalah penyusutan Aset Tetap Mesin; Aset Tetap Gedung dan Bangunan; Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya semester I dan II ;
4. Koreksi (+) BPK sebesar Rp6.136.235,00 atas Pemeliharaan SDN pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menambah nilai aset tetap;
5. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp422.814.724,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap aset Gedung dan Bangunan senilai Rp422.814.724,00;
6. Mutasi keluar antar SKPD disebabkan karena mutasi antar SKPD sebesar Rp863.646.559,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp636.652.001,00, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp782.559.565,00 dan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.000.000,00;

7. Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) merupakan inventarisasi rusak berat Tahun 2024 sebesar Rp4.316.852.504,00 terdiri dari rusak berat pada Peralatan Mesin Rp3.533.292.936,16 dan Gedung dan Bangunan Rp782.559.565,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.000.000,00;
8. Mutasi Penghapusan (-) sebesar Rp325.353.983,00 penghapusan pada Peralatan Mesin sebesar Rp325.353.983,00.

Rincian Akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada **Lampiran 18**.

Kebijakan penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum dilakukan penyusutan. Kebijakan tersebut telah direvisi dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengatur metode garis lurus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Kebijakan Akuntansi tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang menganut metode garis lurus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan metode saldo menurun berganda untuk Aset Tetap Bangunan dan Gedung.

4. Aset Lainnya	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp9.746.056.449,09	**Rp5.569.700.363,76**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.746.056.449,09 dan Rp5.569.700.363,76 dengan rincian sebagai berikut.

4.a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp4.640.412.060,96	**Rp2.197.997.925,19**

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.640.412.060,96 dan Rp2.197.997.925,19, dengan rincian disajikan pada tabel 5.86 berikut.

Tabel 5.86 Rincian Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**2.197.997.925,19**
penambahan	3.130.350.852,02
Mutasi Tambah	**3.130.350.852,02**
Penyetoran (-)	(687.936.716,25)
Total Mutasi Kurang	**(687.936.716,25)**
Saldo Akhir	**4.640.412.060,96**

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 20b**.

4.b. Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp687.162.000,00	**Rp687.162.000,00**

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Pariaman disajikan pada tabel 5.87 berikut.

Tabel 5.87 Daftar Aset Tidak Berwujud

JENIS	NILAI (Rp)
1	*2*
• *Software* Bidang Pendapatan di DPPKA (2013)	121.000.000,00
• *Software MapInfo* Pendapatan di DPPKA (2014)	19.250.000,00
• *Software Payment Online* Pendapatan di DPPKA (2014)	49.280.000,00
• Lisensi *Software* Bidang Pendapatan (2016)	29.700.000,00
• Sistem Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan Kota (2016)	30.000.000,00
• *Software* ESDNM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00
• *Software* Pembelajaran UPT Utara 4 Laptop	19.184.000,00
• *Software* Pembelajaran UPT Timur 8 Laptop	38.368.000,00
• *Software* Berbasis Web Dinas Kesehatan	29.700.000,00
• *Software* Jaringan Dukcapil	98.000.000,00
• *Software*(SQL Server) Microsoft	29.980.000,00
• *Software Oracle* (SQL *Server*) Bidang Pendapatan	29.700.000,00
• *Software* Monitoring PBB (2017)	44.000.000,00
• *Software* Aplikasi PBHTB (2017)	99.000.000,00
JUMLAH	**687.162.000,00**

Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 21**.

4.c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp687.162.000,00)	**(Rp687.162.000,00)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp687.162.000,00) dan (Rp687.162.000,00), dengan rincian disajikan pada tabel 5.88 berikut.

Tabel 5.88 Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	**(Rp687.162.000,00)**
Mutasi Tahun	**0,00**
Saldo Akhir	**(Rp687.162.000,00)**

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 22**.

4.d. Aset Lain-Lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp32.260.937.983,10	**Rp26.401.914.058,66**

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.260.937.983,10 dan Rp26.401.914.058,66. Berdasarkan verifikasi fisik aset lainnya terdapat penambahan Aset Lain-Lain pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.548.341.516,44, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.746.029.903,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.000.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp563.652.505,00. Dengan rincian disajikan pada tabel 5.89 berikut.

Tabel 5.89 Rincian Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**26.401.914.058,66**
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	
Mutasi Peralatan dan Mesin (+)	3.548.341.516,44
Mutasi Gedung dan Bangunan (+)	1.746.029.903,00
Mutasi JIJ (+)	1.000.000,00
ATL	563.652.505,00
Total Mutasi Tambah	**5.859.023.924,44**
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	
Saldo Akhir	**32.260.937.983,10**

4.e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp27.155.293.594,97)	**(Rp23.030.211.620,09)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp27.155.293.594,97) dan (Rp23.030.211.620,09) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 23.**

5. Properti Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp105.264.398.083,88	**Rp111.854.962.409,88**

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.264.398.083,88 dan Rp111.854.962.409,88 dengan rincian sebagi berikut.

5.a. Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp137.605.343.958,88	**Rp137.605.343.958,88**

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.605.343.958,88 dan Rp137.605.343.958,88, dengan rincian disajikan pada tabel 5.90 berikut.

Tabel 5.90 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Urut	SKPD	Nama/Jenis Barang	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Perindagkop	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Hibah	2004	1	7.384.075.000,00	Pariaman Plaza (Hibah dari Kab. Padang Pariaman)
2		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2005	1	4.498.555.000,00	Pembangunan Pasar Pariaman/Los Ikan
3		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2009	1	7.027.745.659,00	Pembangunan Pasar Produksi
4		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2015	1	2.051.904.000,00	Los Sayur Pasar Pariaman
5		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2016	1	10.271.385.598,00	KDP 2015 (Rp5.231.354.473,00) + KDP selesai 2016 Rp4.895.117.125,00 Pasar Kurai Taji
6		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2019	1	1.778.134.000,00	Pembangunan Los Lambung Balai Kuraitaji+ Biaya Honor Tender Rp6.350.000,00 + SPPD Rp6.945.000,00 + Rp39.976,00
7		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	168.290.000,00	Empat Kotak Bangunan Semi Permanen (Toko Souvenir)
8		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	434.949.599,00	Dua Puluh Kios Pujasera Pantai Gandoriah, Tiga Puluh Kios Pujasera Taman Anas Malik
9		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Hibah	2015	1	5.478.119.300,00	Pasar Kuraitaji (Hibah Pusat BAST No.40/M-DAG/BAST/6/2016 tangal 29 Juni 2016)
10		Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Pembelian	2018	1	3.059.651.794,88	Pusat Jajanan Kuliner Pantai Gandoriah Dua Puluh Delapan Petak Belakang Nantongga
Jumlah (1)						***42.152.809.950,88***	
1	UPT. Pengelola Pasar	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Pembelian	2022	1	94.504.522.624,00	Pasar Rakyat Pariaman (Hibah dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2022)
Jumlah (2)						***94.504.522.624,00***	
1	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Pembelian	2023	1	948.011.384,00	Pembangunan Kawasan Pulau Angso Duo (sembilan Unit Kios)
Jumlah (3)						***948.011.384,00***	
Total (1+2+3)						**137.605.343.958,88**	

5.b Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp32.340.945.875,00)	(Rp25.750.381.549,00)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp32.340.945.875,00) dan (Rp25.750.381.549,00), dengan rincian disajikan pada tabel 5.91 berikut.

Tabel 5.91 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	**25.750.381.549,00**
Mutasi Tambah	
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	6.590.564.326,00
Koreksi BPK (+)	
Total Mutasi Tambah	**6.590.564.326,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	0,00
Total Mutasi Kurang	**0,00**
Saldo Akhir	**32.340.945.875,00**

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 19b.**

6. Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp5.275.197.221,29	Rp12.555.097.795,09

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.275.197.221,29 dan Rp12.555.097.795,09, dengan rincian disajikan pada tabel 5.92 berikut.

Tabel 5.92 Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Retribusi Pasar)	82.225.825,28	122.835.615,78
2	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5.192.971.396,01	12.432.262.179,31
Jumlah		**5.275.197.221,29**	**12.555.097.795,09**

6.a. Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2024	Tahun 2022
	Rp82.225.825,28	Rp122.835.615,78

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.225.825,28 dan Rp122.835.615,78 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa pasar pada Dinas Perindagkop dan UKM dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame dan sewa ATM pada BPKPD dengan rincian disajikan pada tabel 5.93 berikut.

Tabel 5.93 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Perindagkop dan UKM	Pasar Pariaman	6.817.325,00
2	BPKPD	Pajak Relame	71.401.055,83
		Sewa ATM Balaikota	4.007.444,45
Jumlah			**82.225.825,28**

Rincian data Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 25**.

6.b. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp5.192.971.396,01	**Rp12.432.262.179,31**

Saldo Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.192.971.396,01 dan Rp12.432.262.179,31. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan sisa kewajiban pemerintah Kota Pariaman yang timbul dari pembayaran Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Rincian saldo utang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sisa Utang Belanja Tahun 2020 sebesar Rp1.875.000,00 pada Kecamatan Pariaman Tengah;
2. Sisa Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp742.376.069,30 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Sisa Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp453.307.647,40; pada Dinas Perpustakaan dan Kerasipan sebesar Rp54.015.010,00 dan RSUD Sadikin sebesar Rp399.292.637,40;
4. Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp3.995.412.679,31,00 merupakan Tagihan Iuran PBPU & BP Bagi Penduduk Kota Pariaman dalam rangka UHC Tahap II Tahun 2024 sebesar Rp2.378.220.600,00 dengan rincian disajikan pada tabel 5.94 berikut.

Tabel 5.94 Rincian Utang PBPU dan BP Tahap II Tahun 2024

No	Nomor SPM	Unit SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Surat Tagihan Nomor 3203/II-04/1124 tanggal 15 November 2024	Dinas Kesehatan	870.324.000,00	pembayaran iuran jaminan kesehatan / iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemda kota pariaman (APBD sharing) tahap II tahun 2024 Okt-Des tahun 2024

No	Nomor SPM	Unit SKPD	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Surat Tagihan Nomor 3208/II-04/1124 tanggal 15 November 2024	Dinas Kesehatan	1.315.615.000,00	pembayaran iuran jaminan kesehatan/ iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan pekerja yang di daftarkan olh pemda kota pariaman (APBD murni) tahap thn 2024 okt-des
3	Surat Tagihan Nomor 3205/II-04/1124 tanggal 15 November 2024	Dinas Kesehatan	87.032.400,00	pembayaran iuran jaminan kesehatan / iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang di daftarkan oleh pemda kota pariaman tahap ii th 2024 okt-des keg pengelola jaminan kesehatan masyarakat
4	Surat Tagihan Nomor 3210/II-04/1124 tanggal 18 November 2024	Dinas Kesehatan	105.249.200,00	pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan/iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang di daftarkan oleh pembda kota pariaman (apbd murni) tahap ii okt-des tahun 2024 keg pengelola jaminan kesehatan masyarakat
Total			2.378.220.600,00	

Pembayaran Utang Belanja Tagihan iuran BPJS Tahun 2024 di atas telah dibayarkan pada tanggal 17 April 2025.

5. Utang Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada pemerintah Desa dengan rincian:
    1. Kurang Salur Bagi Hasil Desa Tahun 2023 SK Nomor 155/900/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp211.429.581,11; dan
    2. Kurang Salur Bagi Hasil Desa Tahun 2024 SK Nomor 154/900/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp1.405.762.498,20.

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 26** dan **Lampiran 26a**

7. Ekuitas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp795.132.246.237,12	**Rp822.917.825.354,19**

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp795.132.246.237,12 dan Rp822.917.825.354,19. Ekuitas per 31 Desember 2024 berkurang sebesar Rp27.785.579.117,07 dengan rincian disajikan pada tabel 5.95 berikut.

Tabel 5.95 Ekuitas

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Ekuitas Awal	822.917.825.354,19
2	Surplus/Defisit LO	(30.637.307.829,06)
3	Koreksi ekuitas lainnya	2.851.728.711,99
JUMLAH		**795.132.246.237,12**

5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) pada Tahun 2024 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015, sehingga Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023. Rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp650.760.466.716,71	**Rp736.623.768.343,47**

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp650.760.466.716,71 dan Rp736.623.768.343,47. Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp85.863.301.626,76 atau (11,66%) dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2023.

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan pada tabel 5.96 berikut.

Tabel 5.96 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**47.192.029.712,71**	**45.911.378.642,36**	**1.280.651.070,35**
Pendapatan Pajak Daerah	15.099.752.181,17	14.396.111.950,00	703.640.231,17
Pendapatan Restribusi Daerah	9.799.612.224,33	9.375.406.310,00	424.205.914,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	10.961.152.554,21	10.808.347.629,36	152.804.924,85
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**603.393.937.004,00**	**598.450.651.031,00**	**4.943.285.973,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.401.188.687,00	523.642.264.998,00	1.758.923.689,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.148.320.317,00	32.963.958.033,00	3.184.362.284,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**174.500.000,00**	**0,00**	**174.500.000,00**
Pendapatan Hibah	174.500.000,00	0,00	174.500.000,00
JUMLAH	**650.760.466.716,71**	**644.362.029.673,36**	**6.398.437.043,35**

Rincian penjelasan selisih Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1.a Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp47.192.029.712,71	**Rp39.901.052.339,47**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.192.029.712,71 dan Rp39.901.052.339,47. PAD-LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.290.977.373,24 atau 18,27%. Rincian PAD-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 5.97 berikut.

Tabel 5.97 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pendapatan Pajak Daerah – LO		**15.099.752.181,17**	**15.039.730.059,17**	**0,40**
1	Pajak Hotel – LO	0,00	132.032.170,00	(100,00)
2	Pajak Restoran – LO	0,00	1.551.851.563,00	(100,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	22.400.500,00	(100,00)
4	Pajak Reklame – LO	123.321.315,17	138.681.191,17	(11,08)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	5.179.248.587,00	(100,00)
6	Pajak Parkir – LO	0,00	5.170.000,00	(100,00)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	5.908.220,00	151.162.880,00	(96,09)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.321.256.274,00	2.297.168.168,00	1,05
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	5.503.588.857,00	5.562.015.000,00	(1,05)
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	7.145.677.515,00	-	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		**9.799.612.224,33**	**3.133.987.642,00**	**212,69**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	6.939.650.757,00	243.541.000,00	2749,48
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0,00	166.345.000,00	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	92.768.000,00	95.740.000,00	(3,10)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	742.406.998,00	123.536.000,00	500,96
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	43.210.900,00	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	8.186.000,00	(100,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	146.080.000,00	(100,00)
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	319.316.000,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	(112.056.767,67)	620.449.204,00	(118,06)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	193.728.575,00	(100,00)
11	Retribusi Terminal – LO	0,00	207.510.000,00	(100,00)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0,00	124.180.500,00	(100,00)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	27.320.000,00	(100,00)
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	0,00	755.822.000,00	(100,00)

No	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	0,00	117.170.000,00	(100,00)
16	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	4.250.000,00	0,00	0,00
17	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	114.040.000,00	0,00	0,00
18	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	41.910.000,00	0,00	0,00
19	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	774.206.000,00	0,00	0,00
20	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	402.599.730,00	0,00	0,00
21	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	213.600.000,00	0,00	0,00
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	266.921.507,00	261.168.463,00	2,20
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		**11.331.512.753,00**	**10.042.663.440,00**	**12,83**
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	11.331.512.753,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	0,00	10.042.663.440,00	(100,00)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO		**10.961.152.554,21**	**11.684.671.198,30**	**(6,19)**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	155.882.400,00	5.736.500,00	2617,38
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	49.941.333,22	(100,00)
3	Jasa Giro-LO	693.433.441,25	695.462.516,00	(0,29)
4	Pendapatan Bunga – LO	109.375.000,00	251.688.137,84	(56,54)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.478.422.123,89	2.222.703.439,34	11,50
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	448.732.052,00	450.324.010,70	(0,35)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	25.779.453,00	92.067.942,00	(72,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	51.034.488,00	58.339.975,00	(12,52)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	27.549.532,85	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian –LO	173.228.624,22	2.300.000,00	7431,68
11	Pendapatan dari BLUD-LO	6.796.465.439,00	7.590.656.144,20	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	264.951.200,00	(100,00)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.250.000,00	500.000,00	150,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		**47.192.029.712,71**	**39.901.052.339,47**	**18,27**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel 5.98 berikut.

Tabel 5.98 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan Pajak Daerah	15.099.752.181,17	14.396.111.950,00	703.640.231,17
Pendapatan Restribusi Daerah	9.799.612.224,33	9.375.406.310,00	424.205.914,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	11.331.512.753,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	10.961.152.554,21	10.808.347.629,36	152.804.924,85
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**47.192.029.712,71**	**45.911.378.642,36**	**1.280.651.070,35**

1. **Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel 5.99 dikarenakan:**

   a. Pajak Reklame sebesar (Rp13.142.792,83) merupakan Penyesuaian Akun Pendapatan-LO atas Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame dengan jurnal nomor: 002/JK-BPK/BPKPD/12/2024;

   b. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp716.783.024,00 merupakan jurnal penyesuaian PBB Tahun 2024, dimana selisih merupakan ketetapan Tahun 2024 sebesar Rp2.321.256.274,00 dikurangi penerimaan sebesar Rp1.376.479.091,00 dikurangi piutang tertagih sebesar Rp227.994.159,00.

Tabel 5.99 Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pajak Reklame – LO	123.321.315,17	136.464.108,00	(13.142.792,83)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	5.908.220,00	5.908.220,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.321.256.274,00	1.604.473.250,00	716.783.024,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	5.503.588.857,00	5.503.588.857,00	0,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	7.145.677.515,00	7.145.677.515,00	0,00
Jumlah	**15.099.752.181,17**	**14.396.111.950,00**	**703.640.231,17**

2. **Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:**

   a. Selisih Retribusi Pelayanan Pasar-LO sebesar Rp484.579.235,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Piutang sewa toko pada Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

sebesar Rp396.267.985,00 dan jurnal nomor 001/JU-PIUTANG/KOPERINDAG/12/2024 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.811.250,00 jurnal nomor 018/JU/DISPERINDAGKOP/XII/2024 ditambah Jurnal Penyesuaian Piutang retribusi kios pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 sebesar Rp88.000.000,00 dengan nomor jurnal 001/PIUTANG/DISBUDPAR/12/2024 dikurang dengan Jurnal Penyesuaian lebih catat nilai Piutang Retribusi Disbudpar Sewa Pujasera Tahun 2024 sebesar Rp2.500.000,00 dan pembayaran piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000,00 dengan nomor jurnal 001/JK-BPK/PARBUD/12/2024;

b. Selisih Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO sebesar Rp46.829.000,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Piutang Pelayanan Persampahan Tahun 2024 dengan jurnal nomor 10/JP/PERKIMLH/2024;

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–LO selisih sebesar (Rp112.056.767,67) merupakan jurnal koreksi reklas salah rekening atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp49.941.333,00 dengan nomor jurnal 002/JK-BPK/BPKPD/12/2024 yang terdiri dari Pajak Reklame sebesar Rp13.142.792,83; Sewa ATM Balai Kota sebesar Rp12.022.333.34; Sewa ATM DPRD sebesar Rp11.295.000,00; dan Sewa Ruangan Balaikota sebesar Rp26.624.000,00 ditambah Penyesuaian Piutang Sewa Toko Dinas Koperindag pada Sewa Toko Pasar Jati sebesar Rp12.960.000,00 (Surat Perjanjian nomor 02/BLOK C-PS.JATI/DISPERINDAGKO DAN UKM/2024) dengan nomor jurnal 001/JK-BPK/KOPERINDAG/12/2024, dikurang dengan Piutang Retribusi Sewa Toko Dinas Perindagkop yang lebih catat sebesar Rp174.958.101,00 dengan nomor jurnal 002/JK-BPK/KOPERINDAG/12/2024;

d. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selisih sebesar Rp4.854.447,00 merupakan jurnal koreksi penyesuaian kurang catat piutang PBG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 sebesar Rp4.854.447,00 (SKRD nomor 64 Tahun 2024 an. Ali Chandra Rp381.780,00; SKRD nomor 74 Tahun 2024 An. Enna Putri Rp2.018.367,00; SKRD nomor 75 Tahun 2024 Rp2.454.300,00) dengan nomor jurnal 001/JK-BPK/DPUPR/12/2024.

Tabel 5.100 Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	6.939.650.757,00	6.939.650.757,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	92.768.000,00	92.768.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	742.406.998,00	257.827.763,00	484.579.235,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	319.316.000,00	272.487.000,00	46.829.000,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	(112.056.767,67)	0,00	(112.056.767,67)
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	114.040.000,00	114.040.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	41.910.000,00	41.910.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	774.206.000,00	774.206.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	402.599.730,00	402.599.730,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	266.921.507,00	262.067.060,00	4.854.447,00
JUMLAH	**9.799.612.224,33**	**9.375.406.310,00**	**424.205.914,33**

3. Selisih Lain-Lain PAD yang SAH antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan:

a. Selisih Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO sebesar Rp26.240.772,85 merupakan Jurnal Penyesuaian Piutang denda air bersih pada UPTD Air Bersih Tahun 2024 jurnal nomor 009/JP/UPTDPAB/XII/2024;

b. Selisih Pendapatan Pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp126.564.152,00 merupakan jurnal Penyesuaian Piutang air bersih pada UPTD Air Bersih Tahun 2024 jurnal nomor 009/JP/UPTDPAB/2024.

Tabel 5.101 Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD yang SAH

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	155.882.400,00	155.882.400,00	0,00
Jasa Giro-LO	693.433.441,25	693.433.441,25	0,00
Pendapatan Bunga – LO	109.375.000,00	109.375.000,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.478.422.123,89	2.478.422.123,89	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	448.732.052,00	448.732.052,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	25.779.453,00	25.779.453,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	51.034.488,00	51.034.488,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	27.549.532,85	1.308.760,00	26.240.772,85
Pendapatan dari Pengembalian –LO	173.228.624,22	173.228.624,22	0,00

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan dari BLUD-LO	6.796.465.439,00	6.669.901.287,00	126.564.152,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
JUMLAH	**10.961.152.554,21**	**10.808.347.629,36**	**152.804.924,85**

1.b Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp603.393.937.004,00	**Rp585.415.597.265,00**

Pendapatan Transfer–LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp603.393.937.004,00 dan Rp585.415.597.265,00. Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.978.339.739,00 atau 3,07%. Rincian Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 5.102 berikut.

Tabel 5.102 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	**525.401.188.687,00**	**504.976.238.492,00**	**4,04**
Bagi Hasil Pajak–LO	8.079.034.358,00	5.703.778.396,00	41,64
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.977.692.000,00	7.422.153.000,00	(19,46)
Dana Alokasi Umum(DAU)–LO	417.506.738.000,00	400.085.686.160,00	4,35
Dana Alokasi Khusus(DAK)–LO	34.147.923.493,00	30.681.315.075,00	11,30
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	59.689.800.836,00	61.083.305.861,00	(2,28)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	**41.844.428.000,00**	**47.385.758.000,00**	**(11,69)**
Dana Penyesuaian–LO	0,00	6.012.923.000,00	(100,00)
Dana Desa	41.844.428.000,00	41.372.835.000,00	1,14
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	**36.148.320.317,00**	**32.413.600.773,00**	**11,52**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak–LO	36.148.320.317,00	32.413.600.773,00	11,52
Bantuan Keuangan – LO	**0,00**	**640.000.000,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	640.000.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	**603.393.937.004,00**	**585.415.597.265,00**	**3,07**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Transfer dengan rincian pada tabel 5.103 berikut.

Tabel 5.103 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	525.401.188.687,00	523.642.264.998,00	1.758.923.689,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.148.320.317,00	32.963.958.033,00	3.184.362.284,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**603.393.937.004,00**	**598.450.651.031,00**	**4.943.285.973,00**

1. **Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pemerintah Pusat**

   Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.758.923.689,00 merupakan sisa penyaluran dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang belum di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun 2024. Nilai tersebut merupakan SiLPA TDF Tahun 2023 sebesar Rp1.629.474.689,00 (terdiri dari nilai TDF 2023 sebesar Rp3.111.455.689,00 sudah transfer ke RKUD sebesar Rp1.481.981.000,000) ditambah saldo TDF Tahun 2024 sebesar Rp129.449.000,00.

2. **Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya**

   Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp3.184.362.284,00 merupakan selisih kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 sebesar Rp11.888.547.076,00 (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat TA. 2024) dan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp8.704.184.792,00, dengan rincian pada tabel 5.104 berikut.

Tabel 5.104 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 2024 dan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024

No.	Keterangan	Piutang Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran Piutang Tahun 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5=3-4*
1	Piutang PKB	2.421.608.824,00	2.414.564.563,00	7.044.261,00
2	Piutang BBNKB	874.295.597,00	1.020.795.144,00	(146.499.547,00)
3	Piutang PBBKB	8.539.408.766,00	5.252.976.951,00	3.286.431.815,00
4	Piutang PAP	53.233.889,00	15.848.134,00	37.385.755,00
Jumlah		**11.888.547.076,00**	**8.704.184.792,00**	**3.184.362.284,00**

Detail data perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dengan rincian pada Tabel 5.105 berikut.

Tabel 5.105 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Bagi Hasil Pajak	8.079.034.358,00	6.320.110.669,00	1.758.923.689,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.977.692.000,00	5.977.692.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum(DAU)	417.506.738.000,00	417.506.738.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK)	34.147.923.493,00	34.147.923.493,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik	59.689.800.836,00	59.689.800.836,00	0,00
Dana Desa	41.844.428.000,00	41.844.428.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.148.320.317,00	32.963.958.033,00	3.184.362.284,00
Jumlah	**603.393.937.004,00**	**598.450.651.031,00**	**4.943.285.973,00**

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp174.500.000,00	**Rp111.307.118.739,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO pada Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp174.500.000,00 dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp111.307.118.739,00 dan terdapat penurunan sebesar Rp111.132.618.739,00 atau (99,84%) yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Hibah, Pendapatan Lainnya.

Tabel 5.106 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	174.500.000,00	106.415.394.499,00	(99,84)
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	113.335.079,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	4.778.389.161,00	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO		**174.500.000,00**	**111.307.118.739,00**	**(99,84)**

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian pada tabel 5.107 berikut.

Tabel 5.107 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan Hibah	174.500.000,00	0,00	174.500.000,00
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**174.500.000,00**	**0,00**	**174.500.000,00**

Selisih LRA dan LO yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp174.500.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.108 Selisih Pendapatan Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	174.500.000,00	0,00	174.500.000,00
Jumlah	**174.500.000,00**	**0,00**	**174.500.000,00**

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya–LO sebesar Rp174.500.000,00 merupakan hibah dari Dinkes Provinsi Sumatera Barat berupa mobil ambulance merek Isuzu Tahun 2003 sebesar Rp150.000.000 jurnal Penyesuaian nomor: 006/JU/PUSNARAS/12/2024 dan hibah dari PT KAI berupa *container* sampah sebesar Rp24.500.000,00 jurnal Penyesuaian nomor: 12/JP/PERKIMLH/2024.

2. Beban	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp681.211.096.028,77	**Rp657.066.810.091,62**

Beban-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp681.211.096.028,77 dan Rp657.066.810.091,62. Beban-LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.144.285.937,15 atau 3,67% dari Beban-LO per 31 Desember 2023. Uraian Beban-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.

2.a Beban Operasi	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp591.481.981.750,46	**Rp568.974.092.551,62**

Beban Operasi–LO per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp591.481.981.750,46 dan Rp568.974.092.551,62. Beban Operasi-LO per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.507.889.198,84 atau 3,96% dari Beban Operasi-LO per 31 Desember 2023. Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.109 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai 2024 (Rp)	Nilai 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Pegawai	312.696.234.820,00	279.349.746.942,00	11,94
2	Beban Persediaan	37.356.733.894,13	39.104.473.974,57	(4,47)
3	Beban Jasa	102.440.686.282,00	96.373.536.036,40	6,30
4	Beban Pemeliharaan	8.291.680.563,00	11.107.758.625,00	(25,35)
5	Beban Perjalanan Dinas	18.634.452.689,00	24.583.064.412,00	(24,20)
6	Beban Hibah	21.650.244.697,33	16.013.566.936,00	35,20
7	Beban Bantuan Sosial	545.742.000,00	461.160.000,00	18,34
8	Beban Penyisihan Piutang	410.698.456,98	707.947.328,90	(41,99)
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.874.994.506,00	20.728.174.011,00	(13,76)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.140.954.975,00	31.364.468.926,00	(26,22)
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.798.049.760,02	43.254.942.697,75	(7,99)
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.405.644.497,00	2.928.938.210,00	(52,01)
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	11.412.667,00	22.132.946,00	(48,44)
14	Beban Penyusutan Properti Investasi	6.590.564.326,00	0,00	0,00
15	Beban Lain-lain	633.887.617,00	2.974.181.506,00	(78,69)
Jumlah		**591.481.981.750,46**	**568.974.092.551,62**	**3,96**

1) Beban Pegawai

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp312.696.234.820,00	**Rp279.349.746.942,00**

Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp312.696.234.820,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian pada tabel 5.110 berikut.

Tabel 5.110 Beban Pegawai – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	180.082.951.671,00	167.886.764.879,00	7,26
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	75.175.862.530,00	63.444.742.610,00	18,49
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.229.309.969,00	39.146.611.138,00	12,98
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.165.974.726,00	5.894.911.700,00	4,60
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	114.876.312,00	275.095.860,00	(58,24)

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	379.800.000,00	410.880.000,00	(7,56)
7	Beban Pegawai BOS	17.847.875,00	265.627.858,00	(93,28)
8	Beban Pegawai BLUD	6.529.611.737,00	2.025.112.897,00	222,43
Jumlah		**312.696.234.820,00**	**279.349.746.942,00**	**11,94**

Rincian Beban Pegawai per SKPD disajikan pada **Lampiran 27**.

Pengujian LO dan LRA Pegawai dengan rincian pada tabel 5.111 berikut.

Tabel 5.111 Pengujian LO-LRA Pegawai Tahun 2024

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	180.082.951.671,00	180.172.606.765,00	(89.655.094,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	75.175.862.530,00	77.378.356.727,00	(2.202.494.197,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.229.309.969,00	44.229.309.969,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	6.165.974.726,00	6.165.974.726,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	114.876.312,00	114.876.312,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	379.800.000,00	379.800.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS	17.847.875,00	17.847.875,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	6.529.611.737,00	6.529.611.737,00	0,00
Jumlah		**312.696.234.820,00**	**314.988.384.111,00**	**(2.292.149.291,00)**

Selisih pengujian Belanja Pegawai - LRA dengan Beban Pegawai - LO sebesar Rp2.292.149.291,00. Selisih merupakan Pembayaran Utang Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Sadikin, dan Kecamatan Pariaman Tengah. Rincian disajikan pada **Lampiran 29a**.

		Tahun 2024	Tahun 2023
2)	**Beban Persediaan**	**Rp37.356.733.894,13**	**Rp39.104.473.974,57**

Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp37.356.733.894,13 merupakan Beban Persediaan dengan rincian pada tabel 5.112 berikut.

Tabel 5.112 Beban Persediaan-LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Bahan Pakai Habis	37.356.733.894,13	39.104.473.974,57	(4,47)
Jumlah		**37.356.733.894,13**	**39.104.473.974,57**	**(4,47)**

Rincian Beban Persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 28a**.

Pengujian per SKPD Persediaan, LRA dan Beban Persediaan dengan rincian pada tabel 5.113 berikut.

Tabel 5.113 Perbandingan LRA-LO Persediaan Tahun 2024

No	Jenis Persediaan	Persediaan Awal Tahun (Rp)	Belanja Barang dan Jasa - Persediaan (LRA) (Rp)	Persediaan Akhir Tahun (Rp)	Persediaan yang Digunakan (Rp)	Beban Persediaan-LO (Rp)	Selisih LO-LRA (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3+4)-5*	*7*	*8=7-6*
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.101.240.458,23	33.461.286.245,00	5.022.938.757,10	41.539.587.946,13	37.356.733.894,13	(4.182.854.052,00)
Jumlah		**13.101.240.458,23**	**33.461.286.245,00**	**5.022.938.757,10**	**41.539.587.946,13**	**37.356.733.894,13**	**(4.182.854.052,00)**

Selisih LO dan LRA sebesar Rp4.182.854.052,00 merupakan pembayaran Utang Belanja sebesar Rp3.542.704.052,00 dan Belanja Modal tambah Barang dan Jasa sebesar Rp640.150.000,00. Pengujian Persediaan, Belanja Persediaan–LRA, beban Persedian-LO disajikan pada **Lampiran 29b**.

3) **Beban Jasa**	**Tahun 2024**	**Tahun 2023**
	Rp102.440.686.282,00	**Rp96.373.536.036,40**

Beban Jasa sebesar Rp102.440.686.282,00 merupakan Beban Jasa dengan rincian pada tabel 5.114 berikut.

Tabel 5.114 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Jasa Kantor	53.739.369.855,00	55.622.621.779,40	(3,39)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.360.895.154,00	7.588.644.515,00	62,89
3	Beban Sewa Tanah	32.000.000,00	60.800.000,00	(47,37)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.070.227.000,00	1.422.885.000,00	(24,78)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.917.991.676,00	3.122.932.915,00	(38,58)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	79.000.000,00	0,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.496.000,00	544.175.200,00	(90,90)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	89.784.500,00	(100,00)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	16.900.000,00	12.450.000,00	35,74
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	133.211.900,00	1.092.296.357,00	(87,80)
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	35.100.050,00	0,00	0,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.415.218.776,00	1.476.281.500,00	334,55
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.366.095.691,00	11.966.862.149,00	(55,16)
14	Beban Barang dan Jasa BOS	10.433.377.615,00	9.633.743.929,00	8,30

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.481.320.697,00	0,00	0,00
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.310.481.868,00	3.740.058.192,00	68,73
Jumlah		**102.440.686.282,00**	**96.373.536.036,40**	**6,30**

Rincian Beban Jasa per SKPD disajikan pada **Lampiran 28b**.

Pengujian LO dan LRA Beban Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.115 Pengujian LO-LRA Beban Jasa Tahun 2024

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Jasa Kantor	53.739.369.855,00	54.817.346.837,00	(1.077.976.982,00)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.360.895.154,00	9.982.674.554,00	2.378.220.600,00
3	Beban Sewa Tanah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.070.227.000,00	1.070.227.000,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.917.991.676,00	1.917.991.676,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.496.000,00	223.527.740,00	(174.031.740,00)
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	133.211.900,00	99.815.000,00	33.396.900,00
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	35.100.050,00	68.496.950,00	(33.396.900,00)
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.415.218.776,00	6.415.218.776,00	0,00
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.366.095.691,00	5.658.682.191,00	(292.586.500,00)
13	Beban Barang dan Jasa BOS	10.433.377.615,00	10.446.477.615,00	(13.100.000,00)
14	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.481.320.697,00	4.481.320.697,00	0,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.310.481.868,00	6.310.481.868,00	0,00
Jumlah		**102.440.686.282,00**	**101.620.160.904,00**	**820.525.378,00**

Selisih pengujian Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa–LO sebesar Rp820.525.378,00 merupakan pembayaran Utang sebesar (Rp1.252.008.722,00), Utang Belanja Tahun 2024 sebesar Rp2.378.220.600,00, belanja modal tambah barang dan jasa (Rp13.100.000,00) serta Jurnal Variabel Pendukung merupakan penambahan dari biaya perolehan Aset Tetap selain dari Belanja Modal yang belum dikapitalisasi pada aset bersangkutan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar (Rp292.586.500,00)

yaitu biaya pengawasan lima ruas. Rincian data per SKPD pada **Lampiran 29c**.

4) Beban Pemeliharaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp8.291.680.563,00	**Rp11.107.758.625,00**

Beban Pemeliharaan sebesar Rp8.291.680.563,00 merupakan Beban Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.997.482.267,00	6.322.717.027,00	(20,96)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.880.866.363,00	3.457.231.598,00	(45,60)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.413.331.933,00	1.327.810.000,00	6,44
Jumlah		**8.291.680.563,00**	**11.107.758.625,00**	**(25,35)**

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 28c**.

Pengujian LO dan LRA Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.117 Pengujian LO-LRA Pemeliharaan Tahun 2024

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.997.482.267,00	5.031.421.267,00	(33.939.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.880.866.363,00	3.756.589.886,00	(1.875.723.523,00)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.413.331.933,00	1.413.331.933,00	0,00
Jumlah		**8.291.680.563,00**	**10.201.343.086,00**	**(1.909.662.523,00)**

Selisih pengujian Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan–LO sebesar Rp1.909.662.523,00 merupakan pembayaran Utang sebesar Rp70.749.517,00, Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp1.838.913.006,00 dan dengan rincian data per SKPD disajikan pada **Lampiran 29d**.

5) Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp18.634.452.689,00	**Rp24.583.064.412,00**

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp18.634.452.689,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian pada taber 5.118 berikut.

Tabel 5.118 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.253.858.988,00	7.621.830.100,00	(31,07)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.380.593.701,00	16.294.992.298,00	(17,89)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	666.242.014,00	0,00
Jumlah		**18.634.452.689,00**	**24.583.064.412,00**	**(24,20)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD disajikan pada **Lampiran 28d.**

Pengujian LO dan LRA Perjalanan Dinas disajikan pada tabel 5.119 berikut.

Tabel 5.119 Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas Tahun 2024

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.253.858.988,00	5.282.858.988,00	(29.000.000,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.380.593.701,00	13.493.773.752,00	(113.180.051,00)
Jumlah		**18.634.452.689,00**	**18.776.632.740,00**	**(142.180.051,00)**

Selisih pengujian Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp142.180.051,00 merupakan Pembayaran Utang Belanja dengan rincian data per SKPD disajikan pada **Lampiran 29e**.

6) Beban Hibah

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp21.650.244.697,33	**Rp16.013.566.936,00**

Beban Hibah sebesar Rp21.650.244.697,33 merupakan Beban Hibah pada BPKPD dan beban barang/uang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian pada tabel 5.120 berikut.

Tabel 5.120 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	13.961.261.265,00	191.300.000,00	7.198,10
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	8.411.759.510,00	(97,62)

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.115.449.861,00	2.657.680.152,00	17,22
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	1.679.633.143,00	(100,00)
5	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.225.000.000,00	280.970.744,00	335,99
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	1.578.696.367,00	(100,00)
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	372.297.020,00	(100,00)
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	875.252.333,33	841.230.000,00	4,04
9	Beban Hibah Dana BOSP	2.273.281.238,00	0,00	0,00
Jumlah		**21.650.244.697,33**	**16.013.566.936,00**	**35,20**

Rincian Beban Hibah per SKPD disajikan pada **Lampiran 28e**.

7) Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp545.742.000,00	**Rp461.160.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 yaitu sebesar Rp545.742.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp84.582.000,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp461.160.000,00. Beban Bantuan Sosial dimaksud merupakan Pembayaran Belanja uang yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk sisa penerima beasiswa Kartu Pariaman Pintar (KPP).

8) Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp410.698.456,98	**Rp707.947.328,90**

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp410.698.456,98 merupakan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian pada tabel 5.121 berikut.

Tabel 5.121 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	297.080.171,25	476.734.812,53	(37,68)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	71.770.635,38	233.640.913,22	(69,28)

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	43.044.317,02	33.818.270,15	27,28
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.196.666,67)	(36.246.667,00)	(96,70)
Jumlah		**410.698.456,98**	**707.947.328,90**	**(41,99)**

9) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp88.821.620.731,02	**Rp98.298.656.790,75**

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp88.821.620.731,02 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian pada tabel 5.122 berikut.

Tabel 5.122 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.874.994.506,00	20.728.174.011,00	(13,76)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.140.954.975,00	31.364.468.926,00	(26,22)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	39.798.049.760,02	43.254.942.697,75	(7,99)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.405.644.497,00	2.928.938.210,00	(52,01)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	11.412.667,00	22.132.946,00	(48,44)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	6.590.564.326,00	0,00	0,00
Jumlah		**88.821.620.731,02**	**98.298.656.790,75**	**(9,64)**

Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp82.219.643.738,02 merupakan selisih Akumulasi Penyusutan TA. 2024 sebesar Rp1.369.522.652.054,92 dikurangi Akumulasi Penyusutan TA 2023 sebesar Rp1.292.080.067.060,06 dikurangi penghapusan dan penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar Rp4.777.058.743,16 ditambah dengan Akumulasi dan Aset Lain-lain Tahun berjalan sebesar Rp11.412.667,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp6.590.564.326,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD disajikan pada **Lampiran 29f.**

10) Beban Lain-Lain

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp633.887.617,00	**Rp2.974.181.506,00**

Beban Lain-Lain sebesar Rp633.887.617,00 merupakan reklasifikasi belanja modal yang tidak dikapitaliasi dari Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Lain-lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 28f.**

2.b Beban Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp89.608.619.278,31	**Rp88.092.717.540,00**

Beban Transfer pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp89.608.619.278,31 dan Rp88.092.717.540,00, rincian disajikan pada tabel 5.123 berikut.

Tabel 5.123 Beban Transfer – LO Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.600.016.144,21	1.271.990.662,00	25,79
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	988.696.139,10	260.492.865,00	279,55
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	3.235.680.000,00	4.646.400.000,00	(30,36)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.784.226.995,00	81.913.834.013,00	2,28
Jumlah		**89.608.619.278,31**	**88.092.717.540,00**	**1,72**

Pengujian LO dan LRA Transfer disajikan pada tabel 5.124 berikut.

Tabel 5.124 Pengujian LO-LRA Beban Transfer

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.600.016.144,21	546.550.321,00	1.053.465.823,21
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	988.696.139,10	424.969.883,00	563.726.256,10
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	3.235.680.000,00	3.235.680.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.784.226.995,00	83.784.226.995,00	0,00
Jumlah		**89.608.619.278,31**	**87.991.427.199,00**	**1.617.192.079,31**

Selisih LO dan LRA Beban Transfer sebesar Rp1.617.192.097,31 merupakan jurnal penyesuaian Utang kurang salur Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 SK nomor 155/900/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Tahun 2024 Sk nomor 154/900/2025 tanggal 5 Mei 2025.

2.c Beban Tidak Terduga	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp120.495.000,00	**Rp0,00**

Beban Tidak Terduga pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp120.495.000,00 dan Rp0,00.

2.d Defisit Non Operasional	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp186.678.517,00	**Rp26.159.101,00**

Defisit Non Operasional pada Tahun 2024 bersumber dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp186.678.517,00 dan Rp26.159.101,00 dengan rincian pada tabel 5.125 berikut.

Tabel 5.125 Defisit Non Operasional-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	186.678.517,00	26.159.101,00
Jumlah		**186.678.517,00**	**26.159.101,00**

Defisit Non Operasional sebesar Rp186.678.517,00 merupakan jurnal penghapusan peralatan mesin kendaraan dinas sebesar Rp30.796.117,00 dan penjualan kendaraan dinas sebesar Rp155.882.400,00.

2.e Surplus/Defisit-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp30.637.307.829,06)	**Rp79.530.799.150,85**

Defisit–LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.637.307.829,06 dan Surplus-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.530.799.150,85.

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kota Pariaman dalam Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp54.785.631.291,03	**Rp70.462.493.164,04**

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah Kota Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp54.785.631.291,03 dan Rp70.462.493.164,04 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan rincian pada tabel 5.126 berikut.

Tabel 5.126 Rincian Arus Kas dari Aktifitas Operasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
a.	Arus Masuk Kas	644.206.147.273,36	625.823.346.970,04	2,94
b.	Arus Keluar Kas	589.420.515.982,33	555.360.853.806,00	6,13
Jumlah		**54.785.631.291,03**	**70.462.493.164,04**	**(22,25)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus masuk kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp644.206.147.273,36 dan Rp625.823.346.970,04 dengan rincian pada tabel 5.127 berikut.

Tabel 5.127 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendapatan Asli Daerah	45.755.496.242,36	38.855.864.202,04	17,76
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	565.486.692.998,00	553.174.284.492,00	2,23
3	Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi	32.963.958.033,00	27.629.474.036,00	19,31
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	6.163.724.240,00	(100,00)
Jumlah		**644.206.147.273,36**	**625.823.346.970,04**	**2,94**

1) Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp45.755.496.242,36 dan Rp38.855.864.202,04, dengan rincian pada tabel 5.128 berikut.

Tabel 5.128 Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penerimaan Pajak Daerah	14.396.111.950,00	14.323.956.113,00	0,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	9.375.406.310,00	3.115.174.963,00	200,96
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.331.512.753,00	10.042.663.440,00	12,83
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	10.652.465.229,36	11.374.069.686,04	(6,34)
Jumlah		**45.755.496.242,36**	**38.855.864.202,04**	**17,76**

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp565.486.692.998,00 dan Rp553.174.284.492,00, dengan rincian pada tabel 5.129 berikut.

Tabel 5.129 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Pusat

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.320.110.669,00	6.516.066.396,00	(3,01)
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.977.692.000,00	7.422.153.000,00	(19,46)
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	417.506.738.000,00	400.085.686.160,00	4,35
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	93.837.724.329,00	91.764.620.936,00	2,26
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	6.012.923.000,00	(100,00)
6	Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa	41.844.428.000,00	41.372.835.000,00	1,14
Jumlah		**565.486.692.998,00**	**553.174.284.492,00**	**2,23**

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi pada TA 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp32.963.958.033,00 dan Rp27.629.474.036,00. Transfer dari Pemerintah Provinsi berasal dari transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Rincian Arus Masuk Kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel 5.130 berikut.

Tabel 5.130 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	32.963.958.033,00	26.989.474.036,00	22,14

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	0,00	640.000.000,00	(100,00)
Jumlah		**32.963.958.033,00**	**27.629.474.036,00**	19,31

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah selama TA 2024 dan 2023 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp6.163.724.240,00, dengan rincian pada tabel 5.131 berikut.

Tabel 5.131 Rincian Arus Masuk Kas -Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penerimaan Hibah	0,00	1.272.000.000,00	(100,00)
2	Penerimaan Lainnya	0,00	4.891.724.240,00	(100,00)
Jumlah		**0,00**	**6.163.724.240,00**	(100,00)

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 sebesar Rp589.420.515.982,33 dan Rp555.360.853.806,00. Terjadi peningkatan arus kas keluar aktivitas operasi TA 2024 dari TA 2023 sebesar Rp34.059.662.176,33. Rincian disajikan pada tabel 5.132 berikut.

Tabel 5.132 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembayaran Belanja Pegawai	314.988.384.111,00	276.716.366.014,00	13,83
2	Pembayaran Belanja Barang & Jasa	164.059.422.975,00	174.333.143.316,00	(5,89)
3	Pembayaran Belanja Hibah	21.650.244.697,33	15.822.266.936,00	36,83
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	610.542.000,00	396.360.000,00	54,04
5	Pembayaran Belanja Tak Terduga	120.495.000,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	546.550.321,00	1.271.990.662,00	(57,03)
7	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	424.969.883,00	260.492.865,00	63,14
8	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	3.235.680.000,00	4.646.400.000,00	(30,36)
9	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	83.784.226.995,00	81.913.834.013,00	2,28
Jumlah		**589.420.515.982,33**	**555.360.853.806,00**	**6,13**

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp59.524.586.159,00)	(Rp63.797.423.985,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp59.524.586.159,00) dan (Rp63.797.423.985,00). Rincian disajikan pada tabel 5.133 berikut.

Tabel 5.133 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Arus Masuk Kas	155.882.400,00	5.736.500,00	2.617,38
2	Arus Keluar Kas	59.680.468.559,00	63.803.160.485,00	(6,46)
Jumlah		**(59.524.586.159,00)**	**(63.797.423.985,00)**	**(6,70)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp155.882.400,00 dan Rp5.736.500,00. Terjadi peningkatan arus kas masuk aktivitas investasi TA 2024 dari TA 2023 sebesar Rp150.145.900,00. Rincian disajikan pada tabel 5.134 berikut.

Tabel 5.134 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor	0,00	1.300.000,00	(100,00)
2	Penjualan Aset Lainnya	155.882.400,00	4.436.500,00	3.413,63
Jumlah		**155.882.400,00**	**5.736.500,00**	**2.617,38**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp59.680.468.559,00 dan Rp63.803.160.485,00. Terjadi Penurunan Arus Kas Keluar aktivitas Investasi TA 2024 dari TA 2023 sebesar Rp4.122.691.926,00, rincian disajikan pada tabel 5.135 berikut.

Tabel 5.135 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Perolehan Tanah	0,00	117.700.000,00	(100,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	10.229.912.049,00	12.532.002.806,00	(18,37)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	27.172.296.811,00	23.033.557.412,00	17,97
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	19.973.012.799,00	27.638.459.867,00	(27,73)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.305.246.900,00	480.440.400,00	171,68
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.000.000,00	(100,00)

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**59.680.468.559,00**	**63.803.160.485,00**	**(6,46)**

3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp1.212.886.333,00	**(Rp2.173.189.415,38)**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.212.886.333,00 dan (Rp2.173.189.415,38). Terjadi Penambahan Arus Kas dari aktivitas transitoris TA 2024 dari TA 2023 sebesar Rp3.386.075.748,38. Rincian disajikan pada tabel 5.136 berikut.

Tabel 5.136 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Arus Masuk Kas	45.131.109.314,06	38.799.987.926,00	16,32
2	Arus Keluar Kas	43.918.222.981,06	40.973.177.341,38	7,19
Jumlah		**1.212.886.333,00**	**(2.173.189.415,38)**	**(155,81)**

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp45.131.109.314,06 dan Rp38.799.987.926,00 Rincian disajikan pada tabel 5.137 berikut.

Tabel 5.137 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.932.044.859,68	38.774.112.887,00	10,72
2	Dana BOS/FKTP/BLUD	2.199.064.454,38	25.875.039,00	8.398,79
Jumlah		**45.131.109.314,06**	**38.799.987.926,00**	**16,32**

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp43.918.222.981,06 dan Rp40.973.177.341,38 Rincian disajikan pada tabel 5.138 berikut.

Tabel 5.138 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.932.044.859,68	38.774.112.887,00	10,72
2	Dana BOS	0,00	122.385,00	(100,00)
3	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya	986.178.121,38	2.198.942.069,38	(55,15)
4	Koreksi SiLPA Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**43.918.222.981,06**	**40.973.177.341,38**	**7,19**

Rincian perhitungan penerimaan fihak ketiga Pemerintah Kota Pariaman selama tahun 2024, dengan rincian pada tabel 5.139 berikut.

Tabel 5.139 Penerimaan Fihak ketiga Tahun 2024

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3
- Potongan :	**21.617.889.741,00**	**21.617.889.741,00**
1. Iuran Wajib Pegawai 8%	5.099.130.902,00	5.099.130.902,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.732.156,00	15.732.156,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.341.909,00	1.341.909,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.407.087,00	1.407.087,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.801.455,00	5.801.455,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.221.078,00	4.221.078,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%	7.282.440.057,00	7.282.440.057,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	271.093.079,00	271.093.079,00
10. Iuran Jaminan Kematian	811.043.662,00	811.043.662,00
11. Iuran Wajib Pegawai	917.846,00	917.846,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%	2.034.019.262,00	2.034.019.262,00
16. Taspen	4.572.169.726,00	4.572.169.726,00
18. Lainnya	2.174.160,00	2.174.160,00
21. Zakat	1.516.397.362,00	1.516.397.362,00
- Pajak :	**21.314.155.118,68**	**21.314.155.118,68**
1. PPH 21	10.685.113.093,50	10.685.113.093,50
2. Pajak Penghasilan Ps 22	493.086.817,65	493.086.817,65
3. Pajak Penghasilan Ps 23	189.484.601,17	189.484.601,17
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	952.294.863,00	952.294.863,00
8. Pajak Pertambahan Nilai	8.994.175.743,36	8.994.175.743,36
Total	**42.932.044.859,68**	**42.932.044.859,68**

4. Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp3.526.068.534,97)	**Rp4.491.879.763,66**

Kenaikan/Penurunan kas operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp3.526.068.534,97) dan Rp4.491.879.763,66. Ini menunjukkan Tahun 2024 arus kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar mulai dari aktivitas operasional, Investasi, dan transitoris.

5. Saldo Akhir Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp2.644.532.711,54	**Rp7.383.487.579,51**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.644.532.711,54 dan Rp7.383.487.579,51**.** Saldo Kas per 31 Desember 2024 lebih kecil atau terjadi penurunan kas sebesar Rp4.738.954.867,97 atau 64,18% dari saldo akhir kas per 31 Desember 2023. Rincian lebih lanjut saldo akhir kas per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian disajikan pada tabel 5.140 berikut.

Tabel 5.140 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.571.594.340,16	5.184.423.125,13	(69,69)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara BOS	10.126.000,00	122.385,00	8.173,89
4	Kas di Bendahara BLUD	507.674.452,38	1.163.925.554,00	(56,38)
5	Kas di Bendahara JKN	0,00	42.669.245,38	(100,00)
6	Kas Lainnya	468.377.669,00	992.347.270,00	(52,80)
Jumlah		**2.644.532.711,54**	**7.383.487.579,51**	**(64,18)**

Perbandingan Kas pada Neraca dengan saldo Akhir Kas pada LAK disajikan pada tabel 5.141 berikut.

Tabel 5.141 Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca

No.	Uraian	LAK (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.571.594.340,16	1.571.594.340,16	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00	86.760.250,00	0,00
3	Kas di Bendahara BOS	10.126.000,00	10.126.000,00	0,00
4	Kas di Bendahara BLUD	507.674.452,38	507.674.452,38	0,00
5	Kas Lainnya	468.377.669,00	468.377.669,00	0,00
Jumlah		**2.644.532.711,54**	**2.644.532.711,54**	**0,00**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp795.132.246.237,12	**Rp822.917.825.354,19**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2024. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dengan rincian disajikan pada tabel 5.142 berikut.

Tabel 5.142 Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Nilai Tahun 2024 (Rp)	Nilai Tahun 2023 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	2	3	4	5 = (3-4)/4*100
1	Ekuitas Awal	822.917.825.354,19	753.884.427.111,33	9,16
2	Surplus/Defisit LO	(30.637.307.829,06)	79.530.799.150,85	(138,52)
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi ekuitas lainnya	2.851.728.711,99	(10.497.400.907,99)	(127,17)
TOTAL		**795.132.246.237,12**	**822.917.825.354,19**	**3,38**

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp822.917.825.354,19	**Rp753.884.427.111,33**

Pada Tahun 2024 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp822.917.825.354,19 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023. Ekuitas awal tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp69.033.398.242,86 atau 9,16% dari ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp753.884.427.111,33.

2. Surplus/Defisit LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp30.637.307.829,06)	**Rp79.530.799.150,85**

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat surplus/defisit LO sebesar (Rp30.637.307.829,06). Surplus/defisit LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp110.168.106.979,91 atau 138,52% dari Tahun 2023 sebesar Rp79.530.799.150,85.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp2.851.728.711,99	**(Rp10.497.400.907,99)**

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp2.851.728.711,99, dengan rincian pada table 5.143 berikut.

Tabel 5.143 Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024

No.	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Penghapusan Utang	1.185.200,00	147.123.491,61	145.938.291,61
2	Tuntuan Ganti Kerugian Daerah	687.936.716,25	3.130.350.852,02	2.442.414.135,77
3	Saldo Awal Aset tetap dan Penyusutan	562.109.470,00	839.194.422,28	277.084.952,28
4	Penyesuaian Dana Bergulir	746.667,67	5.668.000,00	4.921.332,33
5	Penghapusan Aset TetapTanah	18.630.000,00	0	(18.630.000,00)
TOTAL		1.270.608.053,92	4.122.336.765,91	2.851.728.711,99

Detail rincian dapat dilihat pada **Lampiran 30.**

4. Ekuitas Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp795.132.246.237,12	**Rp822.917.825.354,19**

Ekuitas akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp795.132.246.237,12. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp27.785.579.117,07 atau 3,38% dari ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp822.917.825.354,19.

BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama Tahun 2024 terjadi pergantian manajemen dan pegawai sebanyak sembilan kali, yaitu:

Tabel 6.1 Pergantian Manajemen dan Pegawai

No.	Pelantikan	Jumlah yang Dilantik	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	28 Februari 2024	61 orang	-	-	-	61 Orang
2	9 Juni 2024	12 Orang	-	9 orang	3 orang	-
3	14 September 2024	72 orang	1 Orang	-	-	71 orang
4	22 September 2024	4 orang	-	3 orang	-	1 Orang
5	20 Oktober 2024	19 orang	-	-	-	19 Orang
6	2 Oktober 2024	11 orang	-	-	-	11 Orang
7	12 November 2024	3 Orang	-	3 orang	-	-
8	14 November 2024	14 Orang	-	-	-	14 Orang
9	13 Desember 2024	1 orang	1 Orang	-	-	1 Orang

Namun demikian, dengan terjadinya mutasi, rotasi, ataupun promosi di jajaran Pemerintah Kota Pariaman, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran SKPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.2. Komitmen dan Kontijensi

Terdapat kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 9 November 2023 perihal gugatan antara Nurfifa Hanum Asir sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Inspektorat, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dan Kerapatan Adat Nagari Pasar Pariaman. Objek perkara dalam gugatan ini yaitu sebidang tanah seluas 11 x 24 = 264 meter persegi, yang terletak di kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah. Saat ini perkara tersebut telah mempunyai putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Desember 2024 dan telah yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) di mana gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya *(Niet Onvankelijke Verkelaard).*

Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Kasus yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Perkara Perdata Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 14 Agustus 2024

perihal gugatan antara Indra Jaya Malik sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pariaman Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Inspektorat Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dan Ketua Yayasan LP3ESIDA. Objek perkara dalam gugatan ini yaitu tanah tempat berdirinya Kantor Dinas Pariwisata Kota Pariaman, yang terletak di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman. Selanjutnya Perkara Perdata Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 14 Agustus 2024 perihal gugatan antara Yusneli sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Inspektorat Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dan Direktur PT. Nata Konstruksi. Objek perkara dalam gugatan ini yaitu 2 (dua) bidang, bidang tanah pertama seluas 8 x 108 = 864 meter persegi dan bidang tanah kedua seluas 4 x 108 = 432 meter persegi, yang terletak di Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman Utara. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman

6.3. Pengungkapan Lainnya

Adanya perubahan penerapan Basis dari Basis Kas menuju Akrual ke Akrual Basis. Terhadap praktik dimaksud komite Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan Interpretasi sebagai penegasan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 dimana terdapat perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

6.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaran pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari:

A. Walikota dan Wakil Walikota

B. Sekretaris Daerah membawah 2 Asisten yaitu:

1. Asisten Tata Praja
    a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Hukum
c. Bagian Organisasi

2. Asisten Administrasi dan Pembangunan
   a. Bagian Umum
   b. Bagian Administrasi Pembangunan
   c. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
3. Kelompok Jabatan Fungsional
   a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
   b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
   c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
   d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumberdaya Manusia
   e. Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan
4. Sekretariat DPRD
5. Dinas
   a. Dinas Pendidikan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
   d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
   e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   f. Dinas Sosial;
   g. Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana;
   h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   j. Dinas Perhubungan;
   k. Dinas Komunikasi Dan informatika;
   l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
   m. Dinas penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
   o. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
   p. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. Inspektorat.
7. Badan
   a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Kantor

a. Kantor Kesbangpol;

b. Kantor Camat Pariaman Tengah;

c. Kantor Camat Pariaman Timur;

d. Kantor Camat Pariaman Utara;

e. Kantor Camat Pariaman Selatan.

6.5. Kepemimpinan Daerah

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023

Jabatan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	*2*	*3*
Ketua	Harven Agus Bulyandi (13 Agustus 2024) Muhajir Muslim, LC (14 Agustus 2024-Sekarang)	Fitri Nora, A. Md (28 Maret 2023) Harven Agus Bulyandi (28 Maret 2023 – Sekarang)
Wakil Ketua I	Reza Saputra, S. Pd	Efrizal
Wakil Ketua II	Yogi Firman	Mulyadi

Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3 Daftar Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2024 dan 2023

Jabatan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	*2*	*3*
Walikota	Roberia (12 Oktober 2023 – Sekarang)	Roberia (12 Oktober 2023 – Sekarang) Genius Umar (09 Oktober 2023)
Wakil Walikota	-	Mardison Mahyudin (Oktober 2023)
Sekretaris Daerah	Yota Balad, S.STP, M.Si (1 Agustus 2024 Drs. Yaminu Rizal, M.Si (14 September 2024- 13 Desember 2024) Mursalim, A.P., M.Si (13 Desember 2024-sekarang)	Yota Balad, S.STP, M.Si.
Bendahara Umum Daerah	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si (30 September 2024) Adrial, SE, MM (1 Oktober 2024-Sekraang)	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih *(Good Governance and Clean Government).*

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 secara keseluruhan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDHr	Belanja Pegawai BOS	Belanja Pegawai BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	69.475.683.363,00	11.186.832.416,00	37.367.965.707,00	0,00	0,00	0,00	17.847.875,00	0,00	118.048.329.361,00
2	Dinas Kesehatan	39.763.449.884,00	22.081.177.988,00	221.916.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.066.544.684,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	1.560.000.000,00	1.645.283.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.791.795,00	6.288.075.304,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	122.844.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.897.538,00	466.742.381,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	141.366.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.693.051,00	571.059.899,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	215.776.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.020.088,00	1.062.796.147,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	114.845.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.866.517,00	543.712.400,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	115.721.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.932.489,00	552.654.014,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	122.915.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.813.958,00	641.729.942,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	95.680.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.736.301,00	484.416.793,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	3.364.224.873,00	2.015.111.660,00	238.498.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.835.360,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4.612.961.493,00	2.508.719.223,00	188.169.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860.000,00	7.362.710.073,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.631.537.233,00	1.076.171.531,00	70.812.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.521.617,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.443.038.811,00	1.881.005.746,00	80.309.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.353.579,00
16	Dinas Sosial	1.371.878.789,00	930.231.548,00	70.577.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.687.604,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.764.800.258,00	1.158.906.351,00	101.262.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.969.406,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.716.440.512,00	1.118.802.592,00	67.082.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.326.034,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.696.981.036,00	1.174.588.057,00	75.016.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.585.588,00
20	Dinas Perhubungan	2.237.197.572,00	1.265.450.885,00	111.383.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.032.266,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.703.486.933,00	1.105.056.451,00	86.587.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.131.252,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.600.562.881,00	1.653.160.167,00	135.154.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.877.127,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	2.163.934.736,00	1.415.026.822,00	66.572.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.534.094,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.147.331.798,00	1.346.637.892,00	81.683.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.652.866,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.415.998.890,00	926.921.970,00	59.487.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.408.495,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	7.787.364.829,00	4.550.832.960,00	173.069.628,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.511.787.417,00
27	Sekretariat Daerah	5.245.606.922,00	3.921.214.638,00	493.470.759,00	0,00	12.476.500,00	300.000.000,00	0,00	0,00	9.972.768.819,00
28	Sekretariat DPRD	1.688.464.118,00	1.100.539.946,00	146.313.206,00	6.165.974.726,00	0,00	79.800.000,00	0,00	0,00	9.181.091.996,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2.261.963.062,00	1.444.731.951,00	107.749.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.444.990,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	5.262.835.657,00	2.058.508.918,00	665.517.749,00	0,00	96.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.083.182.324,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.973.298.833,00	1.277.578.216,00	71.409.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322.286.971,00

Lampiran 1

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDHr	Belanja Pegawai BOS	Belanja Pegawai BLUD	TOTAL
32	Inspektorat	3.777.036.255,00	2.555.782.675,00	172.333.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.152.749,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.337.945.341,00	778.125.424,00	67.300.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.370.990,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	6.236.547.226,00	3.290.663.235,00	490.502.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.017.712.649,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.510.836.383,00	821.651.605,00	63.076.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.564.233,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	980.400.383,00	564.008.434,00	66.114.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.523.755,00
37	Kantor Kesbangpol	1.000.798.694,00	610.917.426,00	92.535.000,00	0,00	5.559.812,00	0,00	0,00	0,00	1.709.810.932,00
TOTAL		**180.172.606.765,00**	**77.378.356.727,00**	**44.229.309.969,00**	**6.165.974.726,00**	**114.876.312,00**	**379.800.000,00**	**17.847.875,00**	**6.529.611.737,00**	**314.988.384.111,00**

Lampiran 1.a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Belanja Gaji Pokok ASN	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Belanja Tunjangan Beras ASN	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	53.660.852.430,00	5.127.422.620,00	154.710.000,00	4.210.727.000,00	349.747.000,00	2.767.602.720,00	195.203.249,00	688.469,00	2.568.367.471,00	110.090.627,00	330.271.777,00	69.475.683.363,00
2	Dinas Kesehatan	29.594.279.957,00	2.472.436.614,00	169.970.000,00	3.467.852.650,00	139.830.000,00	1.618.369.740,00	69.383.198,00	454.860,00	1.988.025.249,00	60.711.363,00	182.136.253,00	39.763.449.884,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.519.355.712,00	202.154.878,00	149.200.000,00	67.596.000,00	92.540.000,00	133.904.580,00	5.451.609,00	42.815,00	173.279.220,00	5.174.973,00	15.525.086,00	3.364.224.873,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	3.413.309.242,00	315.680.842,00	168.590.000,00	98.626.000,00	142.740.000,00	209.945.580,00	7.183.207,00	54.353,00	228.854.572,00	6.994.391,00	20.983.306,00	4.612.961.493,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.146.062.614,00	120.894.070,00	140.470.000,00	37.820.000,00	19.560.000,00	64.381.380,00	5.653.013,00	16.266,00	87.274.764,00	2.351.271,00	7.053.855,00	1.631.537.233,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.519.115.490,00	259.555.614,00	114.830.000,00	156.480.000,00	43.180.000,00	154.906.380,00	3.970.407,00	38.256,00	170.322.793,00	5.159.927,00	15.479.944,00	3.443.038.811,00
16	Dinas Sosial	953.747.282,00	84.099.046,00	112.310.000,00	65.916.000,00	18.060.000,00	45.697.020,00	9.412.605,00	14.830,00	74.773.046,00	1.962.224,00	5.886.736,00	1.371.878.789,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.254.503.016,00	90.250.128,00	110.690.000,00	98.300.000,00	36.120.000,00	60.760.380,00	9.048.322,00	18.140,00	94.798.664,00	2.577.882,00	7.733.726,00	1.764.800.258,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.180.954.228,00	120.139.788,00	124.190.000,00	94.040.000,00	23.310.000,00	64.091.700,00	7.257.732,00	17.476,00	92.716.984,00	2.430.640,00	7.291.964,00	1.716.440.512,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.165.582.285,00	98.833.736,00	117.455.000,00	108.740.000,00	33.020.000,00	63.077.820,00	8.106.985,00	18.088,00	92.612.311,00	2.383.679,00	7.151.132,00	1.696.981.036,00
20	Dinas Perhubungan	1.654.389.138,00	150.074.916,00	124.930.000,00	33.060.000,00	50.015.000,00	90.452.580,00	6.649.847,00	25.284,00	113.875.756,00	3.431.265,00	10.293.786,00	2.237.197.572,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.110.706.191,00	120.626.206,00	136.350.000,00	145.280.000,00	16.655.000,00	65.033.160,00	8.867.424,00	14.762,00	90.854.140,00	2.275.010,00	6.825.040,00	1.703.486.933,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.892.088.771,00	156.585.098,00	154.930.000,00	87.260.000,00	53.750.000,00	95.449.560,00	7.442.389,00	29.180,00	137.502.049,00	3.881.443,00	11.644.391,00	2.600.562.881,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	1.511.949.624,00	133.142.774,00	136.590.000,00	113.800.000,00	46.685.000,00	83.283.000,00	10.012.666,00	23.122,00	115.988.618,00	3.114.960,00	9.344.972,00	2.163.934.736,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.598.803.130,00	140.476.458,00	110.900.000,00	32.022.000,00	48.955.000,00	85.165.920,00	5.056.351,00	23.394,00	112.781.960,00	3.286.859,00	9.860.726,00	2.147.331.798,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	979.620.340,00	82.109.726,00	107.450.000,00	91.930.000,00	16.835.000,00	45.769.440,00	7.912.335,00	13.061,00	76.296.852,00	2.015.534,00	6.046.602,00	1.415.998.890,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	5.653.177.490,00	492.863.698,00	201.100.000,00	552.510.000,00	118.090.000,00	308.943.720,00	16.635.750,00	79.241,00	397.518.623,00	11.611.565,00	34.834.742,00	7.787.364.829,00
27	Sekretariat Daerah	3.613.311.108,00	348.971.716,00	376.465.000,00	258.878.000,00	93.625.000,00	195.534.000,00	25.968.242,00	56.044,00	303.260.678,00	7.384.259,00	22.152.875,00	5.245.606.922,00
28	Sekretariat DPRD	1.181.406.568,00	91.559.508,00	109.710.000,00	82.352.000,00	29.000.000,00	47.652.360,00	8.509.884,00	17.131,00	128.468.786,00	2.446.973,00	7.340.908,00	1.688.464.118,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	1.512.870.686,00	153.697.634,00	139.930.000,00	180.970.000,00	41.300.000,00	87.917.880,00	12.370.397,00	24.674,00	120.429.951,00	3.112.944,00	9.338.896,00	2.261.963.062,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.502.694.468,00	252.946.628,00	192.415.000,00	16.740.000,00	79.835.000,00	141.653.520,00	5.300.194,00	39.585,00	2.050.679.850,00	5.132.772,00	15.398.640,00	5.262.835.657,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.395.400.583,00	137.954.772,00	123.650.000,00	72.092.000,00	40.030.128,00	79.517.160,00	7.317.631,00	21.089,00	105.664.112,00	2.912.837,00	8.738.521,00	1.973.298.833,00
32	Inspektorat	2.659.292.345,00	225.036.010,00	72.090.000,00	433.440.000,00	12.510.000,00	127.459.200,00	16.627.995,00	43.069,00	208.690.916,00	5.461.629,00	16.385.091,00	3.777.036.255,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	980.651.858,00	113.937.134,00	67.760.000,00	0,00	33.270.000,00	64.381.380,00	2.051.732,00	15.541,00	67.809.340,00	2.017.076,00	6.051.280,00	1.337.945.341,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	4.725.069.588,00	426.494.112,00	392.350.000,00	0,00	93.345.000,00	247.531.560,00	4.288.245,00	70.091,00	308.541.331,00	9.714.239,00	29.143.060,00	6.236.547.226,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.125.492.566,00	120.124.944,00	68.460.000,00	0,00	38.500.000,00	72.999.360,00	1.305.044,00	18.609,00	74.671.582,00	2.316.079,00	6.948.199,00	1.510.836.383,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	714.254.610,00	82.753.976,00	66.680.000,00	0,00	15.400.000,00	44.031.360,00	1.818.766,00	9.544,00	49.586.908,00	1.466.286,00	4.398.933,00	980.400.383,00
37	Kantor Kesbangpol	745.745.038,00	76.743.704,00	40.320.000,00	0,00	30.660.000,00	48.593.820,00	805.736,00	12.124,00	51.778.727,00	1.534.890,00	4.604.655,00	1.000.798.694,00
TOTAL		132.964.686.358,00	12.197.566.350,00	3.984.495.000,00	10.506.431.650,00	1.756.567.128,00	7.114.106.280,00	469.610.955,00	1.899.098,00	10.085.425.253,00	272.953.597,00	818.865.096,00	180.172.606.765,00

Lampiran 1.b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD/UPT	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkanTempat Bertugas ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	7.423.525.749,00	0,00	158.879.720,00	0,00	3.604.426.947,00	11.186.832.416,00
2	Dinas Kesehatan	14.441.916.190,00	0,00	645.826.014,00	0,00	6.993.435.784,00	22.081.177.988,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	1.560.000.000,00	0,00	1.560.000.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.273.562.212,00	0,00	151.720.700,00	0,00	589.828.748,00	2.015.111.660,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.610.611.349,00	0,00	151.953.766,00	0,00	746.154.108,00	2.508.719.223,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	647.428.756,00	0,00	136.950.195,00	0,00	291.792.580,00	1.076.171.531,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.149.509.725,00	0,00	227.027.694,00	0,00	504.468.327,00	1.881.005.746,00
16	Dinas Sosial	566.640.813,00	0,00	114.810.055,00	0,00	248.780.680,00	930.231.548,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	719.371.503,00	0,00	117.065.041,00	0,00	322.469.807,00	1.158.906.351,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	678.484.390,00	0,00	132.953.933,00	0,00	307.364.269,00	1.118.802.592,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	721.777.122,00	0,00	125.400.234,00	0,00	327.410.701,00	1.174.588.057,00
20	Dinas Perhubungan	787.890.021,00	0,00	118.988.067,00	0,00	358.572.797,00	1.265.450.885,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	662.028.295,00	0,00	141.673.669,00	0,00	301.354.487,00	1.105.056.451,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.030.396.255,00	0,00	148.775.116,00	0,00	473.988.796,00	1.653.160.167,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	875.343.796,00	0,00	141.273.839,00	0,00	398.409.187,00	1.415.026.822,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	840.260.723,00	0,00	107.892.395,00	0,00	398.484.774,00	1.346.637.892,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	564.722.045,00	0,00	109.248.661,00	0,00	252.951.264,00	926.921.970,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	2.914.390.849,00	0,00	250.268.988,00	0,00	1.386.173.123,00	4.550.832.960,00
27	Sekretariat Daerah	2.047.413.248,00	0,00	486.202.472,00	17.227.186,00	1.370.371.732,00	3.921.214.638,00
28	Sekretariat DPRD	677.027.968,00	0,00	122.415.146,00	0,00	301.096.832,00	1.100.539.946,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	887.954.098,00	0,00	149.037.922,00	0,00	407.739.931,00	1.444.731.951,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.287.549.361,00	0,00	172.318.464,00	0,00	598.641.093,00	2.058.508.918,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	790.707.190,00	0,00	135.809.055,00	0,00	351.061.971,00	1.277.578.216,00
32	Inspektorat	1.669.224.655,00	0,00	72.800.482,00	0,00	813.757.538,00	2.555.782.675,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	481.045.841,00	0,00	65.914.849,00	0,00	231.164.734,00	778.125.424,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	1.994.583.630,00	0,00	320.482.946,00	0,00	975.596.659,00	3.290.663.235,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	508.533.053,00	0,00	66.236.852,00	0,00	246.881.700,00	821.651.605,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	336.770.064,00	0,00	62.832.473,00	0,00	164.405.897,00	564.008.434,00
37	Kantor Kesbangpol	386.247.532,00	0,00	38.525.836,00	0,00	186.144.058,00	610.917.426,00
Total		47.974.916.433,00	0,00	4.673.284.584,00	1.577.227.186,00	23.152.928.524,00	77.378.356.727,00

Lampiran 1.c

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Belanja Honorarium	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	36.193.310.716,00	596.250.000,00	0,00	285.929.000,00	292.475.991,00	37.367.965.707,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00	158.288.000,00	48.678.812,00	221.916.812,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.283.509,00	0,00	0,00	1.645.283.509,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	96.564.843,00	26.280.000,00	0,00	122.844.843,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	115.086.848,00	26.280.000,00	0,00	141.366.848,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	185.836.059,00	29.940.000,00	0,00	215.776.059,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	91.520.883,00	23.325.000,00	0,00	114.845.883,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	93.821.525,00	21.900.000,00	0,00	115.721.525,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	101.015.984,00	21.900.000,00	0,00	122.915.984,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	77.180.492,00	18.500.000,00	0,00	95.680.492,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.330.000,00	9.168.827,00	238.498.827,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	16.425.000,00	0,00	0,00	0,00	156.930.000,00	14.814.357,00	188.169.357,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230.000,00	5.582.853,00	70.812.853,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.835.000,00	9.474.022,00	80.309.022,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980.000,00	5.597.267,00	70.577.267,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120.000,00	5.142.797,00	101.262.797,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00	5.582.930,00	67.082.930,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420.000,00	5.596.495,00	75.016.495,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.940.000,00	9.443.809,00	111.383.809,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.985.000,00	5.602.868,00	86.587.868,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300.000,00	13.854.079,00	135.154.079,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.580.000,00	4.992.536,00	66.572.536,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.085.000,00	5.598.176,00	81.683.176,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120.000,00	5.367.635,00	59.487.635,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	4.163.000,00	0,00	0,00	0,00	147.165.000,00	21.741.628,00	173.069.628,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.070.759,00	3.400.000,00	493.470.759,00
28	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.730.000,00	5.583.206,00	146.313.206,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040.000,00	9.709.977,00	107.749.977,00

Lampiran 1.c

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Belanja Honorarium	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Total
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	487.983.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.293.000,00	14.241.699,00	665.517.749,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	5.609.922,00	71.409.922,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525.000,00	130.808.819,00	172.333.819,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.680.000,00	5.620.225,00	67.300.225,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.855.000,00	68.647.188,00	490.502.188,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	4.496.245,00	63.076.245,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545.000,00	5.569.938,00	66.114.938,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.535.000,00	0,00	92.535.000,00
		487.983.050,00	**29.588.000,00**	**36.193.310.716,00**	**596.250.000,00**	**2.421.260.143,00**	**3.778.515.759,00**	**722.402.301,00**	**44.229.309.969,00**

Lampiran 1.d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Uang Representasi DPRD	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Belanja Uang Paket DPRD	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	450.345.000,00	29.567.500,00	42.727.800,00	38.587.500,00	653.000.250,00	56.637.000,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	394.510,00	956.495.166,00	1.863.000.000,00	6.165.974.726,00

Lampiran 1.d

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Uang Representasi DPRD	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Belanja Uang Paket DPRD	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Total
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		450.345.000,00	29.567.500,00	42.727.800,00	38.587.500,00	653.000.250,00	56.637.000,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	394.510,00	956.495.166,00	1.863.000.000,00	6.165.974.726,00

Lampiran 1.e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	Total
1	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	12.476.500,00	0,00	0,00	12.476.500,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	96.320.000,00	0,00	96.320.000,00
4	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	5.559.812,00	5.559.812,00
TOTAL		**520.000,00**	**12.476.500,00**	**96.320.000,00**	**5.559.812,00**	**114.876.312,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH, BELANJA PEGAWAI BOS DAN BELANJA PEGAWAI BLUD
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Belanja Pegawai BOS	Belanja Pegawai BLUD	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	17.847.875,00	0,00	17.847.875,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	3.082.791.795,00	3.082.791.795,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	343.897.538,00	343.897.538,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	429.693.051,00	429.693.051,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	847.020.088,00	847.020.088,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	428.866.517,00	428.866.517,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	436.932.489,00	436.932.489,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	518.813.958,00	518.813.958,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	388.736.301,00	388.736.301,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	52.860.000,00	52.860.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
28	Sekretariat DPRD	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**79.800.000,00**	**300.000.000,00**	**17.847.875,00**	**6.529.611.737,00**	**6.927.259.612,00**

Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA BARANG DAN JASA				TOTAL
		BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA PERJALANAN DINAS	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.883.915.196,00	17.702.511.889,00	2.068.666.658,00	193.993.481,00	21.849.087.224,00
2	Dinas Kesehatan	2.955.719.387,00	11.691.485.686,00	266.568.500,00	478.255.993,00	15.392.029.566,00
3	RSUD dr Sadikin	336.694.472,00	5.759.926.796,00	53.406.000,00	0,00	6.150.027.268,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	61.576.000,00	781.907.065,00	34.110.000,00	2.525.000,00	880.118.065,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	87.397.100,00	991.096.267,00	33.108.150,00	0,00	1.111.601.517,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	62.076.300,00	1.685.538.620,00	18.391.000,00	3.550.000,00	1.769.555.920,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	81.714.956,00	958.786.917,00	51.962.350,00	8.364.618,00	1.100.828.841,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	70.371.100,00	854.396.449,00	52.570.000,00	5.000.000,00	982.337.549,00
9	UPT. Puskesmas Naras	48.343.460,00	969.958.747,00	9.600.000,00	0,00	1.027.902.207,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	22.259.450,00	771.421.586,00	72.351.000,00	7.325.000,00	873.357.036,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	328.959.850,00	95.716.750,00	14.735.044,00	56.850.000,00	496.261.644,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.875.123.335,00	5.586.239.406,00	1.801.271.950,00	503.679.183,00	13.766.313.874,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	2.142.064.786,00	11.733.097.205,00	554.682.124,00	393.646.462,00	14.823.490.577,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	327.892.050,00	1.446.875.392,00	165.075.973,00	99.439.500,00	2.039.282.915,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	635.024.750,00	6.070.420.501,00	155.430.750,00	42.221.221,00	6.903.097.222,00
16	Dinas Sosial	734.361.656,00	498.505.782,00	30.179.023,00	57.870.750,00	1.320.917.211,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.259.741.900,00	3.636.579.310,00	164.493.862,00	185.869.382,00	5.246.684.454,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	384.741.849,00	200.090.530,00	72.746.300,00	87.285.864,00	744.864.543,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	245.848.405,00	2.022.304.111,00	37.430.075,00	259.821.987,00	2.565.404.578,00
20	Dinas Perhubungan	689.699.926,00	2.347.389.083,00	538.259.105,00	108.290.000,00	3.683.638.114,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	186.049.789,00	1.583.925.610,00	1.564.047.926,00	339.207.199,00	3.673.230.524,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.212.878.000,00	3.094.156.505,00	239.742.531,00	136.026.470,00	4.682.803.506,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	302.838.888,00	659.262.950,00	46.563.153,00	192.201.655,00	1.200.866.646,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	469.440.498,00	2.120.489.043,00	191.753.233,00	75.795.609,00	2.857.478.383,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	191.974.394,00	222.369.333,00	61.943.000,00	248.892.397,00	725.179.124,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	2.069.649.771,00	1.152.682.077,00	161.747.850,00	74.033.433,00	3.458.113.131,00
27	Sekretariat Daerah	3.078.488.797,00	5.806.229.580,00	565.732.912,00	1.617.718.092,00	11.068.169.381,00
28	Sekretariat DPRD	2.562.911.675,00	3.444.147.660,00	356.135.674,00	9.712.721.330,00	16.075.916.339,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	745.808.676,00	654.533.204,00	113.347.688,00	467.389.501,00	1.981.079.069,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.994.957.965,00	2.865.786.573,00	397.213.509,00	1.945.046.667,00	7.203.004.714,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	280.177.895,00	507.151.335,00	29.995.100,00	568.415.160,00	1.385.739.490,00
32	Inspektorat	129.131.684,00	180.613.516,00	37.330.200,00	286.965.128,00	634.040.528,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	96.343.940,00	104.040.901,00	18.000.000,00	14.700.000,00	233.084.841,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	1.140.543.400,00	2.631.830.361,00	170.380.000,00	437.179.894,00	4.379.933.655,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	84.819.777,00	98.224.064,00	16.819.783,00	5.175.000,00	205.038.624,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	90.252.650,00	112.947.400,00	16.492.263,00	5.000.000,00	224.692.313,00
37	Kantor Kesbangpol	591.492.518,00	577.522.700,00	19.060.400,00	156.176.764,00	1.344.252.382,00
TOTAL		**33.461.286.245,00**	**101.620.160.904,00**	**10.201.343.086,00**	**18.776.632.740,00**	**164.059.422.975,00**

Lampiran 2.a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA PERSEDIAAN	BELANJA ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA KAPITALISASI	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.151.647.755,00	732.267.441,00	1.883.915.196,00
2	Dinas Kesehatan	2.955.719.387,00	0,00	2.955.719.387,00
3	RSUD dr Sadikin	336.694.472,00	0,00	336.694.472,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	61.576.000,00	0,00	61.576.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	87.397.100,00	0,00	87.397.100,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	62.076.300,00	0,00	62.076.300,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	81.714.956,00	0,00	81.714.956,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	70.371.100,00	0,00	70.371.100,00
9	UPT. Puskesmas Naras	48.343.460,00	0,00	48.343.460,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	22.259.450,00	0,00	22.259.450,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	328.959.850,00	0,00	328.959.850,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.875.123.335,00	0,00	5.875.123.335,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	2.142.064.786,00	0,00	2.142.064.786,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	327.892.050,00	0,00	327.892.050,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	635.024.750,00	0,00	635.024.750,00
16	Dinas Sosial	734.361.656,00	0,00	734.361.656,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.259.741.900,00	0,00	1.259.741.900,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	384.741.849,00	0,00	384.741.849,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	245.848.405,00	0,00	245.848.405,00
20	Dinas Perhubungan	689.699.926,00	0,00	689.699.926,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	186.049.789,00	0,00	186.049.789,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.211.814.000,00	1.064.000,00	1.212.878.000,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	302.838.888,00	0,00	302.838.888,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	469.440.498,00	0,00	469.440.498,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	191.974.394,00	0,00	191.974.394,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	2.069.649.771,00	0,00	2.069.649.771,00
27	Sekretariat Daerah	3.078.488.797,00	0,00	3.078.488.797,00
28	Sekretariat DPRD	2.538.012.832,00	24.898.843,00	2.562.911.675,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	745.808.676,00	0,00	745.808.676,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.994.957.965,00	0,00	1.994.957.965,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	280.177.895,00	0,00	280.177.895,00
32	Inspektorat	127.061.684,00	2.070.000,00	129.131.684,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	96.343.940,00	0,00	96.343.940,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	1.140.543.400,00	0,00	1.140.543.400,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	84.819.777,00	0,00	84.819.777,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	90.252.650,00	0,00	90.252.650,00
37	Kantor Kesbangpol	591.492.518,00	0,00	591.492.518,00
TOTAL		**32.700.985.961,00**	**760.300.284,00**	**33.461.286.245,00**

Lampiran 2.b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA JASA														TOTAL
		Belanja Jasa Kantor	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Belanja Sewa Tanah	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Barang Dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	6.562.182.274,00	49.977.000,00	24.000.000,00	19.300.000,00	172.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650.000,00	228.150.000,00	10.446.477.615,00	0,00	0,00	17.702.511.889,00
2	Dinas Kesehatan	1.902.656.334,00	9.164.399.352,00	0,00	40.500.000,00	431.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160.000,00	0,00	0,00	0,00	11.691.485.686,00
3	RSUD dr Sadikin	2.122.148.734,00	2.877.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.609.650,00	0,00	0,00	3.587.291.292,00	5.759.926.796,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	140.874.910,00	460.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	524.150.861,00	108.921.214,00	781.907.065,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	199.266.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	610.265.000,00	174.064.884,00	991.096.267,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	192.598.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	1.121.404.838,00	352.535.344,00	1.685.538.620,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	162.871.766,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	579.837.942,00	207.237.009,00	958.786.917,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	165.395.786,00	557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	506.942.436,00	173.501.027,00	854.396.449,00
9	UPT. Puskesmas Naras	119.843.556,00	359.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	599.690.891,00	244.564.660,00	969.958.747,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	95.817.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	539.028.729,00	130.125.194,00	771.421.586,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	74.976.050,00	178.200,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662.500,00	0,00	0,00	0,00	95.716.750,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	4.632.316.870,00	22.145.520,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	174.031.740,00	0,00	0,00	379.308.776,00	366.086.500,00	0,00	0,00	0,00	5.586.239.406,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	6.086.827.491,00	282.188.720,00	0,00	5.500.000,00	9.200.000,00	0,00	39.556.000,00	0,00	4.100.000,00	3.748.500.000,00	224.983.750,00	0,00	0,00	1.332.241.244,00	11.733.097.205,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.326.643.908,00	67.017.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.213.884,00	0,00	0,00	0,00	1.446.875.392,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.804.890.221,00	265.530.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.420.501,00
16	Dinas Sosial	307.002.650,00	2.703.132,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	498.505.782,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.225.737.256,00	711.504,00	8.000.000,00	0,00	44.905.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.225.000,00	0,00	0,00	0,00	3.636.579.310,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	191.276.450,00	814.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.090.530,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.296.964.111,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	692.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.304.111,00
20	Dinas Perhubungan	2.289.085.853,00	7.303.230,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.347.389.083,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.486.658.050,00	2.977.560,00	0,00	0,00	24.150.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.583.925.610,00

Lampiran 2.b

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BELANJA JASA														TOTAL
		Belanja Jasa Kantor	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Belanja Sewa Tanah	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Barang Dan Jasa BOS	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.776.287.469,00	9.560.286,00	0,00	0,00	238.900.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	15.408.750,00	0,00	0,00	0,00	3.094.156.505,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	538.083.550,00	3.974.400,00	0,00	0,00	77.750.000,00	0,00	0,00	0,00	27.805.000,00	0,00	11.650.000,00	0,00	0,00	0,00	659.262.950,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.338.323.877,00	2.760.480,00	0,00	124.300.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.104.686,00	0,00	0,00	0,00	2.120.489.043,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.730.333,00	0,00	0,00	0,00	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840.000,00	0,00	0,00	0,00	222.369.333,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.099.642.077,00	0,00	0,00	17.400.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.682.077,00
27	Sekretariat Daerah	3.028.001.109,00	71.200.000,00	0,00	572.685.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.730.000,00	264.963.471,00	0,00	0,00	0,00	5.806.229.580,00
28	Sekretariat DPRD	2.557.334.636,00	3.783.024,00	0,00	219.500.000,00	477.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.147.660,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	549.644.126,00	631.152,00	0,00	0,00	24.757.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	654.533.204,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.706.173.903,00	16.515.720,00	0,00	0,00	74.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.786.573,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	425.547.685,00	754.650,00	0,00	0,00	63.949.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.151.335,00
32	Inspektorat	175.623.916,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.613.516,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	103.240.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	104.040.901,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.490.690.193,00	2.194.968,00	0,00	6.400.000,00	1.895.200,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	124.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.631.830.361,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	97.983.008,00	241.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.224.064,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	111.058.600,00	388.800,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.947.400,00
37	Kantor Kesbangpol	256.946.700,00	0,00	0,00	36.142.000,00	200.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	81.734.000,00	0,00	0,00	0,00	577.522.700,00
JUMLAH		**54.817.346.837,00**	**9.982.674.554,00**	**32.000.000,00**	**1.070.227.000,00**	**1.917.991.676,00**	**79.000.000,00**	**223.527.740,00**	**16.900.000,00**	**99.815.000,00**	**6.415.218.776,00**	**5.658.682.191,00**	**10.446.477.615,00**	**4.481.320.697,00**	**6.310.481.868,00**	**101.620.160.904,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Belanja Pemeliharaan			TOTAL
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	53.183.130,00	2.015.483.528,00	0,00	2.068.666.658,00
2	Dinas Kesehatan	76.668.500,00	189.900.000,00	0,00	266.568.500,00
3	RSUD dr Sadikin	53.406.000,00	0,00	0,00	53.406.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	34.110.000,00	0,00	0,00	34.110.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	33.108.150,00	0,00	0,00	33.108.150,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	18.391.000,00	0,00	0,00	18.391.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	39.150.000,00	10.000.000,00	2.812.350,00	51.962.350,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	18.070.000,00	34.500.000,00	0,00	52.570.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	63.853.000,00	6.500.000,00	1.998.000,00	72.351.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.735.044,00	0,00	0,00	14.735.044,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	148.638.950,00	346.139.540,00	1.306.493.460,00	1.801.271.950,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	446.913.213,00	79.328.911,00	28.440.000,00	554.682.124,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.075.973,00	0,00	0,00	165.075.973,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	155.430.750,00	0,00	0,00	155.430.750,00
16	Dinas Sosial	21.479.023,00	8.700.000,00	0,00	30.179.023,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	127.309.000,00	17.186.769,00	19.998.093,00	164.493.862,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47.749.000,00	24.997.300,00	0,00	72.746.300,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37.430.075,00	0,00	0,00	37.430.075,00
20	Dinas Perhubungan	538.259.105,00	0,00	0,00	538.259.105,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.515.791.306,00	48.256.620,00	0,00	1.564.047.926,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	129.867.522,00	109.875.009,00	0,00	239.742.531,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	46.563.153,00	0,00	0,00	46.563.153,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	77.455.000,00	114.298.233,00	0,00	191.753.233,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61.943.000,00	0,00	0,00	61.943.000,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	143.237.850,00	18.510.000,00	0,00	161.747.850,00
27	Sekretariat Daerah	449.628.022,00	116.104.890,00	0,00	565.732.912,00
28	Sekretariat DPRD	89.425.797,00	237.925.777,00	28.784.100,00	356.135.674,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	43.654.958,00	44.886.800,00	24.805.930,00	113.347.688,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	111.757.000,00	285.456.509,00	0,00	397.213.509,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	29.995.100,00	0,00	0,00	29.995.100,00
32	Inspektorat	37.330.200,00	0,00	0,00	37.330.200,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	121.840.000,00	48.540.000,00	0,00	170.380.000,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	16.819.783,00	0,00	0,00	16.819.783,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	16.492.263,00	0,00	0,00	16.492.263,00
37	Kantor Kesbangpol	19.060.400,00	0,00	0,00	19.060.400,00
TOTAL		**5.031.421.267,00**	**3.756.589.886,00**	**1.413.331.933,00**	**10.201.343.086,00**

Lampiran 2.d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Belanja Perjalanan Dinas			TOTAL
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	115.825.000,00	4.400.000,00	73.768.481,00	193.993.481,00
2	Dinas Kesehatan	90.690.000,00	303.500.000,00	84.065.993,00	478.255.993,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	3.500.000,00	0,00	4.864.618,00	8.364.618,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	7.325.000,00	0,00	0,00	7.325.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.850.000,00	42.000.000,00	0,00	56.850.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	207.239.322,00	4.700.000,00	291.739.861,00	503.679.183,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	206.630.419,00	12.900.000,00	174.116.043,00	393.646.462,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.614.500,00	0,00	69.825.000,00	99.439.500,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	25.700.000,00	0,00	16.521.221,00	42.221.221,00
16	Dinas Sosial	25.839.750,00	0,00	32.031.000,00	57.870.750,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	76.191.750,00	76.200.000,00	33.477.632,00	185.869.382,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	55.250.000,00	0,00	32.035.864,00	87.285.864,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.799.250,00	11.300.000,00	168.722.737,00	259.821.987,00
20	Dinas Perhubungan	108.290.000,00	0,00	0,00	108.290.000,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.196.600,00	0,00	285.010.599,00	339.207.199,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	92.517.500,00	0,00	43.508.970,00	136.026.470,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	62.745.655,00	106.350.000,00	23.106.000,00	192.201.655,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	45.248.666,00	0,00	30.546.943,00	75.795.609,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.592.500,00	0,00	170.299.897,00	248.892.397,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	68.990.000,00	0,00	5.043.433,00	74.033.433,00
27	Sekretariat Daerah	495.554.082,00	0,00	1.122.164.010,00	1.617.718.092,00
28	Sekretariat DPRD	1.225.272.612,00	0,00	8.487.448.718,00	9.712.721.330,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	115.119.132,00	0,00	352.270.369,00	467.389.501,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	549.642.500,00	0,00	1.395.404.167,00	1.945.046.667,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	218.730.250,00	0,00	349.684.910,00	568.415.160,00
32	Inspektorat	26.920.000,00	201.875.000,00	58.170.128,00	286.965.128,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	304.725.000,00	14.900.000,00	117.554.894,00	437.179.894,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
37	Kantor Kesbangpol	83.784.500,00	0,00	72.392.264,00	156.176.764,00
TOTAL		**4.504.733.988,00**	**778.125.000,00**	**13.493.773.752,00**	**18.776.632.740,00**

Lampiran 2.e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Belanja Hibah Dana BOS	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	4.637.313.295,00	0,00	1.950.993.387,00	6.588.306.682,00
2	Dinas Kesehatan	280.970.744,00	0,00	0,00	280.970.744,00
3	Kantor Kesbangpol	8.111.759.510,00	841.230.000,00	0,00	8.952.989.510,00
Jumlah		**13.030.043.549,00**	**841.230.000,00**	**1.950.993.387,00**	**15.822.266.936,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
IKHTISAR DANA DESA TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA DESA	BELANJA DESA (KEUANGAN)						%
		ANGGARAN			REALISASI			
		ADD	DD	TOTAL	ADD	DD	TOTAL	
A	**KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**	**4.822.829.554,00**	**5.037.474.000,00**	**9.860.303.554,00**	**4.822.829.554,00**	**5.037.474.000,00**	**9.860.303.554,00**	**100,00**
1	DESA PAUH BARAT	793.611.759,00	1.095.472.000,00	1.889.083.759,00	793.611.759,00	1.095.472.000,00	1.889.083.759,00	100,00
2	DESA PAUH TIMUR	880.219.759,00	717.757.000,00	1.597.976.759,00	880.219.759,00	717.757.000,00	1.597.976.759,00	100,00
3	DESA RAWANG	716.367.759,00	865.961.000,00	1.582.328.759,00	716.367.759,00	865.961.000,00	1.582.328.759,00	100,00
4	DESA KAMPUNG BARU	767.446.759,00	989.392.000,00	1.756.838.759,00	767.446.759,00	989.392.000,00	1.756.838.759,00	100,00
5	DESA CIMPARUH	968.239.759,00	734.262.000,00	1.702.501.759,00	968.239.759,00	734.262.000,00	1.702.501.759,00	100,00
6	DESA JATI MUDIK	696.943.759,00	634.630.000,00	1.331.573.759,00	696.943.759,00	634.630.000,00	1.331.573.759,00	100,00
B	**KECAMATAN PARIAMAN UTARA**	**12.945.059.903,00**	**13.395.053.000,00**	**26.340.112.903,00**	**12.945.059.903,00**	**13.395.053.000,00**	**26.340.112.903,00**	**100,00**
1	DESA AMPALU	727.261.759,00	783.779.000,00	1.511.040.759,00	727.261.759,00	783.779.000,00	1.511.040.759,00	100,00
2	DESA APAR	722.435.759,00	637.414.000,00	1.359.849.759,00	722.435.759,00	637.414.000,00	1.359.849.759,00	100,00
3	DESA TANJUNG SABAR	700.949.759,00	692.586.000,00	1.393.535.759,00	700.949.759,00	692.586.000,00	1.393.535.759,00	100,00
4	DESA CUBADAK AIR SELATAN	777.160.759,00	674.700.000,00	1.451.860.759,00	777.160.759,00	674.700.000,00	1.451.860.759,00	100,00
5	DESA SIKAPAK BARAT	792.862.759,00	980.678.000,00	1.773.540.759,00	792.862.759,00	980.678.000,00	1.773.540.759,00	100,00
6	DESA SIKAPAK TIMUR	833.368.759,00	813.769.000,00	1.647.137.759,00	833.368.759,00	813.769.000,00	1.647.137.759,00	100,00
7	DESA MANGGUNG	771.568.759,00	717.545.000,00	1.489.113.759,00	771.568.759,00	717.545.000,00	1.489.113.759,00	100,00
8	DESA CUBADAK AIR UTARA	810.798.759,00	780.711.000,00	1.591.509.759,00	810.798.759,00	780.711.000,00	1.591.509.759,00	100,00
9	DESA TUNGKAL SELATAN	802.645.759,00	897.288.000,00	1.699.933.759,00	802.645.759,00	897.288.000,00	1.699.933.759,00	100,00
10	DESA NARAS HILIR	723.130.759,00	748.003.000,00	1.471.133.759,00	723.130.759,00	748.003.000,00	1.471.133.759,00	100,00
11	DESA NARAS I	790.171.759,00	960.097.000,00	1.750.268.759,00	790.171.759,00	960.097.000,00	1.750.268.759,00	100,00
12	DESA BALAI NARAS	780.948.759,00	1.129.318.000,00	1.910.266.759,00	780.948.759,00	1.129.318.000,00	1.910.266.759,00	100,00
13	DESA PADANG BIRIK BIRIK	709.916.759,00	885.211.000,00	1.595.127.759,00	709.916.759,00	885.211.000,00	1.595.127.759,00	100,00
14	DESA SINTUK	750.919.759,00	705.028.000,00	1.455.947.759,00	750.919.759,00	705.028.000,00	1.455.947.759,00	100,00
15	DESA SUNGAI RAMBAI	754.416.759,00	653.043.000,00	1.407.459.759,00	754.416.759,00	653.043.000,00	1.407.459.759,00	100,00
16	DESA TUNGKAL UTARA	739.984.759,00	672.028.000,00	1.412.012.759,00	739.984.759,00	672.028.000,00	1.412.012.759,00	100,00
17	DESA CUBADAK AIR	756.517.759,00	663.855.000,00	1.420.372.759,00	756.517.759,00	663.855.000,00	1.420.372.759,00	100,00
C	**KECAMATAN PARIAMAN SELATAN**	**12.027.548.399,00**	**11.777.792.000,00**	**23.805.340.399,00**	**12.027.548.394,00**	**11.777.792.000,00**	**23.805.340.394,00**	**100,00**
1	DESA PASIR SUNUR	684.524.014,00	582.834.000,00	1.267.358.014,00	684.524.014,00	582.834.000,00	1.267.358.014,00	100,00
2	DESA BALAI KURAI TAJI	732.787.759,00	856.677.000,00	1.589.464.759,00	732.787.759,00	856.677.000,00	1.589.464.759,00	100,00
3	DESA PAUH KURAI TAJI	757.003.759,00	604.688.000,00	1.361.691.759,00	757.003.759,00	604.688.000,00	1.361.691.759,00	100,00
4	DESA SIMPANG KURAI TAJI	728.858.759,00	668.366.000,00	1.397.224.759,00	728.858.759,00	668.366.000,00	1.397.224.759,00	100,00
5	DESA TOBOH PALABAH	746.681.759,00	883.397.000,00	1.630.078.759,00	746.681.759,00	883.397.000,00	1.630.078.759,00	100,00
6	DESA MARABAU	746.277.759,00	815.165.000,00	1.561.442.759,00	746.277.759,00	815.165.000,00	1.561.442.759,00	100,00
7	DESA BATANG TAJONGKEK	736.722.759,00	666.949.000,00	1.403.671.759,00	736.722.759,00	666.949.000,00	1.403.671.759,00	100,00
8	DESA SIKABU	688.354.759,00	588.534.000,00	1.276.888.759,00	688.354.759,00	588.534.000,00	1.276.888.759,00	100,00
9	DESA SUNGAI KASAI	726.449.759,00	637.495.000,00	1.363.944.759,00	726.449.759,00	637.495.000,00	1.363.944.759,00	100,00
10	DESA PALAK ANEH	755.573.759,00	826.146.000,00	1.581.719.759,00	755.573.759,00	826.146.000,00	1.581.719.759,00	100,00
11	DESA KAMPUNG APAR	732.400.759,00	642.337.000,00	1.374.737.759,00	732.400.754,00	642.337.000,00	1.374.737.754,00	100,00
12	DESA MARUNGGI	984.726.759,00	804.819.000,00	1.789.545.759,00	984.726.759,00	804.819.000,00	1.789.545.759,00	100,00
13	DESA TALUK	819.189.759,00	1.022.595.000,00	1.841.784.759,00	819.189.759,00	1.022.595.000,00	1.841.784.759,00	100,00
14	DESA PADANG CAKUR	699.622.759,00	799.774.000,00	1.499.396.759,00	699.622.759,00	799.774.000,00	1.499.396.759,00	100,00
15	DESA PUNGGUNG LADING	786.001.759,00	762.206.000,00	1.548.207.759,00	786.001.759,00	762.206.000,00	1.548.207.759,00	100,00
16	DESA RAMBAI	702.371.759,00	615.810.000,00	1.318.181.759,00	702.371.759,00	615.810.000,00	1.318.181.759,00	100,00
D	**KECAMATAN PARIAMAN TIMUR**	**12.144.361.144,00**	**11.634.109.000,00**	**23.778.470.144,00**	**12.144.361.144,00**	**11.634.109.000,00**	**23.778.470.144,00**	**100,00**
1	DESA TALAGO SARIK	802.440.759,00	732.767.000,00	1.535.207.759,00	802.440.759,00	732.767.000,00	1.535.207.759,00	100,00
2	DESA PAKASAI	758.461.759,00	949.666.000,00	1.708.127.759,00	758.461.759,00	949.666.000,00	1.708.127.759,00	100,00
3	DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN	786.591.759,00	664.177.000,00	1.450.768.759,00	786.591.759,00	664.177.000,00	1.450.768.759,00	100,00
4	DESA KAMPUNG GADANG	795.128.759,00	956.688.000,00	1.751.816.759,00	795.128.759,00	956.688.000,00	1.751.816.759,00	100,00
5	DESA KOTO MARAPAK	819.436.759,00	911.048.000,00	1.730.484.759,00	819.436.759,00	911.048.000,00	1.730.484.759,00	100,00
6	DESA BATANG KABUNG	755.077.759,00	684.089.000,00	1.439.166.759,00	755.077.759,00	684.089.000,00	1.439.166.759,00	100,00
7	DESA BATO	746.594.759,00	640.486.000,00	1.387.080.759,00	746.594.759,00	640.486.000,00	1.387.080.759,00	100,00
8	DESA AIR SANTOK	792.974.759,00	838.885.000,00	1.631.859.759,00	792.974.759,00	838.885.000,00	1.631.859.759,00	100,00
9	DESA CUBADAK MENTAWAI	744.072.759,00	639.928.000,00	1.384.000.759,00	744.072.759,00	639.928.000,00	1.384.000.759,00	100,00
10	DESA SUNGAI SIRAH	696.597.759,00	592.585.000,00	1.289.182.759,00	696.597.759,00	592.585.000,00	1.289.182.759,00	100,00
11	DESA SUNGAI PASAK	793.857.759,00	657.709.000,00	1.451.566.759,00	793.857.759,00	657.709.000,00	1.451.566.759,00	100,00
12	DESA BUNGO TANJUNG	779.591.759,00	655.940.000,00	1.435.531.759,00	779.591.759,00	655.940.000,00	1.435.531.759,00	100,00
13	DESA KAMPUNG TANGAH	687.043.759,00	638.464.000,00	1.325.507.759,00	687.043.759,00	638.464.000,00	1.325.507.759,00	100,00
14	DESA KAMPUNG KANDANG	763.424.759,00	746.043.000,00	1.509.467.759,00	763.424.759,00	746.043.000,00	1.509.467.759,00	100,00
15	DESA KALUAT	710.509.759,00	662.264.000,00	1.372.773.759,00	710.509.759,00	662.264.000,00	1.372.773.759,00	100,00
16	DESA KAJAI	712.555.759,00	663.370.000,00	1.375.925.759,00	712.555.759,00	663.370.000,00	1.375.925.759,00	100,00
Total		**41.939.799.000,00**	**41.844.428.000,00**	**83.784.227.000,00**	**41.939.798.995,00**	**41.844.428.000,00**	**83.784.226.995,00**	**100,00**

Lampiran 4

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BLUD TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

		SALDO AWAL	PENERIMAAN BLUD	TOTAL SPJ BELANJA	SISA KAS	SPJ BELANJA						JUMLAH
						Pegawai	Persediaan	Brg & DJS	Pemeliharaan	SPPD	Mesin	
1	2	3	4	5	6=3+4-5							
1	RSUD SADIKIN	1.101.381.172,00	6.375.980.059,00	7.202.617.237,00	274.743.994,00	3.082.791.795,00	2.862.225.568,00	144.148.390,00	266.510.834,00	314.406.500,00	532.534.150,00	7.202.617.237,00
2	UPTD AIR BERSIH	62.544.382,00	1.417.451.023,00	1.402.224.744,00	77.770.661,00	52.860.000,00	440.088.550,00	689.317.789,00	156.011.750,00	46.823.155,00	17.123.500,00	1.402.224.744,00
3	PUSKESMAS NARAS	176.658,00	858.648.156,00	827.607.133,00	31.217.681,00	518.813.958,00	135.164.660,00	32.500.000,00	69.500.000,00	7.400.000,00	64.228.515,00	827.607.133,00
4	PUSKESMAS PARIAMAN	14.763.631,00	1.421.027.977,00	1.373.371.932,00	62.419.676,00	847.020.088,00	208.529.715,00	21.862.308,00	76.125.000,00	46.018.321,00	173.816.500,00	1.373.371.932,00
5	PUSKESMAS KP BARU PADUSUNAN	0,00	714.277.841,00	708.729.935,00	5.547.906,00	429.693.051,00	88.128.663,00	4.697.206,00	71.948.000,00	9.291.015,00	104.972.000,00	708.729.935,00
6	PUSKESMAS KURAITAJI	0,00	715.539.343,00	690.954.233,00	24.585.110,00	428.866.517,00	86.206.410,00	34.143.474,00	21.475.000,00	65.412.125,00	54.850.707,00	690.954.233,00
7	PUSKESMAS MARUNGGI	16.754.912,00	702.033.551,00	700.433.516,00	18.354.947,00	436.932.489,00	87.883.002,00	809.969,00	50.432.013,00	34.376.043,00	90.000.000,00	700.433.516,00
8	PUSKESMAS AIR SANTOK	10.974.044,38	575.262.587,00	574.081.544,00	12.155.087,38	343.897.538,00	74.732.200,00	4.728.995,00	17.000.000,00	12.460.019,00	121.262.792,00	574.081.544,00
9	PUSKESMAS SIKAPAK	0,00	637.779.207,00	636.899.817,00	879.390,00	388.736.301,00	68.125.194,00	0,00	34.000.000,00	28.000.000,00	118.038.322,00	636.899.817,00
J U M L A H		**1.206.594.799,38**	**13.417.999.744,00**	**14.116.920.091,00**	**507.674.452,38**	**6.529.611.737,00**	**4.051.083.962,00**	**932.208.131,00**	**763.002.597,00**	**564.187.178,00**	**1.276.826.486,00**	**14.116.920.091,00**

Lampiran 5

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BOS TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SMP	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SMP KOTA PARIAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.919.000,00	4.286.919.000,00	4.286.919.000,00	108.651.985,00	108.651.985,00
2	SD SE KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	4.036.000,00	2.638.457.103,00	2.638.457.103,00	2.634.421.103,00	12.774.656,00	12.774.656,00
3	SD SE KECAMATAN PARIAMAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.715.400,00	2.211.715.400,00	2.211.715.400,00	13.214.171,00	13.214.171,00
4	SD SE KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	1.835.534.800,00	1.835.534.800,00	1.829.444.800,00	14.367.204,00	14.367.204,00
5	SD SE KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	0,00	122.385,00	122.385,00	0,00	0,00	0,00	1.558.563.987,00	1.558.441.602,00	1.558.563.987,00	5.017.934,00	5.017.934,00
J U M L A H		**0,00**	**122.385,00**	**122.385,00**	**0,00**	**10.126.000,00**	**10.126.000,00**	**12.531.190.290,00**	**12.531.067.905,00**	**12.521.064.290,00**	**154.025.950,00**	**154.025.950,00**

Lampiran 5a

SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2024
SMP SE KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SMP	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SMPN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200.000,00	544.200.000,00	544.200.000,00	10.877.344,00	10.877.344,00
2	SMPN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.600.000,00	669.600.000,00	669.600.000,00	21.577.161,00	21.577.161,00
3	SMPN 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.200.000,00	763.200.000,00	763.200.000,00	36.554.778,00	36.554.778,00
4	SMPN 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.300.000,00	480.300.000,00	480.300.000,00	5.532.520,00	5.532.520,00
5	SMPN 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.600.000,00	325.600.000,00	325.600.000,00	7.157.751,00	7.157.751,00
6	SMPN 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.219.000,00	365.219.000,00	365.219.000,00	4.137.202,00	4.137.202,00
7	SMPN 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.200.000,00	533.200.000,00	533.200.000,00	11.947.513,00	11.947.513,00
8	SMPN 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.900.000,00	253.900.000,00	253.900.000,00	6.685.429,00	6.685.429,00
9	SMPN 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.700.000,00	351.700.000,00	351.700.000,00	4.182.287,00	4.182.287,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.286.919.000,00**	**4.286.919.000,00**	**4.286.919.000,00**	**108.651.985,00**	**108.651.985,00**

Lampiran 5b

SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2024
SD SE KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SD	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SDN 1 BALAI NARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500.000,00	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00
2	SDN 2 SIKAPAK BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500.000,00	137.500.000,00	137.500.000,00	966.735,00	966.735,00
3	SDN 3 NARAS HILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500.000,00	146.500.000,00	146.500.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
4	SDN 4 CUBADAK AIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.945.400,00	161.945.400,00	161.945.400,00	3.062.640,00	3.062.640,00
5	SDN 5 TUNGKAL UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600.000,00	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00
6	SDN 6 PD. BIRIK-BIRIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.900.000,00	138.900.000,00	138.900.000,00	750.000,00	750.000,00
7	SDN 7 SUNGAI RAMBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00
8	SDN 8 APAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00
9	SDN 9 SIKAPAK BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00	560.900,00	560.900,00
10	SDN 10 CUBADAK AIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00
11	SDN 11 CUBADAK AIR UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00	1.218.820,00	1.218.820,00
12	SDN 12 NARAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.900.000,00	126.900.000,00	126.900.000,00	779.200,00	779.200,00
13	SDN 13 TUNGKAL SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	417.000,00	417.000,00
14	SDN 14 CUBADAK AIR SLTN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	36.000,00	36.000,00
15	SDN 15 AMPALU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.700.000,00	191.700.000,00	191.700.000,00	1.269.278,00	1.269.278,00
16	SDN 16 SIKAPAK TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00
17	SDN 17 TUNGKAL UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00
18	SDN 18 SIKAPAK BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	1.298.198,00	1.298.198,00
19	SDN 19 CUBADAK AIR UTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
20	SDN 20 SINTUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00
21	SDN 21 SIKAPAK BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00
22	SDN 22 MANGGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.740.000,00	97.740.000,00	97.740.000,00	1.467.400,00	1.467.400,00
23	SDN 23 BALAI NARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.730.000,00	128.730.000,00	128.730.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.211.715.400,00**	**2.211.715.400,00**	**2.211.715.400,00**	**13.214.171,00**	**13.214.171,00**

Lampiran 5c

SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2024
SD SE KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SMP	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SDN 1 KP. JAWA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700.000,00	164.700.000,00	164.700.000,00	1.575.747,00	1.575.747,00
2	SDN 2 KARAN AUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.401.200,00	125.401.200,00	125.401.200,00	0,00	0,00
3	SDN 3 PAUH BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00
4	SDN 4 RAWANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100.000,00	132.100.000,00	132.100.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
5	SDN 5 KP. PONDOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	260.135,00	260.135,00
6	SDN 6 CIMPARUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	559.000,00	559.000,00
7	SDN 7 KP. JAWA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00
8	SDN 8 KP. JAWA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000.000,00	297.000.000,00	297.000.000,00	513.818,00	513.818,00
9	SDN 9 PAUH BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
10	SDN 10 JATI HILIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.460.903,00	131.460.903,00	131.460.903,00	0,00	0,00
11	SDN 11 PAUH BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900.000,00	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00
12	SDN 12 CIMPARUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00
13	SDN 13 LOHONG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00
14	SDN 14 PAUH TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
15	SDN 15 JL. KERETA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.055.000,00	118.055.000,00	118.055.000,00	1.203.300,00	1.203.300,00
16	SDN 16 CIMPARUH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304.000,00	46.304.000,00	46.304.000,00	128.200,00	128.200,00
17	SDN 17 KP. BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.300.000,00	292.300.000,00	292.300.000,00	5.830.120,00	5.830.120,00
18	SDN 18 KARAN AUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00	4.036.000,00	47.236.000,00	47.236.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
19	SDN 19 KP. BARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.300.000,00	330.300.000,00	330.300.000,00	1.121.336,00	1.121.336,00
21	SDN 21 JL. KERETA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700.000,00	171.700.000,00	171.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.036.000,00**	**4.036.000,00**	**2.638.457.103,00**	**2.638.457.103,00**	**2.634.421.103,00**	**12.774.656,00**	**12.774.656,00**

Lampiran 5d

SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2024
SD SE KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SD	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SDN 1 PAUH KURAITAJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.690.000,00	305.690.000,00	305.690.000,00	2.643.550,00	2.643.550,00
2	SDN 2 MARUNGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	120.000,00	120.000,00
3	SDN 3 TALUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100.000,00	164.100.000,00	164.100.000,00	1.543.466,00	1.543.466,00
4	SDN 4 BT. TAJONGKEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100.000,00	150.100.000,00	150.100.000,00	2.384.000,00	2.384.000,00
5	SDN 5 MARABAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	180.000,00	180.000,00
6	SDN 6 PG. LADING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700.000,00	110.700.000,00	110.700.000,00	225.000,00	225.000,00
7	SDN 7 TB PALABAH	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	132.090.000,00	132.090.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
8	SDN 8 MARUNGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.450.000,00	158.450.000,00	158.450.000,00	1.387.820,00	1.387.820,00
9	SDN 9 KP. APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	102.000,00	102.000,00
10	SDN 10 PALAK ANEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.320.000,00	138.320.000,00	138.320.000,00	1.144.283,00	1.144.283,00
11	SDN 11 MARUNGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.184.800,00	135.184.800,00	135.184.800,00	1.735.000,00	1.735.000,00
12	SDN 12 TALUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	35.000,00	35.000,00
20	SDN 13 BALAI KURAITAJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400.000,00	203.400.000,00	203.400.000,00	2.867.085,00	2.867.085,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.090.000,00**	**6.090.000,00**	**1.835.534.800,00**	**1.835.534.800,00**	**1.829.444.800,00**	**14.367.204,00**	**14.367.204,00**

Lampiran 5e

SALDO DANA BOS PER 31 DESEMBER 2024
SD SE KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SD	2023			2024			REKON PENERIMAAN	PENERIMAAN 2024	Total SPJ	PAJAK BOS	
		KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL	KAS TUNAI	KAS BANK	TOTAL				POTONG	SETOR
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	11	12	13	14	15
1	SDN 1 KOTO MARAPAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300.000,00	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00
2	SDN 2 TALAGO SARIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200.000,00	108.200.000,00	108.200.000,00	0,00	0,00
3	SDN 3 BUNGO TANJUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	89.100.000,00	495.495,00	495.495,00
4	SDN 4 KAJAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	40.000,00	40.000,00
5	SDN 5 AIR SANTOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	242.000,00	242.000,00
6	SDN 6 KP. BARU PADUSUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	0,00
7	SDN 7 BATANG KABUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500.000,00	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00
8	SDN 8 KP. GADANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300.000,00	117.300.000,00	117.300.000,00	156.000,00	156.000,00
9	SDN 9 BATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450.000,00	120.450.000,00	120.450.000,00	646.639,00	646.639,00
10	SDN 10 SUNGAI PASAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.024.000,00	57.024.000,00	57.024.000,00	40.000,00	40.000,00
11	SDN 11 KOTO MARAPAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700.000,00	137.700.000,00	137.700.000,00	495.495,00	495.495,00
12	SDN 12 CUBADAK MENTAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900.000,00	117.900.000,00	117.900.000,00	2.098.500,00	2.098.500,00
13	SDN 13 KP. KANDANG	0,00	121.885,00	121.885,00	0,00	0,00	0,00	55.921.885,00	55.800.000,00	55.921.885,00	40.000,00	40.000,00
14	SDN 14 SUNGAI PASAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.068.102,00	43.068.102,00	43.068.102,00	0,00	0,00
15	SDN 15 PAKASAI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	67.499.500,00	67.500.000,00	763.805,00	763.805,00
16	SDN 16 SUNGAI SIRAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**122.385,00**	**122.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.558.563.987,00**	**1.558.441.602,00**	**1.558.563.987,00**	**5.017.934,00**	**5.017.934,00**

Lampiran 5f

RINCIAN BOS SWASTA
SD DAN SMP SE KOTA PARIAMAN

(Dalam Rupiah)

No	No Tgl SK	NPSN Nama Sekolah	Nilai	Jmlh Siswa
1	2	3	4	6
1	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	10310580 SMPIT NURUL ILMI	34.650.000,00	63
10	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70003771 SMP-TQIT SAHABAT CENDIKIA	37.950.000,00	69
12	7664/C1/PR.04.01/2024 30-09-2024	70003771 SMP-TQIT SAHABAT CENDIKIA	36.391.000,00	69
26	5803/C1/PR.04.01/2024 15-08-2024	10310580 SMPIT NURUL ILMI	34.439.873,00	63
28	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	69948910 SMP IT AL FURQAN	9.350.000,00	17
45	4551/C/PR.04.01/2024 28-05-2024	69948910 SMP IT AL FURQAN	35.000.000,00	17
55	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70014657 SMPIT ATTIN SUMBAR	43.450.000,00	79
65	4551/C/PR.04.01/2024 28-05-2024	70014657 SMPIT ATTIN SUMBAR	35.000.000,00	79
93	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	70014657 SMPIT ATTIN SUMBAR	43.350.000,00	79
100	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	10310726 SMP IT MUTIARA	63.250.000,00	115
118	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	10310726 SMP IT MUTIARA	63.250.000,00	115
JUMLAH			**436.080.873,00**	

No	No Tgl SK	NPSN Nama Sekolah	Nilai	Jmlh Siswa
1	2	3	4	6
2	5803/C1/PR.04.01/2024 15-08-2024	70000384 SDIT KHALIFATUL FAJAR	18.044.000	44
16	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	70031343 SDIT DAI QURAN	34.200.000	76
21	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	69970598 SD IT UNGGULAN AISYIYAH P	57.600.000	128
41	5803/C1/PR.04.01/2024 15-08-2024	69922518 SD IT IBNU ABBAS	144.900.000	322
53	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	10307422 SD IT NURUL ILMI	52.200.000	116
66	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	69970521 SD IT ATTIN SUMBAR	164.700.000	366
75	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	10310579 SD IT MUTIARA	294.300.000	654
77	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70000384 SDIT KHALIFATUL FAJAR	19.800.000	44
78	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	69970598 SD IT UNGGULAN AISYIYAH P	57.600.000	128
87	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	70014424 SDIT CHADIDJAH	41.850.000	93
121	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70004361 SDIT DAARUL FALAAH	40.950.000	91
138	5803/C1/PR.04.01/2024 15-08-2024	70004361 SDIT DAARUL FALAAH	38.656.365	91
146	5803/C1/PR.04.01/2024 15-08-2024	69970521 SD IT ATTIN SUMBAR	164.700.000	366
156	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	69985578 SD IT ALAM DARUL FURQAN	47.700.000	106
161	4551/C/PR.04.01/2024 28-05-2024	70014424 SDIT CHADIDJAH	22.500.000	93
165	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	69985578 SD IT ALAM DARUL FURQAN	47.700.000	106
183	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70031343 SDIT DAI QURAN	34.200.000	76
185	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	10310579 SD IT MUTIARA	294.300.000	654
187	4551/C/PR.04.01/2024 28-05-2024	69970598 SD IT UNGGULAN AISYIYAH P	22.500.000	128
190	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	69922518 SD IT IBNU ABBAS	144.900.000	322
196	Manual.1879/C1/PR.04.01/2024 29-07-2024	10307422 SD IT NURUL ILMI	52.050.000	116
229	0032/C/PR.04.01/2024 03-01-2024	70014424 SDIT CHADIDJAH	41.850.000	93
JUMLAH			**1.837.200.365**	

Lampiran 6

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI DANA BOK PUSKESMAS TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN BOK	TOTAL SPJ BELANJA	SISA KAS	SPJ BELANJA				JUMLAH
						Pegawai	Persediaan	Brg & DJS	SPPD	
1	2	3	4	5	6=3+4-5					
1	PUSKESMAS NARAS	283.798.931,00	474.651.069,00	700.706.875,00	57.743.125,00	101.015.984,00	164.200.000,00	105.690.891,00	329.800.000,00	700.706.875,00
2	PUSKESMAS PARIAMAN	190.508.671,00	1.211.141.329,00	1.307.240.897,00	94.409.103,00	185.836.059,00	372.145.000,00	187.859.838,00	561.400.000,00	1.307.240.897,00
3	PUSKESMAS KP BARU PADUSUNAN	111.303.358,00	622.996.642,00	725.351.848,00	8.948.152,00	115.086.848,00	216.306.000,00	86.159.000,00	307.800.000,00	725.351.848,00
4	PUSKESMAS KURAITAJI	100.170.321,00	611.283.679,00	671.358.825,00	40.095.175,00	91.520.883,00	219.347.400,00	84.990.542,00	275.500.000,00	671.358.825,00
5	PUSKESMAS MARUNGGI	96.891.563,00	614.537.437,00	600.763.961,00	110.665.039,00	93.821.525,00	191.279.000,00	38.663.436,00	277.000.000,00	600.763.961,00
6	PUSKESMAS AIR SANTOK	135.457.411,00	561.254.589,00	620.715.704,00	75.996.296,00	96.564.843,00	158.707.000,00	83.043.861,00	282.400.000,00	620.715.704,00
7	PUSKESMAS SIKAPAK	74.217.015,00	622.512.985,00	616.209.221,00	80.520.779,00	77.180.492,00	167.895.000,00	80.033.729,00	291.100.000,00	616.209.221,00
J U M L A H		**992.347.270,00**	**4.718.377.730,00**	**5.242.347.331,00**	**468.377.669,00**	**761.026.634,00**	**1.489.879.400,00**	**666.441.297,00**	**2.325.000.000,00**	**5.242.347.331,00**

Lampiran 7

DAFTAR PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A	Piutang Pajak, Pendapatan dan Transfer	12.842.776.143,00	18.502.845.140,00	944.777.183,00	1.482.256.468,00	1.396.621.913,00	1.031.718.811,00	4.855.374.375,00
B	Piutang Retribusi	1.914.263.040,00	2.411.280.523,00	116.761.191,00	80.745.719,00	308.110.557,00	555.448.277,00	1.056.211.297,00
C	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	123.000.000,00	243.823.161,85	393.953,00	2.063.103,00	31.596.157,45	86.769.948,40	120.823.161,85
D	Piutang Lain-Lain	703.738.804,33	608.409.748,66	0,00	0,00	0,00	601.864.086,66	601.864.086,66
Jumlah Piutang All		**15.583.777.987,33**	**21.766.358.573,51**	**1.061.932.327,00**	**1.565.065.290,00**	**1.736.328.627,45**	**2.275.801.123,06**	**6.634.272.920,51**

Lampiran 7a

DAFTAR PIUTANG PAJAK, PENDAPATAN, DAN TRANSFER KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
A	**Piutang Pendapatan dan Transfer**								
a	**Piutang Pajak**								
1	Piutang Pajak Restoran	BPKPD	15.030.200,00	15.030.200,00	0,00	0,00	0,00	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Piutang Pajak Parkir	BPKPD	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00
3	Piutang PBB P2	BPKPD	4.123.394.451,00	4.840.177.475,00	944.777.183,00	1.482.256.468,00	1.396.621.913,00	1.016.521.911,00	4.840.177.475,00
Sub Jumlah Piutang Pajak			**4.138.591.351,00**	**4.855.374.375,00**	**944.777.183,00**	**1.482.256.468,00**	**1.396.621.913,00**	**1.031.718.811,00**	**4.855.374.375,00**
b	**Piutang Transfer Bagi Hasil**	BPKPD-SKPKD							
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat	BPKPD	0,00	1.758.923.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer			**0,00**	**1.758.923.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi**	BPKPD-SKPKD							
1	Piutang PKB		2.414.564.563,00	2.421.608.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang BBNKB		1.020.795.144,00	874.295.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang PBBKB		5.252.976.951,00	8.539.408.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PAP		15.848.134,00	53.233.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Rokok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer			**8.704.184.792,00**	**11.888.547.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Piutang Pendapatan			**12.842.776.143,00**	**18.502.845.140,00**	**944.777.183,00**	**1.482.256.468,00**	**1.396.621.913,00**	**1.031.718.811,00**	**4.855.374.375,00**

Lampiran 7b

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
B	**Piutang Retribusi**								
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Diskominfo							
	Menara Telekomunikasi thn 2015	Dishub	558.943,00	558.943,00	0,00	0,00	0,00	558.943,00	558.943,00
	PT. TOWER BERSAMA eks IBS	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi ex PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia eks PT INDOSAT, Tbk	Diskominfo	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	5.312.000,00	10.624.000,00
	PT XL AXIATA	Diskominfo	21.248.000,00	21.248.000,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00	10.624.000,00	21.248.000,00
	PT Telkomsel	Diskominfo	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00		0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
	PT. Solusi Tunas Pratama	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00		2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
	PT. PERMATA KARYA PERDANA	Diskominfo	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00			2.656.000,00	2.656.000,00
	PT Protelindo	Diskominfo	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	5.312.000,00	18.592.000,00	0,00	23.904.000,00
	PT. Smart Telecom	Diskominfo	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00			5.312.000,00	5.312.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**88.206.943,00**	**88.206.943,00**	**0,00**	**13.280.000,00**	**29.216.000,00**	**45.710.943,00**	**88.206.943,00**
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								
	1) Piutang Sewa Toko Pasar Pariaman	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Sutan syah johan		0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syahlina		8.400.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H.syokri sama. Bba		28.560.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amrina thaib / martias		23.520.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurbaiti		13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drs. H. Rasidin zain said		28.560.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasymar detty		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Fatimah		8.400.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B								
	Zahirman/Yunimar UT		3.896.400,00	3.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zul ala apuak		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jhon		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zalman zaunit		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	H. Nursam		46.882.000,00	53.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful ilmi		32.844.000,00	39.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yuherman		25.806.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Khaidir		53.882.000,00	60.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nasrul		38.119.400,00	43.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Tanjung		48.119.400,00	53.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK C								
	Ali Amri/ Uyun			1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sywalluddin		1.686.248,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasmawati/elok		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yosef afrizal		9.274.373,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sudirman		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Awalluddin/awl tanjung		14.333.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natin 30%		2.023.398,00	2.023.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emi junik 30%		5.049.837,00	5.808.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syamsir alam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Feri asrinaldi/feri		14.333.123,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ernida sosi/rida		16.833.123,00	19.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janubarti jasman		1.686.248,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maizul husni		9.274.373,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ben surya/ben		16.833.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yulius		11.803.748,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muslim		9.274.373,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Susi		14.333.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julinasri/anas tanjung		9.274.373,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lis DT/Nurlis		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darmawan/murni		16.833.123,00	19.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musidah/ Hendri Saputra		6.744.998,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neldawati		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ridwan zaimarni		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**651.119.895,00**	**744.864.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2) Piutang Sewa Toko Pasar Kurai Taji	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Edmar alam		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edmar alam		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Martias		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Martias		2.250.000,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indra Wadi		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mashuri		3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azwir		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mursal		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		6.250.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syafriadi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	El amel muzna		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Animar		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eli Marnia Herina		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rusli		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurdani		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yunasdi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		6.250.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B								
	Maison		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afrizon		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hilma kahar / lidarni		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imrawati		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maili susi yeti		2.250.000,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gusri yeni		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma linda		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arizal/hendrik saputra		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ermawati		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dirmayati		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M. Nasir		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asma		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fahmi		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efiardi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK C								
	Sawirna		6.750.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzma		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mawardi		6.750.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Eka Putriana		4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Anasri		675.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erni Opet		675.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurleli		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Farida Syam		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syukri/Surya Netti		600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wahyunis		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agusnimar		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fitri Nengsih		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Three Nilta		600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tarmuni		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK D								
	Maya defita / edi muncok		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muhammad fauzan		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Zelvi		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mimi elfita		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faizah		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asmaul husna		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aslim		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rasmi harun		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mimi elfita		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asnita Yulina		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sulastri irfan		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dalimi		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zainab		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK E								
	Murshall Jalaludin		500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maryulis		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hartina		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurlisman		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janewar		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edi efendi		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HJ. Ramalah		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurtini		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bainar		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yolla puti pariagam		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maliyus		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Mahendra Gustiawan		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dahniar		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uyung candra		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sumarni		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasril (Alm. H.Maniar)		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roslaini		2.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK F								
	Ridwan		625.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Nurmani		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurkasmi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mainida		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurmimah		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zairis bakaruddin		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asniati / rasni		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lasminah		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rizki mardila		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurcaya		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Burdin		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arifin / fatika nadia maharani		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosmanidar		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosna / joneidi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**464.825.000,00**	**605.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Diskoperindag	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**
	4) Piutang Sewa Pujasera	Disbudpar							
	IYEL / BUK MAI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EPI / MANSURIATI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	INIK / ASLINI		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	ATENG / ERNITA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	IFZAN LAIB / IRMASTATI		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	BUK ROS / ROSNANI		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	ROZA / ALFITRIA NUZLA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RINA		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	INANG / JASNIMAR		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	SI LAS / AMEL RAMADHANI		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	LISA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	UPIK / YUHARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	INA KALIANG		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	LENI MARLINA		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	NIZHAMUL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO II)		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	UPIT MAWATI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EMI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	EL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	EFA ERAWATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	BESRIATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	ELI MUZARNI (IFKHAR F)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ROZA ERIYA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ELFINA (AYANG)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ERLINDA WATI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	DAVID		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	AREA MEGA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SANDRA HELMIYATI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ELI SUARNI (ELI INDUAK)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA ASTUTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	RINI ASTUTI/ / EKA PURNAMA SARI		200.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.700.000,00
	NOFRIAL SONI SALMI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA SILVIA MARSA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	YUSWARNITA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ROSNANI (4 DARA)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	IRMA SANTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	AURA INGRID		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	YULIHARTINI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	WULAN YUNI P		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ANTO (YUSMELI)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MERI ASTUTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SYAFNI ANANDA PUTRI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SOLFIHARDI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	SYAFNI EFENDI (EKA SUARNI)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MARNELIS (BUK LIS)		1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	CITRA DEWI (TEMOK)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	NURMAINI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SRI WAHYUNI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	LIFE ISWAR		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	NURSEHA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SUWARNI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DESI ERMAYENI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	NURLELA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DARNISTATI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	NETRAWATI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	UPIK (UPIT MAWATI)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ANNISA PERMATA AYUNDA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	MAWARNI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ELIWATI (LANGKITANG)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	RAHMI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	MARNI PILIANG		3.250.000,00	4.250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	2.500.000,00	4.250.000,00
	HELMI SAFITRI		750.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	AFRIZAL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**27.600.000,00**	**112.100.000,00**	**85.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**23.100.000,00**	**112.100.000,00**
	5) Piutang Pelayanan Pasar (WC Umum)	Diskoperindag	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	**1.125.000,00**
	6) Piutang Pelayanan Pasar (WC Los Ikan)		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	**1.050.000,00**
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	Perkim & LH							
	Kelurahan Pasir		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Kelurahan Kp. Perak		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Kelurahan Jati Hilir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Lohong		0,00	4.510.000,00	885.000,00	1.910.000,00	1.715.000,00	0,00	4.510.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi II		1.280.000,00	4.545.000,00	700.000,00	1.845.000,00	720.000,00	1.280.000,00	4.545.000,00
	Kelurahan Taratak		0,00	4.705.000,00	950.000,00	1.925.000,00	1.830.000,00	0,00	4.705.000,00
	Kelurahan Jawi-jawi I		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Alai Gelombang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Pondok II		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Kp. Pondok		0,00	3.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	3.700.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	Kelurahan Kp. Jawa I		400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Jalan Baru		6.550.000,00	6.550.000,00		0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	Kelurahan Kereta Api		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rawang		150.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00
	Pasar Jurai Taji		2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00
	Desa Kp. Baru		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Desa Cimparuh		3.600.000,00	6.840.000,00	870.000,00	1.580.000,00	790.000,00	3.600.000,00	6.840.000,00
	Desa Taluak Binasi		2.300.000,00	3.350.000,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	2.300.000,00	3.350.000,00
	Desa Bungo Tanjung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD Pariaman		2.100.000,00	5.700.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	5.700.000,00
	Dinas Sosial Kab. PP		0,00	1.650.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00	0,00	1.650.000,00
	RS. Aisyah Taratak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Toboh Palabah		0,00	1.554.000,00	654.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.554.000,00
	Perumahan Toboh		0,00	3.000.000,00	300.000,00	600.000,00	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
	RS. Sadikin		2.100.000,00	1.950.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	350.000,00	1.950.000,00
	Perumahan Talago Sariak		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Desa Pauah Timur (Koto Kaciak)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS. TMC Pariaman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kel. Ujung batung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perumahan Laneva		0,00	1.800.000,00	150.000,00	550.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00
	Perumahan Nan Tongga		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perumahan Residence		0,00	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	1.650.000,00
	Perumahan Griya Taluak		1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Perumahan Rawang		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Desa Jati Mudik		1.320.000,00	435.000,00		0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
	Desa Bato		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perum. Simpang Kasai		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perumahan Koto Marapak		0,00	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Perumahan Kp. Kandang		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Perumahan Manohara Asri		0,00	2.000.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00
	Perumahan Bato		0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
	Kel. Karan Aur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rambai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MTSN 1 PARIAMAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	SD 02 KARAN AUR		300.000,00	750.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00
	Desa Pasia Sunua			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMPN 4 PARIAMAN		150.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	750.000,00

Lampiran 7b

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
	SMAN 1 PARIAMAN		0,00	1.350.000,00	150.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	1.350.000,00
	SMPN 2 PARIAMAN		0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	SD IT TALAGO SARIK		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	UNISBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT SKM		0,00	240.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
	PARIAMAN BARAYO KAKI LIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SD 11 KOTO MARAPAK		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	SD 09 BATO		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	MANGGUNG - NARAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAFARI IN		0,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
	IAI SUMBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINKES PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESA PAUH BARAT		0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	SUPM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MTSN 3 PARIAMAN		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	SMPN 7 PARIAMAN		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	PUSKESMAS NARAS		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	BUMBU		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	SMAN 4 PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPBU KURAITAJI		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**27.125.000,00**	**73.954.000,00**	**9.189.000,00**	**15.950.000,00**	**24.625.000,00**	**24.190.000,00**	**73.954.000,00**
4	Piutang Retribusi Parkir	Dishub							
	1) Endrizal		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2) Ferdi Ferdian		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	3) Mulyadi		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4) Nurmasrizal		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
5	Piutang Retribusi IMB	KP2TPM	10.983.848,00	10.983.848,00	0,00	0,00	0,00	10.983.848,00	10.983.848,00
	Piutang Persetujuan Bangunan Gedung	PUPRP	0,00	4.854.447,00	4.854.447,00	0,00	0,00	0,00	4.854.447,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**10.983.848,00**	**15.838.295,00**	**4.854.447,00**	**0,00**	**0,00**	**10.983.848,00**	**10.983.848,00**
6	Piutang Retribusi Air Bersih	Perkim & LH	631.531.354,00	758.095.506,00	17.217.744,00	49.015.719,00	253.269.557,00	438.592.486,00	758.095.506,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**631.531.354,00**	**758.095.506,00**	**17.217.744,00**	**49.015.719,00**	**253.269.557,00**	**438.592.486,00**	**758.095.506,00**
Jumlah Piutang Retribusi			**1.914.263.040,00**	**2.411.280.523,00**	**116.761.191,00**	**80.745.719,00**	**308.110.557,00**	**555.448.277,00**	**1.056.211.297,00**

Lampiran 7c

DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet 3-4 Tahun	Jumlah
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
D	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**								
1	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	0,00	120.823.161,85	393.953,00	2.063.103,00	31.596.157,45	86.769.948,40	120.823.161,85
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR	BPKPD	123.000.000,00	123.000.000,00				0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**123.000.000,00**	**243.823.161,85**	**393.953,00**	**2.063.103,00**	**31.596.157,45**	**86.769.948,40**	**120.823.161,85**
C	**Piutang Lain-Lain**								
1	Piutang Bunga Dana Bergulir KSP/USP		24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR		118.564.000,00	117.367.333,33	0,00	0,00	0,00	117.367.333,33	117.367.333,33
3	Piutang Lain-lain TGR		412.549,17	412.549,17	0,00	0,00	0,00	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR		6.095.662,00	6.545.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	RSUD	320.434.635,00	320.434.635,00	0,00	0,00	0,00	320.434.635,00	320.434.635,00
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	RSUD	139.049.569,16	139.049.569,16	0,00	0,00	0,00	139.049.569,16	139.049.569,16
7	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	94.582.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain			**703.738.804,33**	**608.409.748,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,66**	**601.864.086,66**

Lampiran 8

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2 3	3	4	5	6	7	8	9
A	Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer	12.842.776.143,00	18.502.845.140,00	944.777.183,00	1.482.256.468,00	1.396.621.913,00	1.031.718.811,00	4.855.374.375,00
	Rate			0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Pajak			**4.723.885,92**	**148.225.646,80**	**698.310.956,50**	**1.031.718.811,00**	**1.882.979.300,21**
B	Piutang Retribusi	1.914.263.040,00	2.411.280.523,00	116.761.191,00	80.745.719,00	308.110.557,00	555.448.277,00	1.061.065.744,00
	Rate			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi			**583.805,96**	**8.074.571,90**	**154.055.278,50**	**555.448.277,00**	**718.161.933,36**
C	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	123.000.000,00	243.823.161,85	393.953,00	2.063.103,00	31.596.157,45	86.769.948,40	120.823.161,85
	Rate			**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**1.969,77**	**206.310,30**	**15.798.078,73**	**86.769.948,40**	**102.776.307,19**
D	Piutang Lain-Lain	703.738.804,33	608.409.748,66	-	-	-	601.864.086,65	601.864.086,65
	Rate			0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain			**-**	**-**	**-**	**601.864.086,65**	**601.864.086,65**
	Jumlah Piutang All	15.460.777.987,33	21.522.535.411,66	1.061.538.374,00	1.563.002.187,00	1.704.732.470,00	2.189.031.174,65	6.518.304.205,65
	Jumlah Penyisihan Piutang All			**5.307.691,87**	**156.300.218,70**	**852.366.235,00**	**2.189.031.174,65**	**3.305.781.627,41**

Lampiran 8a

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAN TRANSFER KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Piutang Pendapatan dan Transfer								
A	**Piutang Pajak**								
1	Piutang Pajak Restoran	BPKPD	15.030.200,00	15.030.200,00	0,00	0,00	0,00	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Piutang Pajak Parkir	BPKPD	166.700,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00
Jumlah			**15.196.900,00**	**15.196.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.196.900,00**	**15.196.900,00**
Rate					0,5%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan Piutang					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.196.900,00**	**15.196.900,00**
3	Piutang PBB P2	BPKPD	4.123.394.451,00	4.840.177.475,00	944.777.183,00	1.482.256.468,00	1.396.621.913,00	1.016.521.911,00	4.840.177.475,00
Jumlah			**4.123.394.451,00**	**4.840.177.475,00**	**944.777.183,00**	**1.482.256.468,00**	**1.396.621.913,00**	**1.016.521.911,00**	**4.840.177.475,00**
Rate					0,5%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan Piutang					**4.723.885,92**	**148.225.646,80**	**698.310.956,50**	**1.016.521.911,00**	**1.867.782.400,21**
Sub Jumlah Piutang Pajak Daerah			**4.138.591.351,00**	**4.855.374.375,00**	**944.777.183,00**	**1.482.256.468,00**	**1.396.621.913,00**	**1.031.718.811,00**	**4.855.374.375,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer			**4.138.758.051,00**	**4.855.541.075,00**	**4.723.885,92**	**148.225.646,80**	**698.310.956,50**	**1.031.718.811,00**	**1.882.979.300,21**
B	**Piutang Transfer Bagi Hasil**	BKD							
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pemerintah Pusat		0,00	1.758.923.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi			**0,00**	**1.758.923.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
B	**Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi**	BKD							
1	Piutang PKB		2.414.564.563,00	2.421.608.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang BBNKB		1.020.795.144,00	874.295.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang PBBKB		5.252.976.951,00	8.539.408.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PAP		15.848.134,00	53.233.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Rokok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi			**8.704.184.792,00**	**11.888.547.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Piutang Pajak, Pendapatan, dan Transfer			**12.827.579.243,00**	**18.487.648.240,00**	**944.777.183,00**	**1.482.256.468,00**	**1.396.621.913,00**	**1.016.521.911,00**	**4.855.374.375,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak, Pendapatan dan Transfer					**4.723.885,92**	**148.225.646,80**	**698.310.956,50**	**1.016.521.911,00**	**1.882.979.300,21**

Lampiran 8b

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	**Piutang Retribusi**								-
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPMPTSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Menara Telekomunikasi thn 2015	Dishub	558.943,00	558.943,00	0,00	0,00	0,00	558.943,00	558.943,00
	PT. TOWER BERSAMA eks IBS	Dinas PMPTSPNaker	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Dinas PMPTSPNaker	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi ex PT INDOSAT, Tbk	Dinas PMPTSPNaker	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia eks PT INDOSAT, Tbk	Dinas PMPTSPNaker	10.624.000,00	10.624.000,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	5.312.000,00	10.624.000,00
	PT XL AXIATA	Dinas PMPTSPNaker	21.248.000,00	21.248.000,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00	10.624.000,00	21.248.000,00
	PT Telkomsel	Dinas PMPTSPNaker	7.968.000,00	7.968.000,00	0,00	0,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00
	PT. Solusi Tunas Pratama	Dinas PMPTSPNaker	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
	PT. PERMATA KARYA PERDANA	Dinas PMPTSPNaker	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00
	PT Protelindo	Dinas PMPTSPNaker	23.904.000,00	23.904.000,00	0,00	5.312.000,00	18.592.000,00	0,00	23.904.000,00
	PT. Smart Telecom	Dinas PMPTSPNaker	5.312.000,00	5.312.000,00	0,00	0,00	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**88.206.943,00**	**88.206.943,00**	**0,00**	**13.280.000,00**	**29.216.000,00**	**45.710.943,00**	**88.206.943,00**
	Rate				0,5%	10%	50%	100%	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**-**	**1.328.000,00**	**14.608.000,00**	**45.710.943,00**	**61.646.943,00**
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								-
	1) Piutang Sewa Toko Pasar Pariaman	Diskoperindag							-
	BLOK A								
	Sutan syah johan		0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syahlina		8.400.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H.syokri sama. Bba		28.560.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amrina thaib / martias		23.520.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurbaiti		13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drs. H. Rasidin zain said		28.560.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roswita		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasymar detty		18.480.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Fatimah		8.400.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahirman/Yunimar UT		3.896.400,00	3.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zul ala apuak		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jhon		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zalman zaunit		11.730.000,00	18.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Nursam		46.882.000,00	53.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful ilmi		32.844.000,00	39.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yuherman		25.806.000,00	32.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Khaidir		53.882.000,00	60.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nasrul		38.119.400,00	43.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Tanjung		48.119.400,00	53.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BLOK C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ali Amri/ Uyun		0,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sywalluddin		1.686.248,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasmawati/elok		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yosef afrizal		9.274.373,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sudirman		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syaiful		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Awalluddin/awl tanjung		14.333.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natin 30%		2.023.398,00	2.023.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emi junik 30%		5.049.837,00	5.808.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syamsir alam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Feri asrinaldi/feri		14.333.123,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ernida sosi/rida		16.833.123,00	19.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janubarti jasman		1.686.248,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maizul husni		9.274.373,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ben surya/ben		16.833.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yulius		11.803.748,00	14.333.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muslim		9.274.373,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Susi		14.333.123,00	16.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julinasri/anas tanjung		9.274.373,00	11.803.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lis DT/Nurlis		6.744.998,00	9.274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darmawan/murni		16.833.123,00	19.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Musidah/ Hendri Saputra		6.744.998,00	1.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neldawati		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ridwan zaimarni		6.744.998,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		**651.119.895,00**	**744.864.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2) Piutang Sewa Toko Pasar Kurai Taji	Diskoperindag							
	BLOK A								
	Edmar alam		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edmar alam		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Martias		562.500,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Martias		2.250.000,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indra Wadi		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mashuri		3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Azwir		3.937.500,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mursal		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		6.250.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syafriadi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	El amel muzna		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Animar		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eli Marnia Herina		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rusli		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurdani		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yunasdi		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Naadiya		6.250.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK B								
	Maison		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naadiya		0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afrizon		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hilma kahar / lidarni		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imrawati		7.312.500,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maili susi yeti		2.250.000,00	3.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gusri yeni		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Firma linda		5.625.000,00	7.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arizal/hendrik saputra		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ermawati		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dirmayati		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anhar		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M. Nasir		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asma		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fahmi		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efiardi		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK C								
	Sawirna		6.750.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzma		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mawardi		6.750.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Eka Putriana		4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anasri		675.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erni Opet		675.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurleli		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Farida Syam		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Syukri/Surya Netti		600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wahyunis		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agusnimar		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fitri Nengsih		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Three Nilta		600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tarmuni		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK D								
	Maya defita / edi muncok		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muhammad fauzan		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eva Zelvi		2.400.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mimi elfita		11.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faizah		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asmaul husna		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aslim		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rasmi harun		6.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mimi elfita		9.600.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asnita Yulina		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sulastri irfan		7.800.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dalimi		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zainab		4.200.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK E								
	Murshall Jalaludin		500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maryulis		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hartina		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurlisman		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Janewar		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edi efendi		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HJ. Ramalah		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurtini		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bainar		8.125.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yolla puti pariagam		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maliyus		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahendra Gustiawan		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dahniar		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uyung candra		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sumarni		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jasril (Alm. H.Maniar)		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Roslaini		2.500.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLOK F								
	Ridwan		625.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yusni Z, S.Pd		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H. Nurmani		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurkasmi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mainida		5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurmimah		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zairis bakaruddin		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asniati / rasni		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lasminah		10.000.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rizki mardila		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nurcaya		2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Burdin		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arifin / fatika nadia maharani		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asri bakaruddin		8.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosmanidar		3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hj. Rosna / joneidi		6.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**464.825.000,00**	**605.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Diskoperindag	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2) Piutang Sewa Pujasera	Disbudpar							
	IYEL / BUK MAI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EPI / MANSURIATI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	INIK / ASLINI		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	ATENG / ERNITA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	IFZAN LAIB / IRMASTATI		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
	BUK ROS / ROSNANI		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	ROZA / ALFITRIA NUZLA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	RINA		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	INANG / JASNIMAR		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	SI LAS / AMEL RAMADHANI		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	LISA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	UPIK / YUHARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	INA KALIANG		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MARNI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	LENI MARLINA		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	NIZHAMUL		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO II)		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	UPIT MAWATI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	EMI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	EL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	EFA ERAWATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	BESRIATI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	ELI MUZARNI (IFKHAR F)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ROZA ERIYA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ELFINA (AYANG)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ERLINDA WATI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	DAVID		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	AREA MEGA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SUHARMI (EMI MUARO)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SANDRA HELMIYATI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ELI SUARNI (ELI INDUAK)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA ASTUTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	RINI ASTUTI/ / EKA PURNAMA SARI		200.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.700.000,00
	NOFRIAL SONI SALMI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MEGA SILVIA MARSA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	YUSWARNITA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ROSNANI (4 DARA)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	IRMA SANTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	AURA INGRID		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	YULIHARTINI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	WULAN YUNI P		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	ANTO (YUSMELI)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MERI ASTUTI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SYAFNI ANANDA PUTRI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SOLFIHARDI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SYAFNI EFENDI (EKA SUARNI)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	MARNELIS (BUK LIS)		1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	CITRA DEWI (TEMOK)		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	NURMAINI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	SRI WAHYUNI		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	LIFE ISWAR		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	NURSEHA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	SUWARNI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DESI ERMAYENI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	NURLELA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DARNISTATI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	NETRAWATI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	UPIK (UPIT MAWATI)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ANNISA PERMATA AYUNDA		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	MAWARNI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ELIWATI (LANGKITANG)		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	RAHMI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	MARNI PILIANG		3.250.000,00	4.250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	2.500.000,00	4.250.000,00
	HELMI SAFITRI		750.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	AFRIZAL		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Sub Jumlah Piutang Sewa Puja Sera		27.600.000,00	112.100.000,00	**85.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.000.000,00**	**23.100.000,00**	**112.100.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**427.500,00**	**250.000,00**	**500.000,00**	**23.100.000,00**	**24.277.500,00**
	5) Piutang Pelayanan Pasar (WC Umum)	Diskoperindag	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	6) Piutang Pelayanan Pasar (WC Los Ikan)		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		2.175.000,00	2.175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
	Rate				**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	Perkim & LH							
	Kelurahan Pasir		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Kelurahan Kp. Perak		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Kelurahan Jati Hilir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Lohong		0,00	4.510.000,00	885.000,00	1.910.000,00	1.715.000,00	0,00	4.510.000,00
	Kelurahan Jawi-Jawi II		1.280.000,00	4.545.000,00	700.000,00	1.845.000,00	720.000,00	1.280.000,00	4.545.000,00
	Kelurahan Taratak		0,00	4.705.000,00	950.000,00	1.925.000,00	1.830.000,00	0,00	4.705.000,00
	Kelurahan Jawi-jawi I		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Alai Gelombang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kelurahan Pondok II		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Kp. Pondok		0,00	3.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	Kelurahan Kp. Jawa I		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Kelurahan Jalan Baru		6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	Kelurahan Kereta Api		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rawang		150.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00
	Pasar Jurai Taji		2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Desa Kp. Baru		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Desa Cimparuh		3.600.000,00	6.840.000,00	870.000,00	1.580.000,00	790.000,00	3.600.000,00	6.840.000,00
	Desa Taluak Binasi		2.300.000,00	3.350.000,00	150.000,00	600.000,00	300.000,00	2.300.000,00	3.350.000,00
	Desa Bungo Tanjung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSUD Pariaman		2.100.000,00	5.700.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	5.700.000,00
	Dinas Sosial Kab. PP		0,00	1.650.000,00	150.000,00	450.000,00	1.050.000,00	0,00	1.650.000,00
	RS. Aisyah Taratak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Toboh Palabah		0,00	1.554.000,00	654.000,00	0,00	900.000,00	0,00	1.554.000,00
	Perumahan Toboh		0,00	3.000.000,00	300.000,00	600.000,00	2.100.000,00	0,00	3.000.000,00
	RS. Sadikin		2.100.000,00	1.950.000,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	350.000,00	1.950.000,00
	Perumahan Talago Sariak		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Desa Pauah Timur (Koto Kaciak)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS. TMC Pariaman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kel. Ujung batung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perumahan Laneva		0,00	1.800.000,00	150.000,00	550.000,00	1.100.000,00	0,00	1.800.000,00
	Perumahan Nan Tongga		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perumahan Residence		0,00	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	1.650.000,00
	Perumahan Griya Taluak		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Perumahan Rawang		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Desa Jati Mudik		1.320.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
	Desa Bato		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perum. Simpang Kasai		0,00	1.100.000,00	100.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00
	Perumahan Koto Marapak		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Perumahan Kp. Kandang		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Perumahan Manohara Asri		0,00	2.000.000,00	200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00
	Perumahan Bato		0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
	Kel. Karan Aur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desa Rambai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MTSN 1 PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SD 02 KARAN AUR		300.000,00	750.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00
	Desa Pasia Sunua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SMPN 4 PARIAMAN		150.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	750.000,00
	SMAN 1 PARIAMAN		0,00	1.350.000,00	150.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	1.350.000,00
	SMPN 2 PARIAMAN		0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00
	SD IT TALAGO SARIK		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
	UNISBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PT SKM		0,00	240.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
	PARIAMAN BARAYO KAKI LIMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SD 11 KOTO MARAPAK		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	SD 09 BATO		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	MANGGUNG - NARAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAFARI IN		0,00	450.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
	IAI SUMBAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DINKES PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESA PAUH BARAT		0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	SUPM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 8b

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MTSN 3 PARIAMAN		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	SMPN 7 PARIAMAN		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	PUSKESMAS NARAS		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	BUMBU		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	SMAN 4 PARIAMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPBU KURAITAJI		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**27.125.000,00**	**73.954.000,00**	**9.189.000,00**	**15.950.000,00**	**24.625.000,00**	**24.190.000,00**	**73.954.000,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**45.945,00**	**1.595.000,00**	**12.312.500,00**	**24.190.000,00**	**38.143.445,00**
4	Piutang Retribusi Parkir	Dishubkominfo							
	1) Endrizal		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2) Ferdi Ferdian		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	3) Mulyadi		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4) Nurmasrizal		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**9.650.000,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650.000,00**	**9.650.000,00**
5	Piutang Retribusi IMB	KP2TPM	10.983.848,00	10.983.848,00	0,00	0,00	0,00	10.983.848,00	10.983.848,00
	Piutang Persetujuan Bangunan Gedung	PUPRP	0,00	4.854.447,00	4.854.447,00	0,00	0,00	0,00	4.854.447,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**10.983.848,00**	**10.983.848,00**	**4.854.447,00**	**0,00**	**0,00**	**10.983.848,00**	**10.983.848,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**24.272,24**	**0,00**	**0,00**	**10.983.848,00**	**11.008.120,24**
6	Piutang Air Bersih	Perkim & LH	631.531.354,00	758.095.506,00	17.217.744,00	49.015.719,00	253.269.557,00	438.592.486,00	758.095.506,00
Sub Jumlah Piutang Retribusi			**631.531.354,00**	**758.095.506,00**	**17.217.744,00**	**49.015.719,00**	**253.269.557,00**	**438.592.486,00**	**758.095.506,00**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**86.088,72**	**4.901.571,90**	**126.634.778,50**	**438.592.486,00**	**570.214.925,12**
Jumlah Piutang Retribusi			**1.914.263.040,00**	**2.406.426.076,00**	**116.761.191,00**	**80.745.719,00**	**308.110.557,00**	**555.448.277,00**	**1.056.211.297,00**
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi					**583.805,96**	**8.074.571,90**	**154.055.278,50**	**555.448.277,00**	**718.161.933,36**

Lampiran 8c

DAFTAR UMUR PIUTANG & PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Des 2023	Jumlah Piutang Per 31 Des 2024	Kategori Piutang				
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**								
1	Piutang Denda Air Bersih	Perkim&LH	0,00	120.823.161,85	393.953,00	2.063.103,00	31.596.157,45	86.769.948,40	120.823.161,85
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR	BPKPD	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			**123.000.000,00**	**243.823.161,85**	**393.953,00**	**2.063.103,00**	**31.596.157,45**	**86.769.948,40**	**120.823.161,85**
					0,5%	**10%**	**50%**	**100%**	
Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					**1.969,77**	**206.310,30**	**15.798.078,73**	**86.769.948,40**	**102.776.307,19**
C	**Piutang Lain-Lain**								
1	Piutang Bunga Dana Bergulir KSP/USP	BPKPD (SKPKD)	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang Bunga Dana Bergulir BPR		118.564.000,00	117.367.333,33	0,00	0,00	0,00	117.367.333,32	117.367.333,31
3	Piutang Lain-lain TGR		412.549,17	412.549,17	0,00	0,00	0,00	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR		6.095.662,00	6.545.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan		320.434.635,00	320.434.635,00	0,00	0,00	0,00	320.434.635,00	320.434.635,00
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	RSUD	139.049.569,16	139.049.569,16	0,00	0,00	0,00	139.049.569,16	139.049.569,16
7	Piutang Denda Air Bersih		94.582.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah Piutang Lain-Lain			**703.738.804,33**	**608.409.748,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,65**	**601.864.086,64**
Rate					**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Sub Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.864.086,65**	**601.864.086,65**

Lampiran 9

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	Bahan pakaian	Obat-Obatan/ BMHP	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Peralatan Lain-Lain	TOTAL
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA																-
2	DINAS KESEHATAN									5.566.000,00							5.566.000,00
3	PUSKESMAS NARAS	291.000,00		50.000,00		39.500,00				118.352.996,30							118.733.496,30
4	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN									89.620.851,67							89.620.851,67
5	PUSKESMAS PARIAMAN	265.000,00								148.398.849,83							148.663.849,83
6	PUSKESMAS KURAI TAJI									137.551.141,46							137.551.141,46
7	PUSKESMAS MARUNGGI									79.074.271,47							79.074.271,47
8	PUSKESMAS AIR SANTOK	823.000,00		105.000,00		204.000,00				106.699.904,13							107.831.904,13
9	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT									100.850.879,71							100.850.879,71
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD SADIKIN) KOTA PARIAMAN	6.641.875,00		15.498.750,00	3.000.000,00	2.806.000,00				531.475.744,53	4.954.767,00					3.900.000,00	568.277.136,53
11	UPT. INSTALASI FARMASI									2.370.331.092,00							2.370.331.092,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1.048.000,00	162.000,00	357.500,00		434.200,00											2.001.700,00
13	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	412.240,00		415.356.400,00		120.000,00											415.888.640,00
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	165.000,00	88.500.000,00														88.665.000,00
15	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	773.000,00					242.580.297,00					71.568.000,00					314.921.297,00
16	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	939.500,00												580.000,00		25.405.900,00	26.925.400,00
17	KANTOR KESBANG POL	40.000,00				150.000,00											190.000,00
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																-
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	111.000,00															111.000,00
20	DINAS SOSIAL																-
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.593.000,00															1.593.000,00
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		3.151.800,00													269.480.900,00	272.632.700,00
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	844.000,00															844.000,00
24	DINAS PERHUBUNGAN	1.062.000,00	407.500,00			991.000,00											2.460.500,00
25	UPT. PARKIR	436.000,00															436.000,00
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	738.500,00				62.500,00											801.000,00
27	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	204.500,00							800.000,00								1.004.500,00
28	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	340.000,00			20.000,00												360.000,00
29	UPT. METROLOGI LEGAL	1.613.000,00				298.500,00											1.911.500,00

Lampiran 9

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	Bahan pakaian	Obat-Obatan/ BMHP	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Peralatan Lain-Lain	TOTAL
30	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	170.000,00															170.000,00
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	893.000,00		801.000,00		977.000,00											2.671.000,00
32	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	386.300,00															386.300,00
33	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PARIAMAN	120.000,00										4.200.000,00					4.320.000,00
34	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN									9.506.410,00							9.506.410,00
35	UPT. BALAI BENIH IKAN							31.698.500,00		2.070.000,00			24.195.600,00			3.180.000,00	61.144.100,00
36	BAGIAN PEMERINTAHAN	788.497,00															788.497,00
37	BAGIAN HUKUM DAN HAM	1.489.700,00															1.489.700,00
38	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	735.000,00															735.000,00
39	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	9.102.200,00															9.102.200,00
40	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN	673.650,00															673.650,00
41	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.377.264,00													3.250.000,00		4.627.264,00
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	490.000,00															490.000,00
43	SEKRETARIAT DPRD	758.500,00															758.500,00
44	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	190.500,00				30.000,00											220.500,00
45	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH																-
46	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	724.000,00				243.000,00											967.000,00
47	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	100.000,00															100.000,00
48	INSPEKTORAT	3.240.000,00															3.240.000,00
49	BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.787.976,00	250.000,00			640.500,00											8.678.476,00
50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	2.628.500,00	46.787.000,00		120.000,00	97.000,00											49.632.500,00
51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																-
52	KELURAHAN KAMPUNG JAWA 1	977.000,00															977.000,00
53	KELURAHAN JATI HILIR	1.270.000,00															1.270.000,00
54	KELURAHAN JALAN KERETA API																-
55	KELURAHAN KARAN AUR	417.500,00															417.500,00
56	KELURAHAN PONDOK DUO	680.000,00															680.000,00
57	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	100.000,00															100.000,00
58	KELURAHAN ALAI GELOMBANG																-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	ATK	Cetakan	Alat-alat Listrik	Materai/ Perangko	Peralatan Kebersihan	Bahan Baku Bangunan/Bahan Material Lainnya Bangunan	Bibit Ternak	Bahan pakaian	Obat-Obatan/ BMHP	Bahan Makanan	Bahan Kimia	Pakan Ternak	Peralatan Kesehatan Lainnya	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Peralatan Lain-Lain	TOTAL
59	KELURAHAN KAMPUNG JAWA 2	183.300,00															183.300,00
60	KELURAHAN JAWI-JAWI 2																-
61	KELURAHAN LOHONG	375.500,00															375.500,00
62	KELURAHAN PASIR	374.000,00															374.000,00
63	KELURAHAN TARATAK	437.000,00															437.000,00
64	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	541.500,00															541.500,00
75	KELURAHAN KP PONDOK	365.000,00															365.000,00
76	KELURAHAN JALAN BARU	270.000,00															270.000,00
Total Persediaan		**55.986.502,00**	**##########**	**432.168.650,00**	**3.140.000,00**	**7.093.200,00**	**242.580.297,00**	**31.698.500,00**	**800.000,00**	**3.699.498.141,10**	**4.954.767,00**	**75.768.000,00**	**24.195.600,00**	**580.000,00**	**3.250.000,00**	**301.966.800,00**	**5.022.938.757,10**

Lampiran 10a

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN DANA BERGULIR UKM DAN ROVOLVING FUND

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Plafond	Posisi Per 31 Desember 2024									Dana Bergulir Yang Diragukan Tidak Tertagih	
		Pokok	Bunga	Jumlah	6	7	8	9	10	>10	75%	100%
A Sektor Pertanian dan Peternakan	351.500.000	279.534.500	32.742.500	312.277.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.534.500,00	0,00	279.534.500,00
B Sektor Kelautan dan Perikanan	412.500.000	321.747.500	34.467.000	356.214.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.747.500,00	0,00	321.747.500,00
C Sektor Industri	588.500.000	434.986.500	49.705.000	484.691.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.986.500,00	0,00	434.986.500,00
D Sektor Perdagangan	739.000.000	565.257.000	59.136.500	624.393.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.257.000,00	0,00	565.257.000,00
TOTAL	**2.091.500.000**	**1.601.525.500**	**176.051.000**	**1.777.576.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.601.525.500,00**	**0,00**	**1.601.525.500,00**

Data Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir Revolving Fund Tahun 2024 **117.367.333,33**

REKAPITULASI PERKEMBANGAN BANTUAN DANA BERGULIR KSP/USP

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Plafond	Posisi Per 31 Desember 2024									Dana Bergulir Yang Diragukan Tidak Tertagih	
		Pokok	Bunga	Jumlah	6	7	8	9	10	>10	Jangka Waktu (> 3 s/d 5 thn) 75%	Jangka Waktu (> 5 thn) 100%
1 Takapalo Saiyo	50.000.000	35.000.000	10.500.000	45.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	35.000.000
2 Jambak Sakato	50.000.000	27.500.000	8.250.000	35.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000	0,00	27.500.000
3 Tuah Sakato	50.000.000	37.500.000	11.250.000	48.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000	0,00	37.500.000
4 KPP Laskar Cimparuh	50.000.000	10.000.000	3.000.000	13.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000	0,00	10.000.000
5 Primkoptama	50.000.000	7.500.000	2.250.000	9.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000	0,00	7.500.000
6 Kop. Nly Pasie Nrh	10.000.000	5.500.000	1.650.000	7.150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000	0,00	5.500.000
TOTAL	**260.000.000**	**123.000.000**	**36.900.000**	**159.900.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000.000**	**0,00**	**123.000.000**

Data Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP Tahun 2024 **24.600.000**

Lampiran 10b

Pemerintah Kota Pariaman
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah Bln	Jumlah Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
I.	**Sektor Pertanian dan Peternakan**															
1	ST. Darjis	8.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	27/10/06
2	Omo Aldrin Hasan, SP	15.000.000	25/10/04	36	bln	36	134	146	158	170	206	17,2	15.000.000,00	2.625.000,00	17.625.000,00	25/10/07
3	Syahfinasri	20.000.000	23/10/04	36	bln	28	134	146	158	170	198	16,5	15.552.000,00	2.700.000,00	18.252.000,00	23/10/07
4	Juarman	3.000.000	28/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	28/10/05
5	Syahrul	3.000.000	30/10/04	12	bln	2	158	170	182	194	196	16,3	500.000,00	15.000,00	515.000,00	30/10/05
6	Risnawati	10.000.000	25/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,8	8.092.000,00	900.000,00	8.992.000,00	25/10/06
7	Mahyudin / Appaludin	8.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	27/10/06
8	Narasli	8.000.000	28/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	28/10/06
9	Erman Safni	8.000.000	29/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.555.000,00	640.000,00	8.195.000,00	29/10/06
10	Khairul	8.000.000	21/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	880.000,00	8.880.000,00	21/10/06
11	Majelis / Marjailis, BA	8.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	8.000.000,00	920.000,00	8.920.000,00	25/10/06
12	Jakimar	8.000.000	23/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7	6.220.000,00	480.000,00	6.700.000,00	23/10/06
13	Drs. Agusman	5.000.000	15/01/05	18	bln	15	149	161	173	185	200	16,7	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	15/07/06
14	Rp. Gazali	10.000.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00	23/10/06
15	Syafrial	20.000.000	22/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	19.333.000,00	3.500.000,00	22.833.000,00	22/10/07
16	Drs. John Hendry	20.000.000	23/10/04	36	bln	23	134	146	158	170	193	16,1	12.663.000,00	1.800.000,00	14.463.000,00	23/10/07
17	Marzuki	10.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	600.000,00	10.600.000,00	25/10/06
18	Sridayeti	4.000.000	25/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	25/04/06
19	Metri Evita	10.000.000	29/10/04	24	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	4.480.000,00	500.000,00	4.980.000,00	29/10/06
20	Ali Zuarman	10.000.000	23/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	8.963.000,00	1.050.000,00	10.013.000,00	23/10/06
21	Suhaimi	5.000.000	27/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	25.000,00	5.025.000,00	27/04/06
22	Nurman /HM Umar LW	20.000.000	27/10/04	36	bln	29	134	146	158	170	199	16,6	15.998.000,00	2.500.000,00	18.498.000,00	27/10/07
23	H. Masrial / BY. Gurun	20.000.000	25/10/04	36	bln	23	134	146	158	170	193	16,0	12.500.000,00	1.900.000,00	14.400.000,00	25/10/07
24	Arisma Agus, S.Pd	5.000.000	23/10/04	18	bln	15	152	164	176	188	203	16,9	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	23/04/06
25	Yusmanlina Rita	5.000.000	28/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	28/04/06
26	Yulmaneti	8.000.000	12/03/04	24	bln	24	153	165	177	189	213	17,8	8.000.000,00	840.000,00	8.840.000,00	12/03/06
27	M. Darman	8.000.000	12/03/04	24	bln	24	153	165	177	189	213	17,8	8.000.000,00	800.000,00	8.800.000,00	12/03/06
28	Hendri	2.500.000	12/03/04	36	bln	28	141	153	165	177	205	17,0	1.915.000,00	300.000,00	2.215.000,00	12/03/07
29	Yuzarlis Uyun	8.000.000	12/02/04	24	bln	5	154	166	178	190	195	16,3	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	12/02/06
30	Syukri, S.Pt	8.000.000	12/06/04	24	bln	7	150	162	174	186	193	16,1	2.324.000,00	360.000,00	2.684.000,00	12/06/06
31	Darmansyah	6.000.000	17/05/05	24	bln	15	139	151	163	175	190	15,8	3.700.000,00	420.000,00	4.120.000,00	17/05/07
32	Irja, SE	8.000.000	12/02/04	24	bln	19	154	166	178	190	209	17,4	6.220.000,00	560.000,00	6.780.000,00	12/02/06
33	Hendri	4.000.000	05/06/05	36	bln	34	126	138	150	162	196	16,3	3.732.000,00	580.000,00	4.312.000,00	05/06/08
34	H. Hasan Basri	5.000.000	09/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	09/09/07

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
35	Mulyadi	5.000.000	17/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	17/09/07
36	Darnengsih	3.000.000	20/09/05	12	bln	10	147	159	171	183	193	16,1	2.500.000,00	135.000,00	2.635.000,00	20/09/06
37	Firdaus	4.000.000	09/07/05	24	bln	22	137	149	161	173	195	16,2	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	09/07/07
38	Asrul Joya	2.500.000	16/09/05	24	bln	24	135	147	159	171	195	16,3	2.500.000,00	287.500,00	2.787.500,00	16/09/07
39	Awaluddin	2.500.000	09/06/05	24	bln	21	138	150	162	174	195	16,2	2.186.500,00	250.000,00	2.436.500,00	09/06/07
40	Afni	10.000.000	30/01/06	36	bln	4	119	131	143	155	159	13,3	0,00	0,00	0,00	30/01/09
41	Liberty	3.500.000	26/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	3.500.000,00	402.500,00	3.902.500,00	26/07/08
42	Basril / Delmawati	7.500.000	07/12/06	24	bln	20	120	132	144	156	176	14,7	6.250.000,00	712.500,00	6.962.500,00	07/12/08
43	Syafrizal	5.000.000	20/07/07	24	bln	7	113	125	137	149	156	13,0	1.386.000,00	100.000,00	1.486.000,00	20/07/09
42 Org	**Total**	**351.500.000**											**279.534.500,00**	**32.742.500,00**	**312.277.000,00**	
II.	**Sektor Kelautan dan Perikanan**															
1	Afrianto	2.500.000	21/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.873.000,00	100.000,00	1.973.000,00	21/10/05
2	Damril	3.000.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.750.000,00	150.000,00	2.900.000,00	27/10/05
3	Nofri Indra Gunawan	2.500.000	28/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	28/10/05
4	Erdiman	2.000.000	29/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	1.778.000,00	150.000,00	1.928.000,00	29/04/06
5	Erman	5.000.000	27/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	27/04/06
6	Ardison	7.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	21/10/06
7	Kanak	5.000.000	25/10/04	18	bln	15	152	164	176	188	203	16,9	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	25/04/06
8	Sukirman	2.500.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	37.500,00	2.537.500,00	26/10/05
9	Zafrinal	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
10	Ajismar	7.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	21/10/06
11	BY. Yardin	2.000.000	26/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	1.832.000,00	210.000,00	2.042.000,00	26/10/06
12	Dayardi Alek	5.000.000	25/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.775.000,00	250.000,00	5.025.000,00	25/10/05
13	Ibra Wendi	3.500.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	3.500.000,00	297.500,00	3.797.500,00	26/04/06
14	Mazona / Chandra Sonedi	6.000.000	23/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	5.620.000,00	510.000,00	6.130.000,00	23/10/06
15	Ali Buzar	5.000.000	27/10/04	18	bln	1	152	164	176	188	189	15,7	274.000,00	0,00	274.000,00	27/04/06
16	Asril	8.000.000	22/10/04	36	bln	10	134	146	158	170	180	15,0	1.295.000,00	640.000,00	1.935.000,00	22/10/07
17	Agusman / Mahdi Bermana	5.000.000	25/10/04	12	bln	2	158	170	182	194	196	16,3	939.000,00	0,00	939.000,00	25/10/05
18	Agus Neri Ambi	5.000.000	29/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	29/04/06
19	H. SD. Ramli	20.000.000	21/10/04	30	bln	7	140	152	164	176	183	15,2	4.432.000,00	700.000,00	5.132.000,00	21/04/07
20	Ali Akbar	7.000.000	26/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	3.788.000,00	420.000,00	4.208.000,00	26/10/06
21	H. Suardi Alek	10.000.000	28/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	0,00	0,00	0,00	28/10/06
22	Hendri Johan	5.000.000	26/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.394.000,00	375.000,00	4.769.000,00	26/04/06
23	Masri Husen	10.000.000	29/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	9.722.000,00	1.700.000,00	11.422.000,00	29/10/07
24	Mesrawati	2.500.000	29/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.664.000,00	85.500,00	1.749.500,00	29/10/05
25	Mulhendri	7.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	27/10/06
26	Ros Kamil	7.000.000	26/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	3.788.000,00	420.000,00	4.208.000,00	26/10/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
27	Syaripudin	7.000.000	25/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	5.832.000,00	315.000,00	6.147.000,00	25/10/05
28	Yusrizal	7.500.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,1	7.400.000,00	862.500,00	8.262.500,00	23/10/06
29	Edi Permana	2.000.000	25/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	25/10/05
30	Yulius Kaisar	5.000.000	22/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	250.000,00	4.833.000,00	22/10/05
31	Asril Thaib	5.000.000	22/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.372.000,00	350.000,00	4.722.000,00	22/04/06
32	Rusyafni	5.000.000	25/10/04	12	bln	5	158	170	182	194	199	16,6	2.081.000,00	100.000,00	2.181.000,00	25/10/05
33	Erizal	5.000.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	250.000,00	4.833.000,00	27/10/05
34	Syamsurizal	5.000.000	27/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	27/04/06
35	Musyirwan	5.000.000	22/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	22/04/06
36	Yuliardi	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
37	Darmawan	15.000.000	27/10/04	36	bln	26	134	146	158	170	196	16,3	10.830.000,00	1.875.000,00	12.705.000,00	27/10/07
38	H. Jufri Jamal	10.000.000	29/10/04	36	bln	34	134	146	158	170	204	17,0	9.583.000,00	1.700.000,00	11.283.000,00	29/10/07
39	Zaldi	2.500.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	23/10/05
40	Zulfajar	5.000.000	22/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	5.000.000,00	275.000,00	5.275.000,00	22/10/05
41	Alinur	6.500.000	23/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	6.500.000,00	747.500,00	7.247.500,00	23/10/06
42	Fadillah	5.000.000	27/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	4.440.000,00	375.000,00	4.815.000,00	27/10/06
43	Mulyadi	2.500.000	26/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	1.944.000,00	162.500,00	2.106.500,00	26/04/06
44	Erwin	7.000.000	26/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	26/10/06
45	Hendrik Budiyono	3.500.000	26/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	3.110.000,00	261.500,00	3.371.500,00	26/04/06
46	Zahari	2.000.000	25/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	998.000,00	50.000,00	1.048.000,00	25/10/05
47	Asrizal	1.000.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	26/10/05
48	Zakriman	4.000.000	25/10/04	12	bln	7	158	170	182	194	201	16,7	2.330.000,00	120.000,00	2.450.000,00	25/10/05
49	H. Fadli Jalil	7.000.000	26/10/04	24	bln	14	146	158	170	182	196	16,3	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	26/10/06
50	Almiarti	5.000.000	27/10/04	18	bln	12	152	164	176	188	200	16,7	3.332.000,00	275.000,00	3.607.000,00	27/04/06
51	Jafrinal	5.000.000	29/10/04	18	bln	5	152	164	176	188	193	16,1	1.386.000,00	100.000,00	1.486.000,00	29/04/06
52	Jarunasdi	5.000.000	27/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.442.000,00	375.000,00	4.817.000,00	27/04/06
53	Martias	5.000.000	27/10/04	18	bln	13	152	164	176	188	201	16,7	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	27/04/06
54	Ismael	5.000.000	27/10/04	18	bln	12	152	164	176	188	200	16,7	3.332.000,00	275.000,00	3.607.000,00	27/04/06
55	Ali Nuzar	5.000.000	27/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	27/04/06
56	M. Nasir	5.000.000	27/10/04	18	bln	4	152	164	176	188	192	16,0	1.108.000,00	75.000,00	1.183.000,00	27/04/06
57	Herman Uncu	5.000.000	25/11/04	36	bln	36	133	145	157	169	205	17,1	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	25/11/07
58	Johan. BSC	5.000.000	21/12/04	24	bln	22	144	156	168	180	202	16,8	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	21/12/06
59	Syofyan Oyon	7.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.000.000,00	805.000,00	7.805.000,00	25/10/06
60	Hasrizal	5.000.000	28/10/04	18	bln	13	152	164	176	188	201	16,7	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	28/04/06
61	Yulisyenti	5.000.000	12/02/04	18	bln	16	160	172	184	196	212	17,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	12/08/05
62	M. Salim	7.500.000	12/02/04	24	bln	24	154	166	178	190	214	17,8	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	12/02/06
63	Syafinal	8.000.000	12/02/04	24	bln	19	154	166	178	190	209	17,4	6.330.000,00	720.000,00	7.050.000,00	12/02/06
64	Hendri Suarman	5.000.000	12/02/04	18	bln	18	160	172	184	196	214	17,8	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	12/08/05

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
65	Suardi Ahmad	7.500.000	28/06/05	36	bln	36	126	138	150	162	198	16,5	7.500.000,00	1.350.000,00	8.850.000,00	28/06/08
66	Dalimar	4.000.000	21/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.666.000,00	220.000,00	3.886.000,00	21/08/06
67	Hanibal	2.500.000	05/09/05	12	bln	11	147	159	171	183	194	16,2	2.291.500,00	125.000,00	2.416.500,00	05/09/06
68	Dahlan	2.500.000	05/10/05	18	bln	12	140	152	164	176	188	15,7	1.666.000,00	37.500,00	1.703.500,00	05/04/07
69	Syamsunar	2.500.000	05/10/05	12	bln	12	146	158	170	182	194	16,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	05/10/06
70	Hazwir Zaini	4.000.000	09/08/05	24	bln	24	136	148	160	172	196	16,3	4.000.000,00	380.000,00	4.380.000,00	09/08/07
71	Afrizal, S.Pd	4.000.000	09/01/05	26	bln	26	141	153	165	177	203	16,9	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	09/03/07
72	Zulkorneli	20.000.000	17/07/06	36	bln	36	113	125	137	149	185	15,4	20.000.000,00	3.500.000,00	23.500.000,00	17/07/09
73	Zulnaidi. A	4.000.000	20/07/06	24	bln	23	125	137	149	161	184	15,3	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	20/07/08
74	Raysoni	7.000.000	02/03/07	36	bln	36	105	117	129	141	177	14,8	7.000.000,00	1.225.000,00	8.225.000,00	02/03/10
73 Org	**Total**	**412.500.000**											**321.747.500,00**	**34.467.000,00**	**356.214.500,00**	
														34.467.000,00		
III.	**Sektor Industri**													**0,00**		
1	Syafruddin. Z	8.000.000	21/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7			0,00	21/10/06
2	Maya Oktafarina	10.000.000	27/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	8.749.000,00	1.000.000,00	9.749.000,00	27/10/06
3	Rini Sasmita	10.000.000	27/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	27/10/06
4	M. Subuh	7.500.000	25/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	6.875.000,00	787.500,00	7.662.500,00	25/10/06
5	Azwarni	15.000.000	27/10/04	36	bln	36	134	146	158	170	206	17,2	15.000.000,00	2.625.000,00	17.625.000,00	27/10/07
6	Alimah	8.000.000	26/10/04	24	bln	22	146	158	170	182	204	17,0	7.332.000,00	840.000,00	8.172.000,00	26/10/06
7	ST Anis	7.500.000	29/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,2	4.062.000,00	450.000,00	4.512.000,00	29/10/06
8	Alfian	7.500.000	27/10/04	24	bln	9	146	158	170	182	191	15,9	2.812.500,00	292.000,00	3.104.500,00	27/10/06
9	Tsamratul Fuadi	7.500.000	25/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.187.500,00	824.500,00	8.012.000,00	25/10/06
10	Sulaiman	7.500.000	22/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	7.187.000,00	824.000,00	8.011.000,00	22/10/06
11	**Nofiati (LUNAS)**	10.000.000	23/10/04	24	bln	-	146	158	170	182	182	15,2	0,00	0,00	0,00	23/10/06
12	**Netti Winda Sari**	7.000.000	21/10/04	36	bln	20	134	146	158	170	190	15,9	0,00	0,00	0,00	21/10/07
13	Syafti Yeni	5.000.000	29/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	29/04/06
14	Maiyusti	5.000.000	29/10/04	18	bln	8	152	164	176	188	196	16,3	2.220.000,00	175.000,00	2.395.000,00	29/04/06
15	Rismarni	5.000.000	21/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,1	4.900.000,00	275.000,00	5.175.000,00	21/10/05
16	Maizonal	15.000.000	23/10/04	36	bln	35	134	146	158	170	205	17,1	14.583.000,00	2.550.000,00	17.133.000,00	23/10/07
17	Syahrial Beren	7.500.000	22/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.000,00	8.362.000,00	22/10/06
18	Jamaluddin	10.000.000	29/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	7.466.000,00	950.000,00	8.416.000,00	29/10/06
19	Dra. Endrawati	7.500.000	23/10/04	24	bln	0	146	158	170	182	182	15,2	35.000,00	0,00	35.000,00	23/10/06
20	Adi Putra	7.500.000	26/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	5.425.500,00	634.000,00	6.059.500,00	26/10/06
21	Rismadona Iskandar	7.500.000	27/10/04	24	bln	18	146	158	170	182	200	16,7	5.636.500,00	674.500,00	6.311.000,00	27/10/06
22	M. Nur	10.000.000	22/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	6.664.000,00	350.000,00	7.014.000,00	22/10/05
23	Mawardi, SE	7.500.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.000,00	8.362.000,00	25/10/06
24	Jonasri	7.500.000	29/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	29/10/06
25	Mayar	5.000.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	26/04/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
26	Yuliani	7.500.000	26/10/04	24	bln	16	146	158	170	182	198	16,5	5.000.000,00	562.000,00	5.562.000,00	26/10/06
27	Salmiwati	7.500.000	21/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	5.312.500,00	599.500,00	5.912.000,00	21/10/06
28	Zarlaini	7.500.000	27/10/04	24	bln	20	146	158	170	182	202	16,8	6.248.000,00	712.000,00	6.960.000,00	27/10/06
29	Alam Nur	7.500.000	28/10/04	24	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	3.362.500,00	0,00	3.362.500,00	28/10/06
30	Mardinis	7.500.000	22/10/04	36	bln	34	134	146	158	170	204	17,0	7.084.000,00	1.236.000,00	8.320.000,00	22/10/07
31	Kadir / Khaidir	5.000.000	25/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	25/10/06
32	Aldinur	5.000.000	26/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	26/04/06
33	Opet Martini	5.000.000	11/11/04	18	bln	18	151	163	175	187	205	17,1	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/05/06
34	Elmi Marlinda	5.000.000	11/10/04	18	bln	6	152	164	176	188	194	16,2	1.767.000,00	125.000,00	1.892.000,00	11/04/06
35	Ratna Juwita	5.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	4.250.000,00	225.000,00	4.475.000,00	11/11/05
36	Nurbaya	5.000.000	11/11/04	18	bln	8	151	163	175	187	195	16,2	2.220.000,00	175.000,00	2.395.000,00	11/05/06
37	Sumarni	5.000.000	11/11/04	18	bln	14	151	163	175	187	201	16,7	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	11/05/06
38	Dona Karmila	4.000.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	2.664.000,00	140.000,00	2.804.000,00	11/10/05
39	Nasril Rahman	10.000.000	11/11/04	24	bln	24	145	157	169	181	205	17,1			0,00	11/11/06
40	Rosmawati	5.000.000	12/03/04	18	bln	16	159	171	183	195	211	17,6	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	12/09/05
41	Zuraida	3.000.000	11/11/04	12	bln	4	157	169	181	193	197	16,4	1.000.000,00	45.000,00	1.045.000,00	11/11/05
42	Haji Zainir	7.500.000	29/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	29/10/06
43	Nurhayati	6.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,8	5.750.000,00	660.000,00	6.410.000,00	12/02/06
44	Umar Ali	5.000.000	12/02/04	12	bln	10	166	178	190	202	212	17,7	4.166.000,00	225.000,00	4.391.000,00	12/02/05
45	Agustami	10.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,7	9.583.000,00	1.100.000,00	10.683.000,00	12/02/06
46	Sumiarni	3.000.000	21/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	21/08/06
47	Kharnelis	4.000.000	21/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	4.000.000,00	220.000,00	4.220.000,00	21/02/06
48	Betrida Yanti	3.000.000	11/05/05	18	bln	10	145	157	169	181	191	15,9	1.664.000,00	135.000,00	1.799.000,00	11/11/06
49	Irni	5.000.000	23/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	23/08/06
50	Nurleli	7.500.000	21/02/05	24	bln	9	142	154	166	178	187	15,6	2.812.500,00	300.000,00	3.112.500,00	21/02/07
51	Sumarni	6.000.000	22/02/05	24	bln	20	142	154	166	178	198	16,5	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	22/02/07
52	Yusmini	4.000.000	22/02/05	18	bln	14	148	160	172	184	198	16,5	3.108.000,00	260.000,00	3.368.000,00	22/08/06
53	Mursyida Layna	7.000.000	30/04/05	24	bln	23	140	152	164	176	199	16,6	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	30/04/07
54	Afrizal	3.000.000	11/05/05	18	bln	15	145	157	169	181	196	16,3	2.499.000,00	210.000,00	2.709.000,00	11/11/06
55	Dedi Hidayat	4.000.000	10/05/05	18	bln	18	145	157	169	181	199	16,6	4.000.000,00	340.000,00	4.340.000,00	10/11/06
56	Fahmi. AS	10.000.000	27/08/05	24	bln	19	136	148	160	172	191	15,9	7.915.000,00	900.000,00	8.815.000,00	27/08/07
57	Netalia	7.000.000	09/01/05	30	bln	21	137	149	161	173	194	16,2	4.894.000,00	700.000,00	5.594.000,00	09/07/07
58	Asneriyanti	3.000.000	09/08/05	24	bln	8	136	148	160	172	180	15,0	1.000.000,00	105.000,00	1.105.000,00	09/08/07
59	Mardianis	7.000.000	17/01/06	24	bln	15	131	143	155	167	182	15,2	4.372.000,00	490.000,00	4.862.000,00	17/01/08
60	Novit Tasniati	4.000.000	20/01/06	24	bln	23	131	143	155	167	190	15,8	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	20/01/08
61	Sufarmaiteti	5.000.000	23/01/06	18	bln	13	137	149	161	173	186	15,5	3.610.000,00	300.000,00	3.910.000,00	23/07/07
62	Paimin	5.000.000	23/01/06	24	bln	18	131	143	155	167	185	15,4	3.749.000,00	425.000,00	4.174.000,00	23/01/08
63	Yulinar	4.000.000	16/02/06	24	bln	19	130	142	154	166	185	15,4	3.165.000,00	360.000,00	3.525.000,00	16/02/08

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
64	Yeni Latifah	4.000.000	17/07/06	24	bln	5	125	137	149	161	166	13,8	827.000,00	80.000,00	907.000,00	17/07/08
65	Erma Yetti	10.000.000	18/07/06	36	bln	32	113	125	137	149	181	15,1	8.888.000,00	1.550.000,00	10.438.000,00	18/07/09
66	Nurmaini	5.000.000	18/07/06	12	bln	10	137	149	161	173	183	15,2	4.166.000,00	225.000,00	4.391.000,00	18/07/07
67	Asni Arti	5.000.000	19/07/06	24	bln	4	125	137	149	161	165	13,7	820.000,00	75.000,00	895.000,00	19/07/08
68	Syahril	4.000.000	19/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	19/07/08
69	Werisma Yani	3.000.000	21/07/06	18	bln	18	131	143	155	167	185	15,4	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	21/01/08
70	**Zainidar (LUNAS)**	4.000.000	21/07/06	18	bln	-	131	143	155	167	167	13,9	0,00	0,00	0,00	21/01/08
71	Kamaldi	3.000.000	21/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	21/07/08
72	Syafwit	5.000.000	27/07/06	24	bln	18	125	137	149	161	179	14,9	3.746.000,00	425.000,00	4.171.000,00	27/07/08
73	Revi Syukrina	4.000.000	10/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	10/10/08
74	Suharni	5.000.000	11/10/06	24	bln	21	122	134	146	158	179	14,9	4.374.500,00	500.000,00	4.874.500,00	11/10/08
75	Yufetra Asra	7.000.000	08/12/06	18	bln	13	126	138	150	162	175	14,6	5.055.000,00	420.000,00	5.475.000,00	08/06/08
76	Eliarnita	8.000.000	20/02/07	24	bln	22	118	130	142	154	176	14,7	7.332.000,00	840.000,00	8.172.000,00	20/02/09
77	Syamsurizal	3.000.000	21/03/07	24	bln	24	117	129	141	153	177	14,8	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	21/03/09
78	Burhanuddin	5.000.000	30/07/07	24	bln	9	113	125	137	149	158	13,2	1.865.000,00	200.000,00	2.065.000,00	30/07/09
79	Deni Fahmi	5.000.000	19/07/07	24	bln	22	113	125	137	149	171	14,2	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	19/07/09
80	Hayati	4.000.000	20/07/07	24	bln	20	113	125	137	149	169	14,1	3.332.000,00	380.000,00	3.712.000,00	20/07/09
81	Idi Amin	3.000.000	19/09/07	12	bln	12	123	135	147	159	171	14,3	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	19/09/08
82	Gustiyawarman	4.000.000	24/09/07	24	bln	23	111	123	135	147	170	14,2	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	24/09/09
83	Sawirna	4.000.000	07/04/08	18	bln	12	110	122	134	146	158	13,2	2.662.000,00	220.000,00	2.882.000,00	07/10/09
84	Harisli	4.000.000	07/04/08	24	bln	12	104	116	128	140	152	12,7	1.996.000,00	220.000,00	2.216.000,00	07/04/10
85	Emransyah	5.000.000	08/04/08	24	bln	10	104	116	128	140	150	12,5	2.074.000,00	225.000,00	2.299.000,00	08/04/10
86	Agustanil	5.000.000	09/04/08	24	bln	23	104	116	128	140	163	13,6	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	09/04/10
87	Efriyeni	5.000.000	13/01/09	36	bln	36	83	95	107	119	155	12,9	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	13/01/12
88	Muchtar TJ	8.000.000	16/01/09	24	bln	21	95	107	119	131	152	12,7	6.982.000,00	840.000,00	7.822.000,00	16/01/11
89	Baharuddin	5.000.000	20/01/09	24	bln	10	95	107	119	131	141	11,7	2.074.000,00	225.000,00	2.299.000,00	20/01/11
90	Nurbaiti	5.000.000	21/01/09	18	bln	11	101	113	125	137	148	12,3	3.054.000,00	250.000,00	3.304.000,00	21/07/10
91	Maini Lidia	5.000.000	22/01/09	36	bln	21	83	95	107	119	140	11,7	2.915.000,00	500.000,00	3.415.000,00	22/01/12
92	Rita Zahara	5.000.000	22/01/09	36	bln	35	83	95	107	119	154	12,8	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/01/12
93	Yurneli	5.000.000	29/01/09	36	bln	35	83	95	107	119	154	12,8	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	29/01/12
94	Erlina	5.000.000	27/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	27/04/12
95	Hermanto	5.000.000	08/05/09	36	bln	36	79	91	103	115	151	12,6	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	08/05/12
96	Yuni Sukma Sari	7.500.000	04/09/09	24	bln	16	87	99	111	123	139	11,6	5.000.500,00	600.000,00	5.600.500,00	04/09/11
97	Rosnaini	4.000.000	07/09/09	24	bln	22	87	99	111	123	145	12,1	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	07/09/11
94 Org	**Total**	**588.500.000**											**434.986.500,00**	**49.705.000,00**	**484.691.500,00**	
IV.	**Sektor Perdagangan**															
1	Yulisman	2.500.000	21/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	1.246.500,00	62.000,00	1.308.500,00	21/10/05

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
2	Ade Suryatman	3.000.000	22/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	22/10/05
3	Asmiarti	10.000.000	27/10/04	24	bln	12	146	158	170	182	194	16,2	4.996.000,00	500.000,00	5.496.000,00	27/10/06
4	Halimah	2.500.000	25/10/04	12	bln	6	158	170	182	194	200	16,7	1.245.000,00	62.000,00	1.307.000,00	25/10/05
5	Azizah	2.500.000	21/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.882.500,00	99.500,00	1.982.000,00	21/10/05
6	Azimah	8.000.000	25/10/04	24	bln	6	146	158	170	182	188	15,7	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	25/10/06
7	Maisuri Z	4.000.000	27/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.108.000,00	260.000,00	3.368.000,00	27/04/06
8	Osmiati	2.500.000	26/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	2.082.000,00	112.000,00	2.194.000,00	26/10/05
9	Candra	5.000.000	29/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	29/04/06
10	Nurtini	7.500.000	23/10/04	24	bln	13	146	158	170	182	195	16,3	4.062.500,00	449.500,00	4.512.000,00	23/10/06
11	Bgd Asril	5.000.000	26/10/04	18	bln	6	152	164	176	188	194	16,2	1.664.000,00	125.000,00	1.789.000,00	26/04/06
12	Zainal Abidin	7.500.000	23/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	6.561.000,00	750.000,00	7.311.000,00	23/10/06
13	Zita Herlina	5.000.000	22/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	3.332.000,00	175.000,00	3.507.000,00	22/10/05
14	Nofrizal	2.500.000	29/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	29/10/05
15	Erlinda Yenti	2.500.000	25/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.291.000,00	125.000,00	2.416.000,00	25/10/05
16	Murniati	2.500.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	2.291.000,00	125.000,00	2.416.000,00	27/10/05
17	Marwilisni	3.000.000	23/10/04	18	bln	17	152	164	176	188	205	17,1	2.833.000,00	240.000,00	3.073.000,00	23/04/06
18	Efrizaldi	7.000.000	11/02/04	30	bln	23	148	160	172	184	207	17,2	5.362.000,00	770.000,00	6.132.000,00	11/08/06
19	Bujang	2.000.000	29/10/04	12	bln	3	158	170	182	194	197	16,4	497.000,00	20.000,00	517.000,00	29/10/05
20	Azwardi	2.000.000	28/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	28/10/05
21	Ade Bursa	2.000.000	25/10/04	12	bln	1	158	170	182	194	195	16,2	163.000,00	0,00	163.000,00	25/10/05
22	Solfihardi	5.000.000	28/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	28/04/06
23	Yusran Yatim	2.500.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	23/10/05
24	Fitmawati	2.500.000	28/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	1.944.000,00	169.000,00	2.113.000,00	28/04/06
25	Joni Indra	10.000.000	28/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	28/10/06
26	Atos Austri	2.000.000	26/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	26/10/05
27	Azmawati	1.000.000	23/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	1.000.000,00	55.000,00	1.055.000,00	23/10/05
28	Elimarnis	4.000.000	28/10/04	12	bln	3	158	170	182	194	197	16,4	994.000,00	40.000,00	1.034.000,00	28/10/05
29	Ramlan	5.000.000	28/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	28/04/06
30	Elni Pudin / Elmi	2.500.000	29/10/04	12	bln	10	158	170	182	194	204	17,0	2.082.000,00	112.500,00	2.194.500,00	29/10/05
31	Yasnimar	2.500.000	29/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	2.500.000,00	137.500,00	2.637.500,00	29/10/05
32	Mimi Elfita	10.000.000	21/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	10.000.000,00	1.150.000,00	11.150.000,00	21/10/06
33	ST. Maryadi	10.000.000	26/10/04	24	bln	17	146	158	170	182	199	16,6	7.081.000,00	800.000,00	7.881.000,00	26/10/06
34	Zumardi, ST	5.000.000	25/10/04	12	bln	12	158	170	182	194	206	17,2	5.000.000,00	275.000,00	5.275.000,00	25/10/05
35	Yusniar	5.000.000	22/10/04	12	bln	1	158	170	182	194	195	16,3	413.000,00	25.000,00	438.000,00	22/10/05
36	Jasmi	3.000.000	22/10/04	12	bln	7	158	170	182	194	201	16,8	1.750.000,00	90.000,00	1.840.000,00	22/10/05
37	Martianas	5.000.000	23/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	23/10/06
38	Ilham Ilyas Can	10.000.000	21/10/04	24	bln	23	146	158	170	182	205	17,1	9.583.000,00	1.100.000,00	10.683.000,00	21/10/06
39	Herman Usman	7.000.000	27/10/04	24	bln	19	146	158	170	182	201	16,7	5.540.000,00	63.000,00	5.603.000,00	27/10/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021	Jumlah					
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
40	Aprijon	4.000.000	23/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	3.666.000,00	200.000,00	3.866.000,00	23/10/05
41	Yurisman	10.000.000	26/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	8.749.000,00	1.000.000,00	9.749.000,00	26/10/06
42	Syafriyanti	1.500.000	27/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	27/10/05
43	Syamsimar	3.000.000	26/10/04	24	bln	24	146	158	170	182	206	17,2	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	26/10/06
44	Sarmadani	1.500.000	26/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	7.500,00	1.382.500,00	26/10/05
45	Syahrul	2.000.000	29/10/04	12	bln	9	158	170	182	194	203	16,9	1.501.000,00	80.000,00	1.581.000,00	29/10/05
46	Basrida Basir	10.000.000	29/10/04	36	bln	-	134	146	158	170	170	14,2	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	29/10/07
47	Rosmaini	5.000.000	27/10/04	18	bln	14	152	164	176	188	202	16,8	3.888.000,00	325.000,00	4.213.000,00	27/04/06
48	Syafriadi	5.000.000	11/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	4.583.000,00	25.000,00	4.608.000,00	11/10/05
49	Ismail, S.Ag	6.000.000	10/11/04	24	bln	13	145	157	169	181	194	16,2	3.250.000,00	180.000,00	3.430.000,00	10/11/06
50	Asni. M	6.000.000	11/11/04	24	bln	20	145	157	169	181	201	16,8	5.000.000,00	570.000,00	5.570.000,00	11/11/06
51	Fera Indriani	2.000.000	11/10/05	12	bln	3	146	158	170	182	185	15,4	496.000,00	0,00	496.000,00	11/10/06
52	Bayu Pratama	6.000.000	11/10/04	24	bln	21	146	158	170	182	203	16,9	5.250.000,00	600.000,00	5.850.000,00	11/10/06
53	Mitra Lindawati	2.500.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.666.000,00	87.500,00	1.753.500,00	11/10/05
54	Ruhneli / Yulidar	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
55	Syafril Sanik	8.500.000	11/11/04	24	bln	23	145	157	169	181	204	17,0	8.145.000,00	935.000,00	9.080.000,00	11/11/06
56	Syamsuwir	7.500.000	11/11/04	24	bln	24	145	157	169	181	205	17,1	7.500.000,00	862.500,00	8.362.500,00	11/11/06
57	Zailis Oyong	1.500.000	11/10/04	12	bln	11	158	170	182	194	205	17,1	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	11/10/05
58	Rasmita	5.000.000	11/10/04	18	bln	18	152	164	176	188	206	17,2	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/04/06
59	Linawati	2.000.000	11/10/04	12	bln	8	158	170	182	194	202	16,8	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	11/10/05
60	Upik	5.000.000	11/10/04	18	bln	16	152	164	176	188	204	17,0	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	11/04/06
61	Osmansyah	7.000.000	11/11/04	24	bln	15	145	157	169	181	196	16,3	4.372.000,00	490.000,00	4.862.000,00	11/11/06
62	Maiyulis Kalis	7.500.000	11/11/04	24	bln	23	145	157	169	181	204	17,0	7.187.500,00	825.000,00	8.012.500,00	11/11/06
63	Idil Taufik	6.000.000	10/11/04	24	bln	17	145	157	169	181	198	16,5	4.250.000,00	510.000,00	4.760.000,00	10/11/06
64	Anwar Sawin	5.000.000	10/11/04	18	bln	16	151	163	175	187	203	16,9	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	10/05/06
65	Mairawati	5.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,7	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00	11/11/05
66	Sugiarto	7.000.000	11/11/04	24	bln	12	145	157	169	181	193	16,1	3.496.000,00	385.000,00	3.881.000,00	11/11/06
67	M. Yeni Mucti	5.000.000	11/11/04	18	bln	18	151	163	175	187	205	17,1	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	11/05/06
68	Rusdi MT	2.000.000	11/11/04	12	bln	9	157	169	181	193	202	16,8	1.499.000,00	80.000,00	1.579.000,00	11/11/05
69	Desmawati	2.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,7	1.332.000,00	70.000,00	1.402.000,00	11/11/05
70	Runeli	3.000.000	11/11/04	12	bln	12	157	169	181	193	205	17,1	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	11/11/05
71	Orbainur	2.000.000	11/11/04	12	bln	12	157	169	181	193	205	17,1	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	11/11/05
72	Yandri	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
73	Amrialis	5.000.000	11/11/04	18	bln	15	151	163	175	187	202	16,8	4.166.000,00	350.000,00	4.516.000,00	11/05/06
74	Bainis	1.500.000	11/11/04	12	bln	6	157	169	181	193	199	16,6	750.000,00	37.500,00	787.500,00	11/11/05
75	Jupri Syarif	2.000.000	11/11/04	12	bln	11	157	169	181	193	204	17,0	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	11/11/05
76	Yeni Y	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
77	Lindawati	2.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,8	1.399.000,00	80.000,00	1.479.000,00	11/11/05

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
78	Nurhelma	2.000.000	25/11/04	12	bln	3	157	169	181	193	196	16,3	497.000,00	20.000,00	517.000,00	25/11/05
79	Hayati	2.000.000	11/11/04	12	bln	10	157	169	181	193	203	16,9	1.666.000,00	90.000,00	1.756.000,00	11/11/05
80	Todi Novel	2.000.000	11/11/04	12	bln	11	157	169	181	193	204	17,0	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	11/11/05
81	Rosla Aslinda	2.000.000	11/11/04	12	bln	4	157	169	181	193	197	16,4	664.000,00	30.000,00	694.000,00	11/11/05
82	Suarni	2.000.000	25/11/04	12	bln	9	157	169	181	193	202	16,8	1.499.000,00	80.000,00	1.579.000,00	25/11/05
83	Maiyusni	3.000.000	11/11/04	12	bln	8	157	169	181	193	201	16,8	2.000.000,00	105.000,00	2.105.000,00	11/11/05
84	Zailim	5.000.000	11/11/04	18	bln	17	151	163	175	187	204	17,0	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	11/05/06
85	Erman KH	5.000.000	11/11/04	24	bln	19	145	157	169	181	200	16,7	3.955.000,00	450.000,00	4.405.000,00	11/11/06
86	Iswardi	5.000.000	11/11/04	18	bln	17	151	163	175	187	204	17,0	4.722.000,00	400.000,00	5.122.000,00	11/05/06
87	Amril Amir Napia	10.000.000	11/11/04	36	bln	34	133	145	157	169	203	16,9	9.444.000,00	1.650.000,00	11.094.000,00	11/11/07
88	Nasril	6.000.000	12/02/04	24	bln	24	154	166	178	190	214	17,8	6.000.000,00	690.000,00	6.690.000,00	12/02/06
89	**Gafur, S.Ag**	**7.000.000**	**12/02/04**	**24**	**bln**	**18**	**154**	**166**	**178**	**190**	**208**	**17,3**				**12/02/06**
90	**Budi Kurniawan**	**7.000.000**	**12/04/04**	**36**	**bln**	**33**	**140**	**152**	**164**	**176**	**209**	**17,4**	**0,00**			**12/04/07**
91	Usdi Rusli	7.000.000	12/02/04	24	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	3.496.000,00	385.000,00	3.881.000,00	12/02/06
92	Risnawati	4.000.000	12/02/04	18	bln	17	160	172	184	196	213	17,7	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	12/08/05
93	Jonly	5.000.000	12/02/04	18	bln	18	160	172	184	196	214	17,8	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	12/08/05
94	Fajri, SH	7.500.000	12/02/04	24	bln	20	154	166	178	190	210	17,5	6.248.000,00	712.500,00	6.960.500,00	12/02/06
95	Sudirman	4.000.000	12/03/04	18	bln	16	159	171	183	195	211	17,6	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	12/09/05
96	Edir Asnadi, SH	4.000.000	12/02/04	18	bln	15	160	172	184	196	211	17,6	3.331.000,00	280.000,00	3.611.000,00	12/08/05
97	Suardi	7.000.000	12/02/04	24	bln	23	154	166	178	190	213	17,7	6.708.000,00	770.000,00	7.478.000,00	12/02/06
98	Ali Indra, SS	4.000.000	21/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	21/08/06
99	Firdaus,Bsc	5.000.000	21/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	5.000.000,00	425.000,00	5.425.000,00	21/08/06
100	Yuli Reni	2.000.000	21/02/05	12	bln	11	154	166	178	190	201	16,7	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	21/02/06
101	Darnelis	1.500.000	21/02/05	12	bln	5	154	166	178	190	195	16,3	625.000,00	30.000,00	655.000,00	21/02/06
102	Asni	1.500.000	21/02/05	12	bln	4	154	166	178	190	194	16,2	500.000,00	22.500,00	522.500,00	21/02/06
103	M. Ridwan	4.000.000	22/02/05	18	bln	12	148	160	172	184	196	16,3	2.662.000,00	220.000,00	2.882.000,00	22/08/06
104	Dedi Jamal	4.000.000	22/02/05	18	bln	17	148	160	172	184	201	16,7	3.777.000,00	320.000,00	4.097.000,00	22/08/06
105	Juliani	1.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	888.000,00	75.000,00	963.000,00	22/08/06
106	Julia	3.000.000	22/02/05	12	bln	10	154	166	178	190	200	16,7	2.500.000,00	135.000,00	2.635.000,00	22/02/06
107	Erik Alvan	4.000.000	05/07/05	24	bln	-	137	149	161	173	173	14,4	0,00	300.000,00	300.000,00	05/07/07
108	Khaidir	4.000.000	22/02/05	18	bln	13	148	160	172	184	197	16,4	2.885.000,00	240.000,00	3.125.000,00	22/08/06
109	Yessi Raswati	5.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	4.444.000,00	375.000,00	4.819.000,00	22/08/06
110	Alfitra Nuzia	1.500.000	22/02/05	18	bln	18	148	160	172	184	202	16,8	1.500.000,00	127.500,00	1.627.500,00	22/08/06
111	Eti Ronita	1.500.000	22/02/05	12	bln	11	154	166	178	190	201	16,8	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	22/02/06
112	Lidarni	3.000.000	22/02/05	12	bln	3	154	166	178	190	193	16,1	750.000,00	30.000,00	780.000,00	22/02/06
113	Marni	5.000.000	22/02/05	18	bln	14	148	160	172	184	198	16,5	3.838.000,00	325.000,00	4.163.000,00	22/08/06
114	Adrian	3.000.000	22/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	22/02/06
115	Ely Darni	3.000.000	22/02/05	18	bln	15	148	160	172	184	199	16,6	2.490.000,00	210.000,00	2.700.000,00	22/08/06

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
116	Zainal	4.000.000	22/02/05	18	bln	16	148	160	172	184	200	16,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	22/08/06
117	Rosli Achmad	2.000.000	22/02/05	12	bln	12	154	166	178	190	202	16,8	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	22/02/06
118	Hasan Basri	2.000.000	17/05/05	12	bln	12	151	163	175	187	199	16,6	2.000.000,00	110.000,00	2.110.000,00	17/05/06
119	Zainal / Zainuddin	4.000.000	05/11/05	24	bln	24	133	145	157	169	193	16,1	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	05/11/07
120	Nasrudin Nasir	3.000.000	05/10/05	12	bln	5	146	158	170	182	187	15,6	1.250.000,00	60.000,00	1.310.000,00	05/10/06
121	Zainuddin L	1.500.000	05/12/05	12	bln	11	144	156	168	180	191	15,9	1.375.000,00	75.000,00	1.450.000,00	05/12/06
122	Syafril Broyon	3.000.000	05/11/05	18	bln	18	139	151	163	175	193	16,1	3.000.000,00	255.000,00	3.255.000,00	05/05/07
123	Darmayanti	9.000.000	05/04/05	36	bln	35	128	140	152	164	199	16,6	8.750.000,00	1.530.000,00	10.280.000,00	05/04/08
124	Hendri	3.000.000	05/11/05	12	bln	6	145	157	169	181	187	15,6	1.500.000,00	75.000,00	1.575.000,00	05/11/06
125	Nasrun Basri	2.000.000	05/10/05	12	bln	11	146	158	170	182	193	16,1	1.833.000,00	100.000,00	1.933.000,00	05/10/06
126	Afrizal	3.000.000	05/11/05	12	bln	12	145	157	169	181	193	16,1	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	05/11/06
127	Rudi Hermansyah	7.500.000	05/12/05	24	bln	8	132	144	156	168	176	14,7	2.500.000,00	262.500,00	2.762.500,00	05/12/07
128	**Ir. Harwance Novan (LUNAS)**	4.000.000	09/01/05	24	bln	-	143	155	167	179	179	14,9	0,00	0,00	0,00	09/01/07
129	Novit	4.000.000	09/05/05	24	bln	24	139	151	163	175	199	16,6	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	09/05/07
130	Itromi Saputra	3.000.000	13/09/05	24	bln	18	135	147	159	171	189	15,8	2.250.000,00	255.000,00	2.505.000,00	13/09/07
131	Anisah Mahfud	5.000.000	09/06/05	24	bln	15	138	150	162	174	189	15,7	3.119.000,00	350.000,00	3.469.000,00	09/06/07
132	Herman Harun	5.000.000	09/01/05	36	bln	36	131	143	155	167	203	16,9	5.000.000,00	875.000,00	5.875.000,00	09/01/08
133	Zuherman	4.000.000	09/06/05	24	bln	23	138	150	162	174	197	16,4	3.833.000,00	440.000,00	4.273.000,00	09/06/07
134	Nursyamsi	2.000.000	09/09/05	18	bln	16	141	153	165	177	193	16,1	1.776.000,00	150.000,00	1.926.000,00	09/03/07
135	Febbi Hendry	5.000.000	09/07/05	36	bln	33	125	137	149	161	194	16,2	4.583.000,00	800.000,00	5.383.000,00	09/07/08
136	Erlina	2.000.000	27/09/05	18	bln	17	141	153	165	177	194	16,2	1.888.000,00	160.000,00	2.048.000,00	27/03/07
137	Sesmita	4.000.000	17/01/06	18	bln	15	137	149	161	173	188	15,7	3.331.000,00	280.000,00	3.611.000,00	17/07/07
138	Rahmani	4.000.000	19/01/06	18	bln	16	137	149	161	173	189	15,7	3.554.000,00	300.000,00	3.854.000,00	19/07/07
139	Marjohan	4.000.000	20/01/06	24	bln	22	131	143	155	167	189	15,7	3.666.000,00	420.000,00	4.086.000,00	20/01/08
140	Irwan	3.500.000	20/01/06	12	bln	12	143	155	167	179	191	15,9	3.500.000,00	192.500,00	3.692.500,00	20/01/07
141	Masril	4.000.000	23/01/06	18	bln	13	137	149	161	173	186	15,5	2.885.000,00	240.000,00	3.125.000,00	23/07/07
142	Zainul Hakim	4.000.000	23/01/06	24	bln	5	131	143	155	167	172	14,3	827.000,00	80.000,00	907.000,00	23/01/08
143	Sukri Harmia	4.000.000	24/01/06	24	bln	24	131	143	155	167	191	15,9	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	24/01/08
144	Yulius Syarif	7.000.000	02/02/06	36	bln	26	118	130	142	154	180	15,0	5.050.000,00	875.000,00	5.925.000,00	02/02/09
145	Nazril	5.000.000	25/01/06	24	bln	23	131	143	155	167	190	15,8	4.791.500,00	550.000,00	5.341.500,00	25/01/08
146	Anis Hayati	5.000.000	17/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	17/07/08
147	Handi Monalisa, ST	4.000.000	17/07/06	18	bln	11	131	143	155	167	178	14,8	2.439.000,00	200.000,00	2.639.000,00	17/01/08
148	Ida Mutia Farida	2.000.000	19/07/06	12	bln	6	137	149	161	173	179	14,9	998.000,00	80.000,00	1.078.000,00	19/07/07
149	Nurmi	3.000.000	20/07/06	12	bln	9	137	149	161	173	182	15,2	2.250.000,00	120.000,00	2.370.000,00	20/07/07
150	Mahyouddin	5.000.000	20/07/06	24	bln	24	125	137	149	161	185	15,4	5.000.000,00	575.000,00	5.575.000,00	20/07/08
151	M. Roem	3.000.000	21/07/06	24	bln	23	125	137	149	161	184	15,3	2.875.000,00	330.000,00	3.205.000,00	21/07/08
152	**Sawinar (LUNAS)**	3.000.000	24/07/06	24	bln	-	125	137	149	161	161	13,4	0,00	0,00	0,00	24/07/08
153	Adhinir	6.000.000	09/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	5.750.000,00	660.000,00	6.410.000,00	09/10/08

Lampiran 10b

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Realisasi Kredit	Realisasi	Jk. Wkt		Lama Tunggakan							Tunggakan 2024			Jatuh Tempo
							2018	2019	2020	2021						
						s/d jatuh tempo (Bln)	Jth tempo s/d Des 18 (Bln)	Jth tempo s/d Des 19 (Bln)	Jth tempo s/d Des 20 (Bln)	Jth tempo s/d Des 21 (Bln)	Jumlah					
											Bln	Thn	T. Pokok	Bunga	Total	
154	Yusmatati	5.000.000	11/10/06	24	bln	23	122	134	146	158	181	15,1	4.791.500,00	550.000,00	5.341.500,00	11/10/08
155	HM. Kaulan	10.000.000	11/10/06	24	bln	20	122	134	146	158	178	14,8	8.332.000,00	950.000,00	9.282.000,00	11/10/08
156	Taufik	9.000.000	20/02/07	30	bln	28	112	124	136	148	176	14,7	8.400.000,00	1.215.000,00	9.615.000,00	20/08/09
157	Syamsuardi	12.000.000	21/02/07	36	bln	23	106	118	130	142	165	13,8	7.732.000,00	1.980.000,00	9.712.000,00	21/02/10
158	Gusmalizar	5.000.000	23/07/07	24	bln	23	113	125	137	149	172	14,3	4.791.000,00	550.000,00	5.341.000,00	23/07/09
159	Syamsir Alam	3.000.000	20/09/07	18	bln	16	117	129	141	153	169	14,1	2.666.000,00	225.000,00	2.891.000,00	20/03/09
160	Maizul Husni, SH	3.000.000	20/09/07	24	bln	24	111	123	135	147	171	14,3	3.000.000,00	345.000,00	3.345.000,00	20/09/09
161	Arni Susilawati	3.000.000	21/09/07	18	bln	13	117	129	141	153	166	13,8	2.165.000,00	180.000,00	2.345.000,00	21/03/09
162	Ali Bakri	4.000.000	07/04/08	24	bln	24	104	116	128	140	164	13,7	4.000.000,00	460.000,00	4.460.000,00	07/04/10
163	Edi Candra (Meninggal)	5.500.000	09/01/09	36	bln	-	83	95	107	119	119	9,9	0,00	807.000,00	807.000,00	09/01/12
164	Faisal Tamin	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
165	Riko Henra	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
166	Irwan Candra	5.000.000	22/04/09	36	bln	35	80	92	104	116	151	12,6	4.861.000,00	850.000,00	5.711.000,00	22/04/12
167	A. Yamin	8.000.000	23/04/09	36	bln	36	80	92	104	116	152	12,7	8.000.000,00	1.400.000,00	9.400.000,00	23/04/12
168	Fitriwati	5.000.000	30/04/09	24	bln	18	92	104	116	128	146	12,2	3.714.000,00	425.000,00	4.139.000,00	30/04/11
169	Nurhaida	5.000.000	08/05/09	24	bln	22	91	103	115	127	149	12,4	4.582.000,00	525.000,00	5.107.000,00	08/05/11
170	Syafarudin	3.000.000	09/09/09	12	bln	12	99	111	123	135	147	12,3	3.000.000,00	165.000,00	3.165.000,00	09/09/10
	Total	**739.000.000**											**565.257.000,00**	**59.136.500,00**	**624.393.500,00**	

Lampiran 11

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Nilai (Rp)
1	2		3
1	**Mutasi Tahun 2003 s/d 2006**		7.100.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SPMU No. 156/PT/03 19 Desember 2003	100.000.000,00	
	SPMU No. 68/BT/2004 15 April 2004	2.000.000.000,00	
	SPMU No. 37/BT/PBY-2005 18 April 2005	3.000.000.000,00	
	SPMU No. 606/BT/PB-2006 13 Juli 2006	2.000.000.000,00	
2	**Mutasi Tahun 2007**		2.500.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 206/SP2D/LS/6/2007 12 Juni 2007	1.000.000.000,00	
	SP2D No. 2145/SP2D/LS/12/2007 28 Desember 2007	500.000.000,00	
	Penyertaan Modal Pembangunan Kantor Perwakilan Sumbar di Jakarta		
	SP2D No. 1350/SP2D/LS/12/2007 06 Desember 2007	1.000.000.000,00	
3	**Mutasi Tahun 2009**		2.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 2697/SP2D/LS/12/2009 23 Desember 2009	2.000.000,00	
4	**Mutasi Tahun 2010**		742.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 2043/SP2D/LS/12/2010 2 Desember 2010	742.000.000,00	
5	**Mutasi Tahun 2011**		1.479.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3424/SP2D/LS/12/2011 28 Desember 2011	1.479.000.000,00	
6	**Mutasi Tahun 2012**		5.008.899.000,00
	Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar		
	SP2D No. 2627/SP2D/LS/12/2012 7 Desember 2012	1.824.899.000,00	
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3276/SP2D/LS/12/2011 28 Desember 2012	3.184.000.000,00	
7	**Mutasi Tahun 2013**		5.582.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3456/SP2D/LS/12/2013 18 Desember 2013	5.582.000.000,00	
8	**Mutasi Tahun 2014**		5.111.000.000,00
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		
	SP2D No. 3272/SP2D/LS/12/2014 29 Desember 2014	5.111.000.000,00	
9	**Mutasi Tahun 2015**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		7.515.000.000,00
	SP2D No. 2012/SP2D/LS/10/2014 30 Oktober 2015	7.515.000.000,00	
10	**Mutasi Tahun 2017**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		11.183.000.000,00
	SP2D No. 2323/SP2D/LS/11/2017 tanggal 24 November 2017	11.183.000.000,00	
11	**Mutasi Tahun 2018**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		1.800.000.000,00
	SP2D No. 2867/SP2D/LS/12/2018 tanggal 06 Desember 21018	1.800.000.000,00	
12	**Mutasi Tahun 2020**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat		8.650.000.000,00
	SP2D No. 0063/SP2D/LS/02/2020 tanggal 11 Februari 2020	8.650.000.000,00	
13	**Mutasi Tahun 2022**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat		2.500.000.000,00
	SP2D No. 6443/SP2D/LS/11/2022 tanggal 22 November 2022	2.500.000.000,00	
14	**Mutasi Tahun 2024**		
	Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat		1.000.000.000,00
	SP2D Pembiayaan No.13.77/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 06 November 2024	1.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal		**60.172.899.000,00**

Jenis Penyertaan Modal	Nilai	Lembar Saham
a. Penyertaan Modal Bank Nagari	**57.348.000.000,00**	57.348,00
B. Penyertaan Modal Balairun	2.824.899.000,00	1.694,94
		1.129.959,60
Catatan : Penyertaan Modal disajikan sebesar nilai pembayaran oleh Pemerintah Kota Pariaman.		

Investasi Jangka Panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Lampiran 12

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024			Saldo 31 Desember 2024
			Mutasi (+) antar SKPD	Mutasi (-) antar SKPD	PENGHAPUSAN (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.632.720.250,00				3.632.720.250,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	630.315.200,00				630.315.200,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	2.885.848.999,00				2.885.848.999,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	594.034.000,00				594.034.000,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	349.629.250,00				349.629.250,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	105.600.000,00				105.600.000,00
7	SMP 1 PARIAMAN	5.000.000,00				5.000.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	80.000.000,00				80.000.000,00
9	SMP 3 PARIAMAN	133.800.000,00				133.800.000,00
10	SMP 4 PARIAMAN	16.550.000,00				16.550.000,00
11	SMP 5 PARIAMAN	21.775.000,00				21.775.000,00
12	SMP 6 PARIAMAN	20.770.750,00				20.770.750,00
13	SMP 7 PARIAMAN	256.800.000,00				256.800.000,00
14	SMP 8 PARIAMAN	299.852.400,00				299.852.400,00
15	SMP 9 PARIAMAN	150.000.000,00				150.000.000,00
16	DINAS KESEHATAN	507.869.000,00				507.869.000,00
17	PUSKESMAS NARAS	200.834.410,00				200.834.410,00
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	7.940.000,00	1.800.000,00			9.740.000,00
19	PUSKESMAS PAUH	39.000.000,00				39.000.000,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	-				-
21	PUKESMAS MARUNGGI	199.746.000,00				199.746.000,00
22	PUKESMAS AIR SANTOK	963.299.000,00		1.800.000,00		961.499.000,00
23	PUKESMAS SIKAPAK	1.435.000,00				1.435.000,00
24	RSUD KOTA PARIAMAN	2.644.660.500,00				2.644.660.500,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	54.134.614.025,65			18.630.000,00	54.115.984.025,65
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	8.064.152.183,00				8.064.152.183,00
27	KANTOR KESBANGPOL	22.560.000,00				22.560.000,00
28	DINAS PERHUBUNGAN	97.170.000,00				97.170.000,00
29	UPT.TERMINAL	1.551.938.000,00				1.551.938.000,00
30	DINAS PERINDAGKOP	1.825.724.000,00				1.825.724.000,00
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.392.253.852,60				5.392.253.852,60
32	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	4.808.764.000,00				4.808.764.000,00
33	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	403.860.000,00				403.860.000,00
34	UPT. PUSKESWAN & IB	637.200.000,00				637.200.000,00
35	UPT. BBI	1.237.320.000,00				1.237.320.000,00
36	BAGIAN PEMERINTAHAN	5.765.627.119,00				5.765.627.119,00
37	SEKRETARIAT DPRD	1.304.825.500,00				1.304.825.500,00
38	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	1.275.450.000,00				1.275.450.000,00
39	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	75.776.000,00				75.776.000,00
40	KELURAHAN PASIR	11.016.000,00				11.016.000,00
41	KELURAHAN PONDOK 2	32.800.000,00				32.800.000,00
42	KELURAHAN JALAN BARU	2.740.000,00				2.740.000,00
43	KELURAHAN JATI HILIR	4.864.000,00				4.864.000,00
44	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	9.828.000,00				9.828.000,00
45	KELURAHAN TARATAK	15.696.000,00				15.696.000,00
46	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	972.765.000,00				972.765.000,00
47	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	1.207.350.000,00				1.207.350.000,00
48	INSPEKTORAT	707.000.000,00				707.000.000,00
49	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	308.678.000,00				308.678.000,00
JUMLAH		**103.617.451.439,25**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**18.630.000,00**	**103.598.821.439,25**

Lampiran 13

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	koreksi +	Mutasi Tahun 2024										Utang	Saldo 31 desember 2024
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)		
				Belanja Modal	HIBAH	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	antar SKPD	antar SKPD	tidak dikapitalisasi	reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	koreksi kurang utang 2023	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.788.797.765,00		1.877.995.915,00			10.000.000,00		1.564.368.119,00	16.112.200,00				103.400.000,00	1.992.913.361,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	5.082.811.822,44	91.116.500,00			12.150.000,00	13.100.000,00	373.901.509,00		64.461.316,00		254.313.736,00			5.254.304.779,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	5.277.999.206,88				26.100.000,00		303.773.840,00		51.210.795,00		389.286.574,72			5.167.375.677,16
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	3.880.644.325,06				18.700.000,00		452.994.035,00		89.379.180,00	9.933.300,00	345.643.183,72			3.907.382.696,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	3.189.005.889,16				5.100.000,00		78.526.235,00		14.849.200,00		221.322.275,00			3.036.460.649,16
6	TK PARIAMAN SELATAN	50.292.000,00						59.410.000,00		3.111.000,00					106.591.000,00
	TK 01 KEC.TIMUR	43.887.000,00													43.887.000,00
	TK 01 KEC. UTARA	31.413.000,00													31.413.000,00
7	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	1.083.822.607,00						6.937.500,00							1.090.760.107,00
8	SMP 1 PARIAMAN	1.644.627.770,00				22.146.500,00		21.750.000,00				53.700.000,00			1.634.824.270,00
9	SMP 2 PARIAMAN	1.507.871.836,00						40.325.000,00		123.000,00		57.392.385,00			1.490.681.451,00
10	SMP 3 PARIAMAN	2.088.782.261,00				10.500.000,00		93.440.000,00				112.438.792,00			2.080.283.469,00
11	SMP 4 PARIAMAN	1.783.154.933,00						50.180.000,00		17.375.000,00					1.815.959.933,00
12	SMP 5 PARIAMAN	862.363.717,42				1.500.000,00		14.850.000,00							878.713.717,42
13	SMP 6 PARIAMAN	1.663.084.442,00						21.180.000,00		5.430.000,00					1.678.834.442,00
14	SMP 7 PARIAMAN	1.434.850.707,00						13.800.000,00		13.800.000,00					1.434.850.707,00
15	SMP 8 PARIAMAN	1.186.823.573,00						19.800.000,00							1.206.623.573,00
16	SMP 9 PARIAMAN	1.500.800.330,00						13.500.000,00							1.514.300.330,00
17	DINAS KESEHATAN	3.989.958.398,73		1.253.448.000,00				149.000.000,00	726.956.000,00						4.665.450.398,73
18	PUSKESMAS NARAS	4.233.431.722,34		64.228.515,00	150.000.000,00										4.447.660.237,34
19	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	3.529.246.969,00		129.642.000,00						4.925.000,00					3.653.963.969,00
20	PUSKESMAS PARIAMAN	4.974.188.572,00		173.816.500,00											5.148.005.072,00
	PUSKESMAS KURAI TAJI	5.062.133.380,30		70.997.707,00					138.458.251,00						4.994.672.836,30
22	PUSKESMAS MARUNGGI	3.945.968.195,33		90.000.000,00											4.035.968.195,33
23	PUSKESMAS air santok	4.163.836.183,00	14.500.000,00	121.262.792,00						46.029.002,00					4.253.569.973,00
24	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	4.651.877.150,00		139.038.322,00						34.999.322,00					4.755.916.150,00
25	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	27.608.176.415,76		3.418.953.652,00				138.458.251,00		1.874.994,00					31.163.713.324,76
26	UPT. INSTALASI FARMASI	994.075.519,00		-				726.956.000,00	149.000.000,00						1.572.031.519,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.774.428.877,00		64.305.600,00										24.800.000,00	3.813.934.477,00
28	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	4.109.230.178,95							339.350.000,00						3.769.880.178,95
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	7.608.757.633,00		1.551.780.000,00	24.500.000,00			374.350.000,00				1.687.023.200,00			7.872.364.433,00
30	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	512.842.900,00		17.123.500,00											529.966.400,00
31	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	6.118.706.772,00		-								286.902.600,00			5.831.804.172,00
32	KANTOR KESBANG POL	560.336.000,00		6.255.610,00						192.000,00					566.399.610,00
33	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	12.288.334.689,00		12.426.925,00						1.163.200,00					12.299.598.414,00
34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.306.514.376,00		14.652.000,00											5.321.166.376,00
35	DINAS SOSIAL	1.304.168.325,00		67.500.000,00						67.500.000,00					1.304.168.325,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	4.438.935.813,00	81.000.000,00	16.600.000,00			32.150.000,00								4.568.685.813,00

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	koreksi +	Mutasi Tahun 2024										Utang	Saldo 31 desember 2024
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)		
				Belanja Modal	HIBAH	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	antar SKPD	antar SKPD	tidak dikapitalisasi	reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	koreksi kurang utang 2023	
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.523.572.324,00		-											2.523.572.324,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.549.813.187,00													1.549.813.187,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	14.206.136.685,00		157.098.000,00											14.363.234.685,00
40	UPT. PARKIR	884.666.000,00													884.666.000,00
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.000.316.479,00		-											5.000.316.479,00
42	DINAS PERINDAGKOP	1.685.919.475,00										26.439.300,00			1.659.480.175,00
43	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	745.756.988,00		-											745.756.988,00
44	UPT. METROLOGI LEGAL	1.313.515.605,00		-											1.313.515.605,00
45	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.722.365.219,00		25.553.934,00						4.000.000,00					1.743.919.153,00
46	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.454.298.652,00		38.750.000,00						7.450.000,00		86.865.470,00			2.398.733.182,00
47	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.654.567.671,00		29.325.577,00											7.683.893.248,00
48	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.863.217.720,00		1.764.000,00						250.000,00					1.864.731.720,00
49	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	1.179.588.385,00		19.079.250,00								27.014.000,00			1.171.653.635,00
50	UPT. BALAI BENIH IKAN	441.354.050,00		-											441.354.050,00
51	BAGIAN PEMERINTAHAN	586.458.034,00													586.458.034,00
52	BAGIAN HUKUM DAN HAM	843.877.908,00						14.700.000,00							858.577.908,00
53	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	607.334.625,00						42.000.000,00							649.334.625,00
54	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	26.342.082.625,00		169.410.000,00					56.700.000,00	1.860.000,00			512.032.500,00	6.000.000,00	25.934.900.125,00
55	BAGIAN EKBANG	879.752.857,00													879.752.857,00
56	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	612.333.816,00		28.556.500,00											640.890.316,00
57	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	1.296.043.020,00		201.848.750,00											1.497.891.770,00
58	SEKRETARIAT DPRD	8.656.917.957,00		149.300.000,00		39.500.000,00								24.250.000,00	8.821.467.957,00
59	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	1.040.315.992,00		7.881.000,00											1.048.196.992,00
60	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.121.899.270,00													1.121.899.270,00
61	KELURAHAN PASIR	335.184.686,00		9.950.000,00											345.134.686,00
62	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	315.043.436,00		-											315.043.436,00
63	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	411.512.479,00		35.635.000,00			11.600.000,00			11.115.000,00					447.632.479,00
64	KELURAHAN PONDOK 2	349.581.437,00		9.000.000,00											358.581.437,00
65	KELURAHAN UJUNG BATUNG	427.141.359,00		-											427.141.359,00
66	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	425.147.186,00		-											425.147.186,00
67	KELURAHAN JALAN BARU	318.007.280,00		18.000.000,00											336.007.280,00
68	KELURAHAN KARAN AUR	242.461.572,00		22.998.000,00											265.459.572,00
69	KELURAHAN LOHONG	242.896.286,00		20.720.000,00											263.616.286,00
70	KRLURAHAN JALAN KERETA API	320.714.989,00		14.650.000,00											335.364.989,00
71	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	428.745.684,00		9.900.000,00											438.645.684,00
72	KELURAHAN KP.JAWA 1	364.350.391,00		16.050.000,00						10.000.000,00					370.400.391,00
73	KELURAHAN JATI HILIR	275.726.786,00		15.000.000,00											290.726.786,00
74	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	242.122.934,00		11.200.000,00					35.000.000,00						218.322.934,00
75	KELURAHAN KP JAWA 2	296.019.479,00		9.980.000,00											305.999.479,00
76	KELURAHAN TARATAK	327.933.063,00		2.000.000,00			2.822.100,00								332.755.163,00
77	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	965.225.924,00		-											965.225.924,00
78	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	931.760.774,00		8.200.000,00						1.200.000,00					938.760.774,00
79	INSPEKTORAT	2.153.046.599,00		-											2.153.046.599,00

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

NO	SOPD	Saldo Awal	koreksi +	Mutasi Tahun 2024										Utang	Saldo 31 desember 2024
				Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi +	Mutasi(+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)		
				Belanja Modal	HIBAH	Reklas salah rekening	Kapitalisasi Blj brg	antar SKPD	antar SKPD	tidak dikapitalisasi	reklas salah rekening	ke Aset lain-lain	Penghapusan	koreksi kurang utang 2023	
80	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.200.620.088,00		2.185.000,00						2.185.000,00					3.200.620.088,00
81	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	7.200.628.250,00		85.650.000,00						5.000.000,00					7.281.278.250,00
82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.232.350.765,00		20.200.000,00											2.252.550.765,00
JUMLAH		**250.494.507.245,37**	**186.616.500,00**	**10.229.912.049,00**	**174.500.000,00**	**135.696.500,00**	**69.672.100,00**	**3.009.832.370,00**	**3.009.832.370,00**	**475.595.209,00**	**9.933.300,00**	**3.548.341.516,44**	**512.032.500,00**	**158.450.000,00**	**256.586.551.868,93**

Lampiran 14

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - GEDUNG BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi Tahun 2024								Koreksi BPK	Saldo 31 desember 2024
					Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	terutang (-)		
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Belanja Modal	Reklas salah rekening	Belanja Barang &jasa	antar SKPD	antar SKPD	ke aset lain2	tidak dikapitalisasi		Kapitalisasi Barang dan Jasa	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	35.335.659.553,00			2.549.010.392,00		752.838.400,00		3.204.736.422,00			97.112.370,00		35.335.659.553,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	37.176.818.847,00						375.905.732,00					165.417.279,00	37.718.141.858,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	35.734.472.575,00						726.101.238,00					249.589.262,00	36.710.163.075,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	20.999.045.681,00						1.547.216.980,00					291.347.197,00	22.837.609.858,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	24.885.172.376,00											379.720.868,00	25.264.893.244,00
6	TK PARIAMAN SELATAN	241.263.047,00						173.379.148,00						414.642.195,00
	TK KEC. TIMUR	169.700.000,00												169.700.000,00
	TK KEC. UTARA	-												-
7	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	935.124.000,00												935.124.000,00
8	SMP 1 PARIAMAN	6.140.211.035,00												6.140.211.035,00
9	SMP 2 PARIAMAN	9.220.292.594,00						186.770.100,00						9.407.062.694,00
10	SMP 3 PARIAMAN	5.501.299.667,59												5.501.299.667,59
11	SMP 4 PARIAMAN	3.494.565.196,00												3.494.565.196,00
12	SMP 5 PARIAMAN	3.607.758.430,00						195.363.224,00						3.803.121.654,00
13	SMP 6 PARIAMAN	2.442.118.084,00												2.442.118.084,00
14	SMP 7 PARIAMAN	4.975.870.384,00												4.975.870.384,00
15	SMP 8 PARIAMAN	2.591.955.631,00												2.591.955.631,00
16	SMP 9 PARIAMAN	3.526.241.119,00												3.526.241.119,00
17	DINAS KESEHATAN	8.383.717.096,03			14.658.904.731,00		598.000.000,00					776.278.482,00		22.864.343.345,03
18	PUSKESMAS NARAS	5.859.613.971,00												5.859.613.971,00
19	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	4.742.164.527,00												4.742.164.527,00
20	PUSKESMAS PAUH	6.799.654.538,00												6.799.654.538,00
21	PUSKESMAS KURAI TAJI	7.059.749.684,00												7.059.749.684,00
22	PUSKESMAS MARUNGGI	4.049.596.310,00												4.049.596.310,00
23	PUSKESMAS AIR SANTOK	7.264.444.292,00												7.264.444.292,00
24	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	5.256.406.995,00												5.256.406.995,00
25	RSUD KOTA PARIAMAN	31.933.871.975,00	11.180.000,00		7.299.733.390,00									39.244.785.365,00
26	UPT. INSTALASI FARMASI	1.835.261.000,00												1.835.261.000,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	11.975.510.999,82			1.220.314.674,00				1.145.780.638,00		15.674.508,00	58.859.528,00		11.975.510.999,82
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	24.228.233.203,00			294.000.000,00	294.000.000,00								24.228.233.203,00
29	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	797.705.000,00						461.422.000,00						1.259.127.000,00
30	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	881.091.605,00												881.091.605,00

Lampiran 14

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi Tahun 2024								Koreksi BPK	Saldo 31 desember 2024
					Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	terutang (-)		
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Belanja Modal	Reklas salah rekening	Belanja Barang &jasa	antar SKPD	antar SKPD	ke aset lain2	tidak dikapitalisasi		Kapitalisasi Barang dan Jasa	
31	SAT POL PP dan PEMADAM	1.578.591.918,12								1.528.609.903,00				49.982.015,12
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.286.736.165,00												8.286.736.165,00
33	DINAS SOSIAL	-												-
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	3.291.592.771,00												3.291.592.771,00
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	78.967.000,00												78.967.000,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.352.368.000,00												2.352.368.000,00
37	DINAS PERHUBUNGAN	2.955.848.800,00												2.955.848.800,00
38	UPT. PARKIR	1.614.569.120,00												1.614.569.120,00
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.798.000,00												29.798.000,00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9.327.259.696,00						450.984.773,00						9.778.244.469,00
40	DINAS PERINDAGKOP	2.786.677.525,00												2.786.677.525,00
41	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	518.975.000,00												518.975.000,00
42	UPT. METROLOGI LEGAL	997.276.030,00												997.276.030,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	375.508.000,00												375.508.000,00
44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	66.624.752.843,62			772.069.624,00				450.984.773,00	217.420.000,00				66.728.417.694,62
45	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	4.863.580.910,00												4.863.580.910,00
	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	2.774.524.678,00		247.567.000,00										2.526.957.678,00
47	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	1.386.304.116,00												1.386.304.116,00
48	UPT. BALAI BENIH IKAN	7.620.165.193,00												7.620.165.193,00
49	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	47.750.782.083,80						98.954.000,00						47.849.736.083,80
51	SEKRETARIAT DPRD	12.910.682.259,00			378.264.000,00	39.500.000,00		388.207.800,00						13.637.654.059,00
52	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	4.157.773.335,86												4.157.773.335,86
53	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	2.962.701.500,00												2.962.701.500,00
54	KELURAHAN PASIR	69.958.000,00												69.958.000,00
55	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	394.525.000,00												394.525.000,00
56	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	-												-
57	KELURAHAN PONDOK 2	17.492.500,00												17.492.500,00
58	KELURAHAN UJUNG BATUNG	619.097.000,00												619.097.000,00
59	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	19.990.000,00												19.990.000,00
60	KELURAHAN JALAN BARU	731.313.500,00												731.313.500,00
62	KELURAHAN LOHONG	79.969.784,00												79.969.784,00
63	KRLURAHAN JALAN KERETA API	778.952.000,00												778.952.000,00
64	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	790.639.000,00												790.639.000,00
66	KELURAHAN JATI HILIR	88.315.500,00												88.315.500,00

Lampiran 14

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Koreksi		Mutasi Tahun 2024								Koreksi BPK	Saldo 31 desember 2024
					Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (+)	Mutasi (+)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	Mutasi (-)	terutang (-)		
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Belanja Modal	Reklas salah rekening	Belanja Barang &jasa	antar SKPD	antar SKPD	ke aset lain2	tidak dikapitalisasi		Kapitalisasi Barang dan Jasa	
67	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	432.230.000,00												432.230.000,00
68	KELURAHAN KP JAWA 2	119.975.000,00												119.975.000,00
70	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	3.022.743.000,00												3.022.743.000,00
71	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	3.117.159.614,00						197.196.838,00						3.314.356.452,00
72	INSPEKTORAT	3.161.685.136,00												3.161.685.136,00
73	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.205.242.787,00												3.205.242.787,00
74	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	6.924.273.735,00												6.924.273.735,00
	JUMLAH	**526.863.585.915,84**	**11.180.000,00**	**247.567.000,00**	**27.172.296.811,00**	**333.500.000,00**	**1.350.838.400,00**	**4.801.501.833,00**	**4.801.501.833,00**	**1.746.029.903,00**	**15.674.508,00**	**932.250.380,00**	**1.086.074.606,00**	**553.208.953.941,84**

Lampiran 15

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Belanja Modal Nilai (Rp)	KDP TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD KURANG Nilai (Rp)	KDP KURANG Nilai (Rp)	REKLAS SALAH REKENING TAMBAH Nilai (Rp)	Tidak Dikapitalisasi Kurang Nilai (Rp)	Aset Lain-Lain Kurang (Rp)	Utang (-) (Rp)	Variabel pendukung (Rp)	Saldo 31 DESEMBER 2024 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.900.000,00											7.900.000,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	7.000.000,00											7.000.000,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	35.611.650,00											35.611.650,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	4.000.000,00											4.000.000,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	12.600.000,00											12.600.000,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	6.000.000,00											6.000.000,00
7	SMP 1 PARIAMAN	34.999.910,00											34.999.910,00
8	SMP 2 PARIAMAN	2.500.000,00											2.500.000,00
9	SMP 3 PARIAMAN	0,00											0,00
10	SMP 4 PARIAMAN	38.145.000,00											38.145.000,00
11	SMP 5 PARIAMAN	0,00											0,00
12	SMP 6 PARIAMAN	0,00											0,00
13	SMP 7 PARIAMAN	4.000.000,00											4.000.000,00
14	SMP 8 PARIAMAN	13.000.000,00											13.000.000,00
15	SMP 9 PARIAMAN	22.750.000,00											22.750.000,00
16	DINAS KESEHATAN	149.956.000,00	398.500.000,00										548.456.000,00
17	PUSKESMAS NARAS	11.961.500,00											11.961.500,00
18	PUSKESMAS PAUH	16.173.000,00											16.173.000,00
19	PUSKESMAS KURAI TAJI	87.353.000,00											87.353.000,00
20	PUSKESMAS MARUNGGI	10.918.880,00											10.918.880,00
21	PUSKESMAS AIR SANTOK	1.700.000,00											1.700.000,00
22	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	13.730.000,00											13.730.000,00
23	RSUD KOTA PARIAMAN	339.873.022,00											339.873.022,00
24	UPT. INSTALASI FARMASI	47.667.000,00											47.667.000,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	716.510.803.778,36	15.974.441.249,00	79.664.000,00		837.487.890,00	79.952.000,00		149.571.000,00		2.633.473.159,00	292.586.500,00	729.157.011.478,36
26	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	19.492.004.341,00											19.492.004.341,00
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	118.924.441.871,72	3.600.071.550,00					294.000.000,00					122.818.513.421,72
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	42.006.507.881,00			837.487.890,00								42.843.995.771,00
29	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	40.000.000,00											40.000.000,00
30	KANTOR KESBANG POL	5.375.000,00											5.375.000,00
31	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	675.000,00											675.000,00

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Belanja Modal Nilai (Rp)	KDP TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD KURANG Nilai (Rp)	KDP KURANG Nilai (Rp)	REKLAS SALAH REKENING TAMBAH Nilai (Rp)	Tidak Dikapitalisasi Kurang Nilai (Rp)	Aset Lain-Lain Kurang (Rp)	Utang (-) (Rp)	Variabel pendukung (Rp)	Saldo 31 DESEMBER 2024 (Rp)
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.931.510,00											200.931.510,00
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	40.375.700,00											40.375.700,00
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00											0,00
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00											0,00
36	DINAS PERHUBUNGAN	2.473.226.000,00											2.473.226.000,00
37	UPT.TERMINAL	895.471.000,00											895.471.000,00
38	UPT PARKIR	0,00											0,00
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.435.000,00											36.435.000,00
40	DINAS PERINDAGKOP	391.825.000,00								1.000.000,00			390.825.000,00
41	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	0,00											0,00
42	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5.664.500,00											5.664.500,00
43	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	597.745.475,00			682.250.000,00								1.279.995.475,00
44	UPT. PULAU ANGSO	1.455.658.659,80											1.455.658.659,80
45	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	1.500.572.800,00				682.250.000,00							818.322.800,00
46	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	7.173.000,00											7.173.000,00
47	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	70.260.000,00											70.260.000,00
48	UPT. BALAI BENIH IKAN	309.785.000,00											309.785.000,00
49	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1.215.581.005,16											1.215.581.005,16
50	SEKRETARIAT DPRD	207.186.013,00											207.186.013,00
51	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	57.534.500,00											57.534.500,00
52	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	61.205.000,00											61.205.000,00
53	KELURAHAN PASIR	0,00											0,00
54	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	40.088.300,00											40.088.300,00
55	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	0,00											0,00
56	KELURAHAN PONDOK 2	119.583.300,00											119.583.300,00
57	KELURAHAN UJUNG BATUNG	0,00											0,00
58	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	0,00											0,00
59	KELURAHAN JALAN BARU	78.710.764,00											78.710.764,00
60	KELURAHAN KARAN AUR	0,00											0,00
61	KELURAHAN LOHONG	0,00											0,00

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Belanja Modal Nilai (Rp)	KDP TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD TAMBAH Nilai (Rp)	MUTASI ANTAR SKPD KURANG Nilai (Rp)	KDP KURANG Nilai (Rp)	REKLAS SALAH REKENING TAMBAH Nilai (Rp)	Tidak Dikapitalisasi Kurang Nilai (Rp)	Aset Lain-Lain Kurang (Rp)	Utang (-) (Rp)	Variabel pendukung (Rp)	Saldo 31 DESEMBER 2024 (Rp)
62	KRLURAHAN JALAN KERETA API	49.724.000,00											49.724.000,00
63	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	0,00											0,00
64	KELURAHAN KP.JAWA 1	0,00											0,00
65	KELURAHAN JATI HILIR	102.844.900,00											102.844.900,00
66	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	0,00											0,00
67	KELURAHAN KP JAWA 2	69.097.000,00											69.097.000,00
68	KELURAHAN TARATAK	192.496.000,00											192.496.000,00
69	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	244.899.650,00											244.899.650,00
70	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	67.416.200,00											67.416.200,00
71	INSPEKTORAT	181.049.625,00											181.049.625,00
72	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	121.409.500,00											121.409.500,00
73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	149.777.000,00											149.777.000,00
	TOTAL	**908.791.373.236,04**	**19.973.012.799,00**	**79.664.000,00**	**1.519.737.890,00**	**1.519.737.890,00**	**79.952.000,00**	**294.000.000,00**	**149.571.000,00**	**1.000.000,00**	**2.633.473.159,00**	**292.586.500,00**	**926.566.640.376,04**

Lampiran 16

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 30 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024							Saldo 31 Desember 2024
			TAMBAH	TAMBAH	KURANG	KURANG	TAMBAH	KURANG	KURANG	
			Belanja Modal	Mutasi antar SKPD	Mutasi antar SKPD	Reklas Salah Rekening	Reklas Salah Rekening	Tidak Dikapitalisasi	Mutasi ke aset lain-lain	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	1.377.333.550,00		1.290.117.900,00			87.215.650		-
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	3.083.093.697,55		201.879.100,00		12.150.000,00		4.609.000,00	129.390.521,00	3.138.823.276,55
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	3.793.143.078,00		267.119.400,00		26.100.000,00		1.750.000,00	160.224.410,00	3.872.188.068,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	2.697.468.409,01		180.870.300,00		18.700.000,00	9.933.300,00		233.054.390,00	2.636.517.619,01
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	2.239.312.188,00		131.584.800,00		5.100.000,00		510.000,00	6.547.037	2.358.739.951,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	4.399.500,00								4.399.500,00
7	SMP 1 PARIAMAN	901.443.289,00		125.980.200,00		22.146.500,00				1.005.276.989,00
8	SMP 2 PARIAMAN	986.935.299,00		78.542.200,00					29.809.647,00	1.035.667.852,00
9	SMP 3 PARIAMAN	965.165.613,00		90.943.000,00		10.500.000,00				1.045.608.613,00
10	SMP 4 PARIAMAN	742.758.633,00		45.219.100,00						787.977.733,00
11	SMP 5 PARIAMAN	560.619.358,00		53.652.800,00		1.500.000,00				612.772.158,00
12	SMP 6 PARIAMAN	485.537.873,00		35.947.300,00						521.485.173,00
13	SMP 7 PARIAMAN	988.010.156,00		38.448.400,00						1.026.458.556,00
14	SMP 8 PARIAMAN	286.446.710,00		25.381.300,00						311.828.010,00
15	SMP 9 PARIAMAN	642.838.793,00		14.550.000,00						657.388.793,00
16	DINAS KESEHATAN	11.532.060,00								11.532.060,00
17	PUKESMAS NARAS	449.600,00								449.600,00
18	PUKESMAS PADUSUNAN	-								-
19	RSUD KOTA PARIAMAN	2.282.000,00								2.282.000,00
20	UPT. INSTALASI FARMASI	2.776.500,00								2.776.500,00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	59.044.540.604,31								59.044.540.604,31
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	966.020.725,39								966.020.725,39
23	KANTOR KESBANG POL	9.855.417,30								9.855.417,30
24	KANTOR SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	3.159.003,00								3.159.003,00
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53.520.900,00								53.520.900,00
26	DINAS SOSIAL	4.778.500,00								4.778.500,00
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	16.010.000,00								16.010.000,00
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.407.400,00								15.407.400,00
29	DINAS PERHUBUNGAN	3.014.000,00								3.014.000,00

Lampiran 16

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi Tahun 2024							Saldo 31 Desember 2024
			TAMBAH	TAMBAH	KURANG	KURANG	TAMBAH	KURANG	KURANG	
			Belanja Modal	Mutasi antar SKPD	Mutasi antar SKPD	Reklas Salah Rekening	Reklas Salah Rekening	Tidak Dikapitalisasi	Mutasi ke aset lain-lain	
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.000.000,00								20.000.000,00
31	DINAS PERINDAGKOP	9.656.900,00								9.656.900,00
32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	60.060.680,00								60.060.680,00
33	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.153.286.667,00							4.626.500	1.148.660.167,00
34	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	509.000,00								509.000,00
35	UPT. BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PARIAMAN	14.948.800,00								14.948.800,00
36	BAGIAN HUKUM DAN HAM	20.224.000,00								20.224.000,00
37	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	33.908.000,00								33.908.000,00
38	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.500.000,00								12.500.000,00
39	BAGIAN PERPUSTAKAAN & ARSIP	331.339.158,00	15.129.000,00					600.000,00		345.868.158,00
40	SEKRETARIAT DPRD	140.851.900,00								140.851.900,00
41	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	14.113.000,00								14.113.000,00
42	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	490.000,00								490.000,00
43	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	25.740.000,00								25.740.000,00
44	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	3.744.920,00								3.744.920,00
45	INSPEKTORAT	41.176.850								41.176.850,00
46	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	481.514.100,00								481.514.100,00
TOTAL		**80.874.583.281,56**	**1.392.462.550,00**	**1.290.117.900,00**	**1.290.117.900,00**	**96.196.500,00**	**9.933.300,00**	**94.684.650,00**	**563.652.505,00**	**81.522.445.476,56**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Tahun Perolehan		Mutasi 2024		Saldo Akhir
				koreksi (-)	Debet	Kredit	
1	2	3	4		5	6	8
1	**DINAS KESEHATAN**						
a	**Rumah Sakit Sadikin**	-					-
3	Pemby. BM Pagar (Perenc.Pemb.Pagar Isolasi RS) 80%xRp.13.975.000=Rp. 11.180.000 kpd CV. Jasuma kons. dgn SPK no. 026/SPK/Pernc.pagar/PPK-RSUD dr sadikin/VI/2021 utk upy penanganan covid-19 tgl 14 juni 2021 pd keg. penye. faskes UKM &UKP sub keg. Pemb. RS	11.180.000,00	2021	11.180.000,00			-
	Sub Jumlah	**11.180.000,00**		**11.180.000,00**	**-**	**-**	**-**
2	**DINAS PEKERJAAN UMUM**	**-**			**-**	**-**	**-**
1	pernc. Pembangunan 3 buah Simpang Kecamatan Pariaman Selatan	44.367.000,00	2011				44.367.000,00
2	Perencanaan tratoar kt. Kaciak-simp. Apar	49.531.000,00	2014				49.531.000,00
3	Pern. Jl. 2 jalur lapai-jati	49.567.000,00	2014				49.567.000,00
4	pern. Jembatan penangkaran penyu	71.410.000,00	2014				71.410.000,00
5	Pern gerbang batas kota	135.300.000,00	2014				135.300.000,00
6	perencanaan rumah jabatan wakil ketua DPRD	41.775.000,00	2015				41.775.000,00
7	Pern,. Gapura Pantai Kata	13.832.000,00	2015				13.832.000,00
8	Pek. Perencanaan Ruang serbaguna kantor Camat Parut 80 %	39.832.000,00	2016				39.832.000,00
9	Pekj Perencanaan DED Mesjid Terapung Tujuan Wisata 80%	416.416.700,00	2016				416.416.700,00
10	Pek.Perenc.Pemb.Gdg.Kantr Kesbangpol 80%	67.623.600,00	2016				67.623.600,00
11	Pek.perenc.Gdg.Serbaguna Kota Pariaman (Ex GOR Sebelah RM. Pincalang) 80%	228.000.000,00	2016				228.000.000,00
12	Pek.Perenc.Pemb.Ktr.UPTD Pemadam Kebakaran 80%	39.684.000,00	2016				39.684.000,00
13	Pek. perencanaan Pemb. Kantor UPTD SKB 80 %	39.392.000,00	2016				39.392.000,00
14	Pek.Perenc.penataan Kawasan Pulau Tangah 80 %	39.816.000,00	2016				39.816.000,00
15	Pek.Perenc.Taman Pantai Manggung 80%	38.894.400,00	2016				38.894.400,00
16	Pek. Pemb. Perencanaan Jalan Lingkar Utara, Selatan dan Timur 80%	390.368.000,00	2016				390.368.000,00
17	Pek.Perenc.jalan Sp.Sianik-Sp.Tugu Tabuik 80%	27.840.000,00	2016				27.840.000,00
18	Pek.Perenc.Talao oleh CV. DESICON 80%	39.712.000,00	2016				39.712.000,00
19	Perencanaan Trotoar Simp.SDN 08 Toboh Palabah-Simp.Lapangan Futsal Lambang (2,858 Km) oleh CV. PARADES KARYA CONSULTANT , Kontrak Rp.195.162.000,-	156.129.600,00	2017				156.129.600,00
20	Perencanaan Penataan Kawasan Pulau Tangah TA. 2016 oleh CV. DESICON , Kontrak Rp.49.770.000,	9.954.000,00	2017				9.954.000,00
21	Penyusunan Dokumen Lingkungan Amdal Mesjid Terapung oleh CV. GELAR BUANA SEMESTA, Kontrak Rp.770.220.000,-	231.066.000,00	2017				231.066.000,00
22	Pembangunan Sarana Dan Parasarana Wisata Pulau Tangah oleh CV. PUTRA IDOLA, Kontrak Rp.730.000.000,-	593.198.000,00	2017				593.198.000,00
23	Perencanaan Kantor Pelayanan Bersama Kp.Pondok oleh CV. ARTERINDO PRATAMA, Kontrak Rp.248.253.000,	198.602.400,00	2017				198.602.400,00
24	Perencanaan Pembangunan Gedung P2TP2A Forum Anak & KNPI oleh CV. DESICON, Kontrak Rp.49.800.000,-	39.840.000,00	2017				39.840.000,00
25	Penyusuan Amdal Kawasan By Pass Kp. Gadang oleh PT. TEISAR CIPTA SARANA , Kontrak Rp.720.175.000	216.052.500,00	2017				216.052.500,00
26	.Perenc.Trotoar Sp.Kp.Pondok-Sp.pauh oleh CV. Parades Karya Consult Rp.49.852.000	39.881.600,00	2018				39.881.600,00
27	Peningkt.Trotoar Sp.Kp.Pondok-Sp.Pauh(750M) oleh PT.CKPS Rp.6.897.673.000,-	5.715.291.456,00	2018				5.715.291.456,00
28	Perenc.Trotoar (Ruas Sp.Kp.Cino-Sp.STIE Gguk-Sp.Sianik-Sp.IV RSUD oleh CV.DIRGA JAYA INDO Rp.82.141.000,-	65.712.800,00	2018				65.712.800,00
29	Pembangunan Mesjid Terapung oleh PT.Bukit Intan Enginnering	4.258.793.400,00	2018				4.258.793.400,00
30	Pek. Montoring& Pelaporan Dok. Lingkungan (RKL-RPL) Mesjid Terapung oleh CV. DELTA ARSITEKTUR	14.901.000,00	2018				14.901.000,00
31	Pek. Perenc.Pemb.Posko Terpadu Pantai Gandoriah oleh CV. 2R KONSULTANT Rp.14.480.000,-	11.584.000,00	2018				11.584.000,00
32	PEMBANGUNAN MESJID TERAPUNG TAHAP 1 TAHUN 2018 OLEH PT. BUKIT INTAN ENGINEERING Sisa Kontrak Tahun 2018 RP. 17.035.173.600,- Termin 100%	17.035.173.600,00	2019				17.035.173.600,00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Tahun Perolehan		Mutasi 2024		Saldo Akhir
				koreksi (-)	Debet	Kredit	
1	2	3	4		5	6	8
33	PEMBAYARAN SISA TAHUN 2018 PEK. MONITORING & PELAPORAN DOK. LINGKUNGAN (RKL-RPL) OLEH CV. DELTA ARSITEKTUR Termin 100%	34.769.000,00	2019				34.769.000,00
34	Pembangunan Mesjid TERAPUNG Tahap 2 oleh PT. BUKIT INTAN ENGINEERING Nilai Kontrak/ Addendum Rp 11.470.000.000,-Termin 100%	11.495.400.000,00	2019				11.495.400.000,00
35	Pengawasan Pembangunan Mesjid Terapung Tahap 2 Oleh PT. CINDERALAS KARSA PADUTAMA Nilai Kontrak Rp.332.700.500, Termin Akhir 100%	336.300.500,00	2019				336.300.500,00
36	DED Islamic Centre di Kawasan Mesjid Terapung oleh CV. DESICON Nilai Kontrak Rp.174.867.000,- Termin Akhir 30%	56.710.100,00	2019				56.710.100,00
37	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Perencanaan Waterfront City Batang Piaman (Jbt Muaro- Jbt.Pauh) & Sepadan Bt.Mangor Pasir Sunur oleh CV. DESICON Nilai Kontrak Rp.89.457.500,- Termin Akhir 80%	72.141.000,00	2019				72.141.000,00
38	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pek. DED Pariaman Waterront City Pantai Pauh oleh CV. DESICON Nilai Kontrak Rp.98.450.000,- Termin Akhir 80%	79.335.000,00	2019				79.335.000,00
39	Perencanaan Pembangunan Restoran & Hotel oleh PT. YASA KREASINDO CEMERLANG Termin Akhir 80% Nilai Kontrak Rp.99.209.000,-	79.942.200,00	2019				79.942.200,00
40	Perencanaan Rehab Balaikota Pariaman Oleh CV.BIMIGIDE CONSULTANG ENGINEERS Nilai Kontrak Rp.39.330.000 Termin 80%	32.789.000,00	2019				32.789.000,00
41	DED Youth Center oleh CV. ARTERINDO PRATAMA Termin 80%	265.578.000,00	2019				265.578.000,00
42	Perencanaan Kolam Renang GOR Sutan Rajo Bujang. Karan Aur oleh CV.DESICON Nilai Kontrak Rp.99.466.500,- Termin 80 %	80.523.200,00	2019				80.523.200,00
	KDP JIJ 2019						
1	Percanaan Normalisasi & Pendestrian Bt. Pampan oleh CV. NUGRAHA CHAKTI CONSULTANT Nilai Kontrak Rp. 84.579.000,- Termin 80%	68.238.200,00	2019				68.238.200,00
2	Perencanaan Pengamanan Tebing Sungai Batang Manggung oleh CV. JAYA PERMAI CONSULTANT Nilai Kontrak Rp 92.812.000,- Termin 80%	74.824.600,00	2019				74.824.600,00
1	KDP JIJ 2020						
1	Termin 80% Perencanaan 4 Sp(Sampan,SpIV Parik,Sp.IV Lambang,Air Santok) oleh PT.MUTIGUNA ENGINEERING KONSULTAN	79.486.000,00	2020				79.486.000,00
2	Termin 80% .Perencanaan Trotoar Sp.IV Kp.Baru-Sp.IV.Pasar Hilalang oleh CV.PARADES KARYA CONSULTAN	79.393.600,00	2020				79.393.600,00
3	Termin 80% Perencanaan Rehab Trotoar oleh CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT 2020	59.622.000,00	2020				59.622.000,00
4	Termin 80% Perencanaan Rekonstruksi Jalan By Pass-Sp.Apar oleh CV. PARADES KARYA CONSULTANT	79.996.000,00	2020				79.996.000,00
	Termin 80% Perncanaan Jembatan Pondok Amar oleh CV. DESICON	79.645.120,00	2020				79.645.120,00
5	Termin 80% Perencanaan Jembatan tahun 2021 oleh CV. GEO ENGENEERING CONSULTANT	79.976.000,00	2020				79.976.000,00
6	Termin 80% Perencanaan Jembatan Pantai Kata oleh CV. GEO ENGENEERING CONSULTANT	79.976.000,00	2020				79.976.000,00
7	Perenc.Normalisasi Sungai Hulu Sikijang oleh CV. DESICON Kontrak Rp.96.492.000,-	77.393.600,00	2020				77.393.600,00
8	Pembayaran termin 80%xRp.99.761.260,-=Rp.79.809.008,- Keg.Perencanaan Pemb.Jembatan Pek.Perencanaan Jembatan Cubadak Air oleh CV. HUMAIRAH ENGINEERING CONSULTANT SPKNo.11/SPK-PRC/DPUPR/BM/2020 tgl.19/11/2020	79.809.008,00	2020				79.809.008,00
9	Pby.Termin 80%xRp.99.745.000,-=Rp.79.796.000,- Keg.Perenc.Pemb.Jl.Pek.Perencanaan Pemb.Jl.2021 oleh CV. PARADES KARYA CONSULTANT SPKNo.16/SPK.PRC/DPUPR.BM/2020 tgl.20/11/2020	79.796.000,00	2020				79.796.000,00
10	Pembayaran termin 80%xRp.99.580.000,-=Rp.79.664.000,- Keg.Perencanaan Pemb.jalan Pek.Perncanaan jalan 2 Paket oleh PT. TARU NUSANTARA SPKno.10/SPK.PRC/DPUPR.BM/DPUPR/2020 tgl.19/11/2020	79.664.000,00	2020			79.664.000,00	-
11	Pembayaran termin 80%xRp.69.880.000,-=Rp.55.904.000,- Keg.Perencanaan Pemb.Jembatan Pek.Perncanaan Rhb.Jembatan Batang Jirak Pantai Kata oleh CV. PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTANT SPKno.12/SPK.PRC/DPUPR.BM/DPUPR/2020 tgl.20/11/2020	55.904.000,00	2020				55.904.000,00
2	KDP 2020 Bangunan						
1	PEK.PERENCANAAN KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR OLEH CV, ARTERINDO PRATAMA Kontrak RP. 94.943.067,-	76.154.454,00	2020				76.154.454,00
2	Pek.Perencanaan RTH Keluarga Pantai Cermin Oleh CV. DIRGA JAYA INDO Kontrak Rp. 74.834.100,-	60.067.280,00	2020				60.067.280,00

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Tahun Perolehan		Mutasi 2024		Saldo Akhir
				koreksi (-)	Debet	Kredit	
1	2	3	4		5	6	8
3	Perenc. RTH Sepadan Sungai batang Mangor oleh PT. SYNPRA ENGINEERING CONSULTAN Kontrak Rp.794.217.600,	638.644.080,00	2020				638.644.080,00
4	Pk.Pemb.Akses Jl.Menuju Mesjid terapung oleh CV.MALIK TAQY Kontrak Rp.199.903.380,-	200.503.380,00	2020				200.503.380,00
5	Pek.Perncanaan Water Front City Wisata Talao Manggung oleh CV. DESICON Kontrak Rp.99.738.100,-	79.990.480,00	2020				79.990.480,00
6	Pek.Perencanaan Rehab Gor Sutan Radjo Bujang Kontrak Rp.49.085.300,-	39.468.240,00	2020				39.468.240,00
7	Pek. Perencanaan Lanjutan Pembangunan Water Front City Talao Pauh Sisi Belakang MTSN 1 Pariaman CV. JASUMA KONSULTAN dg Nilai Kontrak Rp.99.122.000	79.297.600,00	2021				79.297.600,00
8	Pek. Perencanaan Lapangan Merdeka oleh CV.DESICON Nilai Kontrak Rp. 99.426.000,-	79.540.800,00	2021				79.540.800,00
9	Pemb Jln 3 Ruas Paket 2 yg dilaks CV. TAMAN KARYA MANGGALA dg Kontrak Rp2.851.740.614,76 TM 76,32%		2021				-
10	Pembayaran Termin 80%xRp.49.636.400,- =Rp.39.709.120,-Keg.Pemb.Gedung Kantor Pek.Perenc.Pemb.Kantor Koramil Kota Pariaman oleh CV. CILCLE ENGINEERING SPK.08/SPK/PRC.TRPB/DPURP/2020 tgl.27/11/2020	39.709.120,00	2020				39.709.120,00
							-
12	Pek.Perencanaan Rehab Berat Gedung Nasional (Eks. STIE SB) oleh CV NIDIANRA JAYA KONSULTAN Nilai Kontrak Rp. 98.906.550 (80%)	79.125.240,00	2022				79.125.240,00
13	Pek. Perencanaan Rehab Kolam Renang & Lapangan Bola Ex. Rawang oleh PT. MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN Nilai Kontrak Rp. 48.730.000 (80%)	38.984.000,00	2022				38.984.000,00
14	Pek.Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pariwisata oleh PT.MULTI KARYA INTERPLAN KONSULTAN Nilai Kontrak Rp.97.493.631 (80%)	77.994.905,00	2022				77.994.905,00
15	Perencanaan Jalan 2022 oleh CV. PARADES KARYA CONSULTANT Nilai Kontrak Rp 99.730.000 (80%)	79.784.000,00	2022				79.784.000,00
							-
							-
18	Pek. Prc Perorangan Talao Manggung (Bawah Box Culvert Manggung) oleh ERYANTO RAY, ST Nilai Kontrak 24.660.000 termin 80%	19.728.000,00	2022				19.728.000,00
19	Pek Penyesuaian Rab Arsitektur dan Penyesuaian Penggunaan Bahan Bangunan pada Gambar Kerja Pembangunan Mesjid Terapung SPK No: SPK No:03/SPK.JKP/PRAMT.TRPB/DPUPRP.PRM-2023 tgl 17/04/2023 oleh 'Ir. YOVAN SYARIF, IAI Nilai Kontrak Rp. 49.810.000	39.848.000,00	2023				39.848.000,00
	Pek. Review Desain Struktur Bangunan Mesjid Terapung Kota Pariaman MOU LPPM UNAND SPK No:'02/SPK-KJ/MT-TRPB/DPU PRP.PRM - 2023 Tgl 05/12/2023 oleh LPPM UNAND Nilai Kontrak Rp. 149.850.000	**149.850.000,00**	2023				149.850.000,00
	Perencanaan Jalan DAK 2025 Tm 80%, CV. D'XTRIE Consultant kontrak 99.580.000 SPK no. 21/SPK.BMJK/DPUPRP.PRM/2024 tgl 11 nov 2024		2024		79.952.000,00		79.952.000,00
	Sub Jumlah	**45.725.442.763,00**			**79.952.000,00**	**79.664.000,00**	**45.725.730.763,00**
3	**DINAS PERKIM LH**						
1	Pek. Perenc Pengaspalan Jl Dsn Subarang Pdg Ds Cimparuh	14.255.200,00					14.255.200,00
2	Perenc Ruas Jalan Lingkung di Kec. Pariaman Utara	32.743.200,00	2018				32.743.200,00
3	Perenc Ruas Jalan Lingkung di Kec. Pariaman Timur	21.747.200,00	2018				21.747.200,00
4	Perenc Ruas Jalan Lingkung di Kec. Pariaman Selatan	11.524.400,00	2018				11.524.400,00
5	Perenc Pemb Jalan Lingkung Kel. Jawi-Jawi I / Jawi-Jawi II	8.400.000,00	2018				8.400.000,00
6	Perenc Pemb Jalan Lingkung di Desa Ampalu - Desa Apar	8.800.000,00	2018				8.800.000,00
7	Perenc Ruas Jalan Lingkung di Kec. Pariaman Tengah	49.915.200,00	2018				49.915.200,00
8	Perenc Pemb Jalan Lingkung Kel. Alai Gelombang	7.200.000,00	2018				7.200.000,00
9	Perenc Pemb Darinase 2019 Kec. Pariaman Selatan	13.960.000,00	2018				13.960.000,00
10	Perenc Pemb Darinase 2019 Kec. Pariaman Timur	34.872.000,00	2018				34.872.000,00
11	Perenc Pemb Darinase 2019 Kec. Pariaman Tengah	27.816.000,00	2018				27.816.000,00
12	Perenc Pemb Drainase 2019 Kec. Pariaman Utara	44.355.200,00	2018				44.355.200,00
13	Peren. Jalan lingkung	12.000.000,00	2020				12.000.000,00
14	pemb. Dokumen perenc. Drainase	11.520.000,00	2020				11.520.000,00
	Sub Jumlah	**299.108.400,00**					**299.108.400,00**

Lampiran 17

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Tahun Perolehan		Mutasi 2024		Saldo Akhir
				koreksi (-)	Debet	Kredit	
1	2	3	4		5	6	8
a	**UPT air bersih**						
1	perenc. Jaringan air bersih 2021	39.556.000,00					**39.556.000,00**
2	SPAM Koto marapak-talago sariak-batang kabung						
	Pby UM 25%(25%xRp.291.420.000,-)=Rp.72.855.000,-utk Keg.Pengel & Pengemb SPAM di Drh Kab/Kota.Pek.Pengemb Jar Distribusi & SR Kws Taluak Marunggi olh CV Batang Buo SPK No:03/SPP/PAB.DisperkimLH.PRM/2022 tgl 20 Juli 2022	72.855.000,00	2022				72.855.000,00
	Pby Tmn 70% (70%x95%xRp.291.420.000= Rp.193.794.300) Dikrg UM (25%x70%xRp.291.420.000= Rp.50.998.500) mjadi=Rp.142.795.800Pek.Pengemb Jar Distribusi & SR Kws Tlk Marunggi olh CV.Batang Buo SPK No: 03/SPP/PAB.DisperkimLH.PRM/2022 tgl 20 Jul 2022	142.795.800,00	2022				142.795.800,00
	Sub Jumlah	**255.206.800,00**			**-**	**-**	**255.206.800,00**
4	**Perindagkop**						
	perencanaan pasar karanaur	79.760.000,00	2022				79.760.000,00
	Sub Jumlah	**79.760.000,00**	**-**		**-**	**-**	**79.760.000,00**
	Jumlah KDP	**46.370.697.963,00**	**-**	**11.180.000,00**	**79.952.000,00**	**79.664.000,00**	**46.359.805.963,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AKIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2024				TOTAL
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.626.379.357,00	19.217.447.511,00	7.900.000,00	0,00	20.851.726.868,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	4.370.481.946,44	20.101.544.131,00	7.000.000,00	0,00	24.479.026.077,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	4.369.188.712,44	19.143.989.698,00	35.611.650,00	0,00	23.548.790.060,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	3.046.422.078,34	12.624.147.251,00	4.000.000,00	0,00	15.674.569.329,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	2.719.973.843,16	13.325.684.436,00	12.600.000,00	0,00	16.058.258.279,16
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	1.061.794.868,00	200.131.149,00	6.000.000,00	0,00	1.267.926.017,00
7	TK PARIAMAN SELATAN	21.415.817,00	45.375.284,00	0,00	0,00	66.791.101,00
8	TK PARIAMAN TIMUR	22.857.814,00	17.677.083,00	0,00	0,00	40.534.897,00
9	TK PARIAMAN UTARA	16.360.939,00	0,00	0,00		16.360.939,00
10	SMP 1 PARIAMAN	1.552.912.736,00	3.116.865.010,00	34.999.910,00	0,00	4.704.777.656,00
11	SMP 2 PARIAMAN	1.360.598.167,00	4.342.863.592,00	2.500.000,00	0,00	5.705.961.759,00
12	SMP 3 PARIAMAN	1.861.293.808,00	2.779.377.194,00	0,00	0,00	4.640.671.002,00
13	SMP 4 PARIAMAN	1.700.664.171,00	1.985.618.724,00	38.145.000,00	0,00	3.724.427.895,00
14	SMP 5 PARIAMAN	814.872.781,42	2.547.149.622,00	0,00	0,00	3.362.022.403,42
15	SMP 6 PARIAMAN	1.436.864.151,00	1.322.588.877,00	0,00	0,00	2.759.453.028,00
16	SMP 7 PARIAMAN	1.374.028.440,00	3.767.924.446,00	4.000.000,00	0,00	5.145.952.886,00
17	SMP 8 PARIAMAN	1.125.304.316,00	1.074.920.781,00	13.000.000,00	0,00	2.213.225.097,00
18	SMP 9 PARIAMAN	1.355.674.546,00	1.712.756.755,00	22.750.000,00	0,00	3.091.181.301,00
19	DINAS KESEHATAN	3.355.607.741,14	3.701.472.917,00	156.597.667,00	0,00	7.213.678.325,14
20	PUSKESMAS NARAS	3.771.561.080,33	3.576.781.659,00	11.961.500,00	0,00	7.360.304.239,33
21	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	3.001.748.217,00	2.719.935.343,00	0,00	0,00	5.721.683.560,00
22	PUSKESMAS PARIAMAN	4.227.614.671,00	5.089.236.493,00	16.173.000,00	0,00	9.333.024.164,00
23	PUSKESMAS KURAI TAJI	4.311.000.516,30	2.893.838.210,00	87.353.000,00	0,00	7.292.191.726,30
24	PUSKESMAS MARUNGGI	3.258.353.818,34	2.064.751.985,00	10.918.880,00	0,00	5.334.024.683,34
25	PUSKESMAS AIR SANTOK	3.570.495.431,00	3.275.712.071,00	1.700.000,00	0,00	6.847.907.502,00
26	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	3.970.532.981,00	2.243.442.046,00	13.730.000,00	0,00	6.227.705.027,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	25.776.282.701,77	7.219.102.766,00	339.873.022,00	0,00	33.335.258.489,77
28	UPT. INSTALASI FARMASI	824.783.753,00	1.004.936.132,00	47.667.000,00	0,00	1.877.386.885,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.098.730.823,00	5.689.185.422,00	655.836.428.321,23		664.624.344.566,23
30	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	3.400.780.503,00	0,00	18.701.404.216,00	57.723.025.921,00	79.825.210.640,00
31	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6.019.960.165,00	9.521.247.947,00	116.022.077.300,00	954.272.725,39	132.517.558.137,39
32	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	387.587.509,00	598.032.412,00	39.344.938.292,41	0,00	40.330.558.213,41
33	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	5.713.385.323,00	622.245.482,00	40.000.000,00	0,00	6.375.630.805,00
34	KANTOR KESBANG POL	555.878.991,00	0,00	5.375.000,00	0,00	561.253.991,00
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.010.136.232,00	10.621.177,00	675.000,00	0,00	12.021.432.409,00
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.135.138.912,00	3.065.161.540,00	200.931.510,00	0,00	8.401.231.962,00
37	DINAS SOSIAL	1.000.943.686,00	0,00	0,00	0,00	1.000.943.686,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	4.008.476.633,00	2.073.606.915,00	28.896.783,00	0,00	6.110.980.331,00
39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.220.591.351,00	33.510.879,00	0,00	0,00	2.254.102.230,00
40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.500.455.411,00	715.511.933,00	0,00	0,00	2.215.967.344,00
41	DINAS PERHUBUNGAN	12.600.328.370,00	1.384.886.309,00	3.368.697.000,00	0,00	17.353.911.679,00
42	UPT PERPAKIRAN	655.794.000,00	308.120.635,00	0,00	0,00	963.914.635,00
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.637.286.331,00	9.063.558,00	36.435.000,00	0,00	4.682.784.889,00
44	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.594.297.467,00	1.547.773.324,00	390.825.000,00	0,00	3.532.895.791,00
45	UPT. PENGELOLA PASAR	713.539.881,00	298.967.036,00	0,00	0,00	1.012.506.917,00
46	UPT .METREOLOGI LEGAL	1.179.835.996,00	299.838.143,00	0,00	0,00	1.479.674.139,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.634.485.922,00	323.542.300,00	5.664.500,00	0,00	1.963.692.722,00
48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.243.266.804,00	21.681.415.524,00	2.013.478.167,80	0,00	25.938.160.495,80
49	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.533.614.761,00	2.909.443.536,00	1.492.974.883,00	0,00	11.936.033.180,00
50	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.861.775.136,00	1.418.676.877,00	7.173.000,00	0,00	3.287.625.013,00
51	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	695.672.916,00	675.956.529,00	61.496.458,00	0,00	1.433.125.903,00
52	UPT. BALAI BENIH IKAN	439.854.050,00	4.925.065.002,00	309.785.000,00	0,00	5.674.704.052,00
53	BAGIAN PEMERINTAHAN	586.458.034,00	0,00		0,00	586.458.034,00
54	BAGIAN HUKUM DAN HAM	718.796.833,00	0,00		0,00	718.796.833,00
55	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	489.315.251,00	0,00		0,00	489.315.251,00
56	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	22.042.144.157,00	24.074.058.996,00	1.188.675.170,16	0,00	47.304.878.323,16
57	BAGIAN EKBANG	759.086.190,00	0,00		0,00	759.086.190,00
58	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	575.273.259,00	0,00		0,00	575.273.259,00
59	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.097.392.944,00	757.341.522,00		0,00	1.854.734.466,00
60	SEKRETARIAT DPRD	6.470.956.319,25	7.602.344.678,00	207.186.013,00	0,00	14.280.487.010,25
61	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	927.444.595,00	2.389.436.076,00	57.534.500,00	0,00	3.374.415.171,00
62	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.007.811.801,00	1.614.059.990,00	583.501.115,00	0,00	3.205.372.906,00
63	KELURAHAN PASIR	314.935.727,00	69.958.000,00	0,00	0,00	384.893.727,00
64	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	296.227.811,00	258.085.104,00	0,00	0,00	554.312.915,00
65	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	365.021.284,00	0,00	0,00	0,00	365.021.284,00
66	KELURAHAN PONDOK 2	328.461.636,00	17.492.500,00	0,00	0,00	345.954.136,00
67	KELURAHAN UJUNG BATUNG	358.283.315,00	246.394.785,00	0,00	0,00	604.678.100,00
68	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	398.926.356,00	19.990.000,00	0,00	0,00	418.916.356,00
69	KELURAHAN JALAN BARU	288.079.155,00	217.362.840,00	0,00	0,00	505.441.995,00
70	KELURAHAN KARAN AUR	200.914.551,00	0,00	0,00	0,00	200.914.551,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AKIR AKUMULASI PENYUSUTAN 2024				TOTAL
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
71	KELURAHAN LOHONG	237.957.327,00	44.169.397,00	0,00	0,00	282.126.724,00
72	KRLURAHAN JALAN KERETA API	284.641.656,00	297.370.433,00	0,00	0,00	582.012.089,00
73	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	374.138.907,00	280.017.979,00	0,00	0,00	654.156.886,00
74	KELURAHAN KP.JAWA 1	304.081.706,00	0,00	0,00	0,00	304.081.706,00
75	KELURAHAN JATI HILIR	240.361.067,00	77.954.801,00	0,00	0,00	318.315.868,00
76	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	199.021.997,00	196.304.458,00	0,00	0,00	395.326.455,00
77	KELURAHAN KP JAWA 2	263.048.935,00	80.183.333,00	0,00	0,00	343.232.268,00
78	KELURAHAN TARATAK	315.354.695,00	0,00	0,00	0,00	315.354.695,00
79	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	840.582.810,00	1.837.953.158,00	170.549.850,00	0,00	2.849.085.818,00
80	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	822.348.274,00	1.679.543.936,00	67.416.200,00	0,00	2.569.308.410,00
81	INSPEKTORAT	2.071.469.923,00	1.812.755.297,00	181.049.625,00	0,00	4.065.274.845,00
82	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.046.159.143,00	1.948.677.209,00	121.409.500,00	0,00	5.116.245.852,00
83	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	6.789.513.955,00	2.818.159.883,00	149.777.000,00	0,00	9.757.450.838,00
84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.048.664.165,00	0,00	0,00	0,00	2.048.664.165,00
TOTAL		**221.809.760.353,93**	**247.566.758.021,00**	**841.468.835.033,60**	**58.677.298.646,39**	**1.369.522.652.054,92**

Lampiran 18a

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP MESIN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAK BERAT	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2024
		MESIN 1 JAN 2024	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.500.668.776,00			1.500.668.776,00				63.458.212,00	62.252.369,00		1.626.379.357,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	4.046.515.304,44	23.803.256,00		4.070.318.560,44			244.745.574,00	279.337.046,00	265.571.914,00		4.370.481.946,44
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	4.178.329.215,88	26.011.800,00		4.204.341.015,88			385.948.034,44	284.413.214,00	266.382.517,00		4.369.188.712,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	2.939.052.850,06			2.939.052.850,06			344.921.308,72	230.831.938,00	221.458.599,00		3.046.422.078,34
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	2.691.792.644,16			2.691.792.644,16			220.918.942,00	129.917.511,00	119.182.630,00		2.719.973.843,16
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	929.907.147,00			929.907.147,00				70.831.747,00	61.055.974,00		1.061.794.868,00
	TK PARIAMAN SELATAN	15.644.063,00			15.644.063,00				2.536.875,00	3.234.879,00		21.415.817,00
	TK PARIAMAN TIMUR	11.886.064,00			11.886.064,00				5.485.876,00	5.485.874,00		22.857.814,00
	TK PARIAMAN UTARA	8.507.689,00			8.507.689,00				3.926.625,00	3.926.625,00		16.360.939,00
7	SMP 1 PARIAMAN	1.564.431.844,00			1.564.431.844,00			53.700.000,00	22.628.980,00	19.551.912,00		1.552.912.736,00
8	SMP 2 PARIAMAN	1.348.617.599,00			1.348.617.599,00			57.392.385,00	36.035.814,00	33.337.139,00		1.360.598.167,00
9	SMP 3 PARIAMAN	1.866.407.185,00			1.866.407.185,00			112.438.792,00	55.699.192,00	51.626.223,00		1.861.293.808,00
10	SMP 4 PARIAMAN	1.583.544.179,00			1.583.544.179,00				63.902.054,00	53.217.938,00		1.700.664.171,00
11	SMP 5 PARIAMAN	783.516.045,42			783.516.045,42				16.134.309,00	15.222.427,00		814.872.781,42
12	SMP 6 PARIAMAN	1.267.487.070,00			1.267.487.070,00				88.558.659,00	80.818.422,00		1.436.864.151,00
13	SMP 7 PARIAMAN	1.311.864.042,00			1.311.864.042,00				33.270.072,00	28.894.326,00		1.374.028.440,00
14	SMP 8 PARIAMAN	1.083.795.973,00			1.083.795.973,00				21.291.852,00	20.216.491,00		1.125.304.316,00
15	SMP 9 PARIAMAN	1.226.808.200,00			1.226.808.200,00				65.189.424,00	63.676.922,00		1.355.674.546,00
16	DINAS KESEHATAN	2.934.580.273,14			2.934.580.273,14	149.000.000,00			136.567.693,00	135.459.775,00		3.355.607.741,14
17	PUSKESMAS NARAS	3.303.080.123,33			3.303.080.123,33				315.548.889,00	152.932.068,00		3.771.561.080,33
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	2.652.672.242,00			2.652.672.242,00				177.858.213,00	171.217.762,00		3.001.748.217,00
19	PUSKESMAS PARIAMAN	3.798.938.174,00			3.798.938.174,00				219.711.416,00	208.965.081,00		4.227.614.671,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	4.021.234.141,30			4.021.234.141,30		138.458.251,00		220.587.956,00	207.636.670,00		4.311.000.516,30
21	PUSKESMAS MARUNGGI	2.843.025.015,34			2.843.025.015,34				211.422.365,00	203.906.438,00		3.258.353.818,34
22	PUSKESMAS AIR SANTOK	3.182.996.662,00	14.500.000,00		3.197.496.662,00				194.476.285,00	178.522.484,00		3.570.495.431,00
23	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	3.508.914.793,00			3.508.914.793,00				236.098.081,00	225.520.107,00		3.970.532.981,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	22.030.172.240,77			22.030.172.240,77	138.458.251,00			1.914.368.028,00	1.693.284.182,00		25.776.282.701,77
25	UPT. INSTALASI FARMASI	946.786.285,00			946.786.285,00		149.000.000,00		11.286.600,00	15.710.868,00		824.783.753,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	2.863.852.142,00			2.863.852.142,00				118.644.957,00	116.233.724,00		3.098.730.823,00
27	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	3.638.420.889,00			3.638.420.889,00		339.350.000,00		50.854.807,00	50.854.807,00		3.400.780.503,00
28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.117.822.989,00			7.117.822.989,00	349.193.750,00		1.687.023.200,00	90.581.125,00	149.385.501,00		6.019.960.165,00
29	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	352.829.880,00			352.829.880,00				17.248.050,00	17.509.579,00		387.587.509,00
30	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	5.948.271.673,00			5.948.271.673,00			286.902.600,00	26.320.625,00	25.695.625,00		5.713.385.323,00
31	KANTOR KESBANG POL	532.011.430,00			532.011.430,00				12.722.500,00	11.145.061,00		555.878.991,00
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.673.277.583,00			11.673.277.583,00				181.969.484,00	154.889.165,00		12.010.136.232,00
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.051.198.234,00			5.051.198.234,00				43.507.545,00	40.433.133,00		5.135.138.912,00
34	DINAS SOSIAL	883.548.561,00			883.548.561,00				58.922.564,00	58.472.561,00		1.000.943.686,00
35	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	3.627.316.075,00			3.627.316.075,00				170.470.288,00	210.690.270,00		4.008.476.633,00
36	UPT. PENYULUH KB KEC. PARIAMAN UTARA	-			-							-
37	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.032.720.733,00			2.032.720.733,00				98.801.673,00	89.068.945,00		2.220.591.351,00
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.440.214.899,00			1.440.214.899,00				31.447.655,00	28.792.857,00		1.500.455.411,00
39	DINAS PERHUBUNGAN	12.083.830.899,00			12.083.830.899,00				261.483.017,00	255.014.454,00		12.600.328.370,00
40	UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-			-							-
41	UPT. TERMINAL	-			-							-

Lampiran 18a

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAK BERAT	TAHUN BERJALAN		PENGHAPUSAN	SALDO AKIR 2024
		MESIN 1 JAN 2024	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	MUTASI (-)	
42	UPT PERPAKIRAN	632.877.337,00			632.877.337,00				12.500.000,00	10.416.663,00		655.794.000,00
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.393.693.710,00			4.393.693.710,00				124.511.624,00	119.080.997,00		4.637.286.331,00
44	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.552.744.290,00			1.552.744.290,00			26.439.300,00	34.952.750,00	33.039.727,00		1.594.297.467,00
45	UPT. PENGELOLA PASAR	681.673.492,00			681.673.492,00				15.933.195,00	15.933.194,00		713.539.881,00
46	UPT .METREOLOGI LEGAL	1.084.845.639,00			1.084.845.639,00				48.824.188,00	46.166.169,00		1.179.835.996,00
47	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1.580.671.136,00			1.580.671.136,00				29.990.238,00	23.824.548,00		1.634.485.922,00
48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.169.109.839,00			2.169.109.839,00			85.848.803,00	84.616.353,00	75.389.415,00		2.243.266.804,00
49	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	7.472.257.374,00			7.472.257.374,00				31.241.751,00	30.115.636,00		7.533.614.761,00
50	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.840.809.131,00			1.840.809.131,00				11.370.594,00	9.595.411,00		1.861.775.136,00
51	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	567.542.765,00			567.542.765,00			27.014.000,00	77.696.250,00	77.447.901,00		695.672.916,00
52	UPT. BALAI BENIH IKAN	439.854.050,00			439.854.050,00				-	-		439.854.050,00
53	BAGIAN PEMERINTAHAN	575.686.159,00			575.686.159,00				10.771.875,00	-		586.458.034,00
54	BAGIAN HUKUM DAN HAM	672.891.854,00			672.891.854,00				28.185.302,00	17.719.677,00		718.796.833,00
55	BAGIAN ORGANISASI & APARATUR	449.882.751,00			449.882.751,00				19.278.749,00	20.153.751,00		489.315.251,00
56	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	20.788.591.362,00			20.788.591.362,00				810.244.528,00	768.662.250,00	325.353.983,00	22.042.144.157,00
57	BAGIAN EKBANG	689.305.232,00			689.305.232,00				36.516.887,00	33.264.071,00		759.086.190,00
58	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	546.255.145,00			546.255.145,00				19.959.500,00	9.058.614,00		575.273.259,00
59	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	971.488.141,00			971.488.141,00				58.187.490,00	67.717.313,00		1.097.392.944,00
60	SEKRETARIAT DPRD	5.427.183.555,25			5.427.183.555,25				542.294.858,00	501.477.906,00		6.470.956.319,25
61	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	888.077.157,00			888.077.157,00				20.673.500,00	18.693.938,00		927.444.595,00
62	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	971.879.259,00			971.879.259,00				18.070.438,00	17.862.104,00		1.007.811.801,00
	KELURAHAN PASIR	249.977.976,00			249.977.976,00				34.078.657,00	30.879.094,00		314.935.727,00
	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	236.275.350,00			236.275.350,00				31.561.000,00	28.391.461,00		296.227.811,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 1	287.058.736,00			287.058.736,00				41.110.774,00	36.851.774,00		365.021.284,00
	KELURAHAN PONDOK 2	260.366.614,00			260.366.614,00				35.878.244,00	32.216.778,00		328.461.636,00
	KELURAHAN UJUNG BATUNG	279.163.280,00			279.163.280,00				41.235.740,00	37.884.295,00		358.283.315,00
	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	320.564.493,00			320.564.493,00				41.312.619,00	37.049.244,00		398.926.356,00
	KELURAHAN JALAN BARU	230.547.470,00			230.547.470,00				29.170.126,00	28.361.559,00		288.079.155,00
	KELURAHAN KARAN AUR	152.527.096,00			152.527.096,00				24.606.875,00	23.780.580,00		200.914.551,00
	KELURAHAN LOHONG	201.722.343,00			201.722.343,00				18.531.250,00	17.703.734,00		237.957.327,00
	KRLURAHAN JALAN KERETA API	227.714.572,00			227.714.572,00				29.275.797,00	27.651.287,00		284.641.656,00
	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	290.344.800,00			290.344.800,00				43.470.500,00	40.323.607,00		374.138.907,00
	KELURAHAN KP.JAWA 1	241.786.829,00			241.786.829,00				32.547.836,00	29.747.041,00		304.081.706,00
	KELURAHAN JATI HILIR	194.749.176,00			194.749.176,00				23.900.687,00	21.711.204,00		240.361.067,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	173.490.812,00			173.490.812,00		9.843.750,00		18.077.174,00	17.297.761,00		199.021.997,00
	KELURAHAN KP JAWA 2	211.109.159,00			211.109.159,00				26.634.149,00	25.305.627,00		263.048.935,00
	KELURAHAN TARATAK	253.649.802,00			253.649.802,00				32.910.849,00	28.794.044,00		315.354.695,00
63	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	803.249.435,00			803.249.435,00				18.916.688,00	18.416.687,00		840.582.810,00
64	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	788.894.836,00			788.894.836,00				17.185.625,00	16.267.813,00		822.348.274,00
65	INSPEKTORAT	1.897.006.004,00			1.897.006.004,00				97.273.625,00	77.190.294,00		2.071.469.923,00
66	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.887.119.743,00			2.887.119.743,00				81.793.791,00	77.245.609,00		3.046.159.143,00
67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	6.439.757.608,00			6.439.757.608,00				176.747.432,00	173.008.915,00		6.789.513.955,00
68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.878.210.376,00		2,00	1.878.210.374,00				90.168.625,00	80.285.166,00		2.048.664.165,00
TOTAL		207.729.097.716,09	64.315.056,00	2,00	207.793.412.770,09	636.652.001,00	636.652.001,00	3.533.292.939,16	9.296.557.349,00	8.578.437.157,00	325.353.983,00	221.809.760.353,93

Lampiran 18b

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP BANGUNAN

31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL KARENA SOPD BARU		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAKBERAT	TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR 2024
		BANGUNAN 1 JAN 2023	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	MUTASI (+)	MUTASI (+)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.911.269.386,00			17.911.269.386,00				653.089.063,00	653.089.062,00	19.217.447.511,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	18.389.068.919,00			18.389.068.919,00				855.692.850,00	856.782.362,00	20.101.544.131,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	17.516.681.721,00			17.516.681.721,00				812.622.847,00	814.685.130,00	19.143.989.698,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	11.795.121.686,00			11.795.121.686,00				406.436.730,00	422.588.835,00	12.624.147.251,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	12.106.758.332,00			12.106.758.332,00				608.933.249,00	609.992.855,00	13.325.684.436,00
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	153.374.949,00			153.374.949,00				23.378.100,00	23.378.100,00	200.131.149,00
	TK Pariaman Selatan	32.589.719,00			32.589.719,00				6.031.576,00	6.753.989,00	45.375.284,00
	TK Pariaman timur	9.192.083,00			9.192.083,00				4.242.500,00	4.242.500,00	17.677.083,00
7	SMP 1 PARIAMAN	2.854.702.703,00			2.854.702.703,00				131.081.153,00	131.081.154,00	3.116.865.010,00
8	SMP 2 PARIAMAN	3.891.803.488,00			3.891.803.488,00				225.140.948,00	225.919.156,00	4.342.863.592,00
9	SMP 3 PARIAMAN	2.532.705.535,00			2.532.705.535,00				123.335.829,00	123.335.830,00	2.779.377.194,00
10	SMP 4 PARIAMAN	1.812.828.210,00			1.812.828.210,00				86.395.258,00	86.395.256,00	1.985.618.724,00
11	SMP 5 PARIAMAN	2.466.909.627,00			2.466.909.627,00				39.712.991,00	40.527.004,00	2.547.149.622,00
12	SMP 6 PARIAMAN	1.206.810.785,00			1.206.810.785,00				57.889.046,00	57.889.046,00	1.322.588.877,00
13	SMP 7 PARIAMAN	3.528.645.283,00			3.528.645.283,00				119.639.581,00	119.639.582,00	3.767.924.446,00
14	SMP 8 PARIAMAN	971.772.285,00			971.772.285,00				51.574.249,00	51.574.247,00	1.074.920.781,00
15	SMP 9 PARIAMAN	1.533.329.587,00			1.533.329.587,00				89.713.584,00	89.713.584,00	1.712.756.755,00
16	DINAS KESEHATAN	3.346.663.667,00			3.346.663.667,00				147.236.654,00	207.572.596,00	3.701.472.917,00
17	PUSKESMAS NARAS	3.284.703.153,00			3.284.703.153,00				146.039.254,00	146.039.252,00	3.576.781.659,00
18	PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN	2.502.338.409,00			2.502.338.409,00				108.798.466,00	108.798.468,00	2.719.935.343,00
19	PUSKESMAS PARIAMAN	4.901.974.589,00			4.901.974.589,00				93.630.951,00	93.630.953,00	5.089.236.493,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	2.541.409.560,00			2.541.409.560,00				176.493.742,00	175.934.908,00	2.893.838.210,00
21	PUSKESMAS MARUNGGI	1.881.571.958,00			1.881.571.958,00				91.590.013,00	91.590.014,00	2.064.751.985,00
22	PUSKESMAS AIR SANTOK	2.943.409.748,00			2.943.409.748,00				166.502.537,00	165.799.786,00	3.275.712.071,00
23	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	1.996.344.172,00			1.996.344.172,00				126.414.412,00	120.683.462,00	2.243.442.046,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	5.650.842.701,00	576.745,00		5.651.419.446,00				768.633.881,00	799.049.439,00	7.219.102.766,00
25	UPT. INSTALASI FARMASI	915.048.268,00			915.048.268,00				44.943.932,00	44.943.932,00	1.004.936.132,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	5.218.688.313,00			5.218.688.313,00				235.248.554,00	235.248.555,00	5.689.185.422,00
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.329.468.270,00			8.329.468.270,00				595.889.839,00	595.889.838,00	9.521.247.947,00
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	540.259.986,00			540.259.986,00				27.924.917,00	29.847.509,00	598.032.412,00
29	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	571.151.091,00			571.151.091,00				25.547.196,00	25.547.195,00	622.245.482,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	702.807.725,00			702.807.725,00			694.685.648,00	1.249.550,00	1.249.550,00	10.621.177,00
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.715.403.957,00			2.715.403.957,00				174.878.792,00	174.878.791,00	3.065.161.540,00
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1.916.274.819,00			1.916.274.819,00				80.134.536,00	77.197.560,00	2.073.606.915,00
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	29.562.529,00			29.562.529,00				1.974.175,00	1.974.175,00	33.510.879,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	597.893.533,00			597.893.533,00				58.809.200,00	58.809.200,00	715.511.933,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	1.237.093.879,00			1.237.093.879,00				73.896.222,00	73.896.208,00	1.384.886.309,00
36	UPT PERPAKIRAN	227.392.179,00			227.392.179,00				40.364.228,00	40.364.228,00	308.120.635,00
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.573.658,00			7.573.658,00				744.950,00	744.950,00	9.063.558,00
38	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.395.033.695,00			1.395.033.695,00				76.369.815,00	76.369.814,00	1.547.773.324,00
39	UPT. PENGELOLA PASAR	272.167.730,00			272.167.730,00				13.399.653,00	13.399.653,00	298.967.036,00
40	UPT .METREOLOGI LEGAL	249.974.342,00			249.974.342,00				24.931.901,00	24.931.900,00	299.838.143,00

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP BANGUNAN

31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL KARENA SOPD BARU		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI ANTAR SKPD		RUSAKBERAT	TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR 2024
		BANGUNAN 1 JAN 2023	KOREKSI(+)	KOREKSI(-)		MUTASI (+)	MUTASI (-)	MUTASI (-)	MUTASI (+)	MUTASI (+)	
41	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	317.256.100,00			317.256.100,00				3.143.100,00	3.143.100,00	323.542.300,00
42	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18.981.394.390,00			18.981.394.390,00		226.994.558,00	87.873.917,00	1.505.836.324,00	1.509.053.285,00	21.681.415.524,00
43	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	2.653.458.823,00			2.653.458.823,00				127.992.356,00	127.992.357,00	2.909.443.536,00
44	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	1.501.776.966,00		205.274.304,00	1.296.502.662,00				61.087.107,00	61.087.108,00	1.418.676.877,00
45	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	591.963.393,00			591.963.393,00				41.996.568,00	41.996.568,00	675.956.529,00
46	UPT. BALAI BENIH IKAN	4.577.907.813,00			4.577.907.813,00				173.578.595,00	173.578.594,00	4.925.065.002,00
47	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	22.454.324.878,00			22.454.324.878,00				820.442.528,00	799.291.590,00	24.074.058.996,00
48	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	33.333.333,00	5.530.249,00		38.863.582,00	226.994.558,00			245.741.691,00	245.741.691,00	757.341.522,00
49	SEKRETARIAT DPRD	7.199.747.365,00			7.199.747.365,00				200.956.214,00	201.641.099,00	7.602.344.678,00
50	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	2.180.903.484,00			2.180.903.484,00				104.266.296,00	104.266.296,00	2.389.436.076,00
51	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	1.670.018.565,00		217.540.420,00	1.452.478.145,00				80.790.922,00	80.790.923,00	1.614.059.990,00
	KELURAHAN PASIR	69.958.000,00			69.958.000,00						69.958.000,00
	KELURAHAN KAMPUNG PONDOK	238.358.854,00			238.358.854,00				9.863.125,00	9.863.125,00	258.085.104,00
	KELURAHAN PONDOK 2	17.492.500,00			17.492.500,00						17.492.500,00
	KELURAHAN UJUNG BATUNG	-	217.540.420,00		217.540.420,00				14.427.183,00	14.427.182,00	246.394.785,00
	KELURAHAN KAMPUNG PERAK	19.990.000,00			19.990.000,00						19.990.000,00
	KELURAHAN JALAN BARU	180.797.165,00			180.797.165,00				18.282.838,00	18.282.837,00	217.362.840,00
	KELURAHAN LOHONG	41.920.157,00			41.920.157,00				1.124.620,00	1.124.620,00	44.169.397,00
	KRLURAHAN JALAN KERETA API	258.422.833,00			258.422.833,00				19.473.800,00	19.473.800,00	297.370.433,00
	KELURAHAN ALAI GELOMBANG	240.486.029,00			240.486.029,00				19.765.975,00	19.765.975,00	280.017.979,00
	KELURAHAN JATI HILIR	66.652.220,00			66.652.220,00				5.651.290,00	5.651.291,00	77.954.801,00
	KELURAHAN JAWI-JAWI 2	174.692.958,00			174.692.958,00				10.805.750,00	10.805.750,00	196.304.458,00
	KELURAHAN KP JAWA 2	77.683.333,00			77.683.333,00				1.250.000,00	1.250.000,00	80.183.333,00
52	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	1.694.486.887,00			1.694.486.887,00				71.733.135,00	71.733.136,00	1.837.953.158,00
53	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	1.531.384.865,00			1.531.384.865,00				73.668.709,00	74.490.362,00	1.679.543.936,00
54	INSPEKTORAT	1.673.326.807,00			1.673.326.807,00				69.714.245,00	69.714.245,00	1.812.755.297,00
55	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.799.229.777,00			1.799.229.777,00				74.723.716,00	74.723.716,00	1.948.677.209,00
56	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	2.471.946.197,00			2.471.946.197,00				173.106.843,00	173.106.843,00	2.818.159.883,00
TOTAL		225.407.529.921,00	223.647.414,00	422.814.724,00	225.208.362.611,00	226.994.558,00	226.994.558,00	782.559.565,00	11.525.979.854,00	11.614.975.121,00	247.566.758.021,00

Lampiran 18c

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JARINGAN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	Rusak berat	TAHUN BERJALAN		SALDO AKIR 2024
		1 JAN 2023		Mutasi (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.900.000,00	7.900.000,00				7.900.000,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	35.611.650,00	35.611.650,00				35.611.650,00
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	12.600.000,00	12.600.000,00				12.600.000,00
6	UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	4.900.000,00	4.900.000,00		600.000,00	500.000,00	6.000.000,00
	tk SELATAN	-					-
	TK KECAMATAN TIMUR	-					-
	TK KECAMATAN UTARA	-					-
7	SMP 1 PARIAMAN	34.999.910,00	34.999.910,00				34.999.910,00
8	SMP 2 PARIAMAN	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
9	SMP 3 PARIAMAN						
10	SMP 4 PARIAMAN	38.145.000,00	38.145.000,00				38.145.000,00
11	SMP 5 PARIAMAN						
12	SMP 6 PARIAMAN						
13	SMP 7 PARIAMAN	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
14	SMP 8 PARIAMAN	13.000.000,00	13.000.000,00				13.000.000,00
15	SMP 9 PARIAMAN	22.750.000,00	22.750.000,00				22.750.000,00
16	DINAS KESEHATAN	149.956.000,00	149.956.000,00			6.641.667,00	156.597.667,00
17	PUSKESMAS NARAS	11.961.500,00	11.961.500,00				11.961.500,00
	kpg baru padusunan						
18	PUSKESMAS PARIAMAN	16.173.000,00	16.173.000,00				16.173.000,00
19	PUSKESMAS KURAI TAJI	87.353.000,00	87.353.000,00				87.353.000,00
20	PUSKESMAS MARUNGGI	10.918.880,00	10.918.880,00				10.918.880,00
21	PUSKESMAS AIR SANTOK	1.700.000,00	1.700.000,00				1.700.000,00
22	PUSKESMAS SIKAPAK BARAT	13.730.000,00	13.730.000,00				13.730.000,00
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	339.873.022,00	339.873.022,00				339.873.022,00
24	UPT. INSTALASI FARMASI	47.667.000,00	47.667.000,00				47.667.000,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	622.643.368.701,21	622.643.368.701,21		17.378.534.124,00	15.814.525.496,02	655.836.428.321,23

Lampiran 18c

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JARINGAN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	Rusak berat	TAHUN BERJALAN		SALDO AKIR 2024
		1 JAN 2023		Mutasi (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	
26	UPT. PERALATAN PERBEKALAN DAN PJU	18.071.609.359,00	18.071.609.359,00		318.642.594,00	311.152.263,00	18.701.404.216,00
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	111.947.107.245,00	111.947.107.245,00		2.113.431.161,00	1.961.538.894,00	116.022.077.300,00
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	37.877.194.620,41	37.877.194.620,41		747.316.253,00	720.427.419,00	39.344.938.292,41
29	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN	40.000.000,00	40.000.000,00				40.000.000,00
30	KANTOR KESBANG POL	5.375.000,00	5.375.000,00				5.375.000,00
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	675.000,00	675.000,00				675.000,00
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.931.510,00	200.931.510,00				200.931.510,00
33	DINAS SOSIAL		-				
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	22.907.783,00	22.907.783,00		2.994.500,00	2.994.500,00	28.896.783,00
36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-				-
37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-				-
38	DINAS PERHUBUNGAN	3.204.527.317,00	3.204.527.317,00		89.547.100,00	74.622.583,00	3.368.697.000,00
39	UPT PERPAKIRAN	-	-				-
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.435.000,00	36.435.000,00				36.435.000,00
41	KOPERINDAG	380.391.667,00	380.391.667,00	1.000.000,00	9.800.000,00	1.633.333,00	390.825.000,00
42	UPT. PENGELOLA PASAR	-					-
43	UPT .METREOLOGI LEGAL	-					-
44	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5.664.500,00	5.664.500,00				5.664.500,00

Lampiran 18c

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JARINGAN
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	Rusak berat	TAHUN BERJALAN		SALDO AKIR 2024
		1 JAN 2023		Mutasi (-)	SEMESTER 1	SEMESTER II	
45	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.969.922.567,80	1.969.922.567,80		21.777.800,00	21.777.800,00	2.013.478.167,80
46	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	1.491.672.383,00	1.491.672.383,00		651.250,00	651.250,00	1.492.974.883,00
47	UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN KOTA PARIAMAN	7.173.000,00	7.173.000,00				7.173.000,00
48	POSKESWAN	59.258.958,00	59.258.958,00		1.118.750,00	1.118.750,00	61.496.458,00
49	BBI	309.785.000,00	309.785.000,00				309.785.000,00
50	Bagian UMUM	1.159.323.350,16	1.159.323.350,16		14.675.910,00	14.675.910,00	1.188.675.170,16
51	BAGIAN HUKUM DAN HAM						
52	SEKRETARIAT DPRD	207.186.013,00	207.186.013,00				207.186.013,00
53	Kec. PARIAMAN UTARA	57.534.500,00	57.534.500,00				57.534.500,00
54	KEC. PARIAMAN TENGAH	455.591.862,00	455.591.862,00		63.954.627,00	63.954.626,00	583.501.115,00
55	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	131.758.650,00	131.758.650,00		19.395.600,00	19.395.600,00	170.549.850,00
56	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	67.416.200,00	67.416.200,00				67.416.200,00
57	INSPEKTORAT	181.049.625,00	181.049.625,00				181.049.625,00
58	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	121.409.500,00	121.409.500,00				121.409.500,00
59	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN PENDAPATAN DAERAH	149.777.000,00	149.777.000,00				149.777.000,00
TOTAL		801.671.785.273,58	801.671.785.273,58	1.000.000,00	20.782.439.669,00	19.015.610.091,02	841.468.835.033,60

Lampiran 18d

DATA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINYA
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		SALDO AKIR 2024
		ATL 1 JAN 2023		SEMESTER 1	SEMESTER II	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	56.317.381.424,00	56.317.381.424,00	727.916.915,00	677.727.582,00	57.723.025.921,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	954.272.725,39	954.272.725,39	0,00	0,00	954.272.725,39
TOTAL		57.271.654.149,39	57.271.654.149,39	727.916.915,00	677.727.582,00	58.677.298.646,39

Lampiran 19a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PROPERTY INVESTASI GEDUNG BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal	Saldo 31 DESEMBER 2024
DINAS PERINDAGKOP	42.152.809.950,88	42.152.809.950,88
UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	94.504.522.624,00	94.504.522.624,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	948.011.384,00	948.011.384,00
JUMLAH	**137.605.343.958,88**	**137.605.343.958,88**

Lampiran 19b

DATA AKUMULASI PROPERTY INVENSTASI GEDUNG BANGUNAN

31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	TAHUN BERJALAN		SALDO AKHIR 2024
		PROPERTI INVESTASI 1 JAN 2024		MUTASI (+)	MUTASI (+)	
1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.627.436.526,00	20.627.436.526,00	924.352.302,00	893.585.322,00	22.445.374.150,00
2	UPT. PENGELOLA PASAR	5.118.994.976,00	5.118.994.976,00	2.362.613.066,00	2.362.613.066,00	9.844.221.108,00
3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.950.047,00	3.950.047,00	23.700.285,00	23.700.285,00	51.350.617,00
TOTAL		25.750.381.549,00	25.750.381.549,00	3.310.665.653,00	3.279.898.673,00	32.340.945.875,00

Lampiran 20a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN (TGR)
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	ASET LAINNYA TGR		SALDO AWAL	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi			Saldo Akhir per 31 Desember 2024
		ASET TETAP	Non Aset Tetap			Tambah	Kurang	Total	
1	2	3	4		5=3+4	11	12	13=11-12	17=5+13+16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	133.948.445,43	133.948.445,43	133.948.445,43	122.661.388,58	63.079.974,00	59.581.414,58	193.529.860,01
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	2.125.000,00	-	2.125.000,00	2.125.000,00			-	2.125.000,00
3	SMP 3 PARIAMAN	520.000,00	12.572.153,00	13.092.153,00	13.092.153,00			-	13.092.153,00
4	DINAS KESEHATAN	13.700.000,00	187.038.646,00	200.738.646,00	200.738.646,00	43.262.456,00	25.234.135,00	18.028.321,00	218.766.967,00
5	PUSKESMAS NARAS	18.007.791,00	-	18.007.791,00	18.007.791,00			-	18.007.791,00
6	PUSKESMAS PAUH PARIAMAN		-	-	-			-	-
7	PUSKESMAS KURAI TAJI	24.115.091,00	-	24.115.091,00	24.115.091,00		1.989.578,00	(1.989.578,00)	22.125.513,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	855.562.858,60		855.562.858,60	855.562.858,60	494.170.199,67	50.106.365,00	444.063.834,67	1.299.626.693,27
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	500.000,00	20.416.907,00	20.916.907,00	20.916.907,00	18.853.880,00	4.183.500,00	14.670.380,00	35.587.287,00
10	KANTOR KESBANG POL	-		-	-	62.591.100,00		62.591.100,00	62.591.100,00
11	SATUAN POL PP & DAMKAR	-	8.173.631,13	8.173.631,13	8.173.631,13	2.075.000,00	4.900.000,00	(2.825.000,00)	5.348.631,13
12	BPBD	-		-	-			-	-
13	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	6.840.000,00	4.560.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
14	DP3AKB	-	7.044.000,00	7.044.000,00	7.044.000,00	11.100.000,00	7.044.000,00	4.056.000,00	11.100.000,00
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-	4.664.048,00	2.000.000,00	2.664.048,00	2.664.048,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT DESA	-	25.561.055,00	25.561.055,00	25.561.055,00	2.080.000,00	6.916.500,00	(4.836.500,00)	20.724.555,00
17	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	41.376.207,00	8.030.900,00	33.345.307,00	33.345.307,00
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)	18.400.000,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	-	81.135.000,00	81.135.000,00	81.135.000,00	20.085.000,00	64.125.000,00	(44.040.000,00)	37.095.000,00
20	DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU & TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	15.877.657,00	15.877.657,00	15.877.657,00	38.140.000,00	21.652.657,00	16.487.343,00	32.365.000,00
22	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	70.245.771,78	217.026.011,00	287.271.782,78	287.271.782,78	72.792.786,00	44.104.752,00	28.688.034,00	315.959.816,78

Lampiran 20a

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	ASET LAINNYA TGR		SALDO AWAL	Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi			Saldo Akhir per 31 Desember 2024
		ASET TETAP	Non Aset Tetap			Tambah	Kurang	Total	
1	2	3	4		5=3+4	11	12	13=11-12	17=5+13+16
23	SEKRETARIAT DAERAH	-	208.629.075,00	208.629.075,00	208.629.075,00	104.845.000,00	-	104.845.000,00	313.474.075,00
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					273.654.582,77	-	273.654.582,77	273.654.582,77
25	SEKRETARIAT DPRD	15.400.000,00	38.538.998,00	53.938.998,00	53.938.998,00	150.712.554,00	50.805.150,00	99.907.404,00	153.846.402,00
26	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	-	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	-	2.300.000,00
28	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	473.000,00	43.212.600,00	43.685.600,00	43.685.600,00	-	12.400.000,00	(12.400.000,00)	31.285.600,00
30	INSPEKTORAT		20.879.400,00	20.879.400,00	20.879.400,00	140.568.500,00	17.993.600,00	122.574.900,00	143.454.300,00
31	BAPPEDA	-	-	-	-	362.030.000,00	183.261.999,00	178.768.001,00	178.768.001,00
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-	22.642.856,25	22.642.856,25	22.642.856,25	1.157.448.150,00	22.642.856,25	1.134.805.293,75	1.157.448.150,00
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	-	129.451.978,00	129.451.978,00	129.451.978,00	-	88.405.750,00	(88.405.750,00)	41.046.228,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
	TOTAL	**1.000.649.512,38**	**1.197.348.412,81**	**2.197.997.925,19**	**2.197.997.925,19**	**3.130.350.852,02**	**687.936.716,25**	**2.442.414.135,77**	**4.640.412.060,96**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
RINCIAN ASET LAIN- LAIN (TGR)
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga							
		LHP Khusus Bidang Pendidikan No. 20/S/XIV.1/02/2007 tgl 13 Februari 2007	Pengadaan sarana meubelair untuk SMKN 3 (CV. Mitra Buana) Mengganti meubelair rusak		3.400.000,00			3.400.000,00
			Pengadaan sarana meubelair untuk SMKN 3 (CV. Mitra Buana) Tidak sesuai spesifikasi teknis		12.060.000,00			12.060.000,00
		LHP No.700/36/LHP/Bawas-Prm/XI/2007 tgl 30 Nov 2007 atas Dinas Pendidikan	Pajak yang belum disetor		120.000,00		120.000,00	-
			Proyek tidak sesuai kontrak (SMP3)		520.000,00		520.000,00	-
			Pajak belum disetor		7.260.874,00		3.499.765,00	3.761.109,00
		LHP No. 700/65/LHP/Insp-Prm/XII/2008 tgl 11 Des 2008 atas SMPN 8	SPPD hari libur		150.000,00		150.000,00	-
		LHP No. 700/67/LHP/Insp/2012 tgl 9 Juli 2012 atas UPTD Dikpora Kec. Pariaman Tengah	PBN 1 belum setor		1.090.000,00		1.090.000,00	-
		LHP No. 700/67a/LHP/Insp/2012 tgl 9 Juli 2012 atas SDN 19 Kp. Baru Dikpora Kec. Pariaman Tengah	Perjalanan dinas hari libur		150.000,00		150.000,00	-
		LHP No. 700/67b/LHP/Insp/2012 tgl 9 Juli 2012 atas SDN 07 Kp. Jawa Kec. Pariaman Tengah	Perjalanan dinas hari libur		300.000,00		300.000,00	-
		LHP No. 700/68/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 7 Agt 2012 atas UPTD Dikpora Kec Pariaman Timur	PPh pasal 21 belum setor		165.000,00		165.000,00	-
			PBN 1 belum setor		260.000,00		260.000,00	-
		LHP No. 700/71b/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 3 Sept 2012 atas SDN 15 Ampalu Dikpora Pariaman Utara	PPh pasal 21 belum setor		177.000,00		177.000,00	-
			PPn 10% belum setor		2.266.410,00		2.266.410,00	-
			PBN 1 belum setor		730.000,00		730.000,00	-
		LHP No. 700/67b/LHP/Insp/2012 tgl 9 Juli 2012 atas SDN 07 Kp. Jawa Dikpora Kec. Pariaman Tengah	Perjalanan dinas ganda pegawai UPTD		495.000,00		495.000,00	-
			Kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Jusra Anom		75.000,00			75.000,00
			Kelebihan pembayaran pembelajaran tambahan sore dan materi belajar tambahan		610.000,00			610.000,00
			Perjalanan dinas ganda		750.000,00			750.000,00
			Kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas pada SDN 17 Kp. Jawa		625.000,00			625.000,00
			Kelebihan pembayaran honor / transportasi pada SDN 17 Kp. Jawa		2.172.000,00			2.172.000,00
			Kelebihan pembayaran TA 2011		404.250,00			404.250,00
			Berdasarkan cek fisik di lapangan, tidak ditemui pembelian sejumlah barang		3.080.000,00			3.080.000,00
		700/89/LHP/Insp/2012 Tgl 31-Oct-2012 atas SMKN I	Terjadinya perjalanan dinas ganda		65.000,00			65.000,00
			Perjalanan dinas ganda an. Drs. Kanderi		150.000,00			150.000,00
		700/88/LHP/Insp/2013 tgl 18 Okt 2013	Pembayaran honor dan transportasi ganda sebesar Rp360.000,00 (Desliarni dkk.)		360.000,00		360.000,00	-
			Pengadaan fiktif atas pembelian pot bunga Rp175.000,00 (Bendaharawan SMP 2)		175.000,00		175.000,00	-
		700/89/LHP/Insp/2013 tgl 18 Okt 2013	Perjalanan dinas pada hari libur sebesar Rp140.000,00 (Rika Kemala Sari dkk.)		140.000,00		140.000,00	-
			Penggunaan Dana BOS tidak sesuai juknis Rp3.442.500,00(Kepala Sekolah SMP 1)		3.442.500,00		3.442.500,00	-
			Pembayaran honor tidak sesuai standar biaya sebesar Rp1.685.000,00 (Kepala Sekolah SMP 1)		1.685.000,00		1.685.000,00	-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		700/95/LHP/Insp/2013 tgl 1 Nov 2013	Perjalanan dinas dan honor ganda Rp1.670.000,00 (Elsa W. Dkk.)		1.670.000,00		1.670.000,00	-
		700/117/LHP/Insp/2013 tgl 3 Desember 2013	Biaya perjalanan dinas ganda pegawai SMAN 2 sebesar Rp385.000,00 (Elfisianti dkk.)		185.000,00			185.000,00
		700/26/LHP/Insp/2013 Tgl 04-Mar-2013 atas Disdikpora	Kelebihan pembayaran biaya transportasi dan honorarium		390.000,00			390.000,00
			Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda		1.170.000,00			1.170.000,00
			Pembayaran perjalanan dinas ganda, perjalanan dinas yang dilakukan pada hari libur dan pembayaran perjalanan dinas yang melebihi dari standar yang telah ditetapkan		1.105.000,00			1.105.000,00
		700/02/LHP/Insp/2014	Biaya perjalanan dinas ganda (PPTK)		2.110.000,00		2.110.000,00	-
			Kelebihan pembayaran transportasi siswa pada kegiatan seleksi paskibra utusan Sumbar		2.700.000,00		2.700.000,00	-
		700/134/LHP/Insp/2014 Dinas Pendidikan	Perjalanan dinas ganda		575.000,00		575.000,00	-
			Perjalanan dinas hari libur		100.000,00		100.000,00	-
			Kelebihan pembayaran sewa gedung / tempat		1.200.000,00		1.200.000,00	-
			Kekurangan pekerjaan rehab		698.586,00		698.586,00	-
		700/09/LHP/Insp-Prm/2015 SDN 03 Naras Hilir	PPH 21		540.000,00		540.000,00	-
		700/48/LHP/Insp/2014 ; tgl: 20-August-2014 SMK Negeri 1	Makan minum fiktif		270.000,00			270.000,00
			Makan minum ganda		7.263.000,00			7.263.000,00
		Kanderi	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan SMA 5 sebesar 15.343.846,82 oleh CV DBP		5.343.846,00			5.343.846,00
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras dan Anak Sebesar Rp90,54 Juta kepada 53 PNS di Enam SKPD		3.636.582,58			3.636.582,58
		700/108/LHP/Insp-Prm/2017 27 Oktober 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	SPPD Ganda		452.083,33		302.083,33	150.000,00
			SPPD Ganda		87.500,00		37.500,00	50.000,00
			Belanja tidak sesuai ketentuan		1.997.216,67		1.997.216,67	-
			Kelebihan pembayaran honor		6.301.458,33		6.301.458,33	-
			Kelebihan pembayaran honor		765.625,00		765.625,00	-
			Kelebihan pembayaran pekerjaan		3.966.526,67		3.966.526,67	-
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Beras dan Anak Sebesar Rp90,54 Juta kepada 53 PNS di Enam SKPD		956.995,42			956.995,42
		700/108/LHP/Insp-Prm/2017 27 Oktober 2017 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	SPPD Ganda		322.916,67		322.916,67	-
			SPPD Ganda		62.500,00		62.500,00	-
			Belanja tidak sesuai ketentuan		1.426.583,33		1.426.583,33	-
			Kelebihan pembayaran honor		4.501.041,67		4.501.041,67	-
			Kelebihan pembayaran honor		546.875,00		546.875,00	-
			Kelebihan pembayaran pekerjaan		2.833.233,33		2.833.233,33	-
			Dana BOS SMP3		12.572.153,00		12.572.153,00	-
			Dana BOS SD Pariaman Tengah dan Utara		38.412.841,43	8.764.759,57		47.177.601,00
		700/103/LHP/Insp/2013 tgl 12 Oktober 2013	Pengadaan karpet kantor UPTD fiktif sebesar Rp2.125.000,00	PPTK: Khairunas	2.125.000,00		2.125.000,00	-
		LKPD 2011 (KEPATUHAN)	Pemerintah Kota Pariaman Mengenakan Retribusi IMB terhadap Gedung dan Bangunan Pemerintah	PPK DIKPORA : Nusirwan (CV GSP dan CV AB)		7.389.646,40		7.389.646,40

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Kekurangan Volume atas dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Sebesar Rp11.473.390,10 dan Enam Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dua OPD Sebesar Rp284.681.436,55			94.136.394,00		94.136.394,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Kekurangan volume pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas 11 paket pekerjaan sebesar Rp21.166.717,71			12.370.588,61		12.370.588,61
Jumlah					**149.165.598,43**	**122.661.388,58**	**63.079.974,00**	**208.747.013,01**
2	**Dinas Kesehatan**							
		LHP No. 700/96/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 30 Desember 2011 atas Dinkes	Pajak pembayaran honor dan belanja belum setor		1.321.000,00		0,00	1.321.000,00
			Perjalanan dinas ganda dan hari libur		110.000,00		110.000,00	-
		LHP LKPD TA 2012 No. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Pengadaan Alat Medis/Kesehatan/Laboratorium (DAK) pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp733.338.100,00 dan Diantaranya tidak Sesuai dengan Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp39.488.000,00		39.488.000,00			39.488.000,00
			Belanja modal pekerjaan konstruksi pembangunan baru Poskesdes Batang Tajongkek		17.125.513,00		17.125.513,00	-
		700/133/Insp-Prm/X-2016 tanggal 5 Oktober 2016 Pada Dinkes	Pemeriksaan Khusus Kehilangan Uang Kas Dinas Kesehatan Kota Pariaman Sebesar Rp98.907.200,00		90.664.933,00			90.664.933,00
		LHP LKPD TA 2014 No. 07.C/LHP/XVIII.PDG/05/2015 tanggal Mei 2015 Dinkes	Terdapat Realisasi Belanja Pegawai yang Dibayarkan kepada 4 PNS yang Tidak Aktif Bekerja sebesar Rp161.626.222,00		37.285.600,00		6.600.000,00	30.685.600,00
			Pembayaran tiket melebihi satuan harga	Tri Pipo, SKM	6.838.600,00			6.838.600,00
		700/22/LHP/Insp-PRM/2019 tanggal 10 April 2019 Dinas Kesehatan	Terdapat Kelebihan Pembayaran honor narasumber pada kegiatan pendampingan akreditasi puskesmas		7.905.000,00			7.905.000,00
		700/243/LHP/Insp/2023 Dinas Kesehatan	Perjalanan Dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya			7.975.000,00		7.975.000,00
			Kelebihan Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan			1.860.000,00		1.860.000,00
			Kelebihan Pembayaran belanja keg. Peningkatan Mutu pelayanan fasilitas kes Th.2021			19.175.000,00		19.175.000,00
			Kelebihan pembayaran paket data keg. Covid-19			800.000,00		800.000,00
		700/164/LHP/Insp/2015 tgl 16-December-2015	Pelaksanaan pekerjaan rehab poskesdes Simp.Apar dengan nomor kontrak:21/RHB-Poskesdes/S.Apar/Dinkes-2015 tanggal 25 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh CV.Mitra Bersama mengalami keterlambatan selama 13 hari kalender	PPK (Bakhtiar, SKM) menagih ke penyedia CV.Mitra Bersama		1.287.000,00		1.287.000,00
			Ditemukan kekurangan fisik pekerjaan lanjutan ruang rawat puskesmas Kp.Baru Padusunan senilai Rp.972.341,- oleh CV.Putra Kembar dan hasil pekerjaan belum dimanfaatkan	PPK (Bakhtiar, SKM) menagih ke penyedia CV.Putra Kembar		972.000,00		972.000,00
			Ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan belanja modal penataan halaman/lahan/lapangan dan area parkir puskesmas kuraitaji senilai Rp.8.398.000,-	PPK (Bakhtiar, SKM) untuk menagih kepada rekanan CV.Gadies Major Corp		8.398.000,00	597.000,00	7.801.000,00
			Keterlanjuran pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi poskesdes dan pustu	Tri Pipo, SKM	1.277.105,00			1.277.105,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Kemahalan harga pembelian lemari arsip Tahun 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes Tahun 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang Tahun 2012 Rp20.994.500,00	Tri Pipo, SKM	4.000.000,00			4.000.000,00
			Kemahalan harga pembelian lemari arsip th 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes th 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang th 2012 Rp20.994.500,00	Tri Pipo, SKM	12.730.686,00			12.730.686,00
		700/118/LHP/Insp/2014 tgl 31 Desember 2014 DINKES	Belanja modal pekerjaan konstruksi pembangunan baru Poskesdes Batang Tajongkek		22.125.513,00			22.125.513,00
			kekurangan volume pekerjaan		1.989.578,00		1.989.578,00	-
			Belanja modal konstruksi rehab Rumah Dinas Tenaga Medis dan Paramedis Puskesmas Marunggi	PPK (Tri Pipo, SKM), PPTK (Hendri, SE) menagih denda keterlambatan pekerjaan kepada Penyedia		2.145.456,00	801.622,00	1.343.834,00
		700/242/LHP/Insp/2021 31 Desember 2021	Perjalanan dinas ganda Tahun 2019	Pelestario		200.000,00		200.000,00
			SPPD melebihi ketentuan tahun 2019	Pelestario		450.000,00		450.000,00
Jumlah					**242.861.528,00**	**43.262.456,00**	**27.223.713,00**	**258.900.271,00**
3	**DPUPR**							
		LHP LKPD TA 2009 No.126/S/XVIII.PDG/6/2010 tgl 7 Juli 2010	Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum CV Darma Swasta		13.000.000,00			13.000.000,00
		LHP LKPD TA 2010 No. 08/LHP/XVIII.PDG/06/2011 tgl 21 Juni 2011	Terdapat enam kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp3.159,47jt tidak dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2010 dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp674,80jt belum dicairkan CV Glorius		420.000.000,00			420.000.000,00
		LHP No. 700/95/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 6 Feb 2012 atas Dinas PU	Kelebihan biaya perjalanan an. Ir. Aprimensyah & Subali		1.150.000,00			1.150.000,00
		LHP LKPD TA 2012 No. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Terdapat Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan TA 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp420.454.919,32 dan Satu Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp15.343.846,82		40.267.664,00			40.267.664,00
		LHP LKPD TA 2012 No. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Padang Birik-Birik pada Dinas Pekerjaan Umum tidak Sesuai Ketentuan dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp77.610.350,00 telah Kadaluarsa serta Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp28.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	-
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sembilan SKPD Diragukan Kebenarannya dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Maksimal Sebesar Rp28.860.950,99		2.472.451,00		1.946.651,00	525.800,00
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Terdapat Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp197.396.331,28		114.076.245,28			114.076.245,28

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Kekurangan Volume atas Kontrak Pembangunan Trotoar Simpang RSU-BLK Sebesar Rp2.539.200,00 dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp87.676.750,00 Belum Dicairkan dan Disetor ke Kas Daerah		85.215.950,00			85.215.950,00
		700/97/LHP/Insp/2014 ; tgl: 16-October-2014	Perjalanan dinas ganda		350.000,00		350.000,00	-
		700/97/LHP/Insp/2014 ; tgl: 16-October-2014	Kekurangan fisik		4.963.000,00			4.963.000,00
		LHP LKPD TA 2015 No. 31.C/LHP/XVIII.PDG/06/2016 Tanggal 8 Juni 2016	Terdapat kekurangan penetapan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Pembangunan Pasar Nagari Kurai Taji sebesar Rp7.290.902,63, pekerjaan jaringan listrik lampu heighmast sebesar Rp8.100.920,00, dan pekerjaan pembangunan tambatan kapal sebesar Rp5.766.295,00		8.100.920,00			8.100.920,00
		700/147/LHP/Insp-Prm/2017 19 Desember 2017	Kelebihan pembayaran pekerjaan		4.000.000,00		4.000.000,00	-
		700/14/Insp-2019 tanggal 28 Februari 2019 Inspektorat	CV Genniyo Technik sudah menerima uang muka sebesar Rp375.305.100 dan termin I sebesar Rp203.290.263 = Rp 578.595.363 serta sudah mengembalikan uang muka sebesar Rp98.826.275 sehingga sisa uang muka yang harus dikembalikan rekanan CV Genniyo Technik kepada kas daerah sebesar Rp281.478.825		108.823.573,00	31.999.999,00		140.823.572,00
		39.C/LHP/XVII.PDG/05/2019 700/14/Insp-2019 tanggal 28 Februari 2019 Inspektorat	Terhadap denda yang belum dibayarkan oleh CV Genniyo Technik, PPK menagih denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp44.354.242,86		22.843.055,32			22.843.055,32
		LHP LKPD TA 2012 Np. 08/LHP/XVIII.PDG/05/2013 tgl 20 Mei 2013	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gerbang Batas Kota Padang Birik-Birik pada Dinas Pekerjaan Umum tidak Sesuai Ketentuan dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp77.610.350,00 telah Kadaluarsa serta Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp28.000.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00	-
		34/LHP/XVIII.PDG/05/2023	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Mutu pada 6 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPRP Sebesar Rp628.586.499,11. Nilai Rekomendasi Rp505.896.613,22 (Rp628.586.499,11 - Rp135.405.000,00)			109.664.105,15		109.664.105,15
			Pembayaran Biaya Langsung Personil/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada 7 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61			20.389.600,00		20.389.600,00
		37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Kekurangan volume atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat OPD			41.179.106,06	5.000.000,00	36.179.106,06
		35/LHP/XVIII.PDG/04/2022	Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dua OPD Sebesar Rp11.469.753,63 dan Enam Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dua OPD Sebesar Rp284.716.510,06			8.526.396,00	8.509.714,00	16.682,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		27.C/LHP/XVIII.PDG/05/2020	Kelebihan Pembayaran atas kekurangan Volume dan Kesalahan perhitungan pembesian atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp150,77 Juta			67.392.062,46		67.392.062,46
		37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Honorarium			215.018.931,00		215.018.931,00
Jumlah					**855.562.858,60**	**494.170.199,67**	**50.106.365,00**	**1.299.626.693,27**
4	**Perkim-LH**							
		LHP No.700/55/LHP/Bawas-Prm/XII/2006 Tgl. 28 Desember 2006 atas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja	Pajak yang belum disetor		853.407,00			853.407,00
				Drs. Syamsurizal dan Nasri	17.876.000,00			17.876.000,00
		LHP No. 700/27/LHP/Insp-Prm/VIII/2008 tgl 19 Agt 2008 atas Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja	Pengembalian honor		850.000,00			850.000,00
			Pengeluaran fiktif		962.500,00			962.500,00
			Biaya makan fiktif		375.000,00			375.000,00
		34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023	Pembayaran Biaya Langsung Personil/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada 7 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61	Nina Gustina		7.500.000,00		7.500.000,00
				Alhamidi		600.000,00		600.000,00
				Arif Fadilah		600.000,00		600.000,00
				Melky Hadi Irawan		600.000,00		600.000,00
		/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Tim sebesar Rp6.900.000,00	Feri Andri		450.000,00	450.000,00	-
				Feri Andri		450.000,00	315.000,00	135.000,00
				Erik Saputra		6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			Jumlah Pemberian Honorsrium melebihi batas jumlah Tim Maksimal yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000,00	Feri Andri		1.400.000,00		1.400.000,00
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.253.880,00	Feri Andri		835.380,00		835.380,00
				Azria Paldi Donal		418.500,00	418.500,00	-
Jumlah					**20.916.907,00**	**18.853.880,00**	**4.183.500,00**	**35.587.287,00**
5	**Kantor Satpol-PP**							
		LHP No. 700/88/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Jan 2012 atas Kantor Satpol PP	Pembayaran kegiatan fiktif bulan Juni 2011		0,00	395.000,00		395.000,00
			Kelebihan pembayaran sewa gedung		50.000,00	1.600.000,00		1.650.000,00
			Pembayaran makan minum ganda		1.625.000,00		1.265.000,00	360.000,00
			Kelebihan pembayaran biaya operasional bulan Agustus 2011		405.000,00	80.000,00		485.000,00
			Kelebihan pembayaran PTT		20.000,00		10.000,00	10.000,00
			PPn dan PPh belum setor		460.000,00		460.000,00	-
		700/48/LHP/Insp/2013 Tgl 04-Jun-2013	Kegiatan fiktif pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan penegakan Perda TA 2013 pada Kantor Satpol PP yang dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 Januari 2013, dimana pada hari itu anak sekolah masih libur tahun baru, sejumlah Rp.2.245.000.-		775.000,00		620.000,00	155.000,00
			Perjalanan dinas ganda Tahun 2013 pada Kantor Satpol PP sejumlah Rp150.000.	Yose Rizal S.STP.M.Si (Kepala Kantor Satpol PP)	150.000,00		150.000,00	-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pembayaran ganda terhadap kegiatan-kegiatan di Kantor Sat Pol PP sejumlah Rp 1.315.000,- an: 1. Arisman Rp. 65.000,- 2. Sarjawan, SH Rp. 40.000,- sehingga PPTK harus menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 1.315.000,-.	PPTK	1.250.000,00		1.210.000,00	40.000,00
			Kekurangan volume dan harga satuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan harga pasar pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pembuatan sekat ruangan) pada Satpol PP sebesar Rp 2.253.631,13,-		2.253.631,13			2.253.631,13
		700/116/LHP/Insp/2013 tgl 3 Desember 2013	Pembayaran perjalanan dinas , uang operasional, uang piket dan honor ganda pada Tahun 2012 sebesar Rp4.281.000,00 dan Tahun 2013 sebesar Rp1.398.000,00 (Azwar dkk)	Azwar dkk	835.000,00		835.000,00	-
		700/43/LHP/Insp/2014 ; tgl: 24-July-2014 SATPOL PP	Perjalanan dinas ganda		350.000,00		350.000,00	-
Jumlah					**8.173.631,13**	**2.075.000,00**	**4.900.000,00**	**5.348.631,13**
6	**DP3AKB**							
		700/64/LHP/Insp/2012 Tgl 27-Jun-2012 atas BP2KB	Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda 8 orang pegawai BP2KB		1.420.000,00		1.420.000,00	-
		700/41/LHP/Insp/2014 ; tgl: 21-July-2014 UPT. Penyuluh KB Kec.ParUt	Pengeluaran fiktif		2.442.000,00		2.442.000,00	-
			Perjalanan dinas ganda		325.000,00		325.000,00	-
			Perjalanan dinas hari libur		305.000,00		305.000,00	-
		700/42/LHP/Insp/2014 ; tgl: 21-July-2014 UPT. Penyuluh KB Kec.ParTeng	Perjalanan dinas hari libur		195.000,00		195.000,00	-
			Pengeluaran fiktif		2.357.000,00		2.357.000,00	-
		700/16/LHP/Insp/2024 tanggal 25 maret 2024	pemborosan biaya makan minum monev Stunting Tahun 2023			11.100.000,00		11.100.000,00
Jumlah					**7.044.000,00**	**11.100.000,00**	**7.044.000,00**	**11.100.000,00**
7	**DPMD**							
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional	Ade Firman,SE	10.853.500,00		6.916.500,00	3.937.000,00
		LHP Inspektorat No.700/39/LHP/Insp-Prm/VII/2009 tgl 7 Juli 2009	Perjalanan dinas ganda	Rosdi	400.000,00			400.000,00
			Perjalanan dinas ganda	Rosdi	100.000,00			100.000,00
			Setoran PBN I (Pajak makan minum Tahun 2008)	Amrin	506.100,00			506.100,00
		LHP Inspektorat No.700/84/LHP/Insp/2013 tgl 25 September 2013	Makan minum fiktif kegiatan pelantikan pengurus RT dan BPD	PPTK (Yazaherman, S.Sos) dan KPA (Yulinesra)	11.800.000,00			11.800.000,00
			Pajak makan minum belum setor	PPTK (Yazaherman, S.Sos)	726.000,00			726.000,00
			Perjalanan dinas fiktif, ganda dan hari libur	Yazaherman, Sos	475.000,00			475.000,00
			Pajak belum setor	PPTK (Yazaherman, S.Sos)	700.455,00			700.455,00
		700/229/LHP/Insp/2023	Kelebihan pembayaran perencanaan pada keg. Rehabilitasi Paving Block Hal Kantor sejumlah Rp.2.080.000 dengan Pelaksana CV. Nidianra Jaya Konsultan	PPTK (Fidyah Husna, S.Pd) menagih ke rekanan dan menyetorkan		2.080.000,00		2.080.000,00
Jumlah					**25.561.055,00**	**2.080.000,00**	**6.916.500,00**	**20.724.555,00**
8	**Dinas Komunikasi dan Informatika**							
		700/182/LHP/Insp/2021 Tgl 10 November 2021 atas Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengeluaran belanja penggantian biaya pengiriman majalah tabuik tahun 2019 dan 2020 fiktif		22.350.000,00		4.500.000,00	17.850.000,00
			Perjalanan daerah tidak sesuai ketentuan		550.000,00			550.000,00
Jumlah					**22.900.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**18.400.000,00**
9	**Dinas Koperindag, UKM**							
		LHP No. 700/46/ LHP/Bawas-Prm/XI/2007 tgl 2 Okt 2007 atas UPTD Pasar Pariaman		Penerimaan pendapatan	14.005.000,00	18.415.000,00		32.420.000,00
				Penyetoran Penerimaan	67.130.000,00		64.125.000,00	3.005.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP No. / LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Regional	Yulinesra, S.Sos, M.M		340.000,00		340.000,00
				Hengky Pratama, S.Sos		1.330.000,00		1.330.000,00
Jumlah					**81.135.000,00**	**20.085.000,00**	**64.125.000,00**	**37.095.000,00**
10	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**							
		LHP No. 700/82/LHP/Insp/ Prm/2012 tgl 21 Sept 2012 atas Disbudpar	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah		300.000,00		300.000,00	-
			Pembayaran belanja tidak sesuai peraturan		140.000,00		140.000,00	-
		1341098		Endri Chaniago, ST NIP: 197707302010011006 jabatan: Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi	5.587.857,00		5.587.857,00	-
		1279204		Meikiko Eddys Silitonga, S.Kom NIP: 198105812010011018 Jabatan: Staf Unker: Dinas	4.800.000,00		4.800.000,00	-
		1297328		Gentri Herizal. S.Sn NIP: 197612152010011010 Jabatan:	3.324.800,00		3.324.800,00	-
		1297335		Dani Satria Marga NIP: 198212012005011005 jabatan: Kasubid Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Unker: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.725.000,00		1.725.000,00	-
			700/23/LHP/INSP/2019	Biaya perjalanan dinas ganda Tahun 2017 senilai Rp. 2.650.000		100.000,00		100.000,00
				Biaya perjalanan dinas ganda Tahun 2018 senilai Rp. 2.500.000		50.000,00		50.000,00
				Kelebihan pembayaran TA 2017 pada dinas Pariwisata sejumlah Rp. 7.927.274 (S = Rp.2.527.274)		1.000.000,00		1.000.000,00
		700/160/LHP-AK/Insp-prm/2020	SPPD ganda tahun 2019	David Ardi		200.000,00	-	200.000,00
			Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman sebesar Rp. 63.575.000,00 tidak sesuai aturan yang berlaku	Agus Mandri Suardi M		4.050.000,000	1.375.000	2.675.000,00
				Dani Satria Marga		5.300.000,000	4.400.000	900.000,00
				Meikiko ES		12.050.000,00		12.050.000
				Dani Satria Marga		1.400.000,00		1.400.000
				Meikiko Eddys Silitonga, S.Kom		2.800.000,00		2.800.000
		LHAK-239/Insp/2023 tgl. 12 Desember 2023 Dinas Pariwisata		Kegiatan launching dan publikasi karya film senilai		8.850.000	-	8.850.000
		LKPD 2023		Pembayaran Biaya Langsung Personel/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.120.064.018,61		2.340.000,00		2.340.000
Jumlah					**15.877.657,00**	**38.140.000,00**	**21.652.657,00**	**32.365.000,00**
11	**Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**							
		LHP No. 85/Bws-Keu/2007	Kekurangan volume Pembuatan jalan usaha tani tidak sesuai kontrak (CV. TRD)	CV. TRD	34.403.268,00			34.403.268,00
		LHP No. 86/Bws-Keu/2007	Pembayaran biaya perjalanan dinas		2.225.000,00			2.225.000,00
			Kekurangan pelaksanaan proyek		7.599.512,00			7.599.512,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Kelemahan dan kekurangan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan	Ir. H Syaiful Rizal, M.M.	16.449.850,00			16.449.850,00
			Pengadaan buku komik flu burung melebihi harga pasar	Indrayani	850.000,00			850.000,00
			Pengadaan Bibit Sapi tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak sebesar Rp182.850.000,00	Noviar Ramadhani	179.350.000,00			179.350.000,00
		LHP LKPD TA 2013 14/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014	Kelebihan Pembayaran dan Kekurangan volume fisik pekerjaan jalan kampung di Pulau Angso sebesar Rp. 10.170.635,20		9.170.635,20			9.170.635,20
		700/16/LHP/Insp-Prm/2016 Tanggal 26 Februari 2016 pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan	Terdapat pemahalan harga atas Pekerjaan Tangga Besi Pabrik Es oleh CV Indo Sinergi sebesar Rp2.658.000,00	CV Indo Sinergi	2.658.000,00		2.658.000,00	-
	Dinas Kelautan, Perikanan	LHP BPK No. 57/S/XVIII.PDG/07 /2008 tgl 11 Juli 2008	Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pariaman yang tidak selesai, Uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Total Akseleri Kontruksi belum dicairkan oleh KPA dan PPTK (LHP BPK No. 57/S/XVIII.PDG/07 /2008 tgl 11 Juli 2008)	Ir. Agustriatman	2.000.000,00		2.000.000,00	-
			Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Pariaman yang tidak selesai, Uang jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Total Akseleri Kontruksi belum dicairkan oleh KPA dan PPTK (LHP BPK No. 57/S/XVIII.PDG/07/2008 tgl 11 Juli 2008)	Mukhlis, SP	20.565.517,58			20.565.517,58
			Kekurangan dan keterlambatan pekerjaan pemasangan instalasi listrik th 2010	Hendri, SE dan CV. Army Jaya Teknik	12.000.000,00		12.000.000	-
	Dinas Pertanian, Pangan dan Perika	LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Kekurangan volume atas belanja barang untuk dijual / diserahkan kepada masyarakat pada dua OPD	CV. Shinwa Karya Anava (DPPP)		17.564.106,00	10.925.552	6.638.554,00
				CV. SALON		15.821.200,00	15.821.200,00	-
				CV. Cinduamato Putra (DPPP)		8.612.860,00	-	8.612.860,00
				CV. Putra Kreatif (DPPP)		7.494.620,00	700.000	6.794.620,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Biaya Langsung Personel/Billing Rate Belanja Jasa Konsultansi pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp120.064.018,61	Emi Suarti (Dinas Pertanian)	7.800.000,00			7.800.000,00
				Astuti Dwi Putri (Dinas Pertanian)		3.100.000,00		3.100.000,00
				AzWar (Dinas Pertanian)		3.100.000,00		3.100.000,00
				Isnawati (Dinas Pertanian)		3.100.000,00		3.100.000,00
				Sri Arnita (Dinas Pertanian)		3.100.000,00		3.100.000,00
				Opy Kurniasari (Dinas Pertanian)		3.100.000,00		3.100.000,00
Jumlah					**287.271.782,78**	**72.792.786,00**	**44.104.752,00**	**315.959.816,78**
12	**Sekretariat Daerah**							
		LHP No. 131/S/XVIII.PDG/6/2009 tgl 26 Juni 2009	Pemberian bantuan biaya operasional Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp190.800.000,00 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan Daerah		87.400.000,00	28.100.000,00		115.500.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pemberian biaya tamu secara tetap kepada Sekretaris Daerah yang dibebankan ke Akun Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp60.000.000 tidak memiliki dasar ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan Daerah		60.000.000,00			60.000.000,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Kelebihan pembayaran transportasi Peserta diklat Kepala Desa/Lurah		1.785.000,00			1.785.000,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Pembayaran honor panitia yang tidak sesuai dengan peruntukannya Bagian Sosial		13.664.870,00			13.664.870,00
			Pembayaran honor panitia yang tidak sesuai dengan peruntukannya Bagian Pemerintahan		5.420.500,00			5.420.500,00
		LHP No. 84/Bws-Keu/2007 tgl 3 Okt 2007	Pembayaran honor tim penyusun profil kerja sama daerah tidak sesuai ketentuan Wako.		2.295.000,00			2.295.000,00
			Pembayaran honor Pengguna anggaran Sekretariat Derah tahun 2006 tidak sesuai ketentuan		3.600.000,00			3.600.000,00
		LHP No. 700/89/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 29 Desember 2011 atas Setda	Perjalanan dinas ganda dan hari libur TA 2010 dan 2011 (Bag. Umum)		375.000,00			375.000,00
		700/114/LHP/Insp/2013 tgl 3 Desember 2013	Perjalanan dinas ganda pada bagian umum Setda Rp3.025.000,00 (Nal Afrizal dkk.)		550.000,00	750.000,00		1.300.000,00
		142914	Keterlanjuran pembayaran paket pekerjaan rehabilitasi poskesdes dan pustu	Tri Pipo, SKM	1.277.105,00			1.277.105,00
		142917	Keterlanjuran pembayaran uang harian					-
		142919	Pembayaran tiket melebihi satuan harga		6.838.600,00			6.838.600,00
		1049602	Kemahalan harga pembelian lemari arsip Tahun 2009 Rp5.885.000,00, kekurangan pekerjaan pembangunan Poskesdes Tahun 2009 Rp18.551186,00, dan kemahalan harga pengadaan barang Tahun 2012 Rp20.994.500,00	Tri Pipo SKM, M.Kes	4.000.000,00			4.000.000,00
		1340989		Lia Lestari NIP : 197610172000032002 Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Unker : Sekretariat Daerah	500.000,00			500.000,00
		1340990		Yaminurizal NIP : 196612121993081001 Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Unker : Sekretariat Daerah	20.923.000,00			20.923.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 2 mei 2024	BOP			20.400.000,00		20.400.000,00
			Melebihi batas honor	Yota Balad, S.STP, M.Si		45.915.000,00		45.915.000,00
				Drs. YAMINU RIZAL, M.Si		9.680.000,00		9.680.000,00
Jumlah					**208.629.075,00**	**104.845.000,00**	**0,00**	**313.474.075,00**
13	**Sekretariat DPRD**							
		LHP No. 131/S/XVIII.PDG/ 6/2009 tgl 26 Juni 2009	Harga pengadaan Notebook pada Sekretariat DPRD diperhitungkan lebih tinggi minimal sebesar Rp26.899.998,00		26.899.998,00			26.899.998,00
		700/122/LHP/Insp/2013 tgl 18 Desember 2013	Kelebihan pembayaran BBM (PPTK Salma)		7.850.000,00	200.000,00	6.618.000	1.432.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Pengadaan barang fiktif pada pengadaan peralatan rumah jabatan Ketua DPRD Tahun 2012 sebesar Rp15.400.000,00 (KPA, PPTK)		15.400.000,00		6.000.000	9.400.000,00
		700/24/LHP/Insp-Prm/2016 Tanggal 10 Maret 2016 pada Sekretariat DPRD	Terdapat pembayaran ganda atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan honor lembur sebesar Rp2.880.750,00		1.250,00		1.250	-
			Pembayaran kegiatan Bimtek tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp10.890.000,00		43.750,00		43.750	-
			Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas Ketua DPRD tetap dibayarkan meskipun yang bersangkutan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada saat yang sama sebesar Rp2.902.000,00		1.813.750,00		1.813.750	-
		700/24/LHP/Insp-Prm/2016 Tanggal 10 Maret 2016 pada Sekretariat DPRD	Terdapat pembayaran ganda atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan honor lembur sebesar Rp2.880.750,00		750,00			750,00
			Pembayaran kegiatan Bimtek tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp10.890.000,00		26.250,00			26.250,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas Ketua DPRD tetap dibayarkan meskipun yang bersangkutan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada saat yang sama sebesar Rp2.902.000,00		1.088.250,00			1.088.250,00
		LHP LKPD TA 2016 No. 30.C/LHP/XVIII.PDG/05 /2017 Tanggal 26 Mei 2017	Belanja Publikasi Kegiatan Parlementaria atas Nama Pribadi Sebesar Rp24,45 Juta Merugikan Keuangan Daerah dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Outbound Anggota DPRD Sebesar Rp182,41 Juta Memboroskan Keuangan Daerah		815.000,00		-	815.000,00
		700/122/LHP/Insp/2013 tgl 18 Desember 2013	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp9.265.000,00 (Nofrizal dkk)			1.000.000,00		1.000.000,00
		LHP Inspektorat No.700/85/LHP/Insp/2011 tgl 26 Desember 2011	Terjadinya keterlambatan 9 (sembilan) hari kalender pekerjaan pengadaan genset dengan total biaya Rp.425.004.000,- dengan denda keterlambatan Rp.3.825.000,- Pihak Kedua Direktur **CV.Multi Guna**			3.825.000		3.825.000,00
			Tidak ditemuinya fisik pengadaan alat penangkal petir dan pengadaan genset			19.450.000		19.450.000,00
		700/202/LHP/Insp/2021	Pembayaran perjalanan dinas Tahun 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.			63.752.000,00	29.378.400	34.373.600,00
		700/14/LHP/Insp-Prm/2023	Keterlanjuran transfer kepada Sdri. Fitri Nora, SE sejumlah Rp. 15.000.000,- dan Sdr. Arie Surya Dirgantara sejumlah Rp. 3.500.000,- (ditagih dan diserahkan kepada Sdr. M. Fahreza).			18.500.000,00		18.500.000,00
			Terdapat pembayaran SPPD fiktif sejumlah Rp. 14.120.000,-			14.120.000	4.950.000	9.170.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Perjalanan dinas terindikasi tidak dilaksanakan			20.160.000,00		20.160.000,00
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar			9.705.554,00	2.000.000	7.705.554,00
Jumlah					**53.938.998,00**	**150.712.554,00**	**50.805.150,00**	**153.846.402,00**
14	**Kec. Parteng**							
		LHP No.700/12/LHP/Bawas-Prm/VI-2006 tgl 15 Juni 2006 atas Kantor Camat Pariaman Tengah	Pengeluaran yang tidak diperbolehkan: biaya ucapan selamat (iklan), dan biaya cetak kartu lebaran		800.000,00			800.000,00
			Pembayaran biaya perbaikan kursi rapat fiktif		1.500.000,00			1.500.000,00
Jumlah					**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
15	**Kecamatan Partim**	1341103		Afrizal NIP: 196304012007011002 Jabatan: Staf Kecamtan Pariaman Timur Unker: Kecamatan Pariaman Timur	43.685.600,00		12.400.000,00	31.285.600,00
Jumlah					**43.685.600,00**	**0,00**	**12.400.000,00**	**31.285.600,00**
16	**Inspektorat**							
		LHP No. 35/LHP/XVIII.PDG/04/2022	HONOR TPKD	Bobby Mafrozza NIP: 199303032022031010 Jabatan : Auditor Ahli Pertama Unker : Inspektorat	7.550.000,00		6.000.000,00	1.550.000,00
		LHP No. 34/LHP/XVIII.PDG/05/2023	HPK	SALMI	2.210.000,00			2.210.000,00
		LHP No. 35/LHP/XVIII.PDG/04/2022	HONOR TPKD 2021		10.849.400,00		10.127.600,00	721.800,00
		LHP No. 126/S/XVIII.PDG/07/2010	BBM		270.000,00			270.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim	Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Genius Umar		11.475.000,00		11.475.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			1.275.000,00		1.275.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Mardison Mahyudin		9.945.000,00		9.945.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			1.190.000,00		1.190.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Roberia		3.825.000,00		3.825.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Yota Balad		12.750.000,00		12.750.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			1.105.000,00		1.105.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Yaminu Rizal		11.220.000,00		11.220.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Elfis Candra		11.220.000,00		11.220.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Alfian Harun		10.200.000,00		10.200.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			1.020.000,00	1.020.000,00	-
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Jumlah pemberian honorarium melebihi batas jumlah tim maksimal yang ditetapkan	honorarium melebihi batas jumlah tim maksimal			11.465.000,00		11.465.000,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/2024 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim	Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Indra Syamsu		350.000,00		350.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Fitra Hadi		6.916.000,00	346.000,00	6.570.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Mairizal		8.550.000,00		8.550.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Sadrianto		2.687.500,00		2.687.500,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			850.000,00		850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Nen Marni		637.500,00		637.500,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Yulia Hariati		4.462.500,00		4.462.500,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			850.000,00		850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Salmi		7.650.000,00		7.650.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			850.000,00		850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Zuswati Safitri		6.375.000,00		6.375.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			850.000,00		850.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Sari Syafrin		5.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
			Honorarium Tim Pendapingan dan Asistensi	Syabran Jabar		4.275.000,00		4.275.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah			475.000,00		475.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Asnizar		400.000,00		400.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Don Suherta		600.000,00		600.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Benny Armiyuza		600.000,00		600.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Yance Nurfia Ningsih		500.000,00		500.000,00
			Honorarium tim satuan tugas pelaksana Implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Zulkarnaini		500.000,00		500.000,00
Jumlah					**20.879.400,00**	**140.568.500,00**	**17.993.600,00**	**143.454.300,00**
17	**BPKPD**							
	DPPKA (SKPK	LHP No. 700/12/LHP/Bawas-Prm/VI/2008 tgl 20 Juni 2008 atas Kel. Ujung Berung	SPPD hari libur		250.000,00		250.000,00	-
		LHP No. 700/14b/LHP/Bawas-Prm/VI/2008 tgl 20 Juni 2008 atas Kel. Alai Gelombang	Pembayaran fiktif		525.000,00		525.000,00	-
		LHP No. 700/22/LHP/Bawas-Prm/VIII/2008 tgl 25 Agt 2008 atas Ds. Cubadak Aia	SPPD fiktif		30.000,00		30.000,00	-
			Setoran pajak		1.051.000,00		1.051.000,00	-
			Setoran pajak		670.000,00		670.000,00	-
			Perjalanan hari libur		550.000,00		550.000,00	-
			Kelebihan pembayaran		480.000,00		480.000,00	-
		LHP No. 700/48/LHP/Insp/XI/2008 tgl 27 Nov 2008 atas Kel. Jalan Baru	Kerugian daerah		2.000.000,00		2.000.000,00	-
		LHP No. 700/58/LHP/Insp-Prm/XII/2008 tgl 5 Des 2008 atas Ds. Naras Hilla	Pembelian fiktif		1.200.000,00			1.200.000,00
			Potongan pajak		1.774.000,00			1.774.000,00
		LHP No. 700/54/LHP/Insp-Prm/VIII/2009 tgl 14 Agt 2009 atas Kel. Jalan Kereta Api	Setoran pajak		873.000,00			873.000,00
		LHP No. 700/56/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Ujung Batuang	SPPD ganda		50.000,00			50.000,00
			SPPD hari libur		50.000,00			50.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP No. 700/57/LHP/Insp-Prm/IX/2009 tgl 29 Juli 2009 atas Kel. Karan Aur	Setoran Pajak		2.537.000,00		2.497.000,00	40.000,00
		LHP No. 700/105/LHP/Insp-Prm/XII/2009 tgl 22 Des 2009 atas Ds. Palak Aneh	Pengeluaran fiktif		1.500.000,00			1.500.000,00
			Pungutan pajak		2.673.000,00			2.673.000,00
		LHP No. 700/33/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 11 April 2011 atas Ds. Apar	PPn dan PPh belum setor		1.276.000,00		1.276.000,00	-
			Perjalanan dinas ganda		20.000,00		20.000,00	-
		LHP No. 700/32/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 20 April 2011 atas Ds. Ampalu	PBN 1 belum setor		68.000,00		68.000,00	-
			PBN 1 lembaga desa belum setor		109.000,00		109.000,00	-
			Pajak lembaga desa belum setor		295.000,00		295.000,00	-
		LHP No. 700/47/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 20 Juni 2011 atas Ds. Pauh Timur	PPh pasal 23 belum setor		16.000,00			16.000,00
			Pajak dana fisik LPM belum setor		2.105.000,00		1.834.772,00	270.228,00
		LHP No. 700/44/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Juli 2011 atas Ds. Simpang Kurai Taji	Pajak yang belum setor		442.000,00			442.000,00
			PPn dan PPh belum setor		3.872.000,00			3.872.000,00
		LHP No. 700/46/LHP/Insp-Prm/2011 tgl 4 Juli 2011 atas Ds. Palak Aneh	Pajak yang belum setor		3.682.000,00			3.682.000,00
			PBN 1 belum setor		538.000,00			538.000,00
		LHP No. 700/11/LHP/Insp/2012 tgl 2 Febr 2012 atas Ds. Taluk	PPn dan PPh belum setor		4.024.000,00			4.024.000,00
		LHP No. 700/12/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 28 Febr 2012 atas Ds. Tanjung Sabar	PPn dan PPh belum setor		6.961.000,00			6.961.000,00
		LHP No. 700/13/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 1 Febr 2012 atas Ds. Naras Hilir	PPn dan PPh belum setor		6.192.000,00		6.192.000,00	-
			PBN 1 belum setor		835.000,00		835.000,00	-
		LHP No. 700/19/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 1 Maret 2012 atas Ds. Sikabu	PPh pasal 23 belum setor		400,00		400,00	-
		LHP No. 700/20/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 23 Apr 2012 atas Ds. Air Santok	PPn dan PPh TA 2010 dan 2011 belum setor		3.485.000,00			3.485.000,00
			PBN 1 TA 2010 dan 2011 belum setor		865.000,00			865.000,00
		LHP No. 700/23/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 30 Maret 2012 atas Kel. Jalan Baru	PBN 1 TA 2010 belum setor		96.000,00			96.000,00
			Perjalanan dinas ganda an. Sovia Yetti		65.000,00		65.000,00	-
		LHP No. 700/24/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 30 Mar 2012 atas Kel. Kp. Pondok	PPn dan PPh pasal 22 belum setor		50,00		50,00	-
		LHP No. 700/41/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 1 Feb 2012 atas Ds. Sei Rambai	PPn dan PPh pasal 22 belum setor		2.431.000,00		2.431.000,00	-
			PBN 1 belum setor		149.000,00		149.000,00	-
		LHP No. 700/60/LHP/Insp/2012 tgl 1 Mei 2012 atas Ds. Jati Mudik	Kelebihan biaya perjalanan dinas		1.000.000,00			1.000.000,00
		LHP No. 700/62/LHP/Insp-Prm/2012 tgl 1 Mei 2012 atas Kel. Karan Aur	PBN 1 belum setor		157.000,00		157.000,00	-
		700/46/LHP/Insp/2013 Tgl 04-Jun-2013	Pengadaan fiktif sejumlah Rp. 3.013.865,- terhadap pembelian inventaris desa Sungai Rumbai sehingga bendaharawan desa (Ermidawati) harus menyetorkan kembali ke kas desa sejumlah Rp. 3.013.865,-		3.013.865,00		3.013.865,00	-
		700/09/LHP/Insp/2014 tgl 11 Februari 2014	Biaya perjalanan dinas ganda lurah dan sekretaris lurah Rp390.000,00		390.000,00			390.000,00
		700/45/LHP/Insp/2015 Kelurahan Jawi-Jawi II	kegiatan yang dialokasikan pada anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dikelola oleh LPM tidak dilaksanakan		4.900.000,00			4.900.000,00
		700/43/LHP/Insp/2015 Kelurahan Kampung Perak	Pembayaran beberapa kegiatan tidak sesuai bukti fisik		450.000,00		450.000,00	-
			Belanja foto copy tidak sesuai kebutuhan		745.000,00		745.000,00	-
		700/118/LHP/Insp/2015 Tanggal 22 September 2015 Desa Palak Aneh	Kemahalan harga terhadap pembelian barang sejumlah Rp. 1.936.364		1.936.363,00		1.936.363,00	-
		700/119/LHP/Insp/2015 Tanggal 22 September 2015 Kelurahan Kampung Jawa II	Perjalanan dinas ganda dan hari libur TA 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 265.000		200.000,00		200.000,00	-
		700/120/LHP/Insp/2015 Tanggal 22 September 2015 Kelurahan Jawi-jawi I	Belum adanya pertanggung jawaban SPJ atas dana kelembagaan oleh LPM, PKK, dan Karang Taruna TA 2013 dan 2014 sejumlah Rp. 45.350.000		45.350.000,00		44.505.000,00	845.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		LHP LKPD TA 2015 No. 31.C/LHP/XVIII.PDG/06/2016 Tanggal 8 Juni 2016	Pengeluaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp25.807.800,00 digunakan untuk mengganti kelebihan penyetoran sisa dana UP oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum		11.855.850,00		11.855.850,00	-
		700/025/LHP/Insp/2014 tgl 25 April 2014 Desa Pauh Timur	Pengadaan barang fiktif, yaitu pembelian mesin ketik manual TA 2013 sebesar Rp1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,00
		700/032/LHP/Insp/2014 tgl 26 Mei 2014 Desa Sungai Rambai	Pembayaran ganda makan minum rapat sebesar Rp262.500		262.500,00		262.500,00	-
		LHP LKPD TA 2015 No. 31.C/LHP/XVIII.PDG/06/2016 Tanggal 8 Juni 2016	Pengeluaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp25.807.800,00 digunakan untuk mengganti kelebihan penyetoran sisa dana UP oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum		3.951.950,00		3.951.950,00	-
	BPKPD	LHP LKPD TA 2014 No. 07.C/LHP/XVIII.PDG/05/2015 tanggal Mei 2015	Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah TA 2014 tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Minimal Sebesar Rp58.301.724,25		22.642.856,25		22.642.856,25	-
		LKPD 2021 LHP No. /LHP/XVIII.PDG/04/2022	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah (TPKD) Sebesar Rp1.811.330.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan			668.621.381,00		668.621.381,00
		LKPD 2022 LHP No. 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tgl 5 Mei 2023	Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional Sebesar Rp879.625.000,00			399.491.769,00		399.491.769,00
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan			85.435.000,00		85.435.000,00
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp109.028.388,00 dan			3.900.000,00		3.900.000,00
Jumlah					**152.094.834,25**	**1.157.448.150,00**	**111.048.606,25**	**1.198.494.378,00**
18	**Kantor Kesbangpol**	LHP LKPD TA 2023 Nomor 37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	Genius Umar		11.475.000,00		11.475.000,00
				Roberia		3.825.000,00		3.825.000,00
				Mardison mahyudin		10.710.000,00		10.710.000,00
				Yota Balad		13.260.000,00		13.260.000,00
				Ferry Ferdian Bagindo		6.609.600,00		6.609.600,00
				Yaminurizal NIP : 196612121993081		5.100.000,00		5.100.000,00
				Rozy Ersa Pratama		2.850.000,00		2.850.000,00
				Alharis Marwan		6.156.000,00		6.156.000,00
				Wetra Hendrayati		1.026.000,00		1.026.000,00
				Eki Satria		769.500,00		769.500,00
				Teguh Hakayanda		810.000,00		810.000,00
Jumlah					**-**	**62.591.100,00**		**62.591.100,00**
19	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	LHP LKPD TA 2023 Nomor 37/LHP/XVIII.PDG/05/2024	Kekurangan volueme pada Dinas Perpustakaan dan Arsip atas pekerjaan pembangunan gedung pustaka dan pembangunan pagar pustaka sebesar Rp272.081.582,77					
			Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum sebesar Rp254.697.851,72	PT. Hobashita Fujitama		254.697.851,72		254.697.851,72
			Kekurangan volume pekerjaan pembangunan pagar dan turap gedung fasilitas layanan perpustakaan sebesar Rp17.383.731,05	CV. Patra Mandiri		17.383.731,05		17.383.731,05
			Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.573.000,00	M. Syukri		1.573.000,00		1.573.000,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Jumlah					**-**	**273.654.582,77**	**-**	**273.654.582,77**
20	**Dinas Perhubungan**							
		Np. 700/48/LHP/Bawas-Prm/XI/2006	Bendahara belum melakukan Penyetoran pajak yang terutang bulan September s/d Desember Tahun 2005 dengan rincian sbb : - PPh pasal 21 sejumlah Rp4.704.750,00; - PPh pasal 22 sejumlah Rp317.561,00; - PPh pasal 23 sejumlah Rp498.934,00; - PPn sejumlah Rp4.225.136,00			9.746.381,00		9.746.381,00
		LHP Inspektorat No.700/42/LHP/Bawas-Prm/XI/2008 tgl 24 November 2008	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Dinas Perhubungan			6.743.226,00		6.743.226,00
		LKPD 2022	Kelebihan Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun 2022	Supeldi Efendi		760.000,00		760.000,00
				Mus Mulyadi		800.000,00		800.000,00
				SYAMSIR, SE		950.000,00		950.000,00
		LKPD 2023	Realisasi Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan atas Pelaksanaan Kegiatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan tim sebesar Rp1.265.278.000,00	Faisal Zikri		3.825.000,00		3.825.000,00
		700/33/LHP/Insp/2023	Kelebihan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp 2.030.000					-
			Uang lembur	Edward, S.Sos		240.000,00		240.000,00
				Salman Surya, S.Kom		240.000,00		240.000,00
				Busriko Hendriadi, SE		240.000,00		240.000,00
				Edison		240.000,00		240.000,00
				Fajri Faisal		240.000,00		240.000,00
				Andri		240.000,00		240.000,00
				Faisal Zikri, A.Md, LLAJ		240.000,00	240.000,00	-
			Uang makan lembur	Edward, S.Sos		50.000,00		50.000,00
				Salman Surya, S.Kom		50.000,00		50.000,00
				Busriko Hendriadi, SE		50.000,00		50.000,00
				Edison		50.000,00		50.000,00
				Fajri Faisal		50.000,00		50.000,00
				Andri		50.000,00		50.000,00
				Faisal Zikri, A.Md, LLAJ		50.000,00	50.000,00	-
			Terdapat pembayaran BBM yang tidak diyakini kebenarannya tahun anggaran 2021 dan 2022 sejumlah Rp 5.350.900	Salman Surya, S.Kom		5.350.900,00	5.350.900,00	-
			Kelebihan Pengeluaran Belanja BBM Tahun 2021 Sejumlah Rp 4.727.700,-	Salman Surya, S.Kom		4.727.700,00	2.390.000,00	2.337.700,00
			Kelebihan Pembayaran biaya pemeliharaan bus sekolah dengan Nomor Polisi BA 8030 W tahun 2022 sejumlah Rp 6.443.000	Salman Surya, S.Kom		6.443.000,00		6.443.000,00
Jumlah					**-**	**41.376.207,00**	**8.030.900,00**	**33.345.307,00**
21	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	LKPD 2023	Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp4.664.048,00	Adi Junaidi		4.664.048,00	2.000.000,00	2.664.048,00
Jumlah					**-**	**4.664.048,00**	**2.000.000,00**	**2.664.048,00**
22	**BKPSDM**	LHP Nomor 700/124/LHP/Insp/2022 tanggal 30 Agustus 2022	pembayaran uang perjalanan dinas tahun 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang			400.000,00		400.000,00
Jumlah					**-**	**400.000,00**	**-**	**400.000,00**
23	**Dinas Sosial**	700/108/LHP/Insp/2023	Pembayaran Honor Narasumber dari Pihak Internal Tahun 2021 dan 2022 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp.5.380.000	Hidayat		1.700.000,00		1.700.000,00
			Pembayaran Honor Peng-Entry dan Pengolah DTKS serta Peng-entry dan Pengolah Data PMKS Tahun 2021 Senilai 4.560.000 tidak memiliki Dasar Hukum	Richo Delfiano		570.000,00	570.000,00	-
				Fitriani Amril		570.000,00	570.000,00	-
				Nurhayati		570.000,00	570.000,00	-
				Selvani trinanda		855.000,00	855.000,00	-
				Soni sahputra		570.000,00	570.000,00	-
				Amrullah		570.000,00	570.000,00	-

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	DOKUMEN SUMBER	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI TGR	TAHUN 2024		SISA
						PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
				Govin Afrinaval		570.000,00	570.000,00	-
				Nelva gusmawati		285.000,00	285.000,00	-
			Pembayaran honor/SPPD Tidak sesuai ketentuan tahun 2022 Sejumlah Rp.1.820.000	Marwan		190.000,00		190.000,00
				Hidayat		340.000,00		340.000,00
			Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan tahun 2021 Sejumlah Rp.800.000	Hidayat		50.000,00		50.000,00
Jumlah					**-**	**6.840.000,00**	**4.560.000,00**	**2.280.000,00**
23	**Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah**							
		LKPD 2023 LHP No. 37.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 Tgl 2 Mei 2024	Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan pembentukan tim sebesar Rp1.265.278.000,00					
			Honorarium tim penyusun rencana kerja pemerintah daerah			135.685.000,00	98.514.499,00	37.170.501,00
			Honorarium Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2023			226.345.000,00	84.747.500,00	141.597.500,00
Jumlah					**-**	**362.030.000,00**	**183.261.999,00**	**178.768.001,00**
Total					**2.197.997.925,19**	**3.130.350.852,02**	**687.936.716,25**	**4.640.412.060,96**

Lampiran 21

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN (TAK BERWUJUD)
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2024	Saldo 31 Desember 2024
		Nilai	Nilai
1	2	3	6
1	UPTD. PARIAMAN UTARA	19.184.000,00	19.184.000,00
2	UPTD. PARIAMAN TIMUR	38.368.000,00	38.368.000,00
3	DINAS KESEHATAN	29.700.000,00	29.700.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.000.000,00	98.000.000,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	451.910.000,00	451.910.000,00
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	50.000.000,00	50.000.000,00
	TOTAL	**687.162.000,00**	**687.162.000,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
S/D 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

SKPD	Harga Perolehan	Bulan/Thn Perolehan	Masa Manfaat (Bln)	Amortisasi/Bln	Bln Amortisasi s/d Des 2024	Amortisasi s/d Des 2024	Nilai Amortisasi Setelah Koreksi
UPT Pariaman Utara							
Software Pembelajaran untuk 4 laptop	19.184.000,00	31/12/2016	48	399.666,67	48	19.184.000,00	19.184.000,00
SUB TOTAL	19.184.000,00			399.666,67		19.184.000,00	19.184.000,00
							-
UPT Pariaman Timur							-
Software Pembelajaran untuk 8 laptop	38.368.000,00	31/12/2016	48	799.333,33	48	38.368.000,00	38.368.000,00
SUB TOTAL	38.368.000,00			799.333,33		38.368.000,00	38.368.000,00
Dinas Kesehatan							-
Software Berbasis Web	29.700.000,00	31/12/2014	48	618.750,00	48	29.700.000,00	29.700.000,00
SUB TOTAL	29.700.000,00			618.750,00		29.700.000,00	29.700.000,00
							-
Dukcapil							-
Software Jaringan	98.000.000,00	31/12/2007	48	2.041.666,67	48	98.000.000,00	98.000.000,00
SUB TOTAL	98.000.000,00			2.041.666,67		98.000.000,00	98.000.000,00
							-
							-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah :							-
Software (SQL Server) Microsoft	29.980.000,00	31/12/2010	48	624.583,33	48	29.980.000,00	29.980.000,00
Software Oracle(Bid. Pendapatan)	29.700.000,00	31/12/2015	48	618.750,00	48	29.700.000,00	29.700.000,00
Software Bid. Pendapatan	121.000.000,00	31/12/2013	48	2.520.833,33	48	121.000.000,00	121.000.000,00
Software Map Info Pendapatan	19.250.000,00	31/12/2014	48	401.041,67	48	19.250.000,00	19.250.000,00
Software Payment Online Pdptn	49.280.000,00	31/12/2014	48	1.026.666,67	48	49.280.000,00	49.280.000,00
lisensi software bidang pendapatan (2016)	29.700.000,00	31/12/2016	48	618.750,00	48	29.700.000,00	29.700.000,00
Sistrm Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan	30.000.000,00	31/12/2016	48	625.000,00	48	30.000.000,00	30.000.000,00
Soft ware Monitoring PBB	44.000.000,00	31/12/2017	48	916.666,67	48	44.000.000,00	44.000.000,00
Aplikasi BPHTB	99.000.000,00	31/12/2017	48	2.062.500,00	48	99.000.000,00	99.000.000,00
							-
SUB TOTAL	451.910.000,00			9.414.791,67		451.910.000,00	451.910.000,00
							-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							-
SOFTWARE ESDM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00	31/12/2016	48	1.041.666,67	48	50.000.000,00	50.000.000,00
SUB TOTAL	50.000.000,00			1.041.666,67		50.000.000,00	50.000.000,00
T O T A L	**687.162.000,00**	**-**	**-**	**14.315.875,00**	**-**	**687.162.000,00**	**687.162.000,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
ASET LAIN- LAIN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024		Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024					Saldo 31 Desember 2024
					Tambah					
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Nilai
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	16
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	575.685.400,00	575.685.400,00	575.685.400,00					0,00	575.685.400,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	617.054.299,01	617.054.299,01	617.054.299,01	254.313.736,00			129.390.521,00	383.704.257,00	1.000.758.556,01
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	237.975.956,00	237.975.956,00	237.975.956,00	389.286.574,72			160.224.410,00	549.510.984,72	787.486.940,72
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	126.418.023,00	126.418.023,00	126.418.023,00	345.643.183,72			233.054.390,00	578.697.573,72	705.115.596,72
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	541.771.995,00	541.771.995,00	541.771.995,00	221.322.275,00			6.547.037,00	227.869.312,00	769.641.307,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	39.958.333,00	39.958.333,00	39.958.333,00					0,00	39.958.333,00
7	SMP 1 PARIAMAN	0,00	0,00	0,00	53.700.000,00				53.700.000,00	53.700.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	12.644.285,00	12.644.285,00	12.644.285,00	57.392.385,00			29.809.647,00	87.202.032,00	99.846.317,00
9	SMP 3 PARIAMAN	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	112.438.792,00				112.438.792,00	127.838.792,00
10	SMP 4 PARIAMAN	54.817.400,00	54.817.400,00	54.817.400,00					0,00	54.817.400,00
11	SMP 5 PARIAMAN	57.057.200,00	57.057.200,00	57.057.200,00					0,00	57.057.200,00
12	SMP 6 PARIAMAN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					0,00	2.000.000,00
	SMP 7 PARIAMAN	298.717.521,42	298.717.521,42	298.717.521,42					0,00	298.717.521,42
13	SMP 8 PARIAMAN	28.050.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00					0,00	28.050.000,00
	SMP 9 PARIAMAN	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00					0,00	7.500.000,00
	DINAS KESEHATAN	279.945.045,00	279.945.045,00	279.945.045,00					0,00	279.945.045,00
15	PUSKESMAS NARAS	407.457.739,33	407.457.739,33	407.457.739,33					0,00	407.457.739,33
16	PUKESMAS KP. BARU PADUSUNAN	14.834.398,50	14.834.398,50	14.834.398,50					0,00	14.834.398,50
17	PUSKESMAS PAUH PARIAMAN	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00					0,00	1.430.000,00
18	PUSKESMAS KURAI TAJI	219.259.000,00	219.259.000,00	219.259.000,00					0,00	219.259.000,00
19	PUKESMAS MARUNGGI	51.227.857,15	51.227.857,15	51.227.857,15					0,00	51.227.857,15

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024		Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024					Saldo 31 Desember 2024
					Tambah					
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Nilai
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	16
20	PUKESMAS AIR SANTOK	7.800.000,33	7.800.000,33	7.800.000,33					0,00	7.800.000,33
21	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	284.700.389,00	284.700.389,00	284.700.389,00					0,00	284.700.389,00
22	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	0,10	0,10	0,10					0,00	0,10
23	UPT. INSTALASI FARMASI	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00					0,00	4.700.000,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	742.618.280,00	742.618.280,00	742.618.280,00					0,00	742.618.280,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	1.176.728.333,28	1.176.728.333,28	1.176.728.333,28	1.687.023.200,00				1.687.023.200,00	2.863.751.533,28
26	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	65.137.000,00	65.137.000,00	65.137.000,00					0,00	65.137.000,00
27	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	249.278.500,00	249.278.500,00	249.278.500,00	286.902.600,00				286.902.600,00	536.181.100,00
28	KANTOR KESBANG POL	26.615.000,00	26.615.000,00	26.615.000,00					0,00	26.615.000,00
29	SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	84.257.600,30	84.257.600,30	84.257.600,30		1.528.609.903,00			1.528.609.903,00	1.612.867.503,30
30	BPBD	108.532.400,00	108.532.400,00	108.532.400,00					0,00	108.532.400,00
31	DINAS SOSIAL	34.597.500,00	34.597.500,00	34.597.500,00					0,00	34.597.500,00
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	434.142.000,00	434.142.000,00	434.142.000,00					0,00	434.142.000,00
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251.523.458,00	251.523.458,00	251.523.458,00					0,00	251.523.458,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.289.300,00	19.289.300,00	19.289.300,00					0,00	19.289.300,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	10.454.300.325,32	10.454.300.325,32	10.454.300.325,32					0,00	10.454.300.325,32
36	UPT. TERMINAL	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	UPT PARKIR	204.770.000,00	204.770.000,00	204.770.000,00					0,00	204.770.000,00
37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	144.441.150,00	144.441.150,00	144.441.150,00					0,00	144.441.150,00
38	DINAS PERINDAGKOP	2.552.439.500,00	2.552.439.500,00	2.552.439.500,00	26.439.300,00		1.000.000,00		27.439.300,00	2.579.878.800,00

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024		Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024					Saldo 31 Desember 2024
					Tambah					
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Nilai
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	16
39	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	461.449.852,00	461.449.852,00	461.449.852,00					0,00	461.449.852,00
40	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	65.518.936,00	65.518.936,00	65.518.936,00					0,00	65.518.936,00
41	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.486.987.258,00	1.486.987.258,00	1.486.987.258,00	86.865.470,00	217.420.000,00		4.626.500,00	308.911.970,00	1.795.899.228,00
42	UPT. PULAU ANGSO	22.170.635,20	22.170.635,20	22.170.635,20					0,00	22.170.635,20
43	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	811.435.700,00	811.435.700,00	811.435.700,00					0,00	811.435.700,00
44	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	149.039.000,00	149.039.000,00	149.039.000,00					0,00	149.039.000,00
45	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	0,00	0,00	0,00	27.014.000,00				27.014.000,00	27.014.000,00
46	UPT. BBI	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
47	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	BAGIAN PEMERINTAHAN	25.090.000,00	25.090.000,00	25.090.000,00					0,00	25.090.000,00
	BAGIAN HUKUM DAN HAM	33.511.000,00	33.511.000,00	33.511.000,00					0,00	33.511.000,00
	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	19.488.000,00	19.488.000,00	19.488.000,00					0,00	19.488.000,00
48	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1.070.664.843,00	1.070.664.843,00	1.070.664.843,00					0,00	1.070.664.843,00
	BAGIAN EKBANG	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.800.007,00	11.800.007,00	11.800.007,00					0,00	11.800.007,00
50	SEKRETARIAT DPRD	321.939.999,72	321.939.999,72	321.939.999,72					0,00	321.939.999,72
9	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	12.264.000,00	12.264.000,00	12.264.000,00					0,00	12.264.000,00
52	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
53	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
54	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00					0,00	9.520.000,00
55	INSPEKTORAT	33.422.500,00	33.422.500,00	33.422.500,00					0,00	33.422.500,00

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024		Saldo Awal Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024					Saldo 31 Desember 2024
					Tambah					
		Rusak Berat	Total Aset Lain Lain		Peralatan Mesin	Gedung Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	Total Tambah	Nilai
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	16
56	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	175.895.000,00	175.895.000,00	175.895.000,00					0,00	175.895.000,00
57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.241.642.139,00	1.241.642.139,00	1.241.642.139,00					0,00	1.241.642.139,00
58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00					0,00	15.000.000,00
TOTAL		26.401.914.058,66	26.401.914.058,66	26.401.914.058,66	3.548.341.516,44	1.746.029.903,00	1.000.000,00	563.652.505,00	5.859.023.924,44	32.260.937.983,10

Lampiran 24

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PENYUSUTAN ASET LAIN- LAIN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2024	Koreksi saldo awal			Pindah Dari Penyusutan Aset Tetap				Tahun Berjalan (+)		Total Akumulasi Penyusutan
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Bangunan	JIJ	Total Tambah	semester 1	semester 2	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	420.463.900,00			420.463.900,00				-			420.463.900,00
2	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA	423.871.509,00			423.871.509,00	244.745.574,00			244.745.574,00			668.617.083,00
3	UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH	309.651.323,00			309.651.323,00	385.948.034,44			385.948.034,44			695.599.357,44
4	UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN	125.793.023,00			125.793.023,00	344.921.308,72			344.921.308,72			470.714.331,72
5	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR	345.154.153,00			345.154.153,00	220.918.942,00			220.918.942,00			566.073.095,00
6	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SPNF	36.072.569,00			36.072.569,00				-			36.072.569,00
7	SMP 1 PARIAMAN	0,00			0,00	53.700.000,00			53.700.000,00			53.700.000,00
8	SMP 2 PARIAMAN	8.721.800,00			8.721.800,00	57.392.385,00			57.392.385,00			66.114.185,00
9	SMP 3 PARIAMAN	15.400.000,00			15.400.000,00	112.438.792,00			112.438.792,00			127.838.792,00
10	SMP 4 PARIAMAN	52.822.608,00			52.822.608,00				-			52.822.608,00
11	SMP 5 PARIAMAN	29.900.000,00			29.900.000,00				-			29.900.000,00
12	SMP 6 PARIAMAN	2.000.000,00			2.000.000,00				-			2.000.000,00
13	SMP 7 PARIAMAN	298.717.521,42			298.717.521,42				-			298.717.521,42
14	SMP 8 PARIAMAN	28.029.167,00			28.029.167,00				-			28.029.167,00
15	SMP 9 PARIAMAN	7.500.000,00			7.500.000,00				-			7.500.000,00
16	DINAS KESEHATAN	271.495.045,59			271.495.045,59				-			271.495.045,59
17	PUSKESMAS NARAS	407.378.209,34			407.378.209,34				-			407.378.209,34
18	PUKESMAS KP. BARU PADUSUNAN	14.834.399,50			14.834.399,50				-			14.834.399,50
19	PUSKESMAS PAUH PARIAMAN	1.430.000,00			1.430.000,00				-			1.430.000,00
20	PUSKESMAS KURAI TAJI	164.444.341,00			164.444.341,00				-			164.444.341,00
21	PUKESMAS MARUNGGI	51.227.857,15			51.227.857,15				-			51.227.857,15
22	PUKESMAS AIR SANTOK	5.850.000,00			5.850.000,00				-			5.850.000,00
23	PUKESMAS SIKAPAK BARAT	270.800.227,00			270.800.227,00				-			270.800.227,00
24	RSUD Dr.SADIKIN KOTA PARIAMAN	0,00			0,00				-			-
25	UPT. INSTALASI FARMASI	4.700.000,00			4.700.000,00				-			4.700.000,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	742.618.280,00			742.618.280,00				-			742.618.280,00

Lampiran 24

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2024	Koreksi saldo awal			Pindah Dari Penyusutan Aset Tetap				Tahun Berjalan (+)		Total Akumulasi Penyusutan
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Bangunan	JIJ	Total Tambah	semester 1	semester 2	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	1.380.511.529,00		218.583.196,28	1.161.928.332,72	1.687.023.200,00			1.687.023.200,00			2.848.951.532,72
28	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	65.137.000,00			65.137.000,00				-			65.137.000,00
29	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	247.422.250,00			247.422.250,00	286.902.600,00			286.902.600,00			534.324.850,00
30	KANTOR KESBANG POL	26.615.000,00			26.615.000,00				-			26.615.000,00
31	SATUAN POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	84.257.600,30			84.257.600,30		694.685.648,00		694.685.648,00			778.943.248,30
32	BPBD	100.813.656,00			100.813.656,00				-			100.813.656,00
33	DINAS SOSIAL	34.347.500,00			34.347.500,00				-			34.347.500,00
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	425.359.188,00			425.359.188,00				-			425.359.188,00
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	251.523.458			251.523.458,00				-			251.523.458,00
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.289.300,00			19.289.300,00				-			19.289.300,00
37	DINAS PERHUBUNGAN	10.400.190.960,00			10.400.190.960,00				-			10.400.190.960,00
38	UPT. TERMINAL	-			0,00				-			-
39	UPT PARKIR	200.821.250,00			200.821.250,00				-			200.821.250,00
40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	144.441.150,00			144.441.150,00				-			144.441.150,00
41	DINAS PERINDAGKOP	1.212.096.650,00			1.212.096.650,00	26.439.300,00		1.000.000,00	27.439.300,00			1.239.535.950,00
42	UPT. PENGELOLA PASAR PARIAMAN	319.902.919,00			319.902.919,00				-			319.902.919,00
43	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	64.904.353,00			64.904.353,00				-			64.904.353,00
44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	935.368.924,80			935.368.924,80	85.848.803,00	87.873.917,00		173.722.720,00	5.977.167,00	5.435.500,00	1.120.504.311,80
45	UPT. PULAU ANGSO	-			0,00				-			-
46	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	790.246.533,00			790.246.533,00				-			790.246.533,00
47	UPT. BPP KOTA PARIAMAN	149.039.000,00			149.039.000,00				-			149.039.000,00
48	UPT. PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN	-			0,00	27.014.000,00			27.014.000,00			27.014.000,00
49	UPT. BBI	-			0,00				-			-
50	SEKRETARIAT DAERAH	-			0,00				-			-
51	BAGIAN PEMERINTAHAN	25.090.000,00			25.090.000,00				-			25.090.000,00
52	BAGIAN HUKUM DAN HAM	33.511.000,00			33.511.000,00				-			33.511.000,00

Lampiran 24

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Saldo awal Penyusutan RB per 1 Januri 2024	Koreksi saldo awal			Pindah Dari Penyusutan Aset Tetap				Tahun Berjalan (+)		Total Akumulasi Penyusutan
			koreksi (+)	Koreksi (-)	Total Aset Lain Lain 2024	Peralatan dan Mesin	Bangunan	JIJ	Total Tambah	semester 1	semester 2	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12=6+7+8+9+10+11
53	BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR	19.488.000,00			19.488.000,00				-			19.488.000,00
54	BAGIAN UMUM & PROTOKOLER	1.061.276.093,00			1.061.276.093,00				-			1.061.276.093,00
55	BAGIAN EKBANG	-			0,00				-			-
56	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.800.007			11.800.007,00				-			11.800.007,00
57	SEKRETARIAT DPRD	320.335.832,99	15.400.000,00		335.735.832,99				-			335.735.832,99
58	KECAMATAN PARIAMAN UTARA	12.264.000,00			12.264.000,00				-			12.264.000,00
59	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	-			0,00				-			-
60	KECAMATAN PARIAMAN SELATAN	-			0,00				-			-
61	KECAMATAN PARIAMAN TIMUR	9.520.000,00			9.520.000,00				-			9.520.000,00
62	INSPEKTORAT	33.422.500,00			33.422.500,00				-			33.422.500,00
63	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	173.259.583,00			173.259.583,00				-			173.259.583,00
64	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	424.080.450,00			424.080.450,00				-			424.080.450,00
65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (SKPKD)	-			0,00				-			-
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.000.000,00			15.000.000,00				-			15.000.000,00
TOTAL		**23.030.211.620,09**	**15.400.000,00**	**218.583.196,28**	**22.827.028.423,81**	**3.533.292.939,16**	**782.559.565,00**	**1.000.000,00**	**4.316.852.504,16**	**5.977.167,00**	**5.435.500,00**	**27.155.293.594,97**

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA KOTA PARIAMAN
PER 31 DESEMBER 2024

A. PASAR PARIAMAN ***(Dalam Rupiah)***

NO	NAMA PENYEWA	BLOK	JUMLAH
1	Nurbaiti	A6	1.680.000,00
2	Beni	B 2	1.948.200,00
3	Asma zaunit	B 4	2.346.000,00
4	Syamsir alam	C 10	843.125,00
JUMLAH			**6.817.325,00**

B. BPKPD

NO	JENIS PAJAK		JUMLAH
1	Pajak Reklame		71.401.055,83
2	Sewa ATM Balaikota	01 Mei 2022 s/d 30 April 2025	4.007.444,45
JUMLAH			**75.408.500,28**

REKAP DATA SISA KEWAJIBAN PEMKO PARIAMAN (UTANG BELANJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	OPD	Sisa Utang s.d Tahun 2023	mutasi (+)	mutasi (-)		SISA UTANG
			Utang Tahun 2024	Penghapusan	Pembayaran Tahun 2024	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	298.181.170,00			298.181.170,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	897.146.076,00	2.378.220.600,00	3.600.000,00	893.546.076,00	2.378.220.600,00
3	PUSKESMAS NARAS	4.000.000,00		4.000.000,00		0,00
4	PUSKESMAS MARUNGGI	446.600,00			446.600,00	0,00
5	PUSKESMAS AIR SANTOK	12.000.000,00			12.000.000,00	0,00
6	RSUD DR SADIKIN	3.411.741.445,40			3.012.448.808,00	399.292.637,40
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3.003.854.827,61		27.782.800,61	2.976.072.027,00	0,00
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.354.018.276,00			3.354.018.276,00	0,00
9	UPT. PENGELOLA AIR BERSIH	39.556.000,00			39.556.000,00	0,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00				0,00
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	0,00				0,00
12	DINAS SOSIAL	0,00				0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	32.457.762,00			32.457.762,00	0,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00				0,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00				0,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	11.690.000,00		1.775.000,00	9.915.000,00	0,00
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.200.000,00			3.200.000,00	0,00
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	47.235.500,00			47.235.500,00	0,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	0,00				0,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	205.912.061,00			151.897.051,00	54.015.010,00
21	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN	12.862.485,00			12.862.485,00	0,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	24.988.750,00			24.988.750,00	0,00
23	SEKRETARIAT DPRD	194.738.767,00			194.738.767,00	0,00
24	INSPEKTORAT	369.500,00			369.500,00	0,00
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	34.741.440,00		34.741.440,00		0,00
26	KECAMATAN PARIAMAN TENGAH	100.745.450,00		55.925.250,00	42.945.200,00	1.875.000,00
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00				0,00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	742.376.069,30	1.617.192.079,31			2.359.568.148,61
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	0,00				0,00
TOTAL		**12.432.262.179,31**	**3.995.412.679,31**	**127.824.490,61**	**11.106.878.972,00**	**5.192.971.396,01**

Lampiran 26a

RINCIAN SISA KEWAJIBAN PEMKO PARIAMAN (UTANG BELANJA)

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	UTANG 2024	URAIAN	Akun Belanja
1	3	4	2	5
1	RSUD dr. Sadikin	162.554.032,00	Pembayaran belanja HUTANG Jasa Pelayanan Kesehatan COVID 19 Tahun 2021 dalam Rangka Penanganan Covid 19 keg penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk daerah kab/kota	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2	RSUD dr. Sadikin	177.677.605,00	Pembayaran belanja HUTANG Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2022 keg penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk daerah kab/kota	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
3	RSUD dr. Sadikin	59.061.000,40	hutang belanja mitra RSUD Rp59.061.000,40	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.604.000,00	Permintaan Pembayaran Belanja Snack Sub Keg Pengawasan Arsip Daerah TA 2023	Belanja Makan Minum Rapat
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.340.000,00	Permintaan Pembayaran Belanja Nasi Bungkus untuk Rapat Sub Keg Pengawasan Arsip Daerah TA 2023	Belanja Makan Minum Rapat
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.000.000,00	Permintaan Pembayaran Belanja Nasi untuk Rapat Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2023	Belanja Makan Minum Rapat
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	960.000,00	Permintaan Pembayaran Makan dan Minum Rapat Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN TA 2023	Belanja Makan Minum Rapat
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.331.010,00	Permintaan Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA 2023	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	780.000,00	Permintaan Pembayaran Makan Minum Rapat Sub keg Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip TA 2023	Belanja Makan Minum Rapat
10	Kecamatan Pariaman Tengah	1.875.000,00	PERMINTAAN PEMBAYARAN HONOR KEG.PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (PPTK)	Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.359.568.148,61	UTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa; Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
12	Dinas Kesehatan	2.378.220.600,00	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2024	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3; Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
JUMLAH		**5.192.971.396,01**		

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BOS	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	69.475.683.363,00	11.186.832.416,00	37.367.965.707,00		0,00	0,00	17.847.875,00		118.048.329.361,00
2	Dinas Kesehatan	39.674.794.790,00	22.201.177.988,00	221.916.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.097.889.590,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	-762.494.197,00	1.645.283.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.791.795,00	3.965.581.107,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	122.844.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.897.538,00	466.742.381,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	141.366.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.693.051,00	571.059.899,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	215.776.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.020.088,00	1.062.796.147,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	114.845.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.866.517,00	543.712.400,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	115.721.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.932.489,00	552.654.014,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	122.915.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.813.958,00	641.729.942,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	95.680.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.736.301,00	484.416.793,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	3.364.224.873,00	2.015.111.660,00	238.498.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.617.835.360,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4.612.961.493,00	2.508.719.223,00	188.169.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.860.000,00	7.362.710.073,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.631.537.233,00	1.076.171.531,00	70.812.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.778.521.617,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	3.443.038.811,00	1.881.005.746,00	80.309.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.404.353.579,00
16	Dinas Sosial	1.371.878.789,00	930.231.548,00	70.577.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.372.687.604,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.764.800.258,00	1.158.906.351,00	101.262.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.024.969.406,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.716.440.512,00	1.118.802.592,00	67.082.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.902.326.034,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.696.981.036,00	1.174.588.057,00	75.016.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.946.585.588,00
20	Dinas Perhubungan	2.237.197.572,00	1.265.450.885,00	111.383.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.614.032.266,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.703.486.933,00	1.105.056.451,00	86.587.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.895.131.252,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.600.562.881,00	1.653.160.167,00	135.154.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.388.877.127,00

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Beban Tambahan Penghasilan ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Beban Pegawai BOS	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	2.163.934.736,00	1.415.026.822,00	66.572.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.645.534.094,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.147.331.798,00	1.346.637.892,00	81.683.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.575.652.866,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.415.998.890,00	926.921.970,00	59.487.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.402.408.495,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	7.787.364.829,00	4.550.832.960,00	173.069.628,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00		12.511.787.417,00
27	Sekretariat Daerah	5.245.606.922,00	3.921.214.638,00	493.470.759,00	0,00	12.476.500,00	300.000.000,00	0,00		9.972.768.819,00
28	Sekretariat DPRD	1.688.464.118,00	1.100.539.946,00	146.313.206,00	6.165.974.726,00	0,00	79.800.000,00	0,00		9.181.091.996,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2.261.963.062,00	1.444.731.951,00	107.749.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.814.444.990,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	5.262.835.657,00	2.058.508.918,00	665.517.749,00	0,00	96.320.000,00	0,00	0,00		8.083.182.324,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.973.298.833,00	1.277.578.216,00	71.409.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.322.286.971,00
32	Inspektorat	3.777.036.255,00	2.555.782.675,00	172.333.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.505.152.749,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	1.337.945.341,00	778.125.424,00	67.300.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.183.370.990,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	6.235.547.226,00	3.290.663.235,00	490.502.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.016.712.649,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.510.836.383,00	821.651.605,00	63.076.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.395.564.233,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	980.400.383,00	564.008.434,00	66.114.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.610.523.755,00
37	Kantor Kesbangpol	1.000.798.694,00	610.917.426,00	92.535.000,00	0,00	5.559.812,00	0,00	0,00		1.709.810.932,00
TOTAL		**180.082.951.671,00**	**75.175.862.530,00**	**44.229.309.969,00**	**6.165.974.726,00**	**114.876.312,00**	**379.800.000,00**	**17.847.875,00**	**6.529.611.737,00**	**312.696.234.820,00**

Lampiran 27a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok ASN	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Beban Tunjangan Beras ASN	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Beban Pembulatan Gaji ASN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	53.660.852.430,00	5.127.422.620,00	154.710.000,00	4.210.727.000,00	349.747.000,00	2.767.602.720,00	195.203.249,00	688.469,00	2.568.367.471,00	110.090.627,00	330.271.777,00	69.475.683.363,00
2	Dinas Kesehatan	29.505.624.863,00	2.472.436.614,00	169.970.000,00	3.467.852.650,00	139.830.000,00	1.618.369.740,00	69.383.198,00	454.860,00	1.988.025.249,00	60.711.363,00	182.136.253,00	39.674.794.790,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.519.355.712,00	202.154.878,00	149.200.000,00	67.596.000,00	92.540.000,00	133.904.580,00	5.451.609,00	42.815,00	173.279.220,00	5.174.973,00	15.525.086,00	3.364.224.873,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	3.413.309.242,00	315.680.842,00	168.590.000,00	98.626.000,00	142.740.000,00	209.945.580,00	7.183.207,00	54.353,00	228.854.572,00	6.994.391,00	20.983.306,00	4.612.961.493,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.146.062.614,00	120.894.070,00	140.470.000,00	37.820.000,00	19.560.000,00	64.381.380,00	5.653.013,00	16.266,00	87.274.764,00	2.351.271,00	7.053.855,00	1.631.537.233,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.519.115.490,00	259.555.614,00	114.830.000,00	156.480.000,00	43.180.000,00	154.906.380,00	3.970.407,00	38.256,00	170.322.793,00	5.159.927,00	15.479.944,00	3.443.038.811,00
16	Dinas Sosial	953.747.282,00	84.099.046,00	112.310.000,00	65.916.000,00	18.060.000,00	45.697.020,00	9.412.605,00	14.830,00	74.773.046,00	1.962.224,00	5.886.736,00	1.371.878.789,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.254.503.016,00	90.250.128,00	110.690.000,00	98.300.000,00	36.120.000,00	60.760.380,00	9.048.322,00	18.140,00	94.798.664,00	2.577.882,00	7.733.726,00	1.764.800.258,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.180.954.228,00	120.139.788,00	124.190.000,00	94.040.000,00	23.310.000,00	64.091.700,00	7.257.732,00	17.476,00	92.716.984,00	2.430.640,00	7.291.964,00	1.716.440.512,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.165.582.285,00	98.833.736,00	117.455.000,00	108.740.000,00	33.020.000,00	63.077.820,00	8.106.985,00	18.088,00	92.612.311,00	2.383.679,00	7.151.132,00	1.696.981.036,00
20	Dinas Perhubungan	1.654.389.138,00	150.074.916,00	124.930.000,00	33.060.000,00	50.015.000,00	90.452.580,00	6.649.847,00	25.284,00	113.875.756,00	3.431.265,00	10.293.786,00	2.237.197.572,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.110.706.191,00	120.626.206,00	136.350.000,00	145.280.000,00	16.655.000,00	65.033.160,00	8.867.424,00	14.762,00	90.854.140,00	2.275.010,00	6.825.040,00	1.703.486.933,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.892.088.771,00	156.585.098,00	154.930.000,00	87.260.000,00	53.750.000,00	95.449.560,00	7.442.389,00	29.180,00	137.502.049,00	3.881.443,00	11.644.391,00	2.600.562.881,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	1.511.949.624,00	133.142.774,00	136.590.000,00	113.800.000,00	46.685.000,00	83.283.000,00	10.012.666,00	23.122,00	115.988.618,00	3.114.960,00	9.344.972,00	2.163.934.736,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.598.803.130,00	140.476.458,00	110.900.000,00	32.022.000,00	48.955.000,00	85.165.920,00	5.056.351,00	23.394,00	112.781.960,00	3.286.859,00	9.860.726,00	2.147.331.798,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	979.620.340,00	82.109.726,00	107.450.000,00	91.930.000,00	16.835.000,00	45.769.440,00	7.912.335,00	13.061,00	76.296.852,00	2.015.534,00	6.046.602,00	1.415.998.890,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	5.653.177.490,00	492.863.698,00	201.100.000,00	552.510.000,00	118.090.000,00	308.943.720,00	16.635.750,00	79.241,00	397.518.623,00	11.611.565,00	34.834.742,00	7.787.364.829,00
27	Sekretariat Daerah	3.613.311.108,00	348.971.716,00	376.465.000,00	258.878.000,00	93.625.000,00	195.534.000,00	25.968.242,00	56.044,00	303.260.678,00	7.384.259,00	22.152.875,00	5.245.606.922,00
28	Sekretariat DPRD	1.181.406.568,00	91.559.508,00	109.710.000,00	82.352.000,00	29.000.000,00	47.652.360,00	8.509.884,00	17.131,00	128.468.786,00	2.446.973,00	7.340.908,00	1.688.464.118,00

Lampiran 27a

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok ASN	Beban Tunjangan Keluarga ASN	Beban Tunjangan Jabatan ASN	Beban Tunjangan Fungsional ASN	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	Beban Tunjangan Beras ASN	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Beban Pembulatan Gaji ASN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	TOTAL
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	1.512.870.686,00	153.697.634,00	139.930.000,00	180.970.000,00	41.300.000,00	87.917.880,00	12.370.397,00	24.674,00	120.429.951,00	3.112.944,00	9.338.896,00	2.261.963.062,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.502.694.468,00	252.946.628,00	192.415.000,00	16.740.000,00	79.835.000,00	141.653.520,00	5.300.194,00	39.585,00	2.050.679.850,00	5.132.772,00	15.398.640,00	5.262.835.657,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	1.395.400.583,00	137.954.772,00	123.650.000,00	72.092.000,00	40.030.128,00	79.517.160,00	7.317.631,00	21.089,00	105.664.112,00	2.912.837,00	8.738.521,00	1.973.298.833,00
32	Inspektorat	2.659.292.345,00	225.036.010,00	72.090.000,00	433.440.000,00	12.510.000,00	127.459.200,00	16.627.995,00	43.069,00	208.690.916,00	5.461.629,00	16.385.091,00	3.777.036.255,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	980.651.858,00	113.937.134,00	67.760.000,00	0,00	33.270.000,00	64.381.380,00	2.051.732,00	15.541,00	67.809.340,00	2.017.076,00	6.051.280,00	1.337.945.341,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	4.724.069.588,00	426.494.112,00	392.350.000,00	0,00	93.345.000,00	247.531.560,00	4.288.245,00	70.091,00	308.541.331,00	9.714.239,00	29.143.060,00	6.235.547.226,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	1.125.492.566,00	120.124.944,00	68.460.000,00	0,00	38.500.000,00	72.999.360,00	1.305.044,00	18.609,00	74.671.582,00	2.316.079,00	6.948.199,00	1.510.836.383,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	714.254.610,00	82.753.976,00	66.680.000,00	0,00	15.400.000,00	44.031.360,00	1.818.766,00	9.544,00	49.586.908,00	1.466.286,00	4.398.933,00	980.400.383,00
37	Kantor Kesbangpol	745.745.038,00	76.743.704,00	40.320.000,00	0,00	30.660.000,00	48.593.820,00	805.736,00	12.124,00	51.778.727,00	1.534.890,00	4.604.655,00	1.000.798.694,00
TOTAL		**132.875.031.264,00**	**12.197.566.350,00**	**3.984.495.000,00**	**10.506.431.650,00**	**1.756.567.128,00**	**7.114.106.280,00**	**469.610.955,00**	**1.899.098,00**	**10.085.425.253,00**	**272.953.597,00**	**818.865.096,00**	**180.082.951.671,00**

Lampiran 27b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	7.423.525.749,00	158.879.720,00	0,00	3.604.426.947,00	11.186.832.416,00
2	Dinas Kesehatan	14.441.916.190,00	645.826.014,00	120.000.000,00	6.993.435.784,00	22.201.177.988,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	1.440.000.000,00	0,00	1.440.000.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.273.562.212,00	151.720.700,00	0,00	589.828.748,00	2.015.111.660,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	1.610.611.349,00	151.953.766,00	0,00	746.154.108,00	2.508.719.223,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	647.428.756,00	136.950.195,00	0,00	291.792.580,00	1.076.171.531,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.149.509.725,00	227.027.694,00	0,00	504.468.327,00	1.881.005.746,00
16	Dinas Sosial	566.640.813,00	114.810.055,00	0,00	248.780.680,00	930.231.548,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	719.371.503,00	117.065.041,00	0,00	322.469.807,00	1.158.906.351,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	678.484.390,00	132.953.933,00	0,00	307.364.269,00	1.118.802.592,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	721.777.122,00	125.400.234,00	0,00	327.410.701,00	1.174.588.057,00
20	Dinas Perhubungan	787.890.021,00	118.988.067,00	0,00	358.572.797,00	1.265.450.885,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	662.028.295,00	141.673.669,00	0,00	301.354.487,00	1.105.056.451,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.030.396.255,00	148.775.116,00	0,00	473.988.796,00	1.653.160.167,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	875.343.796,00	141.273.839,00	0,00	398.409.187,00	1.415.026.822,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	840.260.723,00	107.892.395,00	0,00	398.484.774,00	1.346.637.892,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	564.722.045,00	109.248.661,00	0,00	252.951.264,00	926.921.970,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	2.914.390.849,00	250.268.988,00	0,00	1.386.173.123,00	4.550.832.960,00
27	Sekretariat Daerah	2.047.413.248,00	486.202.472,00	17.227.186,00	1.370.371.732,00	3.921.214.638,00
28	Sekretariat DPRD	677.027.968,00	122.415.146,00	0,00	301.096.832,00	1.100.539.946,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	887.954.098,00	149.037.922,00	0,00	407.739.931,00	1.444.731.951,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.287.549.361,00	172.318.464,00	0,00	598.641.093,00	2.058.508.918,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	790.707.190,00	135.809.055,00	0,00	351.061.971,00	1.277.578.216,00
32	Inspektorat	1.669.224.655,00	72.800.482,00	0,00	813.757.538,00	2.555.782.675,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	481.045.841,00	65.914.849,00	0,00	231.164.734,00	778.125.424,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	1.994.583.630,00	320.482.946,00	0,00	975.596.659,00	3.290.663.235,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	508.533.053,00	66.236.852,00	0,00	246.881.700,00	821.651.605,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	336.770.064,00	62.832.473,00	0,00	164.405.897,00	564.008.434,00
37	Kantor Kesbangpol	386.247.532,00	38.525.836,00	0,00	186.144.058,00	610.917.426,00
	TOTAL	**47.974.916.433,00**	**4.673.284.584,00**	**1.577.227.186,00**	**23.152.928.524,00**	**77.378.356.727,00**

Lampiran 27c

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Beban Honorarium	Beban Jasa Pengelolaan BMD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	36.193.310.716,00	596.250.000,00	0,00	285.929.000,00	292.475.991,00	37.367.965.707,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00	158.288.000,00	48.678.812,00	221.916.812,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	1.645.283.509,00	0,00	0,00	1.645.283.509,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	0,00	0,00	96.564.843,00	26.280.000,00	0,00	122.844.843,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	115.086.848,00	26.280.000,00	0,00	141.366.848,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00	0,00	0,00	185.836.059,00	29.940.000,00	0,00	215.776.059,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00	0,00	0,00	91.520.883,00	23.325.000,00	0,00	114.845.883,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00	0,00	0,00	93.821.525,00	21.900.000,00	0,00	115.721.525,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	101.015.984,00	21.900.000,00	0,00	122.915.984,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	0,00	0,00	0,00	77.180.492,00	18.500.000,00	0,00	95.680.492,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	220.330.000,00	9.168.827,00	238.498.827,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	156.930.000,00	14.814.357,00	188.169.357,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230.000,00	5.582.853,00	70.812.853,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	70.835.000,00	9.474.022,00	80.309.022,00
16	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	64.980.000,00	5.597.267,00	70.577.267,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120.000,00	5.142.797,00	101.262.797,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00	5.582.930,00	67.082.930,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420.000,00	5.596.495,00	75.016.495,00
20	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	101.940.000,00	9.443.809,00	111.383.809,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	80.985.000,00	5.602.868,00	86.587.868,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300.000,00	13.854.079,00	135.154.079,00

Lampiran 27c

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Beban Honorarium	Beban Jasa Pengelolaan BMD	TOTAL
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	61.580.000,00	4.992.536,00	66.572.536,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	76.085.000,00	5.598.176,00	81.683.176,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120.000,00	5.367.635,00	59.487.635,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	147.165.000,00	21.741.628,00	173.069.628,00
27	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	490.070.759,00	3.400.000,00	493.470.759,00
28	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	140.730.000,00	5.583.206,00	146.313.206,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	98.040.000,00	9.709.977,00	107.749.977,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	487.983.050,00	0,00	0,00	0,00	163.293.000,00	14.241.699,00	665.517.749,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800.000,00	5.609.922,00	71.409.922,00
32	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525.000,00	130.808.819,00	172.333.819,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	61.680.000,00	5.620.225,00	67.300.225,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	421.855.000,00	68.647.188,00	490.502.188,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580.000,00	4.496.245,00	63.076.245,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545.000,00	5.569.938,00	66.114.938,00
37	Kantor Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	92.535.000,00	0,00	92.535.000,00
TOTAL		**487.983.050,00**	**36.193.310.716,00**	**596.250.000,00**	**2.421.260.143,00**	**3.778.515.759,00**	**722.402.301,00**	**44.229.309.969,00**

Lampiran 27d

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN DPRD
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Uang Representasi DPRD	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	Beban Tunjangan Beras DPRD	Beban Uang Paket DPRD	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Tunjangan Reses DPRD	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	TOTAL
1	Sekretariat DPRD	450.345.000,00	29.567.500,00	42.727.800,00	38.587.500,00	653.000.250,00	56.637.000,00	0,00	1.512.000.000,00	378.000.000,00	394.510,00	956.495.166,00	1.863.000.000,00	185.220.000,00	6.165.974.726,00
TOTAL		**450.345.000,00**	**29.567.500,00**	**42.727.800,00**	**38.587.500,00**	**653.000.250,00**	**56.637.000,00**	0,00	**1.512.000.000,00**	**378.000.000,00**	**394.510,00**	**956.495.166,00**	**1.863.000.000,00**	**185.220.000,00**	**6.165.974.726,00**

Lampiran 27e

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	TOTAL
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476.500,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320.000,00	0,00	96.320.000,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.476.500,00**	**0,00**	**0,00**	**96.320.000,00**	**0,00**	**108.796.500,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH, BEBAN PEGAWAI BOS DAN BEBAN PEGAWAI BLUD
TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	Beban Pegawai BOS	Beban Pegawai BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	17.847.875,00	0,00	17.847.875,00
2	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	3.082.791.795,00	3.082.791.795,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	52.860.000,00	52.860.000,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
5	Sekretariat DPRD	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00
	TOTAL	**79.800.000,00**	**300.000.000,00**	**17.847.875,00**	**3.135.651.795,00**	**3.533.299.670,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	BEBAN BARANG DAN JASA				TOTAL
		BEBAN JASA	BEBAN PERSEDIAAN	BEBAN PEMELIHARAAN	BEBAN PERJALANAN DINAS	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	17.682.011.889,00	1.866.560.196,00	229.753.652,00	193.993.481,00	19.972.319.218,00
2	Dinas Kesehatan	14.041.093.786,00	2.357.719.387,00	266.568.500,00	478.255.993,00	17.143.637.666,00
3	RSUD dr Sadikin	5.084.839.361,00	160.009.652,47	53.406.000,00	-	5.298.255.013,47
4	UPT. Puskesmas Air Santok	781.907.065,00	40.758.409,87	34.110.000,00	2.525.000,00	859.300.474,87
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	991.096.267,00	63.872.039,33	33.108.150,00	-	1.088.076.456,33
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.685.538.620,00	60.703.242,17	18.391.000,00	3.550.000,00	1.768.182.862,17
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	958.786.917,00	47.446.565,28	51.962.350,00	8.364.618,00	1.066.560.450,28
8	UPT. Puskesmas Marunggi	853.949.849,00	71.559.719,57	52.570.000,00	5.000.000,00	983.079.568,57
9	UPT. Puskesmas Naras	969.958.747,00	20.151.760,97	9.600.000,00	-	999.710.507,97
10	UPT. Puskesmas Sikapak	771.421.586,00	(1.037.502,53)	72.351.000,00	7.325.000,00	850.060.083,47
11	UPT. Instalasi Farmasi	95.716.750,00	997.520.259,00	14.735.044,00	56.850.000,00	1.164.822.053,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	4.908.091.166,00	2.634.565.919,00	1.801.271.950,00	503.679.183,00	9.847.608.218,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	11.733.097.205,00	9.627.174.759,00	552.562.124,00	393.646.462,00	22.306.480.550,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.446.875.392,00	328.154.050,00	165.075.973,00	99.439.500,00	2.039.544.915,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.070.420.501,00	637.857.250,00	155.430.750,00	42.221.221,00	6.905.929.722,00
16	Dinas Sosial	498.505.782,00	734.361.656,00	30.179.023,00	57.870.750,00	1.320.917.211,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.625.401.548,00	1.206.311.900,00	164.493.862,00	185.869.382,00	5.182.076.692,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	200.090.530,00	353.313.699,00	72.746.300,00	87.285.864,00	713.436.393,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.022.304.111,00	245.811.405,00	37.430.075,00	259.821.987,00	2.565.367.578,00
20	Dinas Perhubungan	2.337.474.083,00	692.627.026,00	538.259.105,00	108.290.000,00	3.676.650.214,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.580.725.610,00	190.427.289,00	1.564.047.926,00	339.207.199,00	3.674.408.024,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.092.876.005,00	1.200.558.500,00	227.327.531,00	113.951.470,00	4.634.713.506,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	659.262.950,00	302.818.888,00	46.563.153,00	192.201.655,00	1.200.846.646,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.120.489.043,00	470.673.998,00	191.753.233,00	75.795.609,00	2.858.711.883,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	222.369.333,00	181.501.394,00	40.614.000,00	128.787.346,00	573.272.073,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.139.819.592,00	2.063.418.652,00	161.747.850,00	74.033.433,00	3.439.019.527,00
27	Sekretariat Daerah	5.806.229.580,00	3.091.552.726,00	563.374.162,00	1.617.718.092,00	11.078.874.560,00
28	Sekretariat DPRD	3.328.647.660,00	2.540.320.675,00	323.608.907,00	9.712.721.330,00	15.905.298.572,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	654.533.204,00	748.338.850,00	113.347.688,00	467.389.501,00	1.983.609.243,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.865.786.573,00	2.048.525.465,00	397.213.509,00	1.945.046.667,00	7.256.572.214,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	507.151.335,00	280.177.895,00	29.995.100,00	568.415.160,00	1.385.739.490,00
32	Inspektorat	180.244.016,00	130.301.684,00	37.330.200,00	286.965.128,00	634.841.028,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	104.040.901,00	96.363.440,00	18.000.000,00	14.700.000,00	233.104.341,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.631.235.161,00	1.097.053.100,00	170.380.000,00	437.179.894,00	4.335.848.155,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	98.224.064,00	87.056.777,00	16.819.783,00	5.175.000,00	207.275.624,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	112.947.400,00	90.317.650,00	16.492.263,00	5.000.000,00	224.757.313,00
37	Kantor Kesbangpol	577.522.700,00	591.885.518,00	19.060.400,00	156.176.764,00	1.344.645.382,00
TOTAL		**102.440.686.282,00**	**37.356.733.894,13**	**8.291.680.563,00**	**18.634.452.689,00**	**166.723.553.428,13**

Lampiran 28a

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Bahan Habis pakai	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.134.292.755,00	732.267.441,00	1.866.560.196,00
2	Dinas Kesehatan	2.357.719.387,00	0,00	2.357.719.387,00
3	RSUD dr Sadikin	160.009.652,47	0,00	160.009.652,47
4	UPT. Puskesmas Air Santok	40.758.409,87	0,00	40.758.409,87
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	63.872.039,33	0,00	63.872.039,33
6	UPT. Puskesmas Pariaman	60.703.242,17	0,00	60.703.242,17
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	47.446.565,28	0,00	47.446.565,28
8	UPT. Puskesmas Marunggi	71.559.719,57	0,00	71.559.719,57
9	UPT. Puskesmas Naras	20.151.760,97	0,00	20.151.760,97
10	UPT. Puskesmas Sikapak	(1.037.502,53)	0,00	(1.037.502,53)
11	UPT. Instalasi Farmasi	997.520.259,00	0,00	997.520.259,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	2.634.565.919,00	0,00	2.634.565.919,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	9.627.174.759,00	0,00	9.627.174.759,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	328.154.050,00	0,00	328.154.050,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	637.857.250,00	0,00	637.857.250,00
16	Dinas Sosial	734.361.656,00	0,00	734.361.656,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.206.311.900,00	0,00	1.206.311.900,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	353.313.699,00	0,00	353.313.699,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	245.811.405,00	0,00	245.811.405,00
20	Dinas Perhubungan	692.627.026,00	0,00	692.627.026,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	190.427.289,00	0,00	190.427.289,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.199.494.500,00	1.064.000,00	1.200.558.500,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	302.818.888,00	0,00	302.818.888,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	470.673.998,00	0,00	470.673.998,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	182.101.394,00	(600.000,00)	181.501.394,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	2.063.418.652,00	0,00	2.063.418.652,00
27	Sekretariat Daerah	3.091.552.726,00	0,00	3.091.552.726,00
28	Sekretariat DPRD	2.515.421.832,00	24.898.843,00	2.540.320.675,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	748.338.850,00	0,00	748.338.850,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.048.525.465,00	0,00	2.048.525.465,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	280.177.895,00	0,00	280.177.895,00
32	Inspektorat	128.231.684,00	2.070.000,00	130.301.684,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	96.363.440,00	0,00	96.363.440,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	1.082.631.000,00	14.422.100,00	1.097.053.100,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	87.056.777,00	0,00	87.056.777,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	90.317.650,00	0,00	90.317.650,00
37	Kantor Kesbangpol	591.885.518,00	0,00	591.885.518,00
TOTAL		**36.582.611.510,13**	**774.122.384,00**	**37.356.733.894,13**

Lampiran 28b

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Jasa Kantor	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Beban Sewa Tanah	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Beban Barang dan Jasa BOS	Beban Barang dan Jasa BLUD	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	6.554.782.274,00	49.977.000,00	24.000.000,00	19.300.000,00	172.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650.000,00	228.150.000,00	0,00	10.433.377.615,00	0,00	17.682.011.889,00
2	Dinas Kesehatan	1.874.043.834,00	11.542.619.952,00	0,00	40.500.000,00	431.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.041.093.786,00
3	RSUD dr Sadikin	1.447.061.299,00	2.877.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.609.650,00	0,00	0,00	3.587.291.292,00	5.084.839.361,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	140.874.910,00	460.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	524.150.861,00	0,00	108.921.214,00	781.907.065,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	199.266.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	610.265.000,00	0,00	174.064.884,00	991.096.267,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	192.598.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	1.121.404.838,00	0,00	352.535.344,00	1.685.538.620,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	162.871.766,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	579.837.942,00	0,00	207.237.009,00	958.786.917,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	164.949.186,00	557.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	506.942.436,00	0,00	173.501.027,00	853.949.849,00
9	UPT. Puskesmas Naras	119.843.556,00	359.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	599.690.891,00	0,00	244.564.660,00	969.958.747,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	95.817.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	539.028.729,00	0,00	130.125.194,00	771.421.586,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	74.976.050,00	178.200,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662.500,00	0,00	0,00	0,00	95.716.750,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	4.420.786.870,00	22.145.520,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.308.776,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.908.091.166,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	6.086.827.491,00	282.188.720,00	0,00	5.500.000,00	9.200.000,00	0,00	39.556.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	3.748.500.000,00	224.983.750,00	0,00	0,00	1.332.241.244,00	11.733.097.205,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.326.643.908,00	67.017.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.213.884,00	0,00	0,00	0,00	1.446.875.392,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.804.890.221,00	265.530.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070.420.501,00
16	Dinas Sosial	307.002.650,00	2.703.132,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	498.505.782,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.214.559.494,00	711.504,00	8.000.000,00	0,00	44.905.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.225.000,00	0,00	0,00	0,00	3.625.401.548,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	191.276.450,00	814.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.090.530,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.296.964.111,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	692.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.304.111,00
20	Dinas Perhubungan	2.279.170.853,00	7.303.230,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.337.474.083,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.483.458.050,00	2.977.560,00	0,00	0,00	24.150.000,00	0,00	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.725.610,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.775.006.969,00	9.560.286,00	0,00	0,00	238.900.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	15.408.750,00	0,00	0,00	0,00	3.092.876.005,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	538.083.550,00	3.974.400,00	0,00	0,00	77.750.000,00	0,00	0,00	0,00	27.805.000,00	0,00	0,00	11.650.000,00	0,00	0,00	0,00	659.262.950,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.338.323.877,00	2.760.480,00	0,00	124.300.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.104.686,00	0,00	0,00	0,00	2.120.489.043,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176.730.333,00	0,00	0,00	0,00	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840.000,00	0,00	0,00	0,00	222.369.333,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.086.779.592,00	0,00	0,00	17.400.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.819.592,00
27	Sekretariat Daerah	3.028.001.109,00	71.200.000,00	0,00	572.685.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.730.000,00	264.963.471,00	0,00	0,00	0,00	5.806.229.580,00
28	Sekretariat DPRD	2.441.834.636,00	3.783.024,00	0,00	219.500.000,00	477.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328.647.660,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	549.644.126,00	631.152,00	0,00	0,00	24.757.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	0,00	654.533.204,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.706.173.903,00	16.515.720,00	0,00	0,00	74.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.396.900,00	35.100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.786.573,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	425.547.685,00	754.650,00	0,00	0,00	63.949.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.151.335,00
32	Inspektorat	175.254.416,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.244.016,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	103.240.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	104.040.901,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.490.094.993,00	2.194.968,00	0,00	6.400.000,00	1.895.200,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00	124.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.631.235.161,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	97.983.008,00	241.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.224.064,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	111.058.600,00	388.800,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.947.400,00

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD/UPT	Beban Jasa Kantor	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Beban Sewa Tanah	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Beban Barang dan Jasa BOS	Beban Barang dan Jasa BLUD	TOTAL
37	Kantor Kesbangpol	256.946.700,00	0,00	0,00	36.142.000,00	200.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	81.734.000,00	0,00	0,00	0,00	577.522.700,00
TOTAL		**53.739.369.855,00**	**12.360.895.154,00**	**32.000.000,00**	**1.070.227.000,00**	**1.917.991.676,00**	**79.000.000,00**	**49.496.000,00**	**16.900.000,00**	**133.211.900,00**	**35.100.050,00**	**6.415.218.776,00**	**5.366.095.691,00**	**4.481.320.697,00**	**10.433.377.615,00**	**6.310.481.868,00**	**102.440.686.282,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	53.183.130,00	176.570.522,00	0,00	229.753.652,00
2	Dinas Kesehatan	76.668.500,00	189.900.000,00	0,00	266.568.500,00
3	RSUD dr Sadikin	53.406.000,00	0,00	0,00	53.406.000,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	34.110.000,00	0,00	0,00	34.110.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	33.108.150,00	0,00	0,00	33.108.150,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	18.391.000,00	0,00	0,00	18.391.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	39.150.000,00	10.000.000,00	2.812.350,00	51.962.350,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	18.070.000,00	34.500.000,00	0,00	52.570.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	63.853.000,00	6.500.000,00	1.998.000,00	72.351.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.735.044,00	0,00	0,00	14.735.044,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	148.638.950,00	346.139.540,00	1.306.493.460,00	1.801.271.950,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	444.793.213,00	79.328.911,00	28.440.000,00	552.562.124,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.075.973,00	0,00	0,00	165.075.973,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	155.430.750,00	0,00	0,00	155.430.750,00
16	Dinas Sosial	21.479.023,00	8.700.000,00	0,00	30.179.023,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	127.309.000,00	17.186.769,00	19.998.093,00	164.493.862,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47.749.000,00	24.997.300,00	0,00	72.746.300,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37.430.075,00	0,00	0,00	37.430.075,00
20	Dinas Perhubungan	538.259.105,00	0,00	0,00	538.259.105,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.515.791.306,00	48.256.620,00	0,00	1.564.047.926,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	119.377.522,00	107.950.009,00	0,00	227.327.531,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	46.563.153,00	0,00	0,00	46.563.153,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	77.455.000,00	114.298.233,00	0,00	191.753.233,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.614.000,00	0,00	0,00	40.614.000,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	143.237.850,00	18.510.000,00	0,00	161.747.850,00
27	Sekretariat Daerah	449.628.022,00	113.746.140,00	0,00	563.374.162,00
28	Sekretariat DPRD	89.425.797,00	205.399.010,00	28.784.100,00	323.608.907,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	43.654.958,00	44.886.800,00	24.805.930,00	113.347.688,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	111.757.000,00	285.456.509,00	0,00	397.213.509,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	29.995.100,00	0,00	0,00	29.995.100,00
32	Inspektorat	37.330.200,00	0,00	0,00	37.330.200,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	121.840.000,00	48.540.000,00	0,00	170.380.000,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	16.819.783,00	0,00	0,00	16.819.783,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	16.492.263,00	0,00	0,00	16.492.263,00
37	Kantor Kesbangpol	19.060.400,00	0,00	0,00	19.060.400,00
TOTAL		**4.997.482.267,00**	**1.880.866.363,00**	**1.413.331.933,00**	**8.291.680.563,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN PERJALANAN DINAS - LO
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Perjalanan Dinas				TOTAL
		Beban Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	115.825.000,00	0,00	4.400.000,00	73.768.481,00	193.993.481,00
2	Dinas Kesehatan	90.690.000,00	0,00	303.500.000,00	84.065.993,00	478.255.993,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	UPT. Puskesmas Air Santok	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	UPT. Puskesmas Pariaman	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	3.500.000,00	0,00	0,00	4.864.618,00	8.364.618,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	UPT. Puskesmas Sikapak	7.325.000,00	0,00	0,00	0,00	7.325.000,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.850.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	56.850.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	207.239.322,00	0,00	4.700.000,00	291.739.861,00	503.679.183,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	206.630.419,00	0,00	12.900.000,00	174.116.043,00	393.646.462,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.614.500,00	0,00	0,00	69.825.000,00	99.439.500,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	25.700.000,00	0,00	0,00	16.521.221,00	42.221.221,00
16	Dinas Sosial	25.839.750,00	0,00	0,00	32.031.000,00	57.870.750,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	76.191.750,00	0,00	76.200.000,00	33.477.632,00	185.869.382,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	55.250.000,00	0,00	0,00	32.035.864,00	87.285.864,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.799.250,00	0,00	11.300.000,00	168.722.737,00	259.821.987,00
20	Dinas Perhubungan	108.290.000,00	0,00	0,00	0,00	108.290.000,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.196.600,00	0,00	0,00	285.010.599,00	339.207.199,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	70.442.500,00	0,00	0,00	43.508.970,00	113.951.470,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	62.745.655,00	0,00	106.350.000,00	23.106.000,00	192.201.655,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	45.248.666,00	0,00	0,00	30.546.943,00	75.795.609,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.667.500,00	0,00	0,00	57.119.846,00	128.787.346,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	68.990.000,00	0,00	0,00	5.043.433,00	74.033.433,00
27	Sekretariat Daerah	495.554.082,00	0,00	0,00	1.122.164.010,00	1.617.718.092,00
28	Sekretariat DPRD	1.225.272.612,00	0,00	0,00	8.487.448.718,00	9.712.721.330,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	115.119.132,00	0,00	0,00	352.270.369,00	467.389.501,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	549.642.500,00	0,00	0,00	1.395.404.167,00	1.945.046.667,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	218.730.250,00	0,00	0,00	349.684.910,00	568.415.160,00
32	Inspektorat	26.920.000,00	201.875.000,00	0,00	58.170.128,00	286.965.128,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	304.725.000,00	14.400.000,00	500.000,00	117.554.894,00	437.179.894,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
37	Kantor Kesbangpol	83.784.500,00	0,00	0,00	72.392.264,00	156.176.764,00
TOTAL		**4.475.733.988,00**	**216.275.000,00**	**561.850.000,00**	**13.380.593.701,00**	**18.634.452.689,00**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN HIBAH - LO
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Beban Hibah Dana BOS	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	TOTAL
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	200.000.000,00	3.115.449.861,00	1.025.000.000,00	2.273.281.238,00	0,00	6.613.731.099,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
3	Kantor Kesbangpol	13.961.261.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.252.333,33	14.836.513.598,33
	TOTAL	**13.961.261.265,00**	**200.000.000,00**	**3.115.449.861,00**	**1.225.000.000,00**	**2.273.281.238,00**	**875.252.333,33**	**21.650.244.697,33**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAFTAR BEBAN LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	Beban Lain-Lain
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	282.720.691,00
2	Dinas Kesehatan	0,00
3	RSUD dr Sadikin	1.874.994,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	46.029.002,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	4.925.000,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	34.999.322,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	165.245.508,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	568.969.800,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.163.200,00
16	Dinas Sosial	67.500.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
20	Dinas Perhubungan	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	4.000.000,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.450.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600.000,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	250.000,00
27	Sekretariat Daerah	1.860.000,00
28	Sekretariat DPRD	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2.185.000,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	5.000.000,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00
32	Inspektorat	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	6.692.900,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	1.200.000,00
37	Kantor Kesbangpol	192.000,00
TOTAL		**1.202.857.417,00**

DAFTAR SELISIH BEBAN PEGAWAI-LO DAN BELANJA PEGAWAI -LRA
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO	LRA-LO	Pembayaran Utang
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	118.048.329.361,00	118.048.329.361,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	62.066.544.684,00	61.977.889.590,00	88.655.094,00	88.655.094,00
3	RSUD dr Sadikin	6.288.075.304,00	4.085.581.107,00	2.202.494.197,00	2.202.494.197
4	UPT. Puskesmas Air Santok	466.742.381,00	466.742.381,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	571.059.899,00	571.059.899,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.062.796.147,00	1.062.796.147,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	543.712.400,00	543.712.400,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	552.654.014,00	552.654.014,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	641.729.942,00	641.729.942,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	484.416.793,00	484.416.793,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.617.835.360,00	5.617.835.360,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	7.362.710.073,00	7.362.710.073,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.778.521.617,00	2.778.521.617,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.404.353.579,00	5.404.353.579,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	2.372.687.604,00	2.372.687.604,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.024.969.406,00	3.024.969.406,00	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.902.326.034,00	2.902.326.034,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.946.585.588,00	2.946.585.588,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	3.614.032.266,00	3.614.032.266,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.895.131.252,00	2.895.131.252,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	4.388.877.127,00	4.388.877.127,00	0,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	3.645.534.094,00	3.645.534.094,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.575.652.866,00	3.575.652.866,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.402.408.495,00	2.402.408.495,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	12.511.787.417,00	12.511.787.417,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	9.972.768.819,00	9.972.768.819,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	9.181.091.996,00	9.181.091.996,00	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	3.814.444.990,00	3.814.444.990,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	8.083.182.324,00	8.083.182.324,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	3.322.286.971,00	3.322.286.971,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	6.505.152.749,00	6.505.152.749,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	2.183.370.990,00	2.183.370.990,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	10.017.712.649,00	10.016.712.649,00	1.000.000,00	1.000.000
35	Kecamatan Pariaman Selatan	2.395.564.233,00	2.395.564.233,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	1.610.523.755,00	1.610.523.755,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	1.709.810.932,00	1.709.810.932,00	0,00	0,00
Total		**314.988.384.111,00**	**312.696.234.820,00**	**2.292.149.291,00**	**2.292.149.291,00**

Lampiran 29b

DAFTAR SELISIH BEBAN BARANG LO DAN BEBAN BARANG -LRA
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Persediaan Awal Tahun 2024	Belanja Persediaan -LRA	Persedian Akhir Tahun 2024	Persedian yang digunakan	Beban Persediaan -LO	Selisih	Pembayaran Utang Belanja	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=7-6			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	1.883.915.196,00	0,00	1.883.915.196,00	1.866.560.196,00	(17.355.000,00)	(7.355.000,00)	(10.000.000,00)	(17.355.000,00)
2	Dinas Kesehatan	5.566.000,00	2.955.719.387,00	5.566.000,00	2.955.719.387,00	2.357.719.387,00	(598.000.000,00)	0,00	(598.000.000,00)	(598.000.000,00)
3	RSUD dr Sadikin	526.459.493,00	336.694.472,00	568.277.136,53	294.876.828,47	160.009.652,47	(134.867.176,00)	(134.867.176,00)	0,00	(134.867.176,00)
4	UPT. Puskesmas Air Santok	99.014.314,00	61.576.000,00	107.831.904,13	52.758.409,87	40.758.409,87	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)	0,00	(12.000.000,00)
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	66.095.791,00	87.397.100,00	89.620.851,67	63.872.039,33	63.872.039,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	147.290.792,00	62.076.300,00	148.663.849,83	60.703.242,17	60.703.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	103.282.750,74	81.714.956,00	137.551.141,46	47.446.565,28	47.446.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	80.262.891,04	70.371.100,00	79.074.271,47	71.559.719,57	71.559.719,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	90.541.797,27	48.343.460,00	118.733.496,30	20.151.760,97	20.151.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	77.553.927,18	22.259.450,00	100.850.879,71	(1.037.502,53)	(1.037.502,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	3.038.891.501,00	328.959.850,00	2.370.331.092,00	997.520.259,00	997.520.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	397.608.800,00	5.875.123.335,00	417.890.340,00	5.854.841.795,00	2.634.565.919,00	(3.220.275.876,00)	(3.220.275.876,00)	0,00	(3.220.275.876,00)
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	7.960.177.670,00	2.142.064.786,00	430.511.697,00	9.671.730.759,00	9.627.174.759,00	(44.556.000,00)	(44.556.000,00)	0,00	(44.556.000,00)
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	373.000,00	327.892.050,00	111.000,00	328.154.050,00	328.154.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.832.500,00	635.024.750,00	-	637.857.250,00	637.857.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial		734.361.656,00	-	734.361.656,00	734.361.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.593.000,00	1.259.741.900,00	1.593.000,00	1.259.741.900,00	1.206.311.900,00	(53.430.000,00)	(21.280.000,00)	(32.150.000,00)	(53.430.000,00)
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	241.204.550,00	384.741.849,00	272.632.700,00	353.313.699,00	353.313.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	807.000,00	245.848.405,00	844.000,00	245.811.405,00	245.811.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	5.823.600,00	689.699.926,00	2.896.500,00	692.627.026,00	692.627.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.178.500,00	186.049.789,00	801.000,00	190.427.289,00	190.427.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.421.500,00	1.212.878.000,00	3.276.000,00	1.212.023.500,00	1.200.558.500,00	(11.465.000,00)	(11.465.000,00)	0,00	(11.465.000,00)
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	150.000,00	302.838.888,00	170.000,00	302.818.888,00	302.818.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.904.500,00	469.440.498,00	2.671.000,00	470.673.998,00	470.673.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	480.000,00	191.974.394,00	490.000,00	191.964.394,00	181.501.394,00	(10.463.000,00)	(10.463.000,00)	0,00	(10.463.000,00)
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	69.125.691,00	2.069.649.771,00	75.356.810,00	2.063.418.652,00	2.063.418.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	47.110.240,00	3.078.488.797,00	17.416.311,00	3.108.182.726,00	3.091.552.726,00	(16.630.000,00)	(16.630.000,00)	0,00	(16.630.000,00)
28	Sekretariat DPRD	629.500,00	2.562.911.675,00	758.500,00	2.562.782.675,00	2.540.320.675,00	(22.462.000,00)	(22.462.000,00)	0,00	(22.462.000,00)
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	11.208.650,00	745.808.676,00	8.678.476,00	748.338.850,00	748.338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	103.200.000,00	1.994.957.965,00	49.632.500,00	2.048.525.465,00	2.048.525.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM		280.177.895,00		280.177.895,00	280.177.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	4.410.000,00	129.131.684,00	3.240.000,00	130.301.684,00	130.301.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	240.000,00	96.343.940,00	220.500,00	96.363.440,00	96.363.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	3.850.500,00	1.140.543.400,00	5.990.800,00	1.138.403.100,00	1.097.053.100,00	(41.350.000,00)	(41.350.000,00)	0,00	(41.350.000,00)
35	Kecamatan Pariaman Selatan	3.204.000,00	84.819.777,00	967.000,00	87.056.777,00	87.056.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 29b

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Persediaan Awal Tahun 2024	Belanja Persediaan -LRA	Persedian Akhir Tahun 2024	Persedian yang digunakan	Beban Persediaan -LO	Selisih	Pembayaran Utang Belanja	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	TOTAL
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=7-6			
36	Kecamatan Pariaman Timur	165.000,00	90.252.650,00	100.000,00	90.317.650,00	90.317.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	583.000,00	591.492.518,00	190.000,00	591.885.518,00	591.885.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**13.101.240.458,23**	**33.461.286.245,00**	**5.022.938.757,10**	**41.539.587.946,13**	**37.356.733.894,13**	**(4.182.854.052,00)**	**(3.542.704.052,00)**	**(640.150.000,00)**	**(4.182.854.052,00)**

Lampiran 29c

DAFTAR SELISIH BEBAN BARANG DAN JASA-LO DAN BELANJA BARANG DAN JASA -LRA
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Jasa -LRA	Beban Jasa -LO	Selisih	Pembayaran Utang	Utang Belanja 2024	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	Jurnal variabel pendukung (-)	Total
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	17.702.511.889,00	17.682.011.889,00	20.500.000,00	7.400.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00	20.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	11.691.485.686,00	14.041.093.786,00	(2.349.608.100,00)	28.612.500,00	(2.378.220.600,00)	0,00	0,00	(2.349.608.100,00)
3	RSUD dr Sadikin	5.759.926.796,00	5.084.839.361,00	675.087.435,00	675.087.435,00	0,00	0,00	0,00	675.087.435,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	781.907.065,00	781.907.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	991.096.267,00	991.096.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	1.685.538.620,00	1.685.538.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	958.786.917,00	958.786.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	854.396.449,00	853.949.849,00	446.600,00	446.600,00	0,00	0,00	0,00	446.600,00
9	UPT. Puskesmas Naras	969.958.747,00	969.958.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	771.421.586,00	771.421.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	95.716.750,00	95.716.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	5.586.239.406,00	4.908.091.166,00	678.148.240,00	385.561.740	0,00	0,00	292.586.500,00	678.148.240,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	11.733.097.205,00	11.733.097.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.446.875.392,00	1.446.875.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.070.420.501,00	6.070.420.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	498.505.782,00	498.505.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	3.636.579.310,00	3.625.401.548,00	11.177.762,00	11.177.762	0,00	0,00	0,00	11.177.762,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	200.090.530,00	200.090.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.022.304.111,00	2.022.304.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	2.347.389.083,00	2.337.474.083,00	9.915.000,00	9.915.000	0,00	0,00	0,00	9.915.000,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.583.925.610,00	1.580.725.610,00	3.200.000,00	3.200.000	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Lampiran 29c

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Belanja Jasa -LRA	Beban Jasa -LO	Selisih	Pembayaran Utang	Utang Belanja 2024	Belanja Modal Tambah Barang dan Jasa	Jurnal variabel pendukung (-)	Total
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.094.156.505,00	3.092.876.005,00	1.280.500,00	1.280.500	0,00	0,00	0,00	1.280.500,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	659.262.950,00	659.262.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.120.489.043,00	2.120.489.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	222.369.333,00	222.369.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	1.152.682.077,00	1.139.819.592,00	12.862.485,00	12.862.485	0,00	0,00	0,00	12.862.485,00
27	Sekretariat Daerah	5.806.229.580,00	5.806.229.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	3.444.147.660,00	3.328.647.660,00	115.500.000,00	115.500.000	0,00	0,00	0,00	115.500.000,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	654.533.204,00	654.533.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.865.786.573,00	2.865.786.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	507.151.335,00	507.151.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	180.613.516,00	180.244.016,00	369.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	104.040.901,00	104.040.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	2.631.830.361,00	2.631.235.161,00	595.200,00	595.200,00	0,00	0,00	0,00	595.200,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	98.224.064,00	98.224.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	112.947.400,00	112.947.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	577.522.700,00	577.522.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**101.620.160.904,00**	**102.440.686.282,00**	**(820.525.378,00)**	**1.252.008.722,00**	**(2.378.220.600,00)**	**13.100.000,00**	**292.586.500,00**	**(820.525.378,00)**

Lampiran 29d

DAFTAR SELISIH BEBAN PEMELIHARAAN-LO DAN BELANJA PEMELIHARAAN -LRA
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	OPD/UPT	Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan - LO	Selisih	Pembayaran Utang	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	2.068.666.658,00	229.753.652,00	1.838.913.006,00	0,00	1.838.913.006,00
2	Dinas Kesehatan	266.568.500,00	266.568.500,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	53.406.000,00	53.406.000,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	34.110.000,00	34.110.000,00	0,00	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	33.108.150,00	33.108.150,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	18.391.000,00	18.391.000,00	0,00	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	51.962.350,00	51.962.350,00	0,00	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	52.570.000,00	52.570.000,00	0,00	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	72.351.000,00	72.351.000,00	0,00	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.735.044,00	14.735.044,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	1.801.271.950,00	1.801.271.950,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	554.682.124,00	552.562.124,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.075.973,00	165.075.973,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	155.430.750,00	155.430.750,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	30.179.023,00	30.179.023,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	164.493.862,00	164.493.862,00	-	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	72.746.300,00	72.746.300,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	37.430.075,00	37.430.075,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	538.259.105,00	538.259.105,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.564.047.926,00	1.564.047.926,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	239.742.531,00	227.327.531,00	12.415.000,00	12.415.000,00	0,00
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	46.563.153,00	46.563.153,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	191.753.233,00	191.753.233,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61.943.000,00	40.614.000,00	21.329.000,00	21.329.000,00	0,00
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	161.747.850,00	161.747.850,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	565.732.912,00	563.374.162,00	2.358.750,00	2.358.750,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	356.135.674,00	323.608.907,00	32.526.767,00	32.526.767,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	113.347.688,00	113.347.688,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	397.213.509,00	397.213.509,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	29.995.100,00	29.995.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat	37.330.200,00	37.330.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	170.380.000,00	170.380.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	16.819.783,00	16.819.783,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	16.492.263,00	16.492.263,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	19.060.400,00	19.060.400,00	0,00	0,00	0,00
Total		**10.201.343.086,00**	**8.291.680.563,00**	**1.909.662.523,00**	**70.749.517,00**	**1.838.913.006,00**

Lampiran 29e

DAFTAR SELISIH BEBAN PERJALANAN DINAS-LO DAN BELANJA PERJALANAN DINAS -LRA
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Belanja Perjalanan Dinas-LRA			TOTAL	Beban Perjalanan Dinas-LO				TOTAL	Selisih (+/-)	Keterangan Selisih Pembayaran Utang Belanja
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		Beban Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	115.825.000,00	4.400.000,00	73.768.481,00	193.993.481	115.825.000,00	0,00	4.400.000,00	73.768.481,00	193.993.481	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	90.690.000,00	303.500.000,00	84.065.993	478.255.993	90.690.000,00	0,00	303.500.000,00	84.065.993,00	478.255.993	0,00	0,00
3	RSUD dr Sadikin	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UPT. Puskesmas Air Santok	2.525.000,00	0,00	0,00	2.525.000	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000	0,00	0,00
5	UPT. Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UPT. Puskesmas Pariaman	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000	0,00	0,00
7	UPT. Puskesmas Kuraitaji	3.500.000,00	0,00	4.864.618,00	8.364.618	3.500.000,00	0,00	0,00	4.864.618,00	8.364.618	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Marunggi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	0,00
9	UPT. Puskesmas Naras	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sikapak	7.325.000,00	0,00	0,00	7.325.000	7.325.000,00	0,00	0,00	0,00	7.325.000	0,00	0,00
11	UPT. Instalasi Farmasi	14.850.000,00	42.000.000,00	0,00	56.850.000	14.850.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	56.850.000	0,00	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	207.239.322,00	4.700.000,00	291.739.861,00	503.679.183	207.239.322,00	0,00	4.700.000,00	291.739.861,00	503.679.183	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	206.630.419,00	12.900.000,00	174.116.043,00	393.646.462	206.630.419,00	0,00	12.900.000,00	174.116.043,00	393.646.462	0,00	0,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.614.500,00	0,00	69.825.000,00	99.439.500	29.614.500,00	0,00	0,00	69.825.000,00	99.439.500	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	25.700.000,00	0,00	16.521.221,00	42.221.221	25.700.000,00	0,00	0,00	16.521.221,00	42.221.221	0,00	0,00
16	Dinas Sosial	25.839.750,00	0,00	32.031.000,00	57.870.750	25.839.750,00	0,00	0,00	32.031.000,00	57.870.750	0,00	0,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	76.191.750,00	76.200.000,00	33.477.632,00	185.869.382	76.191.750,00	0,00	76.200.000,00	33.477.632,00	185.869.382	0,00	0,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	55.250.000,00	0,00	32.035.864,00	87.285.864	55.250.000,00	0,00	0,00	32.035.864,00	87.285.864	0,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	79.799.250,00	11.300.000,00	168.722.737,00	259.821.987	79.799.250,00	0,00	11.300.000,00	168.722.737,00	259.821.987	0,00	0,00
20	Dinas Perhubungan	108.290.000,00	0,00	0,00	108.290.000	108.290.000,00	0,00	0,00	0,00	108.290.000	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.196.600,00	0,00	285.010.599,00	339.207.199	54.196.600,00	0,00	0,00	285.010.599,00	339.207.199	0,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	92.517.500,00	0,00	43.508.970,00	136.026.470	70.442.500,00	0,00	0,00	43.508.970,00	113.951.470	22.075.000	22.075.000
23	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	62.745.655,00	106.350.000,00	23.106.000,00	192.201.655	62.745.655,00	0,00	106.350.000,00	23.106.000,00	192.201.655	0,00	0,00
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	45.248.666,00	0,00	30.546.943,00	75.795.609	45.248.666,00	0,00	0,00	30.546.943,00	75.795.609	0,00	0,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.592.500,00	0,00	170.299.897,00	248.892.397	71.667.500,00	0,00	0,00	57.119.846,00	128.787.346	120.105.051	120.105.051

(Dalam Rupiah)

No	Unit Kerja	Belanja Perjalanan Dinas-LRA			TOTAL	Beban Perjalanan Dinas-LO				TOTAL	Selisih (+/-)	Keterangan Selisih Pembayaran Utang Belanja
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		Beban Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
26	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	68.990.000,00	0,00	5.043.433,00	74.033.433	68.990.000,00	0,00	0,00	5.043.433,00	74.033.433	0,00	0,00
27	Sekretariat Daerah	495.554.082,00	0,00	1.122.164.010,00	1.617.718.092	495.554.082,00	0,00	0,00	1.122.164.010,00	1.617.718.092	0,00	0,00
28	Sekretariat DPRD	1.225.272.612,00	0,00	8.487.448.718,00	9.712.721.330	1.225.272.612,00	0,00	0,00	8.487.448.718,00	9.712.721.330	0,00	0,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	115.119.132,00	0,00	352.270.369,00	467.389.501	115.119.132,00	0,00	0,00	352.270.369,00	467.389.501	0,00	0,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	549.642.500,00	0,00	1.395.404.167,00	1.945.046.667	549.642.500,00	0,00	0,00	1.395.404.167,00	1.945.046.667	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	218.730.250,00	0,00	349.684.910,00	568.415.160	218.730.250,00	0,00	0,00	349.684.910,00	568.415.160	0,00	0,00
32	Inspektorat	26.920.000,00	201.875.000,00	58.170.128,00	286.965.128	26.920.000,00	201.875.000,00	0,00	58.170.128,00	286.965.128	0,00	0,00
33	Kecamatan Pariaman Utara	14.700.000,00	0,00	0,00	14.700.000	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000	0,00	0,00
34	Kecamatan Pariaman Tengah	304.725.000,00	14.900.000,00	117.554.894,00	437.179.894	304.725.000,00	14.400.000,00	500.000,00	117.554.894,00	437.179.894	0,00	0,00
35	Kecamatan Pariaman Selatan	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000	0,00	0,00
36	Kecamatan Pariaman Timur	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	0,00
37	Kantor Kesbangpol	83.784.500,00	0,00	72.392.264,00	156.176.764	83.784.500,00	0,00	0,00	72.392.264,00	156.176.764	0,00	0,00
Total		**4.504.733.988**	**778.125.000**	**13.493.773.752**	**18.776.632.740**	**4.475.733.988**	**216.275.000**	**561.850.000**	**13.380.593.701**	**18.634.452.689**	**142.180.051**	**142.180.051**

DAFTAR SELISIH AKUMULASI PENYUSUTAN DAN BEBAN PENYUSUTAN-LO
TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan	selisih	Rekons Penyustan Aset Tetap			Beban Penyusutan Aset lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Beban Penyusutan Properti Investasi	TOTAL
						Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	(127.259.746.748,96)	(137.351.656.595,81)	11.462.159.827,00	1.370.249.980,15	1.370.249.980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2	Dinas Kesehatan	(79.866.038.576,88)	(90.543.164.601,87)	10.662.049.280,00	(15.076.744,99)	(14.499.999,99)	(576.745,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	(708.753.320.828,21)	(744.449.555.206,23)	36.035.584.378,02	339.350.000,00	339.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	(173.678.378.479,80)	(179.223.747.155,80)	7.170.100.726,00	1.624.732.050,00	1.624.732.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.967.533.701,00)	(8.401.231.962,00)	433.698.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	(12.376.760.308,00)	(12.021.432.409,00)	339.357.749,00	694.685.648,00	0,00	694.685.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	(883.548.561,00)	(1.000.943.686,00)	117.395.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	(5.566.498.677,00)	(6.110.980.331,00)	544.481.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(2.062.283.262,00)	(2.254.102.230,00)	191.818.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(2.038.108.432,00)	(2.215.967.344,00)	177.858.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	(17.385.721.611,00)	(18.317.826.314,00)	932.104.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.437.702.368,00)	(4.682.784.889,00)	245.082.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	(5.616.830.855,00)	(6.025.076.847,00)	435.685.292,00	27.439.300,00	26.439.300,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.543.163.756,00	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	(1.903.591.736,00)	(1.963.692.722,00)	60.100.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(23.120.426.796,80)	(25.938.160.495,80)	3.218.450.977,00	400.717.278,00	85.848.803,00	314.868.475,00	0,00	11.412.667,00	47.400.570,00	0,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.004.821.474,00)	(1.854.734.466,00)	617.388.185,00	(232.524.807,00)	0,00	(232.524.807,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	(21.513.459.656,00)	(22.331.488.148,00)	1.050.316.796,00	232.288.304,00	27.014.000,00	205.274.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	(47.336.260.731,16)	(50.433.807.890,16)	3.422.901.142,00	325.353.983,00	325.353.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	(12.834.116.933,25)	(14.280.487.010,25)	1.446.370.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	(4.807.759.020,00)	(5.116.245.852,00)	308.486.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	(9.061.480.805,00)	(9.757.450.838,00)	695.970.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	(1.878.210.376,00)	(2.048.664.165,00)	170.453.791,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Inspektorat	(3.751.382.436,00)	(4.065.274.845,00)	313.892.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Pariaman Utara	(3.126.515.141,00)	(3.374.415.171,00)	247.900.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Pariaman Tengah	(8.294.992.243,00)	(9.780.112.661,00)	1.494.964.168,00	9.843.750,00	9.843.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Pariaman Selatan	(2.629.494.972,00)	(2.849.085.818,00)	219.590.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pariaman Timur	(2.387.695.901,00)	(2.569.308.410,00)	181.612.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kantor Kesbangpol	(537.386.430,00)	(561.253.991,00)	23.867.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**(1.292.080.067.060,06)**	**(1.369.522.652.054,92)**	**82.219.643.738,02**	**4.777.058.743,16**	**3.794.331.868,16**	**981.726.875,00**	**1.000.000,00**	**11.412.667,00**	**6.590.564.326,00**	**(0,00)**

Pemerintah Kota Pariaman
Koreksi Ekuitas Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	OPD	DEBET	KREDIT	SALDO
1	2	3		4	5	6	7
2	31/12/2024	001/JU/BKPSDM/XII/2024	Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2024	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	400.000,00	400.000,00
3	31/12/2024	001/JU/INSPEKTORAT/XII/2024	Mutasi Tambah TGR tahun 2024	Inspektorat	0,00	140.568.500,00	140.968.500,00
4	31/12/2024	001/JU/Bappeda/XII/2024	Mutasi Tambah TGR 2024	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	0,00	362.030.000,00	502.998.500,00
5	31/12/2024	002/JU/Bappeda/XII/2024	Mutasi kurang TGR 2024	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	183.261.999,00	0,00	319.736.501,00
6	31/12/2024	002/JU/INSPEKTORAT/XII/2024	TGR Tahun 2024	Inspektorat	17.993.600,00	0,00	301.742.901,00
7	31/12/2024	02/JP/Partim/2024	Mutasi Kurang TGR Tahun 2024	Kecamatan Pariaman Timur	12.400.000,00	0,00	289.342.901,00
8	31/12/2024	4/JU/DP3AKB/XII/2024	Mutas Kurang TGR 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	7.044.000,00	0,00	282.298.901,00
9	31/12/2024	002/JU/PARBUD/12/2024	Mutasi (+) TGR Aset Lain-Lain	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	38.140.000,00	320.438.901,00
10	31/12/2024	002/JU/PARBUD/12/2024	Mutasi (-) TGR Aset Lain-Lain	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	21.652.657,00	0,00	298.786.244,00
11	31/12/2024	6/JU/DP3AKB/XII/2024	Mutasi Tambah TGR 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	11.100.000,00	309.886.244,00
12	31/12/2024	001/JP/DINSOS/XII/2024	MUTASI TAMBAH TGR TAHUN 2024	Dinas Sosial	0,00	6.840.000,00	316.726.244,00
13	31/12/2024	003/JU/DISHUB/12/2024	MUTASI TAMBAH TGR ASET LAIN LAIN 2024	Dinas Perhubungan	0,00	41.376.207,00	358.102.451,00
14	31/12/2024	002/JP/DINSOS/XII/2024	MUTASI KURANG TGR DINSOS	Dinas Sosial	4.560.000,00	0,00	353.542.451,00
15	31/12/2024	004/JU/DISHUB/12/2024	MUTASI KURANG TGR DAN ASET LAIN LAIN 2024	Dinas Perhubungan	8.030.900,00	0,00	345.511.551,00
16	31/12/2024	003/JU/PARBUD/12/2024	Jurnal Balik Utang Belanja Tahun 2020 berdasarkan BA Penghapusan Utang Belanja	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	34.741.440,00	380.252.991,00
17	31/12/2024	001/TGR/CAPIL/2024	Mutasi (+)TGR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	4.664.048,00	384.917.039,00
18	31/12/2024	002/TGR/CAPIL/2024	Mutasi (-) TGR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.000.000,00	0,00	382.917.039,00
19	31/12/2024	002/TGRDINKES/2024	Mutasi tambah TGR Dinkes 2024	Dinas Kesehatan	0,00	43.262.456,00	426.179.495,00
20	31/12/2024	003/TGRDINKES/2024	Mutasi kurang TGR Dinkes 2024	Dinas Kesehatan	27.223.713,00	0,00	398.955.782,00
21	31/12/2024	003/JP/DISPERINDAGKOP/XII/2024	Mutasi tambah TGR Tahun 2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	20.085.000,00	419.040.782,00
22	31/12/2024	004/JP/DISPERINDAGKOP/XII/2024	Mutasi Kurang TGR Tahun 2024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	64.125.000,00	0,00	354.915.782,00
23	31/12/2024	001/JP-TGR/PERKIMLH/2024	Jurnal Mutasi Tambah TGR 2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	18.853.880,00	373.769.662,00
24	31/12/2024	002/JP-TGR/PERKIMLH/2024	Jurnal Mutasi KurangTGR 2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4.183.500,00	0,00	369.586.162,00
25	31/12/2024	004/JP/DIKPORA/XII/2024	MUTASI TAMBAH TGR TAHUN 2024	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	122.661.388,58	492.247.550,58
26	31/12/2024	005/JP/DIKPORA/XII/2024	MUTASI KURANG TGR TAHUN 2024	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	63.079.974,00	0,00	429.167.576,58
27	31/12/2024	007/JP/UMUM/XII/2024	Mutasi Tambah TGR Tahun 2024	Bagian Umum Sekretariat Daerah	0,00	104.845.000,00	534.012.576,58
28	31/12/2024	004/JP/Kesbangpol/XII-2024	Mutasi Tambah TGR Tahun 2024	Kantor Kesbangpol	0,00	62.591.100,00	596.603.676,58
29	31/12/2024	002/JU/BKPSDM/XII/2024	Koreksi (-) Saldo Awal Penyusutan Peralatan Mesin	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	0,00	2,00	596.603.678,58
30	31/12/2024	005/JU/PUSAIRSANTOK/12/2024	Koreksi Tambah Saldo Awal (Aset Tetap - Peralatan dan Mesin)	UPT. Puskesmas Air Santok	0,00	14.500.000,00	611.103.678,58
31	31/12/2024	006/JU/DPUPRP/XII/2024	Jurnal Penyesuaian Penghapusan Utang Belanja Tahun 2020 dan Utang Belanja Tahun 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	27.782.800,00	638.886.478,58
32	31/12/2024	007/JU/PUSAIRSANTOK/12/2024	Koreksi (+) Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap - Peralatan & Mesin	UPT. Puskesmas Air Santok	14.500.000,00	0,00	624.386.478,58
33	31/12/2024	011/JU/DP3AKB/XII/2024	Koreksi tambah saldo awal peralatan dan mesin	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	81.000.000,00	705.386.478,58
34	31/12/2024	007/JU/RSUDSADIKIN/12/2024	Koreksi (-) saldo awal - Konstruksi Dalam Pengerjaan	RSUD dr Sadikin	11.180.000,00	0,00	694.206.478,58
35	31/12/2024	017/JU/DPUPRP/XII/2024	Mutasi (-) TGR Aset Lain-Lain	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	50.106.365,00	0,00	644.100.113,58
36	31/12/2024	018/JU/DPUPRP/XII/2024	Mutasi (+) TGR Aset Lain-Lain	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	494.170.199,67	1.138.270.313,25
37	31/12/2024	013/JPDINKES/2024	Mutasi (-) Penghapusan Utang Belanja	Dinas Kesehatan	0,00	3.600.000,00	1.141.870.313,25
38	31/12/2024	007/JU/PUSNARAS/12/2024	Mutasi (-) Penghapusan Utang Belanja Tahun 2020	UPT. Puskesmas Naras	0,00	4.000.000,00	1.145.870.313,25
39	31/12/2024	010/JU/BPKPD/XII/2024	Mutasi Tambah TGR Tahun 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	1.157.448.150,00	2.303.318.463,25
40	31/12/2024	011/JU/BPKPD/XII/2024	Mutasi Kurang TGR 2024	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	111.048.606,25	0,00	2.192.269.857,00
41	31/12/2024	005/JU/DISHUB/12/2024	Mutasi (-) Penghapusan Utang Belanja Tahun 2023 UPTD Parkir	Dinas Perhubungan	0,00	1.775.000,00	2.194.044.857,00
42	31/12/2024	002/JU/DPPP/XII/2024	TGR TA 2024	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	0,00	72.792.786,00	2.266.837.643,00
43	31/12/2024	003/JU/DPPP/XII/2024	Pembayaran TGR di TA 2024	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	44.104.752,00	0,00	2.222.732.891,00
44	31/12/2024	003/JU/BPPP/XII/2024	Koreksi kurang saldo awal Gedung dan Bangunan	UPT. Balai Penyuluh Pertanian	247.567.000,00	0,00	1.975.165.891,00
45	31/12/2024	005/JU/BPPP/XII/2024	Koreksi Saldo awal Penyusutan Gedung dan Bangunan	UPT. Balai Penyuluh Pertanian	0,00	205.274.304,00	2.180.440.195,00

(Dalam Rupiah)

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	OPD	DEBET	KREDIT	SALDO
1	2	3		4	5	6	7
46	31/12/2024	203/JurnalUmum/Dikpora/12/2024	Koreksi (+) Saldo Awal Aset Tetap Peralatan Mesin TA 2024	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	91.116.500,00	2.271.556.695,00
47	31/12/2024	002/JP/DPMD/XII/2024	Mutasi Tambah TGR DPMD 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	2.080.000,00	2.273.636.695,00
48	31/12/2024	003/JP/DPMD/XII/2024	Mutasi Kurang DPMD 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.916.500,00	0,00	2.266.720.195,00
49	31/12/2024	005/JU/POLPP/TGR/2024	Mutasi (+) TGR	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	2.075.000,00	2.268.795.195,00
50	31/12/2024	005/JU/POLPP/2024	Mutasi (-) TGR	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.900.000,00	0,00	2.263.895.195,00
51	31/12/2024	205/JurnalUmum/Dikpora/12/2024	Koreksi (+) Saldo Awal Akum Peny Peralatan Mesin	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	49.815.056,00	0,00	2.214.080.139,00
52	31/12/2024	003/JP/PARTENG/2024	KOREKSI KURANG SALDO AWAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	217.540.420,00	2.431.620.559,00
53	31/12/2024	007/JU/RSUDSADIKIN/12/2024	Koreksi + Bangunan Gedung	RSUD dr Sadikin	0,00	11.180.000,00	2.442.800.559,00
54	31/12/2024	003/JP/KEL UJUNG BATUNG/XII/2024	KOREKSI TAMBAH SALDO AWAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Kelurahan Ujung Batung	217.540.420,00	0,00	2.225.260.139,00
55	31/12/2024	203/JU/ASETLAIN-LAIN/SETDPRD/12/2024	AKUM PENY ASET LAIN-LAIN KOREKSI (+)	Sekretariat DPRD	15.400.000,00	0,00	2.209.860.139,00
56	31/12/2024	007/JP/PARTENG/XII/2024	Mutasi (-) Penghapusan Utang Belanja	Kecamatan Pariaman Tengah	0,00	55.925.250,00	2.265.785.389,00
57	31/12/2024	010/JP/RSUDSADIKIN/XII/2024	KOREKSI SALDO AWAL PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	RSUD dr Sadikin	576.745,00	0,00	2.265.208.644,00
58	31/12/2024	012/JU/BPKPD/XII/2024	Mutasi (-) Piutang lain-Lain Dana Bergulir	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	746.666,67	0,00	2.264.461.977,33
59	31/12/2024	006/JP/DISPERSIP/XII/2024	KOREKSI SALDO AWAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.530.249,00	0,00	2.258.931.728,33
60	31/12/2024	002/JP/KOMINFO/XII/2024	MUTASI KURANG TGR	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	0,00	2.254.431.728,33
61	31/12/2024	008/JP/DISPERSIP/XII/2024	MUTASI TAMBAH TGR	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	273.654.582,77	2.528.086.311,10
62	31/12/2024	002/JP/SETDPRD/XII/2024	MUTASI TAMBAH DAN KURANG TGR	Sekretariat DPRD	0,00	150.712.554,00	2.678.798.865,10
63	31/12/2024	002/JP/SETDPRD/XII/2024	MUTASI TAMBAH DAN KURANG TGR	Sekretariat DPRD	50.805.150,00	0,00	2.627.993.715,10
64	31/12/2024	014/JU/BPKPD/XII/2024	INVESTASI DAN BERGULIR	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	5.668.000,00	2.633.661.715,10
65	31/12/2024	208/JurnalUmum/Dikpora/12/2024	UTANG BELANJA BOS TAHUN 2022	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	0,00	19.299.000,00	2.652.960.715,10
66	31/12/2024	208/JurnalUmum/Dikpora/12/2024	UTANG BELANJA BOS TAHUN 2022	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	1.185.200,00	0,00	2.651.775.515,10
67	31/12/2024	020/JU/DPUPRP/XII/2024	Mutasi (-) Utang Belanja Tahun 2022 Penghapusan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	0,00	0,61	2.651.775.515,71
68	31/12/2024	022/JU/DPUPRP/XII/2024	PENGHAPUSAN TANAH DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	18.630.000,00	0,00	2.633.145.515,71
69	31/12/2024	100/JU-PENY/12/2024	JU koreksi (-) saldo awal akum peny aset lain-lain	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	0,00	218.583.196,28	2.851.728.711,99
JUMLAH					**1.270.608.057,92**	**4.122.336.764,91**	**2.851.728.711,99**